



# Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021

Tentang  
**Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah Tahun 2021-2026**





BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sijunjung.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung adalah perangkat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

## Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMN.

## Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

## Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup
- (2) Penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini.

## Pasal 6

RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

## Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2021-2026 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (5) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra-PD.

#### Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung,  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung,  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/50/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2021-2026**

**I. UMUM**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Penyusunan rencana pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Tahun 2021-2026 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

.Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
 2021-2026

# **DAFTAR ISI**

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	27
2.3. Aspek Pelayanan Umum	48
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	82
2.5. Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2016 – 2021	97
2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal	118
2.7. Evaluasi Realisasi RPJPD Tahun 2005–2025	123
2.8. Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	124
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	135
3.1. Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020	136
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020	151
3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026	156
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</b>	165
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	165
4.2. Analisis Isu Strategis	172
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	209
5.1. Visi	209
5.2. Misi	211
5.3. Tujuan dan Sasaran	208
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	225
6.1. Strategi	220
6.2. Arah Kebijakan	233
6.2.1. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahannya	246
6.3. Program Pembangunan Daerah	257

<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	299
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	323
8.1.	Indikator Kinerja Utama	328
8.2.	Indikator Kinerja Daerah	329
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP</b>	338

Lampiran 1 : Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

Lampiran 2 : Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Terhadap Program Prioritas Nasional

# **DAFTAR TABEL**

2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sijunjung	12
2.2	Tinggi Wilayah Kabupaten Sijunjung Per Kecamatan Tahun 2017	13
2.3	Klasifikasi dan Penyebaran Kelerengan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017	14
2.4	Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	14
2.5	Jenis Batuan di Kabupaten Sijunjung	15
2.6	Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017	19
2.7	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 - 2019	20
2.8	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 dan Tahun 2020	21
2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Kelompok Usia Tahun 2020	21
2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Usia Diatas 15 tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2020	22
2.11	Potensi Bahan Galian dan Mineral di Kabupaten Sijunjung	24
2.12	Potensi Wisata di Kabupaten Sijunjung	25
2.13	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	28
2.14	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	30
2.15	Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020	31
2.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	34
2.17	Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan kerja dan Tingkat Pengagguran Terbuka Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	36
2.18	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	38
2.19	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	48
2.20	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2020	50
2.21	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020	54
2.22	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	56
2.23	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	57
2.24	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	58
2.25	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2016-2020	59
2.26	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	60
2.27	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	61

2.28	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2016-2020	62
2.29	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2016-2020	62
2.30	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	63
2.31	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	64
2.32	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	64
2.33	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	65
2.34	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020	67
2.35	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	68
2.36	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020	68
2.37	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2020	69
2.38	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	70
2.39	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2016-2020	70
2.40	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2016-2020	71
2.41	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020	71
2.42	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020	72
2.43	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2016-2020	72
2.44	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020	73
2.45	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020	74
2.46	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2016-2020	74
2.47	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020	75
2.48	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020	76
2.49	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2016-2020	77
2.50	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2016-2020	78
2.51	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2016-2020	78
2.52	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2016-2020	79
2.53	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Tahun 2016-2020	79
2.54	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	80
2.55	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	81

2.56	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2016-2020	81
2.57	Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Kewilayahannya Tahun 2016-2020	82
2.58	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 – 2019	83
2.59	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 - 2019	84
2.60	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 – 2020	85
2.61	Jenis dan Rasio Permukaan Jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2020	86
2.62	Rasio Kondisi Jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2020	87
2.63	Perkembangan Ketersediaan Energi Listrik Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020	89
2.64	Rasio Ketersediaan Telekomunikasi Nirkabel Kabupaten Sijunjung tahun 2019	90
2.65	Luas dan Rasio Lahan Produktif Kabupaten Sijunjung tahun 2017	91
2.66	Jumlah dan Lokasi Penginapan di Kabupaten Sijunjung tahun 2020	92
2.67	Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2020	93
2.68	Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2020	95
2.69	Perkembangan Jumlah Demonstrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020	96
2.70	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020	96
2.71	Penduduk Usia Produktif Menamatkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung tahun 2019	97
2.72	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan RKPD Tahun 2020	98
2.73	Faktor Hambatan dan Keberhasilan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021	99
2.74	Capaian Program Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 Tahun 2020	100
2.75	Hasil Analisis Kondisi Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	111
2.76	Jenis Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sijunjung	119
2.77	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	119
2.78	Capaian Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 Sampai Dengan Tahun 2020	123
2.79	Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	126
3.1	Pertumbuhan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	136
3.2	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	138
3.3	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	139
3.4	Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran Dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2016-2020	140
3.5	Kontribusi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020	142
3.6	Kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020	142
3.7	Perkembangan Capaian Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	143

3.8	Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	144
3.9	Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	144
3.10	Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	145
3.11	Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	145
3.12	Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	147
3.13	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	147
3.14	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	148
3.15	Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	150
3.16	Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	151
3.17	Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	153
3.18	Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016 – 2020	155
3.19	Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020	155
3.20	Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018-2020	156
3.21	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	159
3.22	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	161
3.23	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	163
3.24	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	163
3.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	164
4.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Sijunjung	166
4.2	Permasalahan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	168
4.3	Arah dan Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung 2005-2025 Tahapan ke-4	186
4.4	Rencana Sistem Perkotaan Tahun 2031	189
4.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031	190
4.6	Indentifikasi RPJMD Daerah Lain	192
4.7	Isu-Isu Strategis Sektoral Tahun 2021-2026	207
5.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1	214
5.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2	216
5.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3	217
5.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4	219
5.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	222
6.1	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1	226
6.2	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2	227

6.3	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3	228
6.4	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 4	230
6.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	232
6.6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	235
6.7	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	243
6.8	Rencana Pengembangan Budidaya Pertanian, Industri Pengolahan dan Sektor Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung	250
6.8	Keterkaitan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	251
6.10	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	258
6.11	Program Kepala Daerah	261
6.12	Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	264
6.13	Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	287
7.1	Proyeksi Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026	300
7.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026	301
7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	302
8.1	Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	323
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	328
8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021-2026	330

# **DAFTAR GAMBAR**

1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	2
1.2	Tahapan, Agenda Kerja dan Jadwal Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	3
1.3	Hubungan RPJMD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4	Tahapan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025	6
1.5	Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah	8
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	12
2.2	Kondisi Eksiting Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung	16
2.3	Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	18
2.4	Peta Peluang Investasi di Kabupaten Sijunjung	27
2.5	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	29
2.6	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	34
2.7	Grafik Perkembangan Tingkat Pengganguran Terbuka Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	35
2.8	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	37
2.9	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	39
2.10	Grafik Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat 2020	40
2.11	Grafik Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	41
2.12	Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2020	42
2.13	Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	43
2.14	Grafik Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	44
2.15	Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	45
2.16	Grafik Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	46
2.17	Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	47
2.18	Grafik Kondisi Panjang Jembatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	88
2.19	Grafik Perkembangan Capaian Akses Air Minum bagi Masyarakat Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	92
2.20	Grafik Perkembangan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	94
2.21	Grafik Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2020	124
2.22	Grafik Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020	125
3.1	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2016 – 2020	137
3.2	Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020	138

3.3	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	140
3.4	Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2020	141
3.5	Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	141
3.6	Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	143
3.7	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	144
3.8	Rata-rata proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	154
3.9	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2026	158
3.10	Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2021-2026	160
4.1	Capaian Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	177
4.2	Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Berkewilayahana Nasional 2020-2024	179
4.3	Tahapan dan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025	185
4.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031	191
4.5	Isu Strategis Daerah Tahun 2021-2026	193
5.1	Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024	210
5.2	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	212
5.3	Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan misi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024	212
5.4	Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	213
5.5	Pohon Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	214
5.6	Pohon Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	216
5.7	Pohon Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	218
5.8	Pohon Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	219
5.9	Pilar pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	220
5.10	Sikronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	221
6.1	Logic Model	231
6.2	Kebijakan Pengembangan Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek	249
6.3	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	251
6.4	Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah	257
8.1	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	324
8.2	Metode Penghitungan Indeks Infrastruktur	327

# BAB



1

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut, mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 3 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan tersebut, sehingga dibutuhkan proses perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *top down-bottom up* dengan mengedepankan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9.

Seiring dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat, maka Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H.Iraddatillah, S.Pt resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung untuk periode 2021-2024. Secara eksplisit melekat kewajiban Kepala Daerah terpilih untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

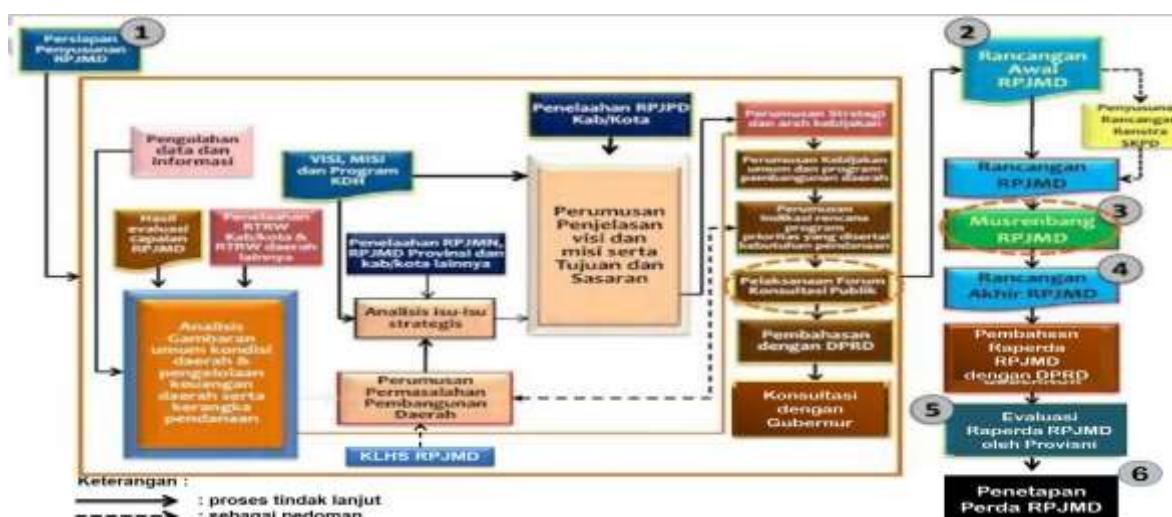
Meskipun masa periodesasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah 2021-2024, namun periodesasi RPJMD Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat. Sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah 2021-2026.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Oleh karena itu, dokumen RPJMD seyoginya disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui perumusan yang didasari dengan kondisi dan potensi daerah serta memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional saat ini.

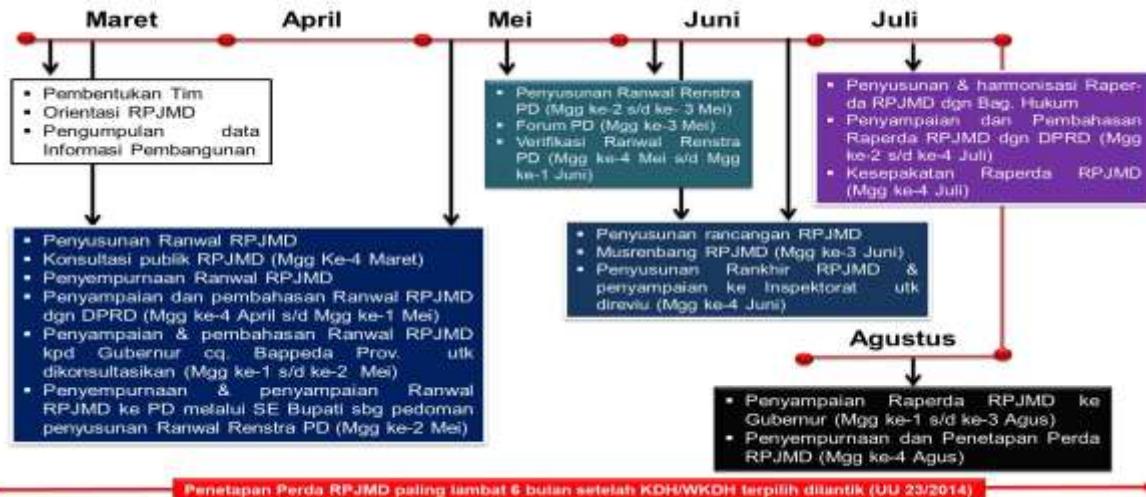
Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ini adalah pemahaman awal kondisi Kabupaten Sijunjung yang berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Perbedaan ini muncul dari faktor karakteristik, geografis, topografis dan sosiologis serta historisnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat dan dialog yang melibatkan *stakeholders*. Proses penyusunan RPJMD secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (diolah)

**Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Sesuai ketentuan tersebut, maka Bupati Sijunjung mengeluarkan Keputusan Nomor : 188.45/111/KPTS-BPT-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam keputusan Bupati Sijunjung tersebut, maka ditetapkan tahapan, agenda kerja dan jadwal penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.2 Tahapan, Agenda Kerja dan Jadwal Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

Berdasarkan substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 tersebut, yang merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama masa jabatannya;
5. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dan sinkron dengan nasional dan provinsi; dan
7. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penilaian kinerja keberhasilan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



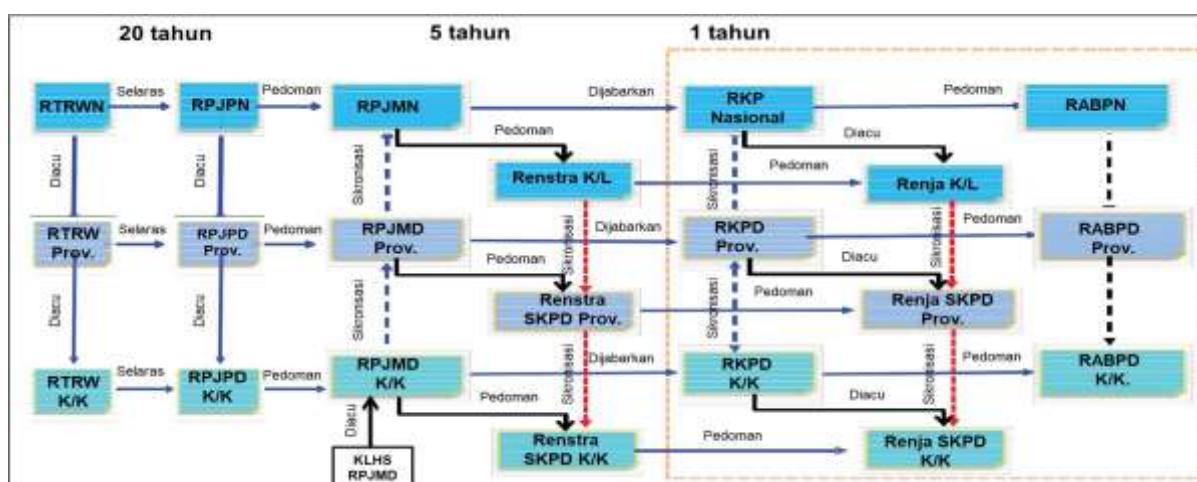
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 serta sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selain itu, RPJMD mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD serta memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten/Kota tetangga. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat dari gambar berikut ini.



**Gambar 1.3 Hubungan RPJMD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya**

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.3.1. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 secara eksplisit mempedomani sasaran pokok pembangunan tahapan ke-IV RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD



tersebut, dijabarkan melalui program pembangunan daerah berdasarkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok RPJPD serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri.

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, disamping menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, juga mengimplementasikan arah pembangunan tahapan ke-IV RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahapan ke-IV RPJPD tersebut, yaitu; "masyarakat Sijunjung yang madani dengan mengedepankan terbangunnya struktur perekonomian yang kuat berbasis keunggulan kompetitif potensi riil daerah dibidang agribisnis dan agroindustri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tahapan dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 (diolah)

**Gambar 1.4 Tahapan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025**

Berdasarkan gambar diatas, perwujudan sasaran RPJPD tahapan ke-IV ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia yang kreatif produktif, pengembangan pola hidup sehat dan layanan kesehatan, peningkatan nilai-nilai agama dan budaya kreatif dan inovatif, peningkatan kemandirian dan kemampuan bersaing para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah sebagai modal utama dalam peningkatan usaha dan perekonomian, pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang berdaya saing tinggi, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### 1.3.2. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan (spasial) dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 1.3.3. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD agar adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi terhadap arah dan kebijakan pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas nasional. Penyelarasan antara RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut, merupakan implementasi dari kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dituangkan melalui Surat Edaran Bersama Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 16 Juni 2021. Untuk melihat keselarasan antara RPJMD dan RPJMN tersebut, tergambar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen RPJMD ini.

#### 1.3.4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dioperasionalkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sijunjung.



Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan harus selaras dan sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam dokumen RKPD perlu ditetapkan prioritas pembangunan daerah atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

#### 1.3.5. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Secara eksplisit Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pada dasarnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat dilihat pada gambar berikut ini



**Gambar 1.5 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

#### 1.3.6. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan KLHS RPJMD

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi



dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1. Maksud**

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sijunjung sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif dan integratif.

##### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Renstra Perangkat daerah periode 2021-2026.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Indikator Kinerja Kunci, sebagai acuan penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung periode 2021-2026.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

##### **Bab I**

##### **Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD.



- Bab II      Gambaran Umum Kondisi Daerah**  
Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sijunjung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya yaitu; (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum dan (4) daya saing daerah.
- Bab III      Gambaran Keuangan Daerah**  
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari; (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.
- Bab IV      Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**  
Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab V      Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**  
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penjabaran terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
- Bab VI      Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**  
Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta diikuti penetapan program pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VII      Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka pendanaan pembangunan tahun 2021-2026 dan seluruh program prioritas yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta target indikator kinerja dan pagu indikatif menurut urusan pemerintahan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD.
- Bab VIII      Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**  
Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- Bab IX      Penutup**  
Bab ini menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan paska ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah.



# BAB



2

# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

#### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi Wilayah**

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat serta hasil konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), maka luas wilayah Kabupaten Sijunjung 3.169,03 Km<sup>2</sup> atau 316.903,36 ha. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung tersebut, mengalami perubahan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 seluas 3.130,80 km atau 313.080 ha.

Secara proporsi luas, Kabupaten Sijunjung memiliki 3 (tiga) kecamatan yang paling luas. Ketiga kecamatan yang luas tersebut terdiri dari; Kecamatan Kamang Baru dengan luas wilayah sebesar 914,13 km<sup>2</sup> atau 28,84% dari luas wilayah, Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas wilayah sebesar 651,89 km<sup>2</sup> atau 20,57% dan Kecamatan Sijunjung dengan luas wilayah sebesar 562,79 km<sup>2</sup> atau 17,75%. Sedangkan jumlah Nagari yang paling banyak, juga terdapat pada ketiga Kecamatan tersebut. Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sumpur Kudus memiliki nagari masing-masingnya 11 (sebelas) nagari, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Tanjung Gadang 9 (sembilan) nagari. Ketiga kecamatan yang paling luas tersebut juga memiliki jumlah jorong yang paling banyak. Kecamatan Kamang Baru memiliki 61 Jorong, Kecamatan Sijunjung 56 Jorong dan Kecamatan Sumpur Kudus 55 Jorong. Rincian luas wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

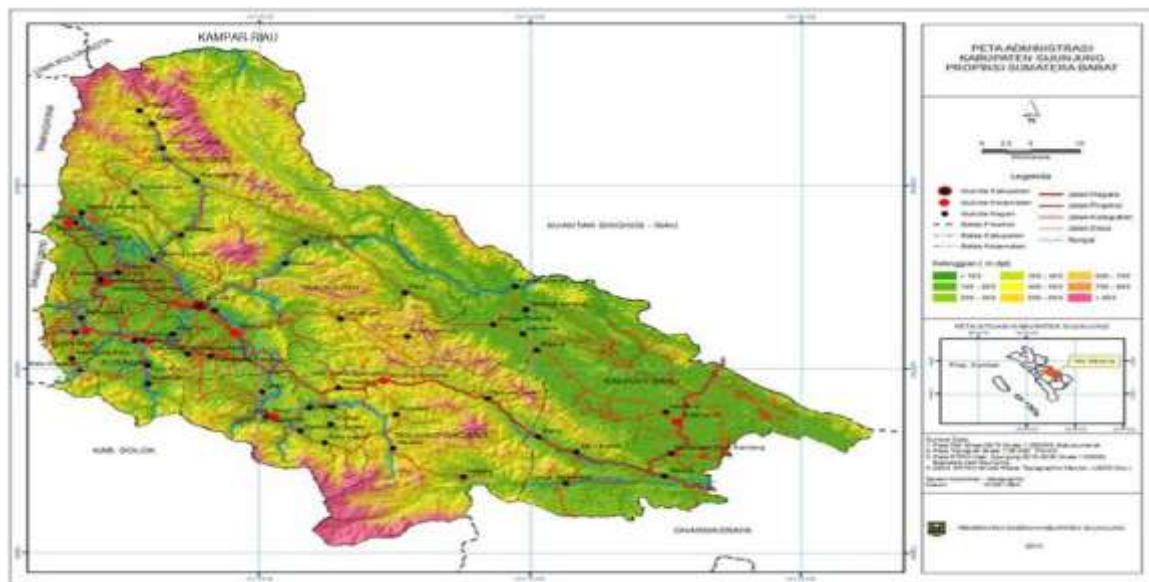
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	% Luas Kec.	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1	Kamang Baru	914,13	28,84	11	61
2	Tanjung Gadang	516,52	16,29	9	41
3	Sijunjung	562,79	17,75	9	56
4	Lubuk Tarok	192,12	6,06	6	24
5	IV Nagari	125,32	3,95	5	17
6	Kupitan	69,81	2,20	3+1 desa	9+5 dusun
7	Koto VII	136,41	4,30	6	36
8	Sumpur Kudus	651,89	20,57	11	55
<b>Jumlah</b>		<b>3.169,03</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>304</b>

Sumber: Permendagri 67/2013 dan Permendagri 113/2019

Sedangkan secara administratif Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, antara lain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singgingi, Provinsi Riau.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Kuantan Singgingi, Provinsi Riau.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Dhamasraya.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.

Batas administrasi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada peta administrasi berikut ini.



Sumber: Permendagri 67/2013 dan Permendagri 113/2019

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung**

### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara letak astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada  $0^{\circ} 18' 43,6666''$  Lintang Selatan (LS) -  $0^{\circ} 59' 18,261''$  Lintang Selatan (LS) dan  $100^{\circ} 47' 14,061''$  Bujur Timur (BT) -  $101^{\circ} 32' 57,395''$  Bujur Timur (BT). Secara geo-strategis Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur provinsi Sumatera Barat pada jalur utama 3 (tiga) provinsi, yakni; Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Sehingga memiliki potensi dan prospek dalam pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata serta



didukung tatanan sosial budaya masyarakat yang masih kuat. Oleh sebab itu, secara geo-ekonomis Kabupaten Sijunjung memiliki potensi tidak kalahnya dengan daerah lain yang sudah bergerak maju dalam pembangunan.

### **2.1.1.3. Kondisi Topografi**

Secara topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, dengan morfologi daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan. Topografi Kabupaten Sijunjung terletak pada ketinggian antara 100 sampai 1.800 m di atas permukaan laut dengan rata-rata ketinggian sebesar 545 mdpl. Kondisi umum ketinggian wilayah masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.  
Tinggi Wilayah Kabupaten Sijunjung Perkecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Tinggi (Mdpl)
1	Kamang Baru	Kamang	100-900
2	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	200-1.800
3	Sijunjung	Sijunjung	300-1.100
4	Lubuk Tarok	Lubuk Tarok	200-1.100
5	IV Nagari	Palangki	200-600
6	Kupitan	Padang Sibusuak	200-500
7	Koto VII	Tanjuang Ampalu	200-600
8	Sumpur Kudus	Kumanis	200-1.200
<b>Rata-Rata</b>			<b>545</b>

*Sumber : Interpretasi Citra Satelit , 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan ketinggian yang tinggi adalah Kecamatan Tanjung Gadang yakni berada pada ketinggian 200-1.800 meter diatas permukaan laut, lalu Kecamatan Lubuk Tarok yakni berada pada ketinggian 200-1.200 meter diatas permukaan laut dan Kecamatan Sumpur Kudus yakni berada pada ketinggian 200-1200 di atas permukaan laut. Sedangkan kecamatan Kupitan berada pada ketinggian yang rendah yakni 200-500 meter diatas permukaan laut.

Sedangkan kondisi bentangan alam Kabupaten Sijunjung dengan tingkat kemiringan/kelerengan pada umumnya berada kemiringan antara 15-25% dengan proposinya 41,30% dari seluruh luas wilayah. Sedangkan kemiringan yang terkecil >40% atau 0,40%. Daerah kemiringan tersebut, merupakan wilayah yang harus dilindungi agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Klasifikasi dan penyebaran kemiringan/kelerengan masing-masing kecamatan tahun 2020 berdasarkan interpretasi peta satelit, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.3.**  
**Klasifikasi dan Penyebaran Kelerengan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

No	Klasifikasi Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Tersebar di Kecamatan
1	0 – 2 %	5.723,57	1,80	Sumpur Kudus, Kupitan, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung dan Kamang Baru
2	2 – 8 %	79.529,66	25,09	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, IV Nagari, Kupitam, Koto VII dan Sumpur Kudus
3	8– 15 %	62.168,92	19,60	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, Koto VII dan Sumpur Kudus
4	15 – 25 %	130.895,38	41,30	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang dan Sumpur Kudus
5	25-40%	37.287,37	11,70	Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, Tanjung Gadang, IV Nagari, Kupitan, Koto VII dan Sumpur Kudus
6	>40 %	1.298,43	0,40	Sijunjung, Tanjung Gadang, Koto VII dan Sumpur Kudus
<b>Jumlah</b>		<b>3.169,03</b>	<b>100</b>	

Sumber : Interpretasi Citra Satelit , 2020

#### 2.1.1.4. Kondisi Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis tipe B yaitu, daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (*global climate change*) juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrim di mana ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran, di mana pada tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari namun pada tahun 2020 terjadi pergeseran ke bulan November dan Desember.

Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4.**  
**Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Suhu Terendah	°C	21	21	21	21	21
2.	Suhu Tertinggi	°C	33	33	33	33	33
3.	Curah Hujan Terendah	mm/th	78	80	82	83	83
4.	Curah Hujan Tertinggi	mm/th	390	412	540	569	569

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

#### 2.1.1.5. Kondisi Geologi

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam. Sehingga Secara geologi Kabupaten Sijunjung memiliki 18 jenis batuan yang terdiri atas Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Gamping, Batu Gamping Pasiran, Batu Kuarsa, Batu Kuarsit,



Batu Sabah Campur Batu Gamping, Batu Sabak Campur Kuarsa, Diabas Basal, Diorit Kuarsa, Filit Batu Sabak, Granit, Konglomerat, Kuarsa Porfir, Lempung dan Napal, Lempung Pasir, Napal Lempungan, Sepih dan Batu Gamping, dan Tuf Batu Apung. Secara rinciannya jenis batuan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5.**  
**Jenis Batuan di Kabupaten Sijunjung**

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Percentase
1	Batu Andesit	239,3	0,08
2	Batu Gamping	74,3	0,02
3	Batu Gamping Pasiran	190,7	0,06
4	Batu Kuarsa	36.905	11,64
5	Batu Kuarsit	61.280	19,33
6	Batu Sabah Campur Batu Gamping	24.436	7,71
7	Batu Sabak Campur Kuarsa	60.577	19,10
8	Diabas Basal	1.061	0,33
9	Diorit Kuarsa	446,3	0,14
10	Filit Batu Sabak	837,5	0,26
11	Granit	80.220	25,31
12	Konglomerat	548,3	0,17
13	Kuarsa Porfir	3.346	1,06
14	Lempung dan Napal	34.662	10,93
15	Lempung Pasir	3.485	1,10
16	Napal Lempungan	7.874	2,48
17	Sepih dan Batu Gamping	233,9	0,07
<b>Jumlah</b>		<b>316.903,36</b>	<b>100</b>

Sumber: Perda No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

### **2.1.1.6. Kondisi Hidrologi**

Kondisi air permukaan di Kabupaten Sijunjung banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Sijunjung bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.

Oleh karena itu, aktivitas usaha tersebut perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Sijunjung pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan yang berasal daerah tetangga. Terdapat 8 sungai yang mengalir di Kabupaten Sijunjung yang terdiri atas Batang Palangki, Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Takung, Batang Sinamar dan Batang Kulampi yang mengalir melewati 8 meter-30 meter. Sungai dengan luas terlebar adalah Batang Kuantan yang mengalir melewati 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Kamang Baru serta melewati 5 Nagari yaitu Nagari Muaro, Nagari Silokek , Nagari Durian Gadang, Nagari Padang Tarok dan Nagari Sungai Betung. Sungai-sungai utama di Kabupaten Sijunjung meliputi;



Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Palangki dan Batang Sukam.

Sedangkan kondisi sungai-sungai tersebut, mengalami erosi yang sangat tinggi yang mengakibatkan volume sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai sangat besar. Dengan kondisi ini, pada saat musim penghujan mengakibatkan rendahnya daya tampung sungai, sehingga mengakibatkan banjir. Kondisi DAS tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.2 Kondisi Eksiting Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sijunjung**

#### **2.1.1.7. Kondisi Tanah**

Kondisi tanah di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagai berikut :

- a. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh, tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah 443 ha atau 0,15% dari luas wilayah kabupaten dan hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru.
- b. Jenis tanah andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau hidroxida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memiliki ph antara 4,5 sampai 6. Tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 ha atau 6,82% dari luas wilayah kabupaten.
- c. Jenis tanah glei humus yaitu jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung bahan organik lebih dari 3% sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral, tingkat kesuburnya sedang



dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60%. Luasan tanah jenis ini lebih kurang seluas 45.555 ha atau 14,55% dari luas wilayah kabupaten. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru.

- d. Jenis tanah kambisol yaitu jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus dengan luas 145.481 ha atau 45,45% dari luas wilayah kabupaten. Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
- e. Jenis tanah Latosol yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 ha atau 7,38% dari luas wilayah kabupaten.
- f. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5%, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi.

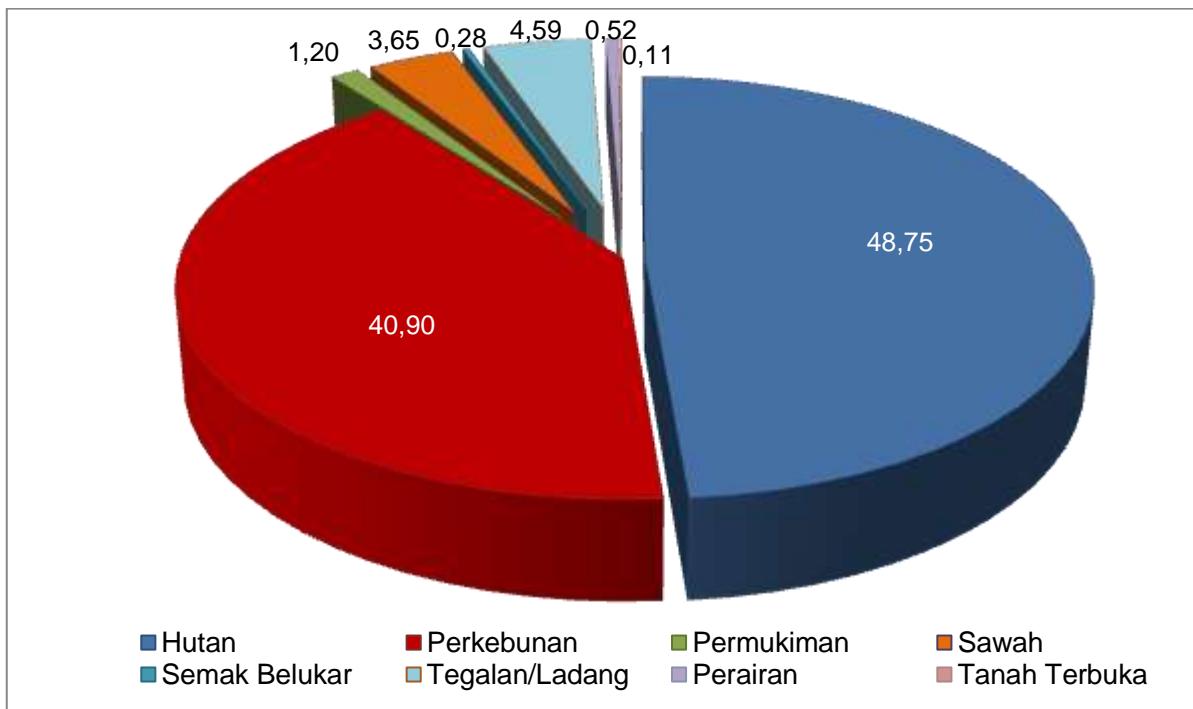
Sementara itu, produktivitas tanah yang rendah sampai sedang ternyata mengalami pertumbuhan dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Sedangkan tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai 77.125 ha atau 24,64% dari luas wilayah kabupaten. Kondisi tanah seperti ini hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

#### **2.1.1.8. Penggunaan Lahan**

Luas lahan di Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan peruntukannya. Perkembangan pembangunan yang semakin berkembang baik disektor pertanian, perkebunan, dan permukiman jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan lahan. Berdasarkan *interpretasi citra satelit* yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), maka proporsi penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 didominasi oleh hutan seluas 154.493 Ha atau 48,75%, perkebunan seluas luas 129.602 Ha atau 40,90% dan tegalan/ladang seluas 14.544 Ha atau 4,5%. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan. Oleh karena itu, akan berimplikasi terhadap kebutuhan lahan sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap



pengembangannya. Sehingga perlu ada penyesuaian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih terstruktur dan terukur. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, tergambar pada grafik berikut ini.



*Sumber: Interpretasi Citra Satelit, 2020*

**Gambar 2.3 Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

Sedangkan rincian luas penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.6.**  
**Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Guna Lahan (Ha)</b>								<b>Jumlah</b>
		<b>Hutan</b>	<b>Perke-bunan</b>	<b>Permu-kiman</b>	<b>Sawah</b>	<b>Semak Belukar</b>	<b>Tegalan/ Ladang</b>	<b>Perairan</b>	<b>Tanah Terbuka</b>	
1	Kamang Baru	36.001	50.071	1.377	1.377	155,3	1.823	366,1	240,5	91.413,8
2	Tanjung Gadang	33.384	15.655	254,8	1.147	89,4	988,2	131,4	0,7	51.652,6
3	Sijunjung	31.146	20.004	616,8	2.343	316,8	1.408	426,2	16,1	56.279,3
4	Lubuk Tarok	6.268	10.189	160,2	929,9	0,9	1.504	114,5	44,2	19.212,6
5	IV Nagari	1.494	7.121	260,2	1.322	105,4	2.072	155,4	-	12.532,4
6	Kupitan	1.057	3.730	167,0	921,4	9,2	1.019	75,06	1,08	6.981,1
7	Koto VII	1.271	8.987	588,6	1.944	12,9	581	246,3	9,4	13.641,6
8	Sumpur Kudus	43.868	13.840	380,3	1.584	194,1	5.146	144,2	30,8	65.189,6
<b>Jumlah</b>		<b>154.493</b>	<b>129.602</b>	<b>3.805,9</b>	<b>11.570,3</b>	<b>884,3</b>	<b>14.544</b>	<b>1.659,6</b>	<b>343,1</b>	<b>316.903,36</b>

*Sumber: Interpretasi Citra Satelit , 2020*



### **2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan topografi Kabupaten Sijunjung yang berbukit-bukit, maka bencana alam yang terjadi pada umumnya tanah longsor (*land slide*). Hal ini disebabkan karena gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap. Kejadian bencana alam tersebut, merata terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, kejadian bencana alam yang frekuensi sering terjadi adalah kebakaran lahan dan angin kencang. Kondisi ini disebabkan karena Kabupaten Sijunjung merupakan kawasan lahan kering, sehingga rawan terjadinya kebakaran.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan daerah rawan bencana, terutama longsor dan banjir yang selalu terjadi setiap tahun. Perkembangan frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7.**

**Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Erosi Sungai	0	0	0	0	0
2	Angin Kencang	3	3	2	33	16
3	Banjir	16	15	12	10	23
4	Banjir Bandang	1	4	3	3	2
5	Hanyut/Tenggelam	2	0	1	1	2
6	Kebakaran	16	15	12	10	15
7	Kebakaran Lahan	171	29	29	23	4
8	Longsor	24	12	12	30	30

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### **2.1.2. Demografi**

Kondisi demografi Kabupaten Sijunjung sebagian besar bersifat homogen dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Disisi lain, Kecamatan Kamang Baru demografinya cenderung heterogen karena sebagian wilayah merupakan kawasan transmigrasi nasional. Sehingga memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan yang telah menyatu dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Sijunjung merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2020 sebesar 1,49%. Laju pertumbuhan penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Lubuk Tarok sebesar 2,13% dan Kecamatan Kamang Baru sebesar 1,94% dan terendah berada di Kacamatan Kupitan sebesar 0,49%.



Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut, cenderung mempengaruhi perumusan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung dimasa yang akan datang.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 dan 2020 per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 dan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2010	2020	
1	Kamang Baru	41.534	50. 459	1,94
2	Tanjung Gadang	22.956	26. 900	1,58
3	Sijunjung	41.189	47. 925	1,51
4	Lubuk Tarok	14.179	17. 567	2,13
5	IV Nagari	14.119	15. 584	1,00
6	Kupitan	12.588	13.193	0,49
7	Koto VII	32.978	37.549	1,30
8	Sumpur Kudus	23.058	25.868	1,16
<b>Total/rata-rata</b>		<b>202.601</b>	<b>235.045</b>	<b>1,49</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

Sedangkan dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung berdasarkan kelompok usia tahun 2020, didominasi oleh kelompok umur 15-39 tahun dan usia 0-14 tahun. Kondisi ini terlihat dari data Sijunjung Dalam Angka tahun 2021, dimana jumlah penduduk dari kelompok umur 15-39 tahun sebanyak 96.371 jiwa atau 41,00% dari total penduduk. Sedangkan kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 59.402 jiwa atau 25,27% dari total penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk kelompok usia 40-59 tahun sebesar 54.491 jiwa atau 23,18% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia diatas 65 tahun sebanyak 15.750 jiwa atau 6,70% dari total penduduk.

Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 menurut kelompok usia, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Menurut Kelompok Usia Tahun 2020**

No.	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)			% Klpk. Usia pddk. thdp Jml pddk
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	0 – 14	30.744	28.658	59.402	25,27
2	15 – 39	49.099	47.272	96.371	41,00
3	40 – 59	27.548	26.943	54.491	23,18
4	60 – 64	4.398	4.633	9.031	3,84
5	> 65	7.337	8.413	15.750	6,70
<b>Total</b>		<b>119.126</b>	<b>115.919</b>	<b>235.045</b>	<b>100</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)



Berdasarkan data komposisi penduduk tersebut, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sijunjung didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif (15-59 tahun). Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung memiliki bonus demografi. Sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kelompok penduduk usia non produktif (0-14 tahun) juga memiliki angka yang cukup tinggi sebesar 25,27%.

Sedangkan dari sisi pekerjaan penduduk Kabupaten Sijunjung kategori usia produktif (15–59 tahun) lebih dominan bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebanyak 53.980 jiwa atau 46,67% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung berusia 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10.**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Usia Diatas 15 tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2020**

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)			% Jml. Pddk. Bekerja
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	26.885	27.095	53.980	46,67
2	Industri Pengolahan	17.319	3.002	20.321	17,57
3	Jasa lainnya.	25.089	16.269	41.358	35,75
	<b>Total</b>	<b>69.293</b>	<b>46.366</b>	<b>115.659</b>	<b>100</b>

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)*

### **2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah**

#### **2.1.3.1. Perkebunan**

Perkebunan merupakan salah satu tiang utama struktur perekonomian Kabupaten Sijunjung. Beberapa komoditi perkebunan yang ditanam di antaranya adalah karet, kelapa sawit, kakao, manggis, dan kopi, baik oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Perkebunan karet yang bersifat perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang yang hampir merata ada di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan analisa GIS yang dilakukan, luas lahan perkebunan yang dikelola secara intensif/perkebunan besar/plasma di Kabupaten Sijunjung adalah 5.123 ha atau 1,6% dari luas kabupaten dan 120.357 ha atau 38,44% dari total luas wilayah Kabupaten merupakan kebun campuran. Sementara itu, komoditas perkebunan pada umumnya dibudidayakan oleh masyarakat adalah karet, kelapa sawit dan kakao. Namun saat ini adanya kecenderungan masyarakat telah melakukan diversifikasi usaha dari perkebunan ke tanaman



holtikultura.

Produksi karet pada tahun 2020 sebesar 64.255 ton dan kelapa sawit sebesar 113.370 ton dan kakao mencapai 1.171 ton. Produksi ketiga komunitas perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2016, dimana produksi karet sebesar 27.134 ton, produksi kelapa sawit sebesar 18.173 ton dan produksi kakao sebesar 638 ton.

Produksi komoditi karet tertinggi pada Tahun 2020 berada di Kecamatan Kamang Baru sebesar 19.958 ton dan Kecamatan Koto VII sebesar 12.903 ton. Sedangkan produksi komoditi karet terendah berada di Kecamatan IV Nagari sebesar 3.923 ton dan Kecamatan Tanjung Gadang sebesar 4.451 ton. Sementara itu, produksi komoditi kelapa sawit tertinggi berada di Kecamatan Kamang Baru sebesar 107.532 ton dan Kecamatan Lubuk Tarok sebesar 4.072 ton. Sedangkan produksi komoditi kelapa sawit terendah berada di Kecamatan Sumpur Kudus sebesar 52 ton dan Kecamatan Tanjung Gadang sebesar 554 ton.

Merujuk kepada perkembangan produksi hasil perkebunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mencerminkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dari sektor perkebunan untuk dikembangkan lima tahun kedepan. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, Kabupaten Sijunjung merupakan kawasan pengembangan sentra produksi pertanian Provinsi Sumatera Barat dengan tanaman yang diunggulkan, padi, jagung, manggis dan karet.

#### 2.1.3.2. Bahan Galian dan Mineral

Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang kaya akan hasil bahan galian dan mineral, terutama batubara dan berbagai bahan mineral lainnya seperti emas, sirtu dan tanah urug. Kegiatan ini dilakukan oleh individu dengan status kepemilikan tanah pertambangan berupa milik sendiri, sewa dan termasuk wilayah sungai. Penambangan dengan status individu ini (berizin/tidak berizin) dilakukan di beberapa tempat dengan sistem tambang terbuka sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada satu daerah terlihat luas.

Berdasarkan peta tambang berizin dan potensi penyebaran bahan tambang di Kabupaten Sijunjung serta beberapa potensi bahan tambang dapat dikembangkan. Penyebaran potensi bahan bahan galian dan mineral di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.11.**  
**Potensi Bahan Galian dan Mineral di Kabupaten Sijunjung**

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi Penyebaran	Prakiraan Potensi
<b>I. Bahan Galian Batubara</b>			
1.	Batu bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Sei Tambang</li> <li>⌚ Sisawah</li> <li>⌚ Muaro</li> <li>⌚ Lubuk Tarok</li> </ul>	Terukur 5.904837 ton Tereka 4.000.000 ton 1.215.000 ton Terukur 14.093.000 ton
<b>II. Bahan Galian Logam</b>			
1.	Air Raksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Tersebar di Sibalabu, Sei Tapir Batu Anjung, dan Gade Talang</li> </ul>	Sumberdaya
2.	Besi (Bijih)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Batu Manjulur</li> </ul>	Sumberdaya
3.	Emas	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Tersebar di Sungai Batang Kuantan, Mundam Sakti dan Sungai Betung</li> </ul>	Sumberdaya
<b>III. Bahan Galian Industri</b>			
1.	Andesit	Tersebar di Perbukitan Salo (Tanjung Gadang),	Sumberdaya
2.	Batu kapur	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Sumpur</li> <li>⌚ Muaro</li> <li>⌚ Bukit Sumanik, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang</li> </ul>	Hipotetik 1.018.750.000 ton Hipotetik 2.082.500.000 ton Tereka 348.260.000 ton (210 ha)
3.	Batu permata/ ½ permata	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Bukit Kulipat dan Kiliran Jao, Muara Takung, Tanjung Gadang</li> </ul>	Sumberdaya
4.	Batu tulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Taratak</li> </ul>	Hipotetik 1.875.00 ton
5.	Dolomit	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Bukit Batang Dareh, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang</li> </ul>	Terduga 40.000.000 ton
6.	Fospat	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Ngalau Buo, Ngalau Kecil dan Muko-muko</li> </ul>	Sumberdaya
7.	Grafit	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Muaro Takung, Tanjung Gadang</li> </ul>	Sumberdaya
8.	Granit	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Perbukitan Sibiluru-Sumpur (Bukit Talang, Lajang, Mambut dam Lawan), Tamparungo, Sumpur Kudus.</li> <li>⌚ Lubuk Talang, Bancah Sibakur (Tj. Gadang), Bukit Langki, Langki (Tj. Gadang) B. Giri Loyo (Koto Baru), B. Dadap, Kampung Dalam (Sijunjung)</li> </ul>	Terduga 2.400.000.000 m <sup>2</sup> Sumberdaya
10.	Kuarsit	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Tamparungo (Sumpur Kudus)</li> </ul>	Sumberdaya
11.	Marmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Bukit Talang Liang dan Bukit Talaung, Tj. Lolo, Tj. Gadang</li> <li>⌚ Tampurungo, S. Kudus</li> <li>⌚ Bukit Sangkar Ayam Tj. Lolo Tj. Gadang</li> </ul>	Terduga 90 ha 75.000.000 ton Terduga 50 ha 2.500.000.000 m <sup>3</sup> Terduga 25 ha 700.000 m <sup>3</sup>
12.	Tanah liat	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Tersebar disekitar Bukit Buluh Kasok, Taratak dan Simpang IV Pematang Panjang (Sijunjung)</li> <li>⌚ Perbukitan dan pendataran Padang Laweh, Tj. Ampalu</li> <li>⌚ Padang Sibusuk, Kupitan</li> <li>⌚ Tanjung Lolo, Tanjung Gadang</li> </ul>	Sumberdaya Sumberdaya Sumberdaya Sumberdaya 210 Ha
13.	Pasir kuarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Palangki</li> </ul>	Hipotetik 62,5 juta ton

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat, 2021

Selain memiliki potensi bahan bahan galian dan mineral Kabupaten Sijunjung juga punya cadangan gas dan minyak bumi yang cukup besar. Berdasarkan data ekplorasi PT Rizki Bukit Barisan terdapat cadangan gas bumi pada Blok Migas *South West* Bukit Barisan Lapangan Sinamar sebesar 35 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau setara dengan 210 Mega Watt



(MW) listrik. Oleh sebab itu, PT Rizki Bukit Barisan telah menjajaki kerjasama dengan PT (Persero) PLN untuk pembelian hasil eksploitasi cadangan gas bumi. Namun hingga saat ini belum dapat terealisasi, karena masih dalam tahap kajian oleh SKK-Migas.

Pengembangan potensi candangan gas bumi melalui kerjasama usaha (*business cooperation*) antara PT Rizki Bukit Barisan dengan PT (Persero) PLN atau bentuk kerjasama lainnya, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor UMKM serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Oleh sebab itu, pengembangan potensi candangan gas bumi menjadi barometer bagi Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

#### 2.1.3.3.Pariwisata

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus yang tersebar di beberapa kecamatan. Tahun 2018 kawasan Silokek ditetapkannya sebagai kawasan taman bumi (*geopark*) nasional, sehingga punya peluang untuk menjadikan kawasan strategis pariwisata nasional. Selain itu, Kabupaten Sijunjung masuk dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Sawahlunto dan sekitarnya dengan tema utama sebagai pengembangan wisata warisan budaya tambang batubara *coal mining heritage of Sawahlunto* berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.

Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12.**  
**Potensi Wisata di Kabupaten Sijunjung**

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1	Kamang Baru	Wahana Wisata	Alam	Kamang Baru
		Murai Tujuah Basanggik	Alam	Aie Amo
		Danau Batang Karing	Alam	Batang Karing
2	Tanjung Gadang	Panorama Bukik Sabalah	Alam	Pandam
		Ngalau Pandam	Alam	Pandam
3	Sijunjung	Ngalau Loguang	Alam	Aie Angek
		Pemandian Aie Angek	Alam	Aie Angek
		Ngalau Palukahan	Alam	Silokek
		Arung Jeram	Minat Khusus	Batang Kuantan



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
3	Sijunjung	Ngalau Cigak Bersafar Perkampungan Adat Ngalau Solok Ambah Ngalau Talago	Alam Budaya Budaya Alam Alam	Silokek Calau Ma Sijunjung Padang Ranah Sijunjung Solok Ambah Silokek
4	Lubuk Tarok	Batu Ajuang Kerajaan Jambu Lipo Rumah Gadang 13 Ruang Aia Tajun Buluah Kasok	Alam Budaya Budaya Alam	Batu Ajuang Jambu Lipo Lubuk Tarok Taratak
5	IV Nagari	Tabek Silacan	Alam	Ranah Tibarau
6	Kupitan	Goa Bukik Panjang Lobang Japang Pemandian Aia Angek Rumah Gadang Piliang	Alam Alam Alam Budaya	Kampung Baru Padang Sibusuak Padang Sibusuak Padang Sibusuak
7	Koto VII	Tabek Gadang Makam Syekh Burhanudin	Alam Alam	Padang Lawas Aur Gading
8	Sumpur Kudus	Lubuk Pandakian Air Terjun Koto Salo Ngalau Sisawah Makam Rajo Ibadat Monumen Sejarah PDRI Lubuk Hijau Lubuk Pandakian	Alam Alam Alam Budaya Budaya Alam Alam	Sumpur Kudus Koto Salo Sisawah Sumpur Kudus Sumpur Kudus Sumpur Kudus Sumpur Kudus

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, 2021

Penyebaran potensi sumber daya alam Kabupaten Sijunjung disetiap kecamatan merupakan peluang investasi bagi daerah, dapat dilihat gambar berikut ini.





Sumber: Dinas PMPTSP, 2021

**Gambar 2.4 Peta Peluang Investasi di Kabupaten Sijunjung.**

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisa terhadap aspek kesejahteraan masyarakat lebih menitikberatkan kepada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni, budaya dan olahraga, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lebih memfokuskan kepada perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, gini rasio, dan tingkat penganguran terbuka dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020).

#### 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu dari tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang diukur melalui 17 (tujuh belas) lapangan usaha struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut para ahli ekonomi, secara umum mengemukakan bahwa terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahapan kegiatan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi dan perkembangan



ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam, kemampuan daya saing daerah dan sumber daya manusia. Perspektif ini, dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan yang relevansi dengan sasaran yang tepat dan terukur.

Lima tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung mengalami pelambatan yang cukup signifikan dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 1,10%. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi global dan nasional akibat adanya bencana non alam (pandemi covid-19) diawal tahun 2020. Hingga saat ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertambahan nilai PDRB, terutama lapangan usaha yang punya daya ungkit pertumbuhan PDRB sangat besar. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.13.**

**Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 (%)**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32	2,25	2,55	0,40	0,11
2	Pertambangan dan Penggalian	1,67	4,17	4,24	6,27	-1,17
3	Industri Pengolahan	7,44	0,46	4,55	-5,50	-1,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,06	7,24	7,31	4,33	-5,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,43	5,61	3,89	3,90	1,98
6	Konstruksi	8,19	9,39	7,07	7,92	-4,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,21	7,41	6,53	7,10	-0,21
8	Transportasi dan Pergudangan	8,45	7,63	5,79	7,94	-10,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,43	9,24	7,97	7,92	-8,76
10	Informasi dan Komunikasi	7,22	11,47	9,53	9,96	8,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,93	-2,01	0,61	2,09	1,20
12	Real Estat	4,42	5,17	4,43	5,54	0,65
13	Jasa Perusahaan	5,83	5,04	5,60	6,35	-2,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,11	5,21	6,09	5,20	-0,64
15	Jasa Pendidikan	8,89	8,10	8,59	8,22	5,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,80	8,33	8,30	7,49	8,23
17	Jasa lainnya	9,90	9,07	8,93	9,20	-7,27
<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>		<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>5,07</b>	<b>4,81</b>	<b>-1,10</b>

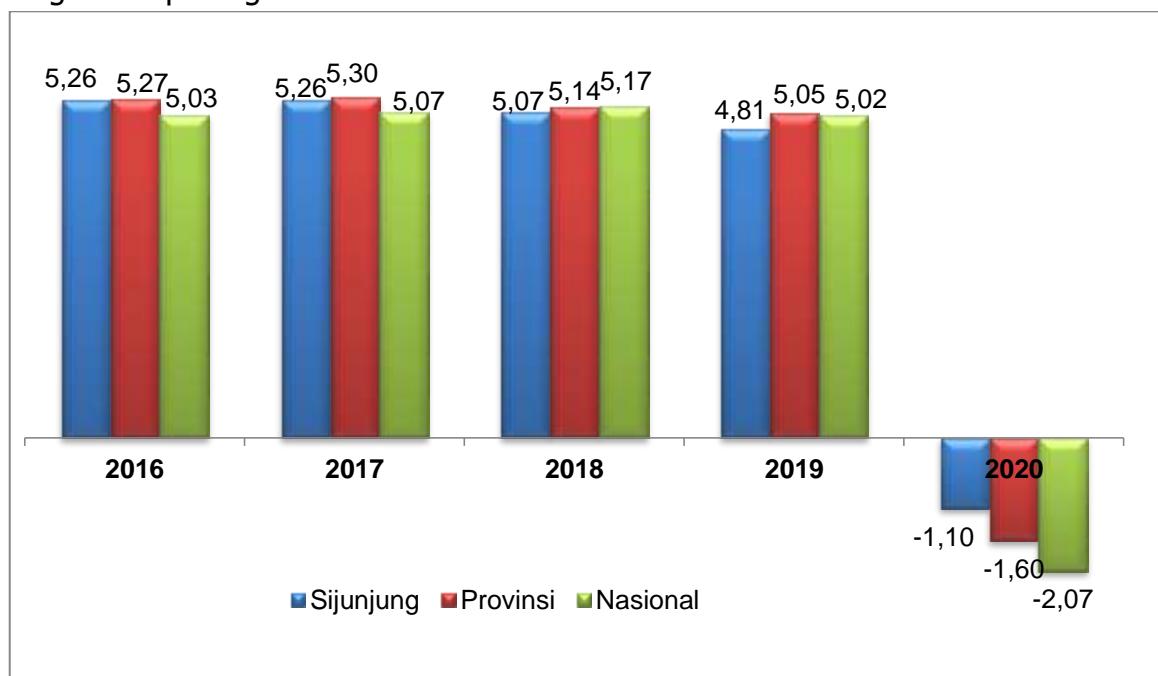
Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

Disisi lain, posisi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016-2020 berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini



menunjukkan daya saing ekonomi daerah cukup rendah dibandingkan daerah lain selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan struktur PDRB yang memiliki daya ungkit dan daya dukung terhadap pertumbuhan PDRB secara efektif. Disisi lain, tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung berada diatas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Artinya, struktur PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2020 masih kuat menahan krisis ekonomi yang terjadi dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 dan posisinya terhadap rata-rata nasional, Provinsi Sumatera Barat tergambar pada grafik berikut ini.



Sumber: *Sijunjung Dalam Angka 2021* dan BPS, 2021

**Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

Sementara itu, pembentukan struktur PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha utama antara lain; pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi dan pergudangan. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung. Lapangan usaha yang memberikan peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir masih bertumpu pada sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,44%.



Selanjutnya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,12% disusul oleh lapangan usaha konstruksi rata-rata kontribusi sebesar 13,71%. Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,47% dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,51%.

Perkembangan dan rata-rata kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 berdasarkan harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14.**

**Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (%)**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Tahun</b>					<b>Rata-Rata</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,55	30,59	29,47	27,88	27,71	29,44
2	Pertambangan dan Penggalian	14,32	14,15	14,14	14,21	13,76	14,12
3	Industri Pengolahan	3,18	3,02	2,99	2,53	2,60	2,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	12,78	13,31	13,8	14,32	14,35	13,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,08	11,26	11,51	11,8	11,71	11,47
8	Transportasi dan Pergudangan	7,45	7,63	7,55	7,76	7,16	7,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,75	0,8	0,85	0,79	0,79
10	Informasi dan Komunikasi	2,72	2,9	2,99	3,18	3,45	3,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,58	2,41	2,33	2,29	2,36	2,39
12	Real Estat	1,21	1,21	1,2	1,21	1,22	1,21
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,77	4,86	5,12	5,59	5,00
15	Jasa Pendidikan	4,27	4,39	4,68	4,95	5,24	4,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67	1,72	1,79	1,87	2,09	1,83
17	Jasa lainnya	1,68	1,74	1,79	1,94	1,86	1,80
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Sedangkan perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sijunjung yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Namun disisi lain pertumbuhannya mengalami pelambatan, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Triliun Rp)**

No.	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020*	
		ADHK	ADHB								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.761,30	2.347,17	1.800,96	2.425,18	1.846,83	2.501,90	1.854,28	2.444,64	1.856,25	2.527,72
2	Pertambangan dan Penggalian	864,73	1.065,65	900,79	1.122,16	938,95	1.200,15	997,81	1.297,42	986,07	1.255,30
3	Industri Pengolahan	202,73	236,25	203,66	253,46	212,92	253,45	201,20	230,68	197,26	237,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,11	3,13	2,26	3,39	2,43	3,63	2,53	3,55	2,41	3,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,43	3,15	2,52	3,38	2,67	3,62	2,78	3,89	2,83	3,97
6	Konstruksi	717,68	950,61	785,11	1.055,33	840,76	1.171,69	907,35	1.307,68	869,57	1.309,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	685,76	823,97	736,59	892,42	784,67	977,53	840,39	1.077,02	838,66	1.067,90
8	Transportasi dan Pergudangan	439,87	554,19	473,44	598,74	439,87	554,19	473,44	598,74	483,30	653,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,92	56,12	40,33	62,61	36,92	56,12	40,33	62,61	42,87	71,77
10	Informasi dan Komunikasi	212,71	202,72	237,60	229,84	259,71	253,44	285,57	290,04	309,56	314,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	140,15	191,96	137,34	190,67	138,18	197,57	141,07	208,74	142,76	215,59
12	Real Estat	72,20	89,67	75,93	95,62	79,29	101,56	83,68	110,31	84,23	111,68
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,52	1,13	1,62	1,20	1,76	1,27	1,93	1,25	1,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	268,51	346,61	282,49	378,06	299,71	412,78	315,30	467,79	313,28	510,19
15	Jasa Pendidikan	230,32	317,60	248,96	348,38	270,35	397,30	292,56	451,75	307,53	478,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,51	124,26	106,71	136,63	115,56	152,18	124,22	170,83	134,45	190,83
17	Jasa lainnya	92,05	124,63	100,39	137,96	115,57	151,81	119,42	176,75	110,74	169,51
	<b>PDRB</b>	<b>5.829,04</b>	<b>7.439,23</b>	<b>6.135,76</b>	<b>7.927,67</b>	<b>6.446,99</b>	<b>8.489,46</b>	<b>6.757,04</b>	<b>9.129,62</b>	<b>6.683,02</b>	<b>9.122,73</b>

\*) angka sangat sementara

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan pembentukan struktur PDRB Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sijunjung bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan lapangan usaha ekonomi sektor pertanian, terutama sub sektor perkebunan dan diversifikasi pengembangan potensi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB sebagai lapangan usaha yang dominan. Komoditi tanaman hortikultura yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sijunjung antara lain, jeruk nipis, jeruk kesturi, jeruk purut, durian, papaya dan manggis.



Selain potensi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Sijunjung. Hal ini terlihat dari cendangan jenis mineral yang potensial untuk dieksplorasi di antaranya, batubara dan mangan yang tersebar di kecamatan Kamang Baru yaitu, di Banjar Tengah, Tanjung Kaliang, dan Timpeh. Biji besi juga termasuk jenis tambang yang potensial untuk dieksploitasi. Jenis biji besi yang ada di Kabupaten Sijunjung ada dua, yaitu besi primer (Fe) dan hematit ( $Fe_2O_3$ ) yang berbutir sangat halus dan berongga.

Selain itu, biji emas di Kabupaten Sijunjung yang terbentuk dari hasil dari pelapukan batuan yang mengandung emas primer dan atau emas *placer* yang kemudian tertransportasi dan terendapkan pada cekungan-cekungan sungai. Selain itu, Kabupaten Sijunjung juga kaya dengan batu gamping yang bentuknya bervariasi. Kabupaten Sijunjung juga memiliki lempung yang digolongkan sebagai mineral non logam yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan keramik dan bahan baku semen. Mineral lain yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sijunjung adalah batu granit, batu marmor, andesit, pasir kuarsa, batu silica, dan lainnya.

Pengembangan potensi sektor pertambangan dan penggalian dalam upaya mengungkit laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang mengalami tantangan bagi daerah, seiring ditariknya kewenangan pengelolaan pertambangan dan penggalian ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh sebab itu, perlu ada adanya strategi pembangunan yang efektif, sehingga potensi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sijunjung dapat diolah dan memberikan nilai tambah pada struktur PDRB.

Disamping potensi sektor pertambangan dan penggalian, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga sedang berupaya untuk mengembangkan sektor industri karena sektor ini juga diharapkan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan masyarakat. Meskipun belum memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB saat ini, namun sektor ini cukup memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan di masa mendatang.

Pembangunan sektor industri sekarang ini di Kabupaten Sijunjung dititikberatkan pada pengembangan industri rumah tangga/industri kecil dan menengah. Upaya untuk menumbuhkembangkan sektor usaha industri rumah tangga/industri kecil di Kabupaten Sijunjung, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung berupa sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi serta kegiatan promosi secara terukur. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga berupaya menarik investor



untuk menumbuhkembangkan usaha industri menengah dan industri besar di masa mendatang. Sehingga perlu meningkatkan kualitas iklim berusaha yang aman, nyaman dan murah serta memberikan dukungan melalui berbagai cara seperti memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Sejalan dengan pengembangan sektor pariwisata nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu prioritas pembangunan. Oleh sebab itu, kedepannya Kabupaten Sijunjung menjadikan sektor pariwisata untuk dikembangkan secara terencana, terstruktur dan masif, seiring ditetapkannya kawasan Silokek sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang dikemas melalui *Geopark Ranah Minang Silokek (GMRS)*.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa lapangan usaha pembentukan struktur PDRB Kabupaten Sijunjung mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah kedepannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian atau kajian yang komprehensif dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebagai salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.2.1.2. Angka Kemiskinan

Pendekatan dalam mengukur angka kemiskinan, Badan Pusat Stastik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Perspektif dari pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sebesar 16.280 jiwa atau 6,78% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan tersebut, mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi pertanian dengan nilai harga jual yang memadai terhadap pengeluaran. Sehingga pengeluaran masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Walaupun disisi lain adanya peningkatan garis kemiskinan dari Rp. 400.861,- tahun 2019 menjadi Rp. 433.147,- pada tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya suasana pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini. Namun sebaliknya kondisi ini tidak diperhatikan secara optimal, lima tahun kedepan akan berimplikasi kepada pendapatan masyarakat. Sehingga jumlah penduduk miskin akan mengalami peningkatan. Selain itu, menurunnya jumlah penduduk miskin disebabkan adanya



korelasi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, garis kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat tabel berikut ini.

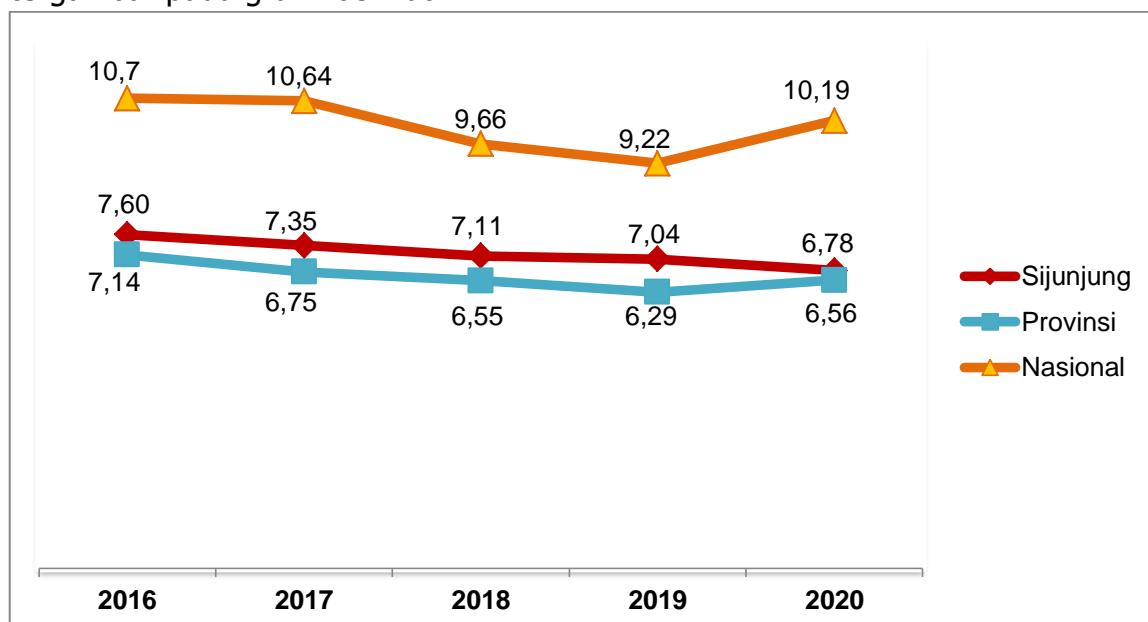
**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	17.120	16.830	16.550	16.650	16.280
2.	Angka Kemiskinan (%)	7,60	7,35	7,11	7,04	6,78
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	344.153	365.074	379.046	400.861	433.147
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,12	0,88	0,94	0,97

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka*, 2021

Disisi lain, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tersebut belum merubah posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dari daerah lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Disisi lain, posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata nasional.

Perkembangan posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

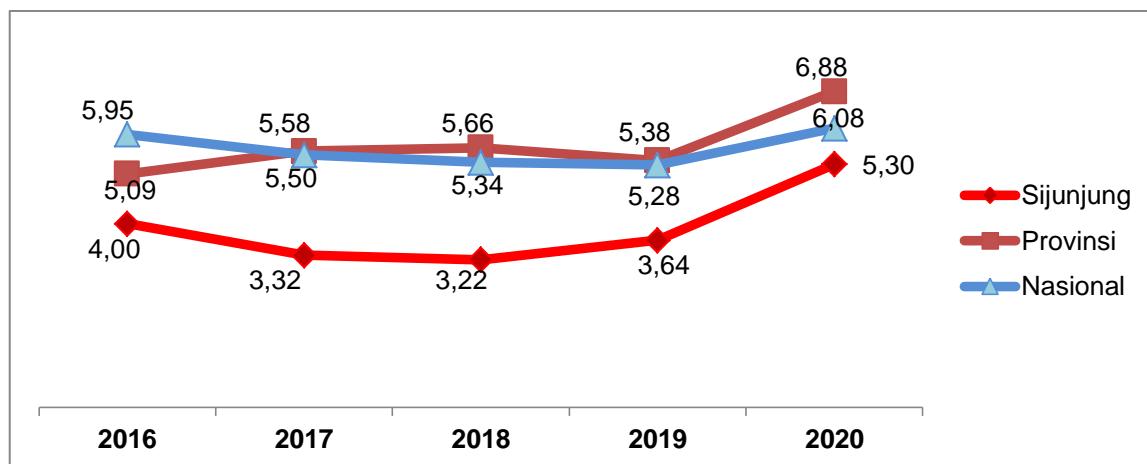


Sementara itu, Bank Dunia dalam menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi US\$ 2/hari atau setara dengan Rp 30.000 (kurs US\$ 1= Rp.15.000,-), sehingga garis kemiskinan per bulan sebesar Rp. 900.000,-/orang. Jika dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur jumlah penduduk miskin, maka angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung jumlahnya akan melebihi dari perhitungan BPS. Oleh sebab itu, perspektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan mengkombinasikan kedua pendekatan garis kemiskinan tersebut. Sehingga dapat mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan disetiap Nagari/Desa secara merata. Selain itu, perlu adanya data kemiskinan yang akurat, sehingga dalam merumuskan kebijakan pembangunan lebih terarah dan terukur.

#### 2.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2018 cenderung menurun, namun tahun 2019-2020 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena tidak bergeraknya lapangan usaha non pertanian akibat terjadinya pandemi covid-19. Sehingga berimplikasi meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak berkerja di sektor formal.

Walaupun adanya kenaikan TPT Kabupaten Sijunjung dua tahun terakhir, namun posisinya tetap berada dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan tingginya angkatan kerja yang terserap terhadap lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan daerah lain. Gambaran perkembangan TPT Kabupaten Sijunjung dan posisinya terhadap rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**



Penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Angkatan kerja Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sebanyak 114.731 orang, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 49.409 orang. Sedangkan angkatan kerja hingga tahun 2019 masih didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 70.268 orang dan kaum perempuan sebanyak 44.463 orang. Rincian jumlah angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sijunjung tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17.**  
**Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Angkatan kerja</b>	<b>70.268</b>	<b>44.463</b>	<b>114.731</b>
	Bekerja	67.724	42.787	110.511
	Pengangguran Terbuka	2.544	1.676	4.220
<b>2.</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>11.245</b>	<b>38.164</b>	<b>49.409</b>
	Sekolah	5.705	7.111	12.816
	Mengurus Rumah Tangga	2.506	28.661	31.167
	Lainnya	3.034	2.392	5.426
	<b>Jumlah</b>	<b>81.513</b>	<b>82.627</b>	<b>164.140</b>
<b>3.</b>	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>86,21</b>	<b>53,81</b>	<b>69,90</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka,2021

#### 2.2.1.4. Gini Rasio

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan negara/wilayah yaitu, gini rasio. Gini rasio sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan di suatu negara/wilayah. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan dalam pengukuran ketimpangan sebagai berikut :

Koefisien	Kriteria Distribusi Pendapatan
$0 < X < 0,4$	tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < X < 0,5$	tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < X < 1$	tingkat ketimpangan tinggi
$X=0$	merata sempurna
$X=1$	tidak merata

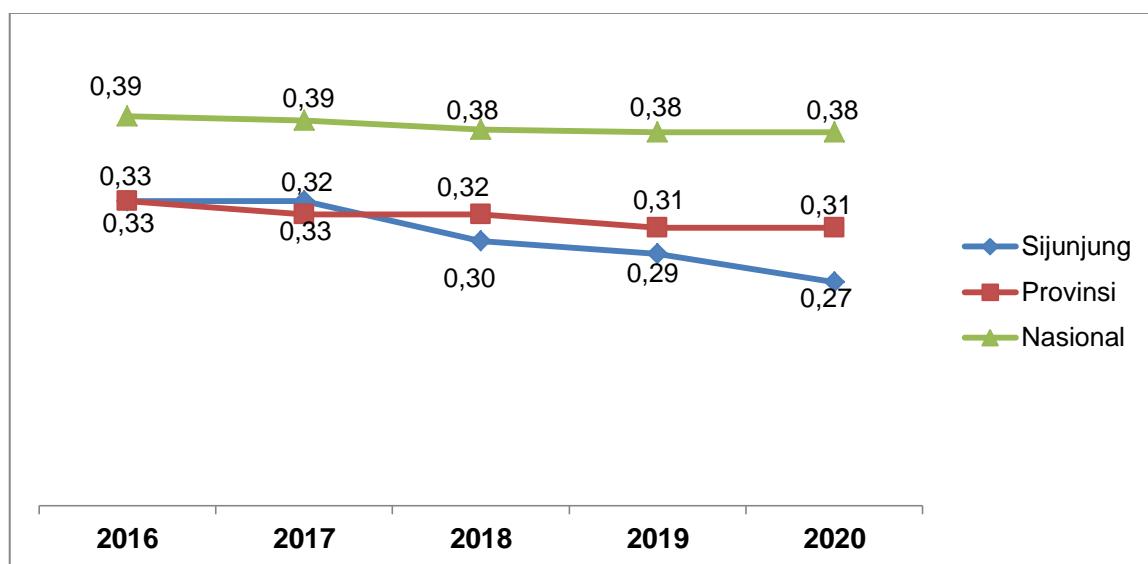
Keterangan: x = gini ratio

Berdasarkan kriteria di atas, semakin kecil gini rasio suatu negara/wilayah berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Negara/wilayah tersebut semakin kecil. Artinya, pemerintah mampu melakukan pemerataan distribusi pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan mampu diminimalisir.



Berdasarkan data BPS tahun 2021, gini rasio Kabupaten Sijunjung 2016-2020 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah karena koefisiennya dibawah 0,40. Kondisi ini mencerminkan distribusi pendapatan antar wilayah di Kabupaten Sijunjung cukup merata. Namun kondisi tersebut, belum dapat dijadikan keberhasilan pembangunan karena koefisien gini rasio masih diatas angka 0.

Sementara itu, secara posisi gini rasio Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung tingkat ketimpangan distribusi pendapatan lebih baik dengan daerah lain. Perkembangan dan posisi gini rasio Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat suatu Negara, maupun daerah yang sering digunakan adalah mengacu kepada target tujuan pembangunan millenium berkelanjutan atau *Sustainable Millennium Development Goals* (SDG's). Oleh sebab itu, pengukuran tingkat kesejahteraan sosial masyarakat cenderung digunakan yaitu; 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2) prevalensi stunting, 3) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



### **2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, IPM sebagai alat ukur dalam menentukan ketercapaian pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi pemerintah IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alat penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM tersebut, dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) Rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli). Berdasarkan perhitungan komponen-komponen tersebut, perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 66,01 dan meningkat menjadi 67,74 pada tahun 2020. Meningkatnya IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2016-2020 mencerminkan status kemampuan dasar penduduk masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial.

Disisi lain, berdasarkan kriteria yang digunakan UNDP, capaian IPM Kabupaten Sijunjung ini masih dalam kategori sedang karena memiliki nilai batas  $>55 - <70$ . Kondisi ini mencerminkan status kemampuan dasar penduduk belum sesuai dengan target SDG's. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung dimasa yang akan datang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan standar kehidupan masyarakat yang layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.18.**  
**Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 (poin)**

No	Komponen IPM	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,33	65,44	65,69	66,02	66,21
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11
4	Pengeluaran Ril per Kapita Dise-suaikan	Ribu Rp/ Org/Th	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361
<b>Indek Pembangunan Manusia</b>		<b>poin</b>	<b>66,01</b>	<b>66,60</b>	<b>66,97</b>	<b>67,66</b>	<b>67,74</b>

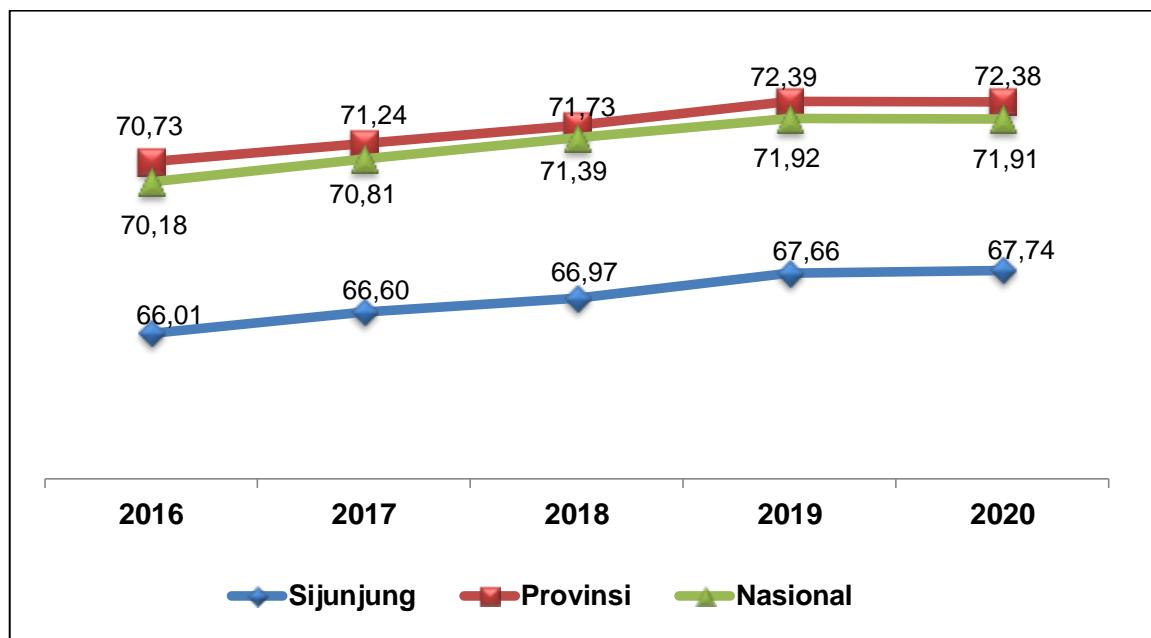
Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

Sedangkan, jika dilihat dari posisi relatif IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat maupun



nasional. Kondisi ini mencerminkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan daerah lain. Walaupun disisi lain, pertumbuhan IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

Perkembangan angka dan posisi relatif IPM Kabupaten Sijunjung terhadap Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2016-2020, tergambar pada grafik berikut ini.

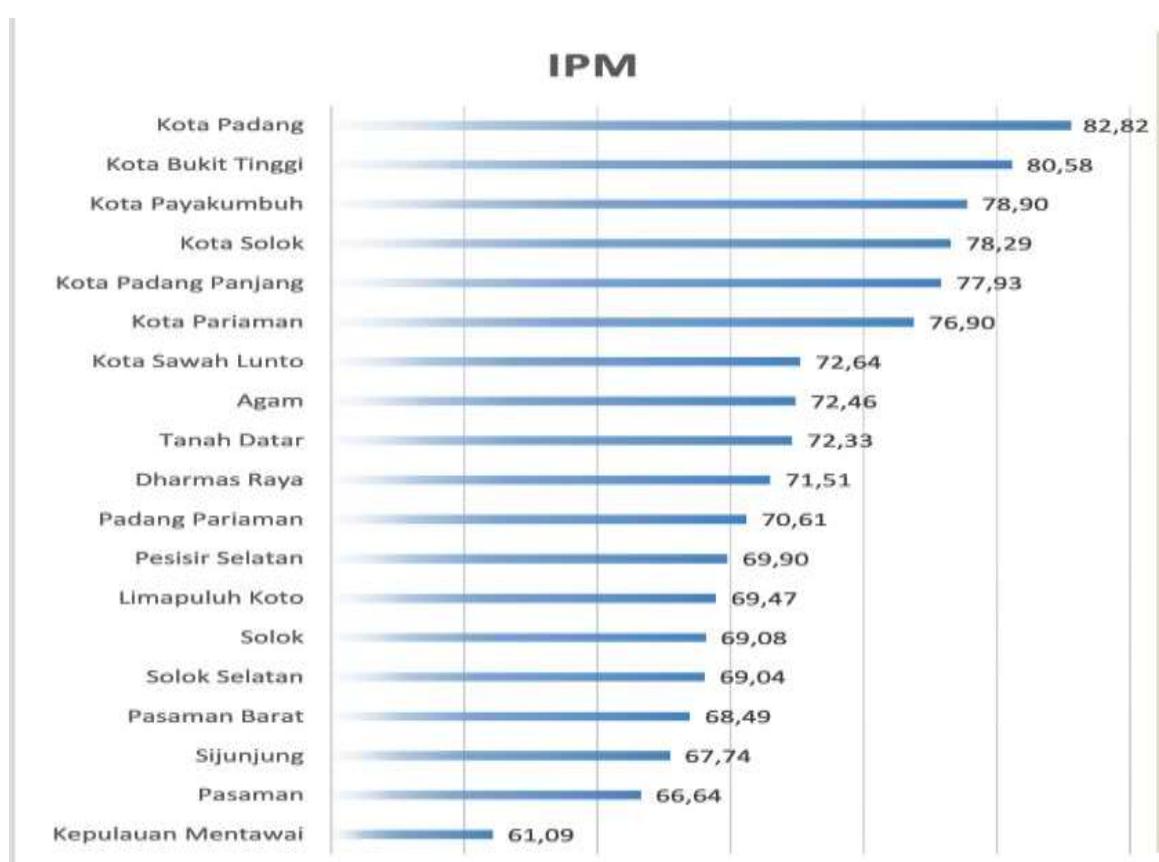


Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.9 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (poin)**

Sementara itu, dari sisi aspek daya saing terkait dengan pembangunan manusia tahun 2020, Kabupaten Sijunjung masih berada pada rangking tiga terbawah terhadap Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, hal ini terlihat pada gambar dibawah ini.





Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

**Gambar 2.10 Grafik Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat 2020 (poin)**

Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung ditingkat provinsi tidak terlepas dari capaian kinerja komponen pembentukan IPM. Perkembangan dan posisi relatif masing-masing komponen IPM Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, diuraikan sebagai berikut :

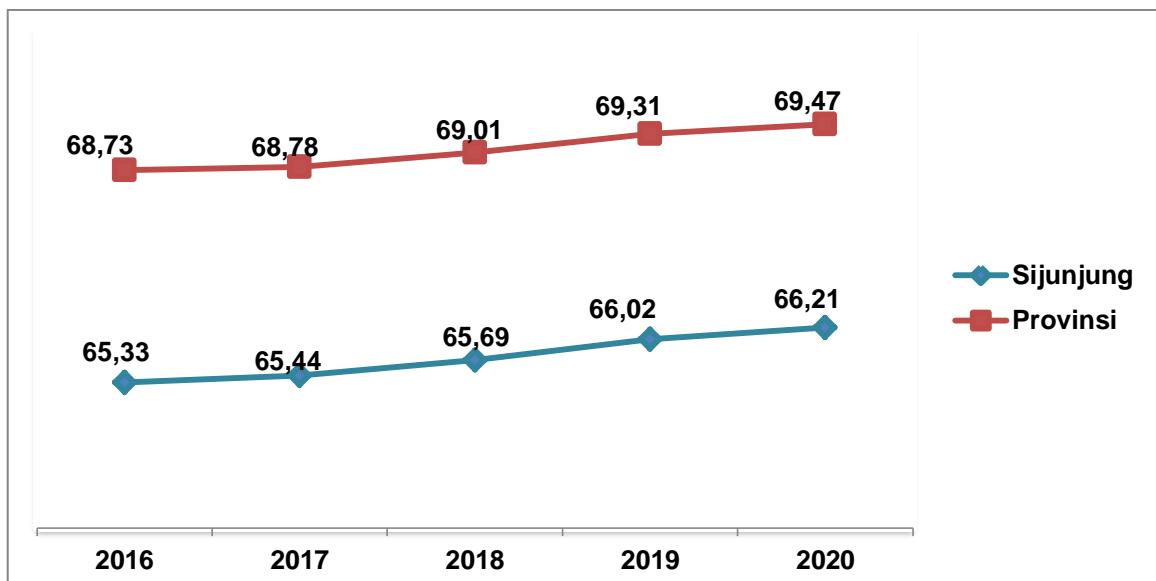
1. Usia Harapan Hidup

Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun pertumbuhannya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016 sebesar 65,33 tahun dan pada di tahun 2020 tercapai sebesar 66,21 tahun. Kondisi ini, mencerminkan Kabupaten Sijunjung belum optimal dalam upaya menciptakan perilaku hidup sehat dan bersih serta kualitas layanan kesehatan masyarakat. Sehingga peningkatan usia harapan hidup relatif rendah pertumbuhannya selama lima tahun terakhir.

Disisi lain, meningkatnya pertumbuhan usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun terakhir belum merubah posisi ditingkat Provinsi



Sumatera Barat karena masih berada dibawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain dalam upaya memberikan harapan lama hidup bagi masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Sijunjung dan posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

**Gambar 2.11 Grafik Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (tahun)**

## 2. Harapan Lama Sekolah

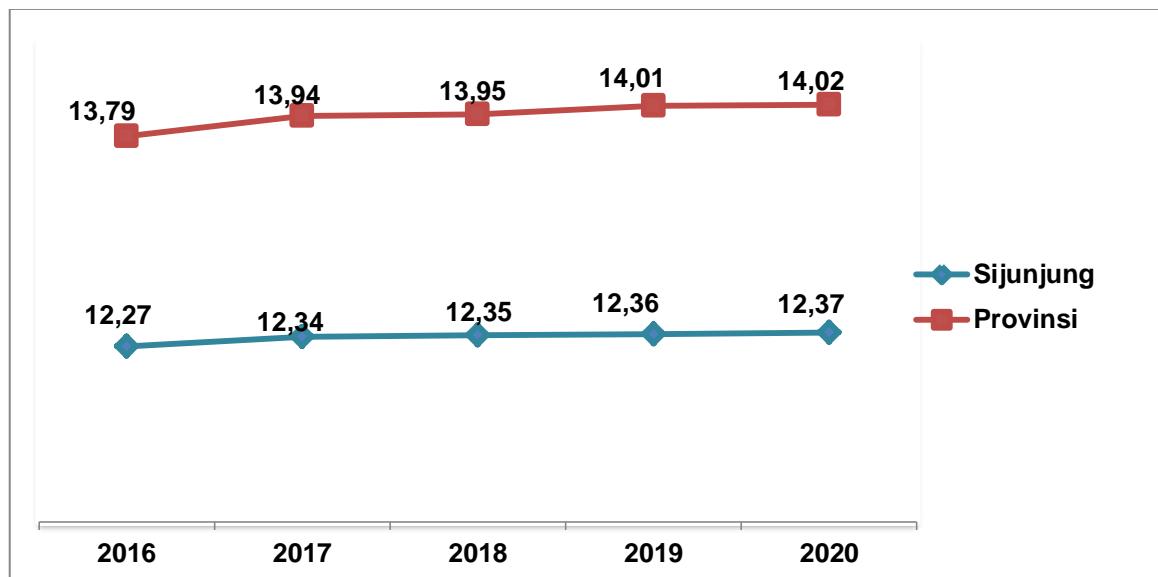
Harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menentukan angka IPM dengan formula baru. Formula ini digunakan untuk melihat seberapa jauh harapan anak yang baru lahir untuk memperoleh kesempatan pendidikan secara formal disuatu negara/wilayah.

Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung mengalami pertumbuhan cukup rendah. Hal ini terlihat dari capaian harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016 sebesar 12,27 tahun dan pada tahun 2020 tercapai sebesar 12,37 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Kabupaten Sijunjung hanya bersekolah sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kondisi ini, mencerminkan kesempatan bayi yang baru lahir di Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh kesempatan pendidikan formal hanya sampai SLTA.

Rendahnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 belum berpengaruh terhadap posisi ditingkat Provinsi Sumatera Barat karena masih berada dibawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan



masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain dalam upaya memberikan harapan bagi yang baru lahir untuk memperoleh kesempatan jenjang pendidikan formal. Perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Sijunjung dan posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

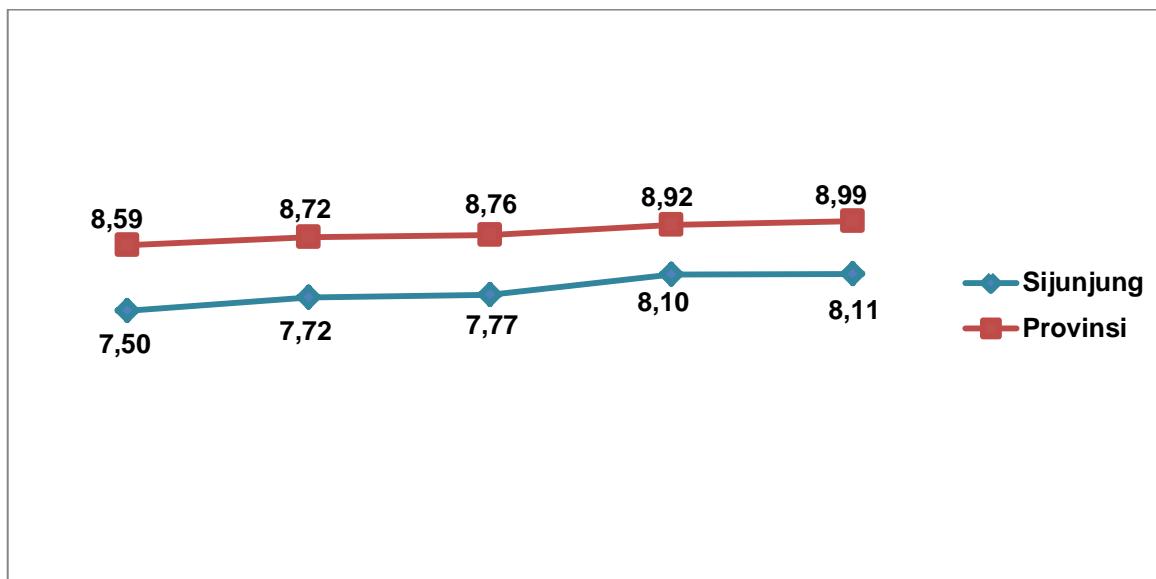
**Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 (tahun)**

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 tercapai 8,11 tahun atau setara dengan kelas 8 SLTP. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung belum menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, juga belum menunjukkan capaian sesuai dengan target SDG's. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak-anak usia sekolah lebih tertarik untuk bekerja di sektor perkebunan dan sektor lainnya. Kondisi tersebut, tentu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena akan menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung di masa mendatang.

Masih rendahnya rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 berimplikasi terhadap posisi ditingkat Provinsi Sumatera Barat karena masih berada dibawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain terhadap kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung dan posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.





Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

**Gambar 2.13 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (tahun)**

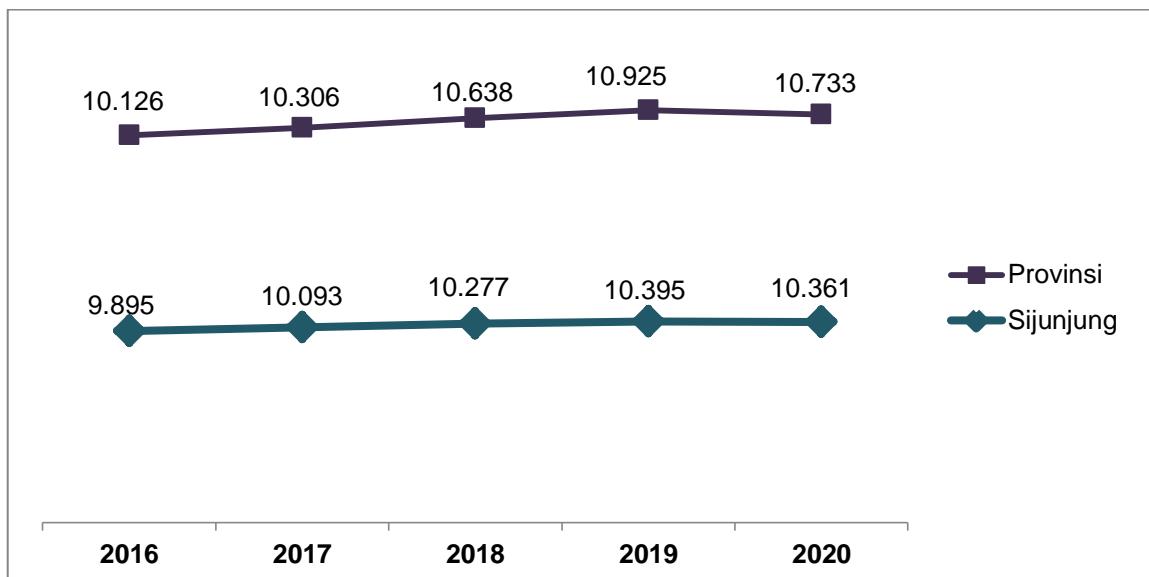
#### 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur kemampuan paritas daya beli masyarakat yang dihitung berdasarkan Produk Nasional Bruto (PNB) yang disesuaikan dengan 96 komponen pengeluaran masyarakat. Berdasarkan perhitungan tersebut, pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2019 cenderung bertumbuh. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi global dan nasional akibat adanya pandemi covid-19. Kondisi ini, mencerminkan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung mengalami pelemahan, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain, hal ini ditandai dengan posisinya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sijunjung dimasa yang akan datang, maka arah dan kebijakan pembangunan lebih difokuskan kepada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai tolak ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Sijunjung dan posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik dibawah ini.





Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

**Gambar 2.14 Grafik Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rp)**

### 2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional saat ini adalah *stunting*. Secara terminology *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya. Penurunan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. *Stunting* sangat mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga tingkat kecerdasan anak menjadi tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas anak di masa depan. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak *stunting* beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

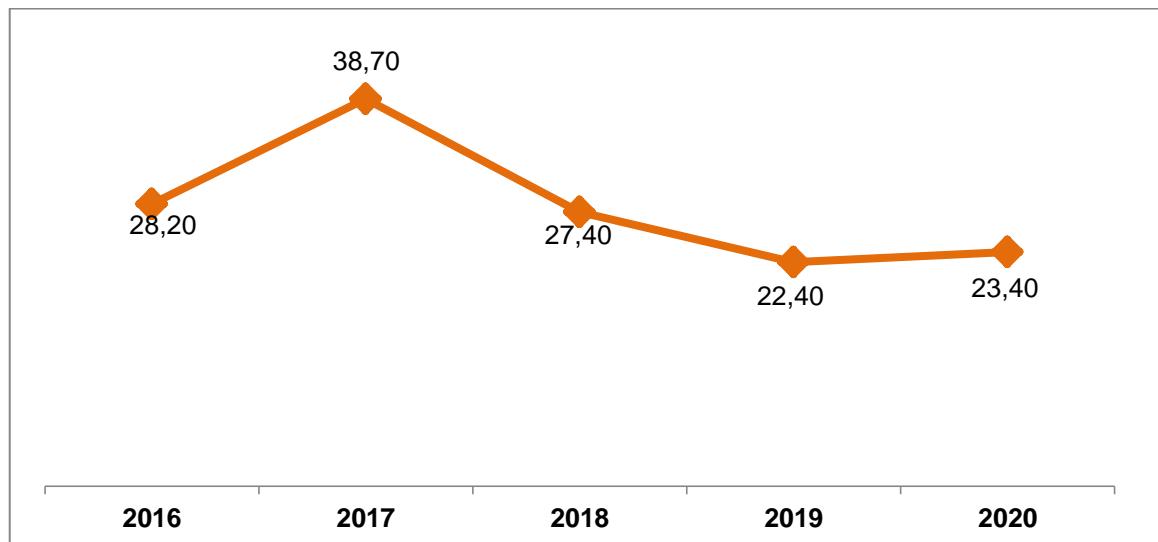
Perkembangan prevalensi *stunting* di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angka prevalensi balita *stunting* sebesar 28,2% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 38,7%. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 cenderung turun, sementara itu tahun 2020 angka prevalensi balita *stunting* cenderung meningkat dengan angka capaian 23,4%. Sebagai program prioritas nasional, penurunan angka *stunting* ini harus terus ditekan hingga pada tahun 2024 mencapai 14%.

Penurunan *stunting* dititik beratkan penanganan penyebab masalah gizi,



terutama kepada akses layanan kesehatan bagi Balita dan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.

Gambaran perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung , 2021

**Gambar 2.15 Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 (%)**

### **2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender saat ini telah menjadi isu global yang telah menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDG's). Dalam SDG's menyebutkan tujuan ke-5 adalah, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial gender.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indeks tersebut, mempunyai hubungan yang erat dengan IPM. Dalam pengukuran IPG lebih difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level pembangunan.

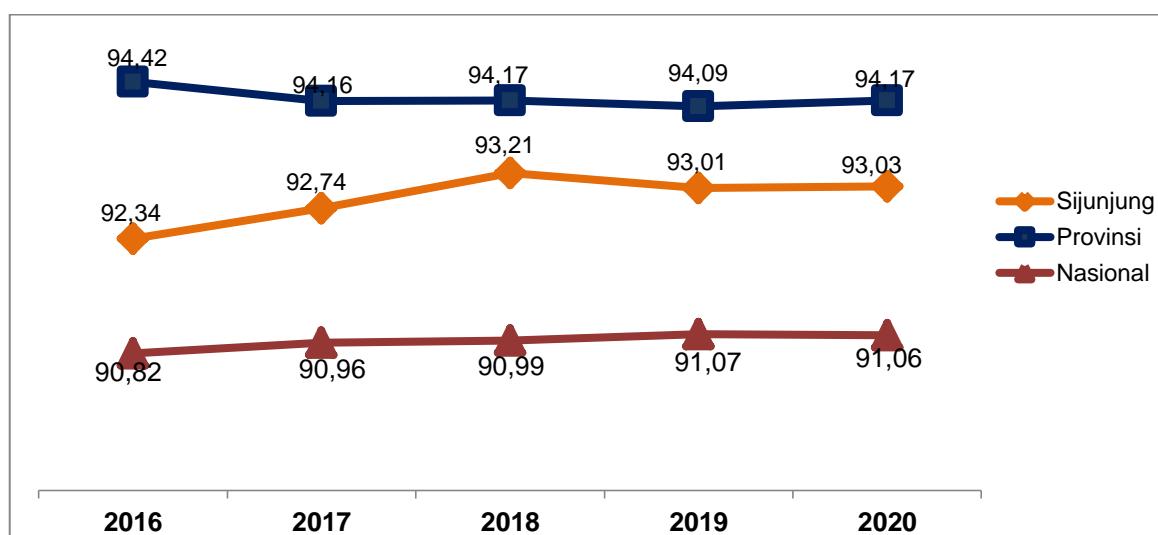


IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati angka 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen dan dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, IDG menjadi alat ukur untuk melihat kesetaraan gender disuatu Negara/wilayah. Jika IDG mendekati angka 100, maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam proses pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, pertumbuhan IPG Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2019 cenderung melambat. Pada tahun 2016 IPG Kabupaten Sijunjung sebesar 92,34 dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 93,03. Kondisi ini, mencerminkan kualitas perempuan di Kabupaten Sijunjung belum sejajar dengan kaum laki-laki dan diikuti pencapaiannya masih dibawah target SDG's.

Disisi lain, meningkatnya IPG Kabupaten Sijunjung dalam periode tersebut, belum sejajar dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, terlihat dari posisi relatif IPG Kabupaten Sijunjung masih berada di bawah rata-rata provinsi. Disisi lain, posisi IPG Kabupaten Sijunjung masih berada diatas rata-rata nasional, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



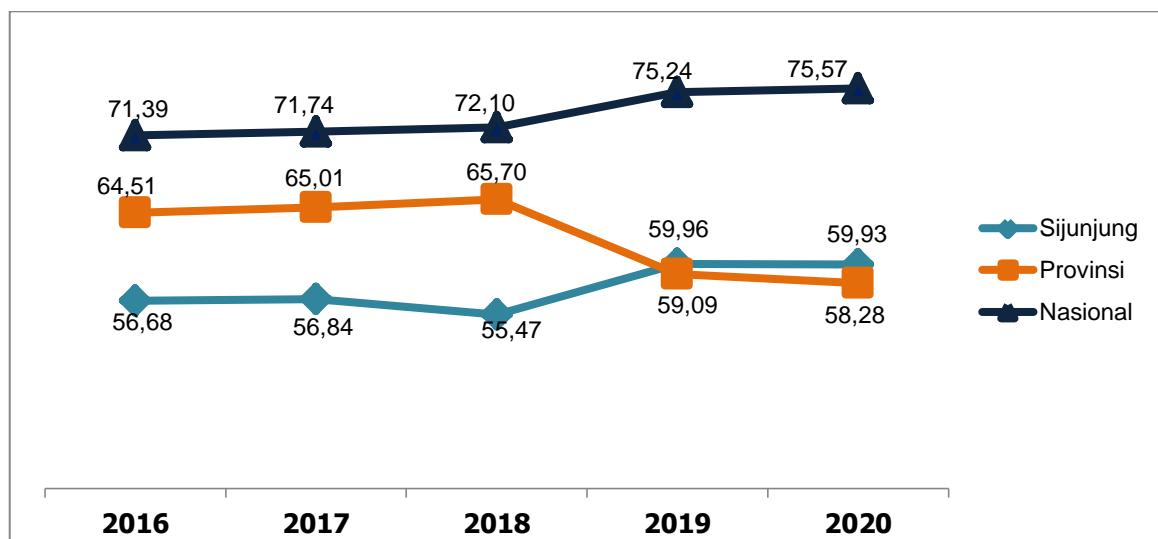
Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.16 Grafik Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

Sementara itu, perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan cenderung melambat. Namun pada tahun 2019 IDG



Kabupaten Sijunjung meningkatkan secara signifikan sebesar 59,93 dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 55,47. Namun pada tahun 2020 capaian IDG sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Disisi lain, meningkatnya pertumbuhan IDG Kabupaten Sijunjung belum diikuti peningkatan posisi relatifnya dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan kesetaraan gender Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan daerah lain dan capaiannya dibawah target SDG's. Disisi lain, posisi IDG Kabupaten Sijunjung 2 (dua) tahun terakhir berada diatas rata-rata provinsi. Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung dan posisi relatifnya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS, 2021

**Gambar 2.17 Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

### **2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga**

Fokus seni, budaya dan olahraga dalam aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah upaya untuk membentuk karakter masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Sehingga pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sijunjung ditujukan untuk melestarikan seni budaya dan mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif. budaya global. Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum menujukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan rasio jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk masih stagnan di rasio 3,08 : 10.000 penduduk, walaupun adanya peningkatan jumlah grup kesenian dari tahun ke tahun. Selain itu, Kabupaten



Sijunjung belum memiliki gedung kesenian yang memadai, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan.

Disisi lain, dalam upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Sijunjung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti; kerja keras dan gotong royong masih terjaga, namun perlu ditingkatkan kualitas. Hal ini ditandai kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar, hal tersebut menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan dari disisi pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan olah raga dengan berbagai cabang olah raga yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat, disamping juga untuk pengembangan prestasi. Namun disisi lain, ketersediaan klub dan gedung olah raga terhadap jumlah penduduk relatif masih kecil. Hal ini ditandai belum signifikannya kenaikan rasio klub dan gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk. Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19.**

**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2,70	2,74	2,96	2,99	3,08
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	1,08	1,15	1,13	1,15	1,34
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,54	0,57	0,56	0,60	0,59

*Sumber; Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, 2021 (data diolah)*

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum merupakan media dalam menggerakkan sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini secara substansi menggambarkan capaian indikator kinerja dari setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 tahun 2020, terdiri dari : 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) urusan pilihan, 4) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5) unsur penunjang urusan pemerintahan, 6) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 7) unsur kewilayahan dan 8) unsur pemerintahan umum.



### **2.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Melihat kemajuan kualitas pelayanan di urusan pendidikan dapat diukur melalui 2 (dua) aspek, yaitu; a) ketersediaan pelayanan pendidikan dan b) keterjangkauan pelayanan pendidikan. Aspek ketersedian pelayanan pendidikan diukur melalui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah dan rasio guru terhadap siswa serta persentase kondisi bangunan sekolah baik. Sedangkan aspek keterjangkauan pelayanan pendidikan pencapaiannya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan, proporsi murid menamatkan sekolah dan rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV setiap jenjang pendidikan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan konkuren bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), secara penuh urusan ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi terhitung mulai tahun 2017. Disisi lain, yang bersekolah di SLTA tersebut, merupakan penduduk Kabupaten/Kota itu sendiri. Artinya, baik atau buruknya kondisi dan kinerja jenjang pendidikan SLTA Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas mengusulkan ke Pemerintah Provinsi, sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki kondisi dan kinerjanya.

Perkembangan capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2016-2020 berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari sisi aspek ketersediaan pelayanan pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja cenderung fluktuatif, terutama, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

Sedangkan dari aspek keterjangkauan pelayanan pendidikan lima tahun terakhir berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan pencapaian APK, APM, angka kelulusan, proporsi murid menamatkan sekolah dan rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV setiap jenjang pendidikan cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan keterjangkauan layanan pendidikan setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Selain itu, angka melek huruf juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dari capaian 99,30% pada tahun 2016, sedikit meningkat pada tahun 2020 sebesar 99,51%.

Pada sisi lain, rata-rata angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 0,06%. Jika dibandingkan dengan dengan



angka putus sekolah SD/MI tingkat Provinsi Sumatera Barat, angka putus sekolah SD/MI di kabupaten Sijunjung masih sedikit berada dibawah angka putus sekolah SD se Provinsi Sumatera Barat. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bersekolah di SD dan MI yang berkisar rata-rata sebesar 30.000,- orang/tahun, berarti terdapat angka putus sekolah SD/MI sebesar 18 orang /tahun. Angka ini masih cukup besar, dalam jangka waktu lima tahun saja terdapat 90 orang penduduk kabupaten Sijunjung yang tidak menamatkan pendidikan jenjang SD/MI.

Sedangkan, angka putus sekolah jenjang pendidikan SLTP cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah pada tahun 2020 masih diangka yang relatif tinggi sebesar 0,40%. Relatif tingginya, angka putus sekolah setiap jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP disebabkan, antara lain; a) latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, b) lemahnya ekonomi keluarga, c) kurangnya minat anak untuk bersekolah, d) kondisi lingkungan tempat tinggal anak /lingkungan masyarakat dan e) pandangan orang tua/ masyarakat terhadap pendidikan/motivasi bersekolah rendah.

Cenderung menurunnya angka putus sekolah Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir, belum berimplikasi terhadap angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang pertumbuhan relatif melambat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan disektor pendidikan kedepannya perlu ada pendekatan dan strategi dalam mengurangi angka putus sekolah. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	a) APK	76,24	80,02	45,62	54,87	48,19
	b) Rasio guru terhadap murid	n.a	n.a	9	10	9
2	c) Rasio sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah	n.a	43	32	33	83
	Pendidikan Sekolah Dasar/MI					
	a) APK	113,79	110,73	110,81	113,77	114,81
	b) APM	99,65	99,69	99,83	99,84	99,87
	c) Angka Putus Sekolah	0,1	0,2	0,1	0,07	0,06
	d) Angka Kelulusan	99,79	100	98,95	100,14	99,88
	e) Persentase kondisi bangunan sekolah baik	83,37	97,07	96,34	79,86	91,47
	f) Rasio sekolah thdp jumlah usia anak sekolah	130	135	149	132	122
	g) Rasio guru terhadap murid	14	14	15	15	16
	h) Proporsi murid menamatkan sekolah	98,80	98,60	99,00	100	99,88
	i) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	83,98	86,70	89,98	92,61	94,85



No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
3	Pendidikan SLTP/MTs					
	a) APK	98,48	99,98	101,12	101,42	109,83
	b) APM	79,99	81,90	82,25	85,02	84,66
	c) Angka Putus Sekolah	0,7	1,3	1,0	0,35	0,40
	d) Angka Kelulusan	99,97	94,14	100	92,55	99,49
	e) Persentase kondisi bangunan sekolah baik	87,48	95,04	99,01	94,35	88,01
	f) Rasio sekolah thdp jumlah usia anak Sekolah	174	192	190	197	174
	g) Rasio guru terhadap murid	10	11	11	11	11
	h) Proporsi murid menamatkan sekolah	99,17	97,67	98,83	99,37	99,49
	i) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	83,35	85,04	92,85	93,32	97,33
4	Angka Melek Huruf	99,30	99,40	99,45	99,06	99,51

Sumber; Dinas Pendidikan & Kebudayaan, 2021

### 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan lima tahun terakhir (2016-2020) yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan cukup tingginya angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian ibu dan angka kejadian malaria tingkat kematian karena tuberculosis dari tahun ke tahun. Selain itu, angka prevalensi balita *stunting* cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya kesehatan dalam menjangkau layanan gizi Balita. Sehingga capaian kinerja urusan kesehatan, belum berimplikasi positif terhadap peningkatan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup cenderung berfluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu terakhir. Hal ini ditandai tahun 2016 capain angka kematian bayi sebesar 17 per 1000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 angka kematian bayi mencapai 15,3 per 1000 kelahiran hidup. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya layanan kesehatan bagi ibu hamil, terutama di daerah pelosok.

Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan angka kematian per 1000 kelahiran hidup yang terjadi dari bayi baru lahir sampai usia 28 hari. Angka Kematian Neonatal sangat tergantung dari pelayanan kesehatan neonatal yang diterima oleh neonatus, yaitu sedikitnya 3 (tiga) kali kunjungan yakni kunjungan Neonatal 1 (KN1) pada 6 (enam) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam setelah lahir, kunjungan neonatal II (KN2) pada hari ke 3 (tiga) sampai hari ke 7 (tujuh), dan kunjungan neonatal III (KN3) pada hari ke 8 (delapan) sampai hari ke 28 (dua puluh delapan). Pendekatan yang dilakukan adalah Manajemen



Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI Ekslusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 bila belum diberikan.

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup tahun 2016 - 2020 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2016 Angka Kematian Neonatal adalah 8 per 1000 kehiran hidup dengan jumlah nonatal yang meninggal sebanyak 35 orang. Tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 12,5% kematian neonatal, yaitu 9 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah neonatal meinggal sebanyak 39 orang. Tahun 2018 terjadi penurunan kematian neonatal sebesar 24,5%, yaitu 6,69 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah neonatal meninggal sebanyak 30 orang. Tahun 2019 kembali terjadi peningkatan Angka Kematian Neonatal sebesar 12% di angka 7,6 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah neonatal meninggal sebanyak 32 orang. Tahun 2020 kembali terjadi peningkatan Angka Kematian Neonatal sebesar 2,6% di angka 7,8 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah neonatal meninggal sebanyak 32 orang. Cenderung meningkatnya Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi ini sangat terkait dengan tingginya kasus bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan rendahnya cakupan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM).

Dari sisi *stunting*, prevalensi *stunting* Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sebesar 23,40%. Capaian prevalensi *stunting* Kabupaten Sijunjung ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20% dan rendah dari capaian nasional sebesar 27,67%. Selain itu, dari sisi cakupan gizi bahwa capaian prevalensi gizi buruk (berat badan/tinggi badan) di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 mencapai 15,5%. Capaian ini menurun sedikit dibandingkan dengan capaian tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akses ke pelayanan kesehatan masih sulit pada beberapa wilayah dikarenakan kondisi geografis, masih rendahnya pengetahuan Ibu yang memiliki balita terkait dengan asupan gizi yang harus dipenuhi anak terutama pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Cukup tingginya angka prevalensi *stunting* dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Sijunjung saat ini, berimplikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Sijunjung tahun 2016 - 2020 memiliki tren yang hampir sama setiap tahunnya. Cakupan pelayanan bayi paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 81,50% dan cakupan pelayanan bayi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 88,50%. Untuk tahun 2020 persentase bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 86,70%.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni mengurangi rasio kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016 adalah 95 orang per 100.000 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2017 dengan angka 141 orang per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, tahun 2018 terjadi penurunan angka kematian ibu dengan angka 113 orang per 100.000 kelahiran hidup dan meningkat pada tahun 2019 dengan angka 143 orang per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 berada pada angka 170 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah ibu meninggal sebanyak 7 orang. Jika dibandingkan dengan sasaran SDG's Angka Kematian Ibu Kabupaten Sijunjung tahun 2020 masih jauh diatas dari target. Kondisi ini disebakan karena resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan akibat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan keadaan kesehatan menjelang kehamilan, seperti kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta penggunaan dan tersedianya fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri.

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada ibu setelah melahirkan minimal tiga kali. Cakupan pelayanan ibu nifas di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016-2019 memiliki tren yang hampir sama yaitu pada kisaran 70-an, namun pada tahun 2020 cakupan pelayanan meningkat sampai ke angka 93,25%. Selain pelayanan nifas, penanganan komplikasi kebidanan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu. Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapat pelayanan defentif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten di tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Angka cakupan komplikasi kebidanan menunjukkan bagaimana akses masyarakat terhadap pelayanan darurat berkualitas dalam waktu cepat dan bagaimana kesiapan pelayanan kegawat-daruratan di suatu wilayah.

Angka cakupan komplikasi kebidanan paling rendah itu terjadi pada tahun 2018, dimana hanya 75,21% komplikasi kebidanan yang ditangani. Angka ini sangat jauh turun dari tahun sebelumnya yaitu 98,69% pada tahun 2016 dan 97,40% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan kembali naik angkanya menjadi 93,05%. Cenderung fluktuatif angka cakupan komplikasi kebidanan disebabkan belum optimalnya penerapan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sehingga dalam penanganan komplikasi kebidanan untuk ibu hamil/melahirkan diluar sasaran ibu hamil resti yang telah ditetapkan sebelumnya.



Sementara itu, cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal yang ditandai relatif kecilnya rasio dan angka cakupan layanan kesehatan. Belum optimalnya pencapaian kinerja cakupan layanan dasar dan rujukan urusan kesehatan dalam kurun waktu lima terakhir karena capaian kinerjanya belum sesuai dengan target SPM, rasio tenaga Medis per satuan penduduk, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Nagari/Desa *Universal Child Immunization* (UCI) dan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak serta angka kejadian malaria.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	17	19	15,84	6,2	15,3
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8	9	6,79	7,6	7,8
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	95	141	113	143	170
4	Prevalansi balita gizi buruk	14,5	18,9	14,65	16,06	15,5
5	Prevalansi balita stunting	28,20	38,70	27,40	22,40	23,40
6	Rasio posyandu per satuan balita	1,19	1,17	1,19	1,2	1,2
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : 3.482	1 : 3.772	1 : 3.772	1 : 3.829	1 : 3.885
8	Rasio dokter per satuan penduduk	25,63	21,73	9,4	9	10
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	6,19	6,08	6	5	5
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	105,17	93,87	103,93	110	101
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	126,38	98,22	106,9	103	120
12	Cakupan Nagari/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	98,69	97,40	75,21	93,05	127,18
13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	74,60	74,62	78,39	74,62	93,32
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	76,76	60,62	71,38	56,91	62
15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100	100	100	100	100
16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	75,91	75,84	73,75	76,19	87,74
17	Cakupan penemuan dan penganganan penderita penyakit DBD	72,47	127,77	112,06	125	88
18	Angka kejadian Malaria	3,98	1,74	4,7	2,5	2,9
19	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100
20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	2	4	4	2	1



No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
21	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	87,89	88,50	81,50	84,59	86,70
22	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	33,02	40,71	49,98	39,80	51,09
23	Cakupan Nagari/Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	71,58	74,28	77,33	73,98	93,25

Sumber; Dinas Kesehatan & RSUD, 2021

### 2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2016-2020 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Kecepatan > 40 Km/Jam) 66,54 % pada tahun 2020 dan didukung 0,79% jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air.

Selain itu, dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan (padi) belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan yang ditandai masih rendahnya rasio jaringan irigasi terhadap luas sawah yang ditangani Dinas PUPR sebesar 58,58% pada tahun 2019, sedangkan data rasio pada tahun 2020 adalah sebesar 41,87 %. Terjadinya penurunan rasio irigasi ini bukan di sebabkan oleh banyaknya irigasi yang rusak/tidak berfungsi tetapi disebabkan adanya pendataan ulang luasan sawah beririgasi dengan memakai peta citra satelit oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung. Namun dalam lima tahun belakangan tidak ada pembangunan irigasi yang baru, yang ada hanya penambahan jaringan dan bendungan suplesi sehingga terjadi peningkatan rasio jaringan irigasi.

Selain itu, belum terpenuhi akses air bersih dan akses sanitasi layak bagi masyarakat sesuai dengan target SPM dan SDG's, dimana hingga tahun 2020 tercapai akses air bersih sebesar 69,50% dan akses sanitasi layak sebesar 71,37%. Belum optimalnya kinerja bidang pekerjaan umum dalam kurun lima tahun terakhir disebabkan karena kondisi topografi daerah yang berbukit-bukit dan geologi daerah yang rawan bencana longsor. Selain itu, juga dipengaruhi oleh relatif sempitnya ruang fiskal pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi daerah dalam memaju laju pertumbuhan pembangunan kedepannya.

Sementara itu, capaian kinerja urusan penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Tahun 2011-2031 sedang dalam proses revisi, untuk persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW berdasarkan rekomendasi yang di keluarkan sebesar 59,96%, hal ini disebabkan karena terjadi perubahan pemanfaatan pola ruang sebanyak 40,09 %, namun masih dalam peruntukan lahan dalam kawasan budidaya. Perubahan pemanfaatan pola ruang tersebut, akan di sesuaikan dengan revisi RTRW saat ini sedang dilakukan proses penyusunan.

Sedangkan disektor penataan bangunan, salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan), maka seluruh kegiatan pembangunan bangunan baik rumah, toko, bangunan pemerintah dan swasta harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Angka keseluruhan Ratio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan hingga tahun 2020 masih 9,10 %. Capaian kinerja mencerminkan masih rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam mengurus IMB. Oleh karena ini tantangan kedepan supaya seluruh bangunan yang akan dan sedang dibangun perlu diawasi oleh pihak-pihak terkait dan bagi yang melanggar diberikan sanksi yang tegas, sehingga ada efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar dan menjadi perhatian bagi yang lain untuk yang datang.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	24,50	32,46	34,86	38,94	66,54
2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,62	0,62	0,79	0,79	0,79
3	Rasio Jaringan Irigasi	54,23	52,32	59,47	58,58	41,87
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,46	57,34	58,6	60,73	60,90
5	Persentase penduduk berakses air bersih	67,70	68,78	69,40	69,10	69,50
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi yang layak	67,73	69,56	71,60	71,10	71,37
7	Persentase luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	n.a	2,30	2,30	2,30	2,70
8	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	7,99	8,34	8,80	9,10	9,10
9	Persentase ketaatan terhadap RTRW	n.a	n.a	n.a	n.a	59,96

Sumber; Dinas PUPR dan Dinas Perkim & Lingkungan Hidup, 2021



#### 2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2016-2020 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai capaian persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga hingga tahun 2020 sebesar 77, 03% dan capaian persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana sebesar 0%.

Belum optimalnya capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dalam kurun waktu lima tahun terakhir disebabkan karena keterbatasan sumber daya daerah dalam mencapai target SPM. Disamping itu, juga dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat yang saat ini cenderung menurun pendapatannya. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan lima tahun kedepan. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.23.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	n.a	63,19	64,67	62,41	77,03
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	n.a	96,77	96,92	98,47	100,00
3	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perkim & Lingkungan Hidup, 2021

#### 2.3.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2016-2020 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing indikator masih dibawah target SPM, kecuali indikator persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang cenderung meningkat.

Sedangkan indikator SPM dibidang penanggulangan bencana belum dapat diukur karena belum termasuk dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Namun seiring berjalan waktu karena kebencanaan merupakan isu nasional, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis



Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga kebencanaan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat per 1.000 penduduk	0,79	0,80	0,83	0,83	0,71
2	Persentase Penegakan Perda	99,50	98,16	99,80	99,90	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	87	169	84	84	100
4	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) Damkar	20	20	20	18	15
5	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	100	100	3,23	0
6	Respon cepat darurat bencana	n.a	n.a	n.a	n.a	100
7	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber; Dinas Satpol PP & Damkar dan BPBD, 2021

### 2.3.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial Tahun 2016-2020 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai pada tahun 2020 sebesar 52,73% dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tercapai sebesar 7,87%. Hal ini disebabkan karena cenderung meningkatnya jumlah PPKS akibat melemahnya ekonomi masyarakat dan diikuti keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.25.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	53,77	56,7	61,88	54,38	52,73
2	Persentase PPKS yang tertangani	53,77	56,7	61,88	54,38	52,73
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	n.a	9,32	8,51	7,87	7,87

Sumber; Dinas Sosial PPr & PA, 2021

### **2.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tahun 2016-2020 secara umum belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai indikator kinerja persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pencari kerja yang akan bekerja diluar kabupaten. Selain itu, pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan pada umumnya tidak melapor, sehingga persentase persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan masih rendah. Disisi lain, capaian indikator tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan indikator tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan karena semakin banyak peserta pelatihan yang terserap untuk mengikuti pelatihan.

Belum optimalnya capaian kinerja indikator persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan indikator tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Sehingga kedepannya dibutuhkan arah dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi tersebut, dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.26.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	8,83	48,74	54,43	36,48	36,94
2	Persentase Perusahaan menerapkan K3 sesuai standar	n.a	n.a	n.a	100	100
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	81,81	88,88	91,42	90,40	90,18

Sumber; Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi, 2021

#### 2.2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya pemberdayaan perempuan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah relatif rendah sebesar 64%, sedangkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD masih rendah tercapai sebesar 13%. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih konservatif terhadap perubahan zaman. Kondisi ini menunjukkan kesetaraan gender di Kabupaten Sijunjung belum tercapai sesuai dengan target SDG's, sehingga akan berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan kedepannya. Selain itu, jumlah tenaga kerja dibawah umur termasuk cukup tinggi, hal ini ditandai persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebesar 0,3%. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung dari sisi memperoleh kesempatan pendidikan. Disamping itu, persentase anak korban kekerasan yang ditangani selama lima tahun terakhir tercapai 100% sepanjang adanya laporan dari masyarakat.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.27.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n.a	64	64	64	64
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	10	10	10	13	13
3	Rasio KDRT	n.a	0,001	0,001	0,001	0,017
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	n.a	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	n.a	100	100	100	100

Sumber; Dinas Sosial PPr & PA, 2021

#### 2.2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat belum optimalnya capaian indikator persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk, Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) dan persentase penanganan daerah rawan pangan hingga tahun 2020 sesuai target SDG's. Dari ke-3 indikator tersebut, hanya Skor Pola Pangan Harapan yang menjadi indikator kinerja dalam RPJMD 2016-2021, namun belum mencapai hasil yang optimal.

Capaian SPPH tahun 2020 memperoleh nilai 80,00, kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman sehingga perlu adanya upaya yang lebih keras lagi untuk pencapaian skor pola pangan yang mendekati nilai ideal. Sedangkan persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan utama, kondisi pada 4 tahun terakhir menunjukan nilai yang fluktuatif namun masih pada posisi surplus. Sedangkan untuk indikator persentase penanganan daerah rawan pangan, pencapaiannya masih jauh dari kondisi idealnya, kondisi ini sangat tergantung dari kemampuan/kondisi fiskal daerah dan hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merumuskan arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.28.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk	n.a	291,23	310,75	282,10	295,87
2	Skor Pola Pangan Harapan	73,80	75,30	78,20	79,30	80,00
3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	35,71	44,44	40,00	7,69	7,69

Sumber; Dinas Pangan & Perikanan, 2021

#### 2.2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pertanahan Tahun 2017-2020, sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian kasus tanah negara berupa pemenuhan tanah untuk kepentingan publik mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan hanya 1 (satu) persil tanah untuk proses ganti rugi, sesuai dengan target pada RPJMD sebelumnya. Untuk lebih optimalnya dalam pencapaian sasaran pembangunan maka perlu penambahan jumlah persil (unit) tanah yang dibebaskan dengan porsi anggaran yang lebih besar.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pertanahan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	n.a	50	100	100	100

Sumber; Dinas PUPR, 2021

#### 2.2.4.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam tahun 2016-2020 dengan ketersediaan data yang ada menunjukkan perkembangan yang belum sesuai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup hingga tahun 2020 senilai 69,06. Hal ini disebabkan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan tiga tahun terakhir cenderung berada dikategori rendah. Kondisi ini disebabkan karena adanya penambangan emas yang terjadi disekitar wilayah Dairan Sungai (DAS), baik berada di Kabupaten Sijunjung, maupun berada di luar Kabupaten Sijunjung dan belum terkelolanya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.



Sedangkan capaian indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2018-2020 cenderung berfluktuasi, namun masih kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh adanya pembakaran hutan yang terjadi di wilayah sekitaran luar provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu membawa efek yang cukup signifikan terhadap Provinsi Sumatera Barat dimana sumbar berada diantara 3 provinsi tetangga, sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas udara yang ada di Kabupaten Sijunjung. Belum tersedianya data dari tahun 2015-2017, disebabkan karena Perangkat Daerah terkait memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara baru tersedia pada tahun 2018.

Sementara itu, perkembangan capaian indikator persentase jumlah sampah yang tertangani periode 2019-2020 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sesuai dengan kondisi timbulan sampah sebesar 34.989,67 ton/tahun. Namun disisi lain persentase pengurangan sampah meningkat secara signifikan pada tahun 2020 tercapai sebesar 30,22%. Kondisi ini disebabkan meningkatnya pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara *recycling*, sehingga bernilai ekonomis.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.30.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	n.a	67,83	66,45	69,06
2	Indeks Kualitas Air	n.a	n.a	47,43	48,13	50,00
3	Indeks Kualitas Udara	n.a	n.a	91,25	86,93	89,05
4	Indeks Tutupan lahan	n.a	n.a	65,56	64,82	64,46
5	Persentase penanganan sampah	n.a	n.a	n.a	19,24	15,65
6	Persentase pengurangan sampah	n.a	n.a	n.a	5,35	30,22

Sumber; Dinas Perkim & Lingkungan Hidup, 2021

#### 2.2.4.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk baru tercapai pada tahun 2020 sebesar 92,93% dan diikuti cakupan akta kelahiran sebesar 93,48%. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.



Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang diperlukan pelayanan yang tepat sasaran dan inovasi-inovasi dalam pelayanan.

Perkembangan capaian urusan pemerintahan bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	89,71	94,10	97,12	93,34	92,93
2	Rasio bayi berakte kelahiran	76,41	90,75	88,71	86,04	93,48

Sumber; Dinas Kependudukan & Capil, 2021

#### 2.2.4.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator yang digunakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam membangun nagari/desa cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengerakkan roda pembangunan sangat kuat. Sehingga berimplikasi cenderung meningkatnya capaian indeks desa membangun dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 tercapai senilai 0,7024. Potensi tersebut, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan nagari/desa yang baik	65	75	85	90	95
2	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif	90	100	100	100	100
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100
6	Indeks Desa Membangun	n.a	n.a	n.a	0,6985	0,7024

Sumber; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, 2021



#### 2.2.4.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari angka *Total Fertility Rate* (TFR) cenderung meningkat dengan jumlah anak per keluarga sebanyak 2 orang. Rasio akseptor KB pada tahun 2020 mencapai angka 72,46% dengan cakupan PUS *Unmetneed* berhasil diturunkan pada angka 12,03% dan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi berhasil ditingkatkan ke angka 38,04%.

Sementara itu, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terhadap total keluarga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 20,90%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 62,45%. Kondisi ini menunjukkan pelaksaaan program pembangunan keluarga cukup optimal. Namun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas programnya dalam upaya penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.33.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,8	2,9	2,5	2,68	2,75
2	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	n.a	50	50	50	50
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,69	2,00	2,00	2,02	2
4	Ratio Akseptor KB	78,94	70,57	72,56	69,09	70,82
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78,94	70,57	72,56	69,09	70,53
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	7,73	13,50	10,42	14,31	12,03
7	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	21,83	23,64	24,32	26,24	38,04
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	n.a	20	20	20	20
9	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	n.a	58,75	58,74	69,41	81,48



No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
10	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap nagari/desa	4,79	4,82	4,71	2,98	1
11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terhadap total keluarga	62,45	19,84	19,84	20,90	20,90
12	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD.	n.a	0,51	0,84	0,87	0,64

Sumber; Dinas Pengendalian Penduduk & KB, 2021

#### 2.2.4.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator pemasangan rambu-rambu jalan hingga tahun 2020 tercapai 16,44%. Rendahnya penurunan persentase realisasi pemasangan rambu jalan ini disebabkan adanya pendataan ulang terhadap jumlah rambu jalan dan kebutuhan rambu di jalan kabupaten terdata sebanyak 1.118 unit dari kebutuhan 6.800 unit yang berada pada 173 ruas jalan kabupaten dengan panjang total 829,42 KM. Hal ini ditambah oleh tidak adanya penambahan rambu jalan dalam 2 (dua) tahun terakhir, hanya pemeliharaan rambu jalan sebanyak 46 unit dan pemasangan spanduk rambu-rambu peringatan sebanyak 30 buah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya tingkat keselamatan dalam berkendaraan.

Sedangkan rasio izin trayek tidak dapat dihitung karena tidak ada pemilik kendaraan yang melakukan pengurusan izin atau perpanjangan izin trayek dalam lima tahun terakhir akibat menurunnya jumlah permintaan yang disebabkan angkutan tersebut kalah bersaing dengan adanya ojek konvesional. Disisi lain, indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2020 hanya mencapai 75% dengan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 3.833 unit dengan realisasi sebanyak 2.862 unit, namun dari segi jumlah kendaraan yang melakukan uji di UPTD PKB Kabupaten Sijunjung mencapai 3.843 unit karena adanya kendaraan dari daerah lain yang menumpang uji KIR di Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.34.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	82	87	90	92	75
3	Persentase pemasangan rambu-rambu jalan	n.a	n.a	n.a	n.a	16,44

Sumber; Dinas Perhubungan, 2021

#### 2.2.4.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian relatif rendahnya cakupan layanan internet setiap nagari/desa hingga tahun 2020 tercatat ada 61 titik blank spot yang tersebar di 18 Nagari dalam 5 kecamatan sehingga pencapaian cakupan layanan internet di setiap desa/nagari baru mencapai 48%. Kondisi ini disebabkan karena kondisi geografi dan topografi yang berbukit-bukit, sehingga menjadi faktor pembatas jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*) bukan hanya masalah jarak tetapi juga keterhalangan oleh topografi yang berbukit-bukit. Sehingga banyak nagari yang sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan BTS, namun tidak dapat menerima signal internet. Oleh sebab itu, terdapat nagari-nagari yang belum terjangkau jaringan internet diantaranya adalah; Nagari Lubuk Tarantang, Tanjung Kaliang dan Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru; Nagari Kampung Dalam dan Silongo, Kecamatan Lubuk Tarok; Nagari Paru dan Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung; Nagari Silantai, Sisawah, Tanjung Labuah dan Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus; Nagari Langki, Pulasan dan Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang.

Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan baru terbentuk sampai tahun 2020 sebanyak 11 KIM. Selain itu, indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yaitu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks tersebut merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Indeks SPBE Kabupaten Sijunjung melalui penilaian mandiri berdasarkan kriteria yang ada hingga tahun 2020 mencapai 2,84, atau berada pada kategori baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa, belum optimalnya daya dukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga berimplikasi terhadap penilaian indeks reformasi birokrasi.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.35.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan internet setiap nagari/desa	43	43	43	48	48
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	n.a	8	11	11	11
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n.a	n.a	1,46	2,04	2,84

Sumber; Dinas Komunikasi & Informatika, 2021

#### 2.2.4.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pencapaian kinerja masing-masing indikator. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, kurang berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini ditandai masih rendahnya persentase usaha mikro dan kecil sebesar 25,6% akibat lemahnya daya saing produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas koperasi dan UMKM dalam memasuki era industri 4.0 sebuah isu yang perlu ditutaskan lima tahun mendatang.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.36.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	42,1	47,5	47,5	47,5	79,10
2	Persentase BPR/LKM aktif	51,5	72,3	72,3	72,7	72,7
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10,0	13,3	11,5	25,6	25,6

Sumber; Dinas Dagperinkop & UKM, 2021

#### 2.2.4.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditandai meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan karena terbangunnya promosi investasi yang efektif dan adanya kemudahan dalam proses perizinan. Namun disisi lain, meningkatkannya nilai investasi tidak meningkatkan pertumbuhan PDRB disebabkan karena belum semuanya investasi dilaksanakan akibat terkendalanya faktor non teknis.



Dari sisi perizinan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), menunjukkan perkembangan yang signifikan hal ini terlihat cenderung meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sementara itu, lama proses perizinan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan proses perizinan di Kabupaten Sijunjung sangat baik karena telah sesuai kebutuhan investasi saat ini.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.37.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal  
Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor PMDN	98	118	124	144	167
2	Jumlah investor PMA	6	6	9	10	10
3	Jumlah nilai investasi PMDN (Miliar Rp)	1.279,88	4.133,36	7.109,78	8.097,75	9.021,10
4	Jumlah nilai investasi PMA (US\$)	32.370	122.171	158.668	189.937	193.559
5	Lama proses perizinan (hari)	5	5	5	5	5
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n.a	76,90	83,14	83,53	84,51

Sumber; Dinas PMPTSP, 2021

#### 2.2.4.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja cenderung fluktuatif. Namun capaian kinerja urusan kepemudaan tersebut, belum diangka yang optimal sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan regulasi terkait dengan pembinaan kepemudaan yang berkesinambungan di Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan capaian kinerja urusan olahraga cukup baik dari sisi perkembangannya. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda cenderung meningkat selama tahun (2016-2019), namun tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2018 menduduki peringkat 9 pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota dengan memperoleh medali emas sebanyak 33 buah, Capaian prestasi tersebut, meningkat dibanding tahun 2016 yang memperoleh medali emas sebanyak 17 buah. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.38.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80,77	81,48	85,18	92,96	100
2	Persentase wirausaha muda	n.a	n.a	n.a	12,97	0,12
3	Cakupan pembinaan olahraga	96,19	96,19	92,60	96,87	75
4	Cakupan pembinaan atlet muda	70,91	76,94	78,85	78,79	33,78
5	Jumlah perolehan medali emas dalam even olahraga	17	-	33	-	-

Sumber; Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, 2021

#### 2.2.4.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang statistik Tahun 2016-2020 sesuai yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi setiap tahunnya melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung. Produk yang sudah dikerjasamakan selama ini adalah penyusunan Buku Kabupaten Sijunjung Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung. Kedua buku tersebut diatas selain dicetak dalam versi manual/analog juga tersedia dalam versi elektronik/e-Book. Disisi lain, statistik sektoral tersebut hingga tahun 2020 belum dilakukan pengembangan sistem dan jaringan data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga berimplikasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tidak efektif dan efisien.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang statistik tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.39.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	0	0	0	0	0
2	Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka	1	1	1	1	1
3	Jumlah Buku Produk Domestik Regional Bruto	2	2	2	2	2

Sumber; Dinas Komunikasi & Informatika, 2021

#### 2.2.4.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandian Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi sudah baik. Hingga tahun 2020 telah tercapai sebesar 94 %, namun angka ini baru dalam hal pemakaian e-LHK pegawai. Sehingga perlu



pengembangan untuk pemakaian sandi komunikasi antar perangkat daerah dan tanda tangan digital. Perlu adanya regulasi yang mengatur penerapan sertifikat digital dan dukungan teknologi informasi yang merata di seluruh entitas. Oleh sebab itu, kedepannya peran persandian menjadi sangat strategis karena persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan. Sehingga terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandian tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.40.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n.a	10	15	20	23

Sumber; Dinas Komunikasi & Informatika, 2021

#### 2.2.4.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kebudayaan 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali untuk kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya capaian kinerja tahun 2020 cukup rendah disebabkan masa pandemi covid-19. Kondisi ini mencerminkan capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kebudayaan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.41.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	n.a	30	54,55	60	99,71
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n.a	2	9	9	0
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	n.a	12	14	18	18

Sumber; Dinas Pendidikan & Kebudayaan, 2021

#### 2.2.4.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja rasio ketersediaan perpustakaan terhadap persatuan



penduduk masih rendah dan cenderung menurunnya jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Hal ini menunjukkan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga menurunnya minat baca masyarakat di perpustakaan, hal ini ditandai cukup rendahnya rata-rata pengunjung pepustakaan per tahun pada tahun 2020. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat sangat diperlukan kebijakan yang jelas dan terukur lima tahun kedepan

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.42.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001
2	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	9.143	9.204	9.674	6.665	5.810
3	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	20.140	20.956	21.480	21.480	13.260
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	3	1

Sumber; Dinas Perpustakaan & Kearsipan, 2021

#### 2.2.4.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang karsipan Tahun 2016-2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 sebesar 65,60%. Belum signifikannya capaian kinerja urusan pemerintahan bidang karsipan disebabkan karena keterbatasan sumber daya apatarur dan sarana prasarana. Kondisi ini kedepannya permasalahan ini perlu dijadikan skala prioritas dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang karsipan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.43.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Karsipan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	n.a	n.a	15,60	65,60	65,60
2	Jumlah SDM pengelola karsipan sesuai kompetensi	33	50	67	75	75

Sumber; Dinas Perpustakaan & Karsipan, 2021



### **2.3.3 Urusan Pilihan**

#### **2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya produksi perikanan terhadap target pada tahun 2020 dengan capaian hanya 78,21% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, hal ini sejalan dengan kecenderungan menurunya nilai tukar petani ikan. Begitu juga halnya kondisi yang terjadi pada persentase konsumsi ikan terhadap target, konsumsi ikan bagi masyarakat terhadap target cenderung menurun dari tahun sebelumnya (2019). Kondisi ini mencerminkan cenderung fluktuatifnya produksi perikanan disebabkan oleh fluktuatifnya tingkat konsumsi ikan yang dipengaruhi oleh kemampuan/daya beli dan pola konsumsi masyarakat serta tingkat kesejahteraan petani ikan itu sendiri.produksi perikanan, sehingga mempengaruhi konsumsi ikan bagi masyarakat.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2016-2020, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.44.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase produksi perikanan terhadap target	75,91	79,32	82,45	92,57	78,21
2	Persentase konsumsi ikan terhadap target	96,68	96,42	86,50	92,52	91,70
3	NTP Perikanan	106,48	109,48	107,89	104,43	94,52

Sumber; Dinas Pangan & Perikanan, 2021

#### **2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi pencapaian target. Hal ini terlihat dari capaian kinerja persentase jumlah kunjungan wisata terhadap target dan rata-rata kunjungan wisata per tahun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Sijunjung saat ini sedang mengembangkan destinasi wisata nasional, yaitu; *Geopark Silokek* dan wisata budaya Perkampungan Adat Padang Ranah. Dalam pengembangan destinasi wisata tersebut, disamping meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata juga diikuti peningkatan even pariwisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Faktor pendukung lainnya, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sedang mengembangkan program "*one village one destination*". Sehingga diharapkan setiap Nagari/Desa dapat mengembangkan



potensi wisata yang ada melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berbasis kearifan lokal.

Namun pencapaian kinerja urusan parawisata belum mencapai diangka yang optimal, sehingga belum optimalnya kontribusi terhadap laju pertumbuhan PDRB. Oleh karena itu, kedepannya pengembangan potensi sektor pariwisata perlu dioptimalkan baik dari sisi kuantitas, maupun dari sisi kualitas. Sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.45.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah kunjungan wisata terhadap target	96,11	128,77	112,09	109,08	101,01
2	Rata-rata kunjungan Wisata per tahun	8.861	12.466	14.968	16.021	10.234

Sumber; Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, 2021

### 2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang optimal karena ditandai cenderung menurunnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Kondisi disebabkan karena cenderung fluktuatifnya jumlah produksi pertanian dan perkebunan, terutama pada komoditi unggulan. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian/perkebunan melalui alih teknologi, sehingga mengurangi nilai jual dan daya saing produk terhadap pasar.

Disisi lain, pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan empat tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas perkebunan pada akhir tahun 2020. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.46.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	32,00	31,55	30,64	29,59	27,71
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,93	96,97	95,31	96,01	100,58
3	Jumlah produksi komoditas pertanian (ton) :					
	- Padi	110.128	88.468	120.175	99.367	109.277
	- Jagung	4.849	1.880	2.868	3.638	5.646
	- Manggis	3.184,6	444,5	827,6	1.736,6	4.071,2



No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah produksi komoditas perkebunan (ton) :					
	- Karet	48.194	52.492	50.256	62.005	64.255
	- Kelapa sawit	37.329	107.949	116.069	117.473	113.370
5	- Coklat	1.263	1.261	1.326	1.130	1.171
	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :					
5	- Padi	5,42	4,99	4,57	3,96	5,40
	- Jagung	5,79	5,48	4,63	6,75	6,66
6	Jumlah produksi peternakan (ton) :					
	- Daging sapi dan kerbau	585,43	573,86	452,64	548,88	584,09
	- Telur unggas	547,02	869,32	691,26	1.168,98	1.495,95

Sumber; Dinas Pertanian. 2021

#### 2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini terlihat dari stagnannya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya sarana dan prasarana pasar komoditi produk unggulan dan belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya data kelompok pedagang/ usaha informal dan belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata yang akurat. Melihat kondisi ini, maka dicerminkan bahwa Kabupaten Sijunjung belum optimal mengelola potensi perdagangan sebagai pengukur laju pertumbuhan PDRB.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2016-2020, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.47.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,08	11,50	11,74	11,80	11,71
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	0	0	0	0

Sumber; Dinas Dagperinkop & UKM, 2021

#### 2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang



optimal, hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung menurun secara signifikan. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan disebabkan karena proses pemberian nilai tambah bahan baku atau sumberdaya lokal dalam proses produksi barang dan jasa masih kecil. Tidak berkorelasinya kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan cakupan bina industri kecil dan menengah mencerminkan belum adanya keselarasan antara program dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan perubahan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.48.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,18	3,04	3,00	2,53	2,60
2	Cakupan bina Industri Kecil dan Menengah	n.a	100	100	106	106

Sumber; Dinas Dagperinkop & UKM, 2021

### 2.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) yang diukur berdasarkan indikator persentase transmigrasi swakarsa belum dapat angka capaiannya. Hal ini disebabkan karena program transmigrasi swakarsa mandiri dan transmigrasi swakarsa berbantuan Kabupaten Sijunjung belum termasuk dalam program skala prioritas oleh Kementerian terkait karena belum diukurnya nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi

Disisi lain, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menetapkan Kabupaten Sijunjung sebagai kawasan Transmigrasi Umum (TU) melalui Transmigrasi Pola Lahan Kering (TPLK) dan Transmigrasi pola Lahan Basah (TPLK). Sehingga perkembangan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan pada kawasan transmigrasi Padang Tarok SP.1 dari tahun 2015 sampai 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 jumlah KK yang ditempatkan di kawasan transmigrasi sebesar 30 KK dan pada tahun 2020 terdapat 221 KK yang ditempatkan. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung masih menjadi kawasan transmigrasi oleh Kementerian terkait, walaupun masih kawasan transmigrasi umum.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.49.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0
2	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan dalam kawasan transmigrasi	30	0	191	221	221
3	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	0	0	0	0	0

Sumber; Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi, 2021

### **2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini ditandai capaian indeks reformasi birokrasi hingga tahun 2020 tercapai sebesar 47,97 atau berada diskor C. Cukup rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Kabupaten Sijunjung disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi menunjukkan perkembangan cukup signifikan, hal ini ditandai cenderung meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 nilai SAKIP sebesar 40,42 (skor c) dan meningkat pada tahun 2020 senilai 62,11 (B). Cenderung meningkatnya nilai SAKIP lima tahun terakhir belum berimplikasi terhadap capaian indeks reformasi birokrasi. Sedangkan, dari sisi kualitas pengendalian internal menunjukkan tingkat kemantangan relatif baik karena pada tahun 2020 berada di level 3. Selain itu, dari sisi kualitas pelayanan publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang ditandai meningkatnya rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun dari sisi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri cenderung berfluktuatif. Hal ini menunjukkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) bervariasi dari tahun ke tahun.

Perkembangan capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.50.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	n.a	n.a	n.a	47,97
2	Nilai SAKIP	40,42	43,12	57,67	60,58	62,11
3	Nilai LPPD	3,0918	2,9238	3,0514	3,1510	0*
4	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,26	77,79	74,60	78,34	80,20

Sumber; Sekretariat Daerah, 2021

\*) Belum dipublikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### 2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3.5.1 Unsur Perencanaan

Capaian kinerja unsur perencanaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung meningkat dari sisi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan mengedepankan prinsip *money follow program* dan *program follow result* serta *sustainable development*. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja perencanaan pembangunan yang digunakan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan capaian kinerja unsur perencanaan pembangunan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.51.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100
2	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD.	85	90	90	95	95
3	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n.a	n.a	n.a	n.a	59,96

Sumber; Bapppedda, 2021

#### 2.3.5.2 Unsur Keuangan

Capaian kinerja unsur keuangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah empat tahun terakhir dan terpenuhinya juga mandatori anggaran belanja pendidikan dan belanja kesehatan serta penetapan APBD selalu tepat waktu.

Selain itu, perbandingan belanja langsung terhadap belanja tidak langsung empat tahun terakhir (2016-2019) cenderung mendekati proporsi yang baik. Pada tahun 2016 perbandingannya 47:53 dan pada tahun 2019



perbandingannya menjadi 49:51. Namun pada tahun 2020 perbandingannya mengalami rasio yang cukup signifikan menjadi 41:58, hal ini disebabkan adanya realokasi anggaran belanja dalam rangka penanganan wabah covid-19. Disisi lain, persentase SILPA terhadap APBD tahun 2016-2020 cenderung fluktuasi. Kondisi ini pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga berimplikasi terhadap capaian kinerja pembangunan.

Cenderung meningkatnya kinerja unsur keuangan lima tahun terakhir, dapat dijadikan modal dasar pembangunan lima tahun kedepan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan capaian kinerja urusan keuangan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.52.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	0,06	0,14	0,11	0,88	0,11
3	Persentase belanja pendidikan	34	82	29	28	29,54
4	Persentase belanja kesehatan	13	34	14	16	16,94
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	47 : 53	48 : 52	49 : 51	49 : 51	41:58
6	Penepatan APBD	Tepat waktu				

Sumber; BKAD, 2021

### 2.3.5.3 Unsur Kepegawaian

Capaian kinerja unsur kepegawaian kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan karena belum dilakukan penerapan sistem merit. Sehingga capaian indikator persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena ASN yang diterima melalui seleksi penerimaan ASN (CPNS) dari tenaga guru dan kesehatan baru bisa memangku jabatan fungsional tertentu setelah diangkat menjadi PNS (100%). Perkembangan capaian kinerja unsur kepegawaian tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Merit Sistem	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	66,65	63,08	63,38	61,85	59,67

Sumber; BKPSDM, 2021



#### 2.3.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja unsur pendidikan dan pelatihan kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai cukup rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sebesar 53,76. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta cukup tingginya jumlah ASN kualifikasi pendidikan ijazah SLTA. Belum optimalnya capaian kinerja unsur pendidikan dan pelatihan berimplikasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kedepan perlu adanya *Roadmap* Pengembangan ASN sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan sumber daya aparatur lima tahun kedepan.

Perkembangan capaian kinerja unsur pendidikan dan pelatihan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.54.**

**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	n.a	n.a	37,42	52,45	53,76
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,79	1,84	1,00	2,74	1,68
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	6,24	6,61	6,48	3,22	0,69

Sumber; BKPSDM, 2021

#### 2.3.5.5 Unsur Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Kondisi ini disebabkan karena kelembagaan penelitian dan pengembangan masih melekat dengan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dari sisi program dan kegiatan lebih diprioritaskan kepada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu, unsur penelitian dan pengembangan dapat dioptimalkan fungsinya melalui penguatan kelembagaan.

Perkembangan capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.55.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangsan.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangsan.	n.a	n.a	40	45	65
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	n.a	n.a	n.a	8,57	8,57

Sumber; Bapppeda, 2021

### **2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja unsur pengawasan dalam menunjang urusan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2020 masih berada pada level 2 plus. Peningkatan kapabilitas APIP merupakan kebutuhan dalam mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam upaya meningkatkan tingkat kemantangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan mengurangi temuan hasil audit BPK yang selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif.

Perkembangan capaian kinerja unsur pengawasan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Leveling kapabilitas APIP	1	2	2	2+	2+
2	Leveling maturitas SPIP	1	2	2	3	3
3	Jumlah temuan BPK	16	37	23	7	18

Sumber; Inspektorat Daerah, 2021

### **2.3.7 Unsur Kewilayahan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Kecamatan merupakan unsur kewilayahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilihat capaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun. Mengingat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan tidak dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sehingga capaian kinerja unsur kewilayahan tidak dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Capaian kinerja unsur kewilayahan



pada tahun 2020 sebagai *baseline data* untuk RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.57.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahannya	n.a	n.a	n.a	n.a	72,45
2	Persentase nagari/desa dengan Kategori Minimal Maju	n.a	n.a	n.a	n.a	10
3	Persentase penurunan potensi konflik	n.a	n.a	n.a	n.a	2
4	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan Nagari/Desa yang dilaksanakan sesuai standar	n.a	n.a	n.a	n.a	85

Sumber; Kecamatan, 2021

### **2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum**

Unsur pemerintahan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan salah satu unsur penting dalam melihat perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, unsur pemerintahan umum belum dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga capaian kinerja unsur pemerintahan umum belum dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun selama periodesasi 2016-2020.

Dari uraian dan analisa diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja aspek pelayanan umum selama periode 2016-2020 secara rata-rata belum menunjukkan kinerja layanan yang optimal. Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Belum optimalnya pencapaian kinerja aspek pelayanan umum menggambarkan penerapan tata kelola pemerintahan belum berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

### **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Aspek daya saing daerah menggambarkan perkembangan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain, baik kabupaten/kota maupun provinsi yang berdekatan. Keempat fokus aspek daya saing daerah tersebut, diuraikan sebagai berikut:



## **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja terhadap aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan melalui; 1) PDRB perkapita, 2) pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan 3) nilai tukar petani.

### **2.4.1.1. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

PDRB perkapita lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sehingga mencerminkan kemampuan ekonomi daerah mempunyai daya saing dalam berinvestasi. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.58.**

**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHB (Rp. Juta)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>PDRB Perkapita (Rp)</b>
2016	7.439.227,39	226.300	32.873.298,23
2017	7.978.030,46	230.104	34.671.411,45
2018	8.515.968,84	233.810	36.422.603,14
2019	9.133.599,30	237.376	38.477.349,44
2020	9.122.052,36	235.045	38.809.812,41

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka, 2021* (data diolah)

### **2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

Besar kecilnya jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan faktor yang turut menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara/wilayah. Meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat akan mendorong perkembangan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Hal ini berarti membuka peluang investasi bagi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan gambaran penggunaan PDRB.

Tingkat pengeluaran konsumsi tersebut, menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi melalui proses multiplier dari PDRB Kabupaten Sijunjung menurut penggunaan tahun 2016-2020, dapat kita ketahui pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang dominan dalam



penggunaan PDRB. Hal ini menunjukkan besarnya peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung. Jika terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, maka akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pangan dan non pangan Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku cenderung meningkat. Hal ini disebabkan, karena adanya peningkatan kebutuhan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan diikuti naiknya tingkat inflasi rata-rata provinsi. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 sebesar Rp 60,81 juta dan meningkat sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp 73,14 juta. Meningkatnya rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir mencerminkan meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Sehingga dapat membuka peluang investasi bagi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.59.**

**Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rp Juta)	3.471.496,81	3.804.154,7	4.109.432,7	4.458.534,96	4.658.534,96
2.	Jumlah Rumah Tangga	57.092	58.961	60.844	63.641	63.691
	<b>Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Rp Juta)</b>	<b>60,81</b>	<b>64,51</b>	<b>67,54</b>	<b>70,05</b>	<b>73,14</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)

#### 2.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Secara konsep dasar, Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

Sementara itu, NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga angka NTP menunjukkan tingkat



daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Berdasarkan kriteria perhitungan, jika  $NTP > 100$  berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Namun jika  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sedangkan jika  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Berdasarkan konsep NTP dan kriteria perhitungannya, NTP Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2016-2019) berada dibawah angka 100. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 100,58. Kondisi ini mencerminkan kenaikan harga produksi pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi bagi petani. Hal ini disebabkan dalam periode tersebut, belum stabilnya harga komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Sijunjung seperti karet. Sehingga pedapatan petani karet belum mampu menutupi biaya produksi untuk menghasilkan produk komoditas tersebut. Walaupun ada peningkatan harga karet namun belum mampu menyokong pencapaian NTP, walaupun didukung oleh beberapa komoditi lainnya seperti kakao, sawit, dan pinang. Perkembangan NTP Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 sesuai perhitungannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.60.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang Diterima (It)	119,62	122,64	125,39	130,54	106,55
2.	Indeks yang Dibayar (Ib)	122,48	126,47	131,56	136,00	105,93
	<b>NTP</b>	<b>97,67</b>	<b>96,97</b>	<b>95,31</b>	<b>96,01</b>	<b>100,58</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Sijunjung, 2021 (data diolah)

Berdasarkan uraian ketiga indikator aspek kemampuan ekonomi daerah diatas, dapat disimpulkan peningkatan PDRB per kapita lima tahun terakhir berkorelasi terhadap peningkatan NTP. Disisi lain, pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa, kemampuan pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung sejalan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.



#### **2.4.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor pada suatu daerah atau wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah tersebut. Secara umum ketersediaan infrastruktur suatu daerah dapat dilihat dari; 1) fasilitas transportasi, 2) energi listrik dan komunikasi, 3) ketataan rencana tata ruang wilayah, 4) luas wilayah produktif, 5) layanan air bersih dan 6) jasa penginapan dan restoran.

##### **2.4.4.1. Fasilitas Transportasi**

Ketersediaan fasilitas transportasi menjadi daya dukung dalam upaya meningkatkan aspek daya saing daerah. Dalam konteks hal tersebut, fasilitas transportasi lebih difokuskan kepada jaringan transportasi jalan dan sarana pendukung lainnya. Ketersediaan panjang jalan tahun 2020 sebesar 829,47 km. Panjang jalan tersebut, dilihat dari topografi daerah yang berbukit-bukit menunjukkan relatif terpenuhi, karena konektivitas antar kecamatan dan nagari/desa di Kabupaten Sijunjung telah terhubungi. Namun disisi lain, konektivitas antar wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam belum terpenuhi secara optimal. Sehingga penambahan ruas jalan baru dalam upaya meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah menjadi urgensi bagi daerah kedepannya.

Dari ketersediaan jalan sepanjang 829,42 km tersebut, ruas jalan kabupaten yang terpanjang berada di Kecamatan Sijunjung sebesar 209,58 km dan terpendek berada di Kecamatan Kupitan sebesar 29,95 km. Sementara itu, rasio jenis permukaan jalan terhadap panjang jalan yang beraspal sebesar 51,92% dan selebihnya rigid (22,61%), kerikil (7,89%) dan tanah (17,57%). Kondisi ini mencerminkan jalan di Kabupaten Sijunjung belum dapat menjadi daya dukung yang kuat dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB dan IPM karena jenis permukaan jalan yang beraspal baru tercapai sebagian dari panjang jalan kabupaten.

Kondisi jenis dan rasio permukaan jalan berdasarkan panjang jalan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61.**  
**Jenis dan Rasio Permukaan Jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan (km)				Total pjg jalan
		Aspal	Rigid	Kerikil	Tanah	
1	Kamang Baru	90,24	28,02	7,9	37,07	163,23
2	Tanjung Gadang	54,40	24,94	4,92	9,87	104,13
3	Sijunjung	105,86	44,61	1,21	57,9	209,58
4	Lubuk Tarok	30,00	11,78	7,18	2,90	51,86
5	IV Nagari	29,96	3,58	0	1,84	35,38
6	Kupitan	11,27	4,83	13,85	-	29,95



No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan (km)				<b>Total pjg jalan</b>
		Aspal	Rigid	Kerikil	Tanah	
7	Koto VII	33,48	24,31	35,35	5,59	78,73
8	Sumpur Kudus	75,44	35,50	15,03	20,59	156,56
	<b>Jumlah</b>	<b>430,65</b>	<b>187,57</b>	<b>65,44</b>	<b>145,76</b>	<b>829,42</b>
	<b>Rasio jenis permukaan jalan (%)</b>	<b>51,92</b>	<b>22,61</b>	<b>7,89</b>	<b>17,57</b>	<b>100</b>

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka, 2021*(data diolah)

Sementara itu, ketersediaan ruas jalan kabupaten sepanjang 829,98 km yang memiliki kondisi baik sepanjang 409,40 km atau 49,39% terhadap total panjang jalan. Sedangkan yang kondisi sedang sepanjang 142,07 km atau 17,14% terhadap total panjang jalan dan kondisi yang rusak ringan sepanjang 66,02 km atau 7,96% terhadap total panjang jalan. Sedangkan kondisi jalan yang rusak berat sepanjang 211,49 km atau 25,51% terhadap total panjang jalan.

Cukup tingginya kondisi panjang jalan yang rusak akan menimbulkan dampak negatif terhadap distribusi barang dan jasa. Sehingga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan. Kondisi ini mencerminkan daya saing daerah dari sisi fasilitas transportasi relatif rendah. Sehingga akan mempengaruhi terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah kedepannya. Gambaran rasio kondisi jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62.**  
**Rasio Kondisi Jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2020**

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan (km)				<b>Total panjang jalan</b>
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kamang Baru	81,82	22,01	16,34	45,85	166,02
2	Tanjung Gadang	53,87	17,59	12,14	10,52	94,12
3	Sijunjung	119,61	32,37	8,71	38,75	199,44
4	Lubuk Tarok	28,49	6,20	7,06	10,10	51,85
5	IV Nagari	22,38	2,45	4,89	5,21	34,93
6	Kupitan	10,87	2,38	7,00	9,70	29,95
7	Koto VII	27,11	22,81	8,34	40,46	98,72
8	Sumpur Kudus	65,25	36,26	1,54	50,90	153,95
	<b>Jumlah</b>	<b>409,40</b>	<b>142,07</b>	<b>66,02</b>	<b>211,49</b>	<b>828,98</b>
	<b>Rasio kondisi jalan (%)</b>	<b>49,39</b>	<b>17,14</b>	<b>7,96</b>	<b>25,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka, 2021* (data diolah)

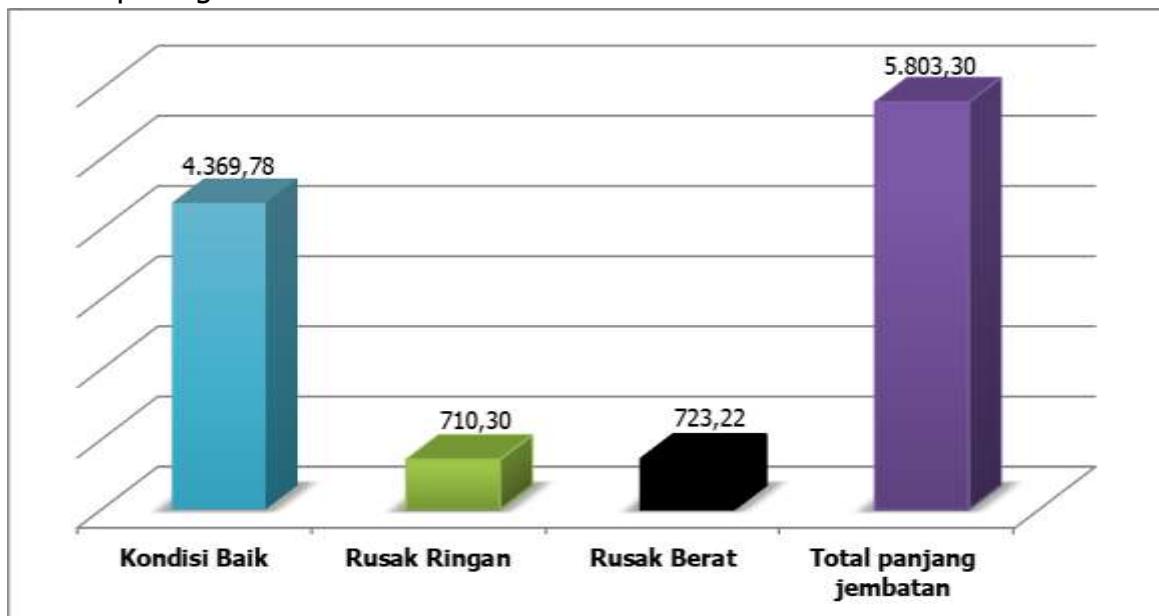
Selain itu, Kabupaten Sijunjung juga dilewati jalan negara sepanjang 108,69 km dan jalan provinsi sepanjang 79,71 km. Namun data kondisi jalan negara dan provinsi tidak tercatum dalam buku Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021. Sementara itu, dari sisi faktanya kondisi jalan negara dan provinsi mengalami kondisi rusak berat lebih kurang 50% dari total panjang jalan.

Untuk menunjang ketersediaan jalan kabupaten yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan jembatan sebagai sarana penunjang jaringan jalan.



Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, ketersediaan panjang jembatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 5.803,30 meter. Ketersediaan jembatan tersebut, relatif terpenuhi dari sisi ketersediaan jalan. Sedangkan kondisi panjang jembatan yang baik sebesar 4.369,78 meter atau 75,30% terhadap total panjang jembatan.

Sementara itu, kondisi panjang jembatan yang rusak ringan sebesar 710,30 meter atau 12,24% terhadap total panjang jembatan dan kondisi panjang jembatan rusak berat sebesar 723,22 meter atau 12,46% terhadap total panjang jembatan. Relatif kecilnya panjang jembatan dalam kondisi rusak mencerminkan sarana dan prasarana penunjang jalan relatif memadai. Gambaran kondisi panjang jembatan di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2019 berdasarkan kriteria, terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, 2020

**Gambar 2.18 Grafik Kondisi Panjang Jembatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 (meter)**

#### 2.4.4.2. Energi Listrik dan Komunikasi

Ketersediaan energi listrik dan sarana komunikasi merupakan tolak ukur utama dalam melihat tingkat daya saing daerah. Disisi lain, penyediaan energi listrik dan sarana komunikasi bagi daerah yang ruang fiskal pembangunan relatif sempit sangat tergantung dengan pihak ketiga sebagai penyedia. Sehingga ketersediaan energi listrik dan sarana komunikasi di daerah relatif terpenuhi oleh PT (Persero) PLN dan perusahaan operator seluler. Hal ini disebabkan karena hasil kajian terhadap kelayakan bisnis belum bernilai ekonomis akibat dibutuhkan nilai investasi yang relatif besar.



Ketersediaan energi listrik di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2020 sudah cukup memadai. Hal ini terlihat adanya peningkatan pasokan listrik dari PT (Persero) PLN tahun 2016-2020. Tahun 2016 ketersediaan energi listrik sebesar 46.995.868 kwh dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 55.952.694 kwh. Sedangkan cakupan layanan energi listrik telah terlayani pelanggan di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2020 sebanyak 39.796 pelanggan atau 66,73% dari jumlah rumah tangga. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan pembangunan daerah kedepannya, karena keterjangkauan layanan listrik keseluruh pelosok nagari/desa dapat memberikan daya dukung terhadap daya saing daerah. Perkembangan ketersediaan energi listrik yang dipasok dari PT (Persero) PLN di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63.**  
**Perkembangan Ketersediaan Energi Listrik Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 (kwh)**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi listrik	52.615.712	55.530.644	55.362.023	56.982.096	59.144.711
2.	Dipakai sendiri	26.308	26.765	13.081	14.055	14.055
3.	Susut/hilang	5.593.536	5.197.266	4.943.343	4.313.457	3.177.962
<b>4.</b>	<b>Ketersediaan listrik</b>	<b>46.995.868</b>	<b>50.306.613</b>	<b>50.405.599</b>	<b>52.654.584</b>	<b>55.952.694</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Selain itu, berdasarkan buku Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020, ketersediaan energi listrik di Kabupaten Sijunjung juga didukung melalui 8 (delapan) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas produksi sebesar 17 kw yang tersalurkan sebanyak 71 rumah tangga.

Sementara itu, ketersediaan sarana telekomunikasi hingga tahun 2020, khususnya telekomunikasi nirkabel telah dibangun *Base Tranformation Stantioner* (BTS) sebanyak 98 tower yang lokasi tersebar di nagari/desa di Kabupaten Sijunjung. Ketersediaan BTS tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah nagari/desa telah terpenuhi cakupan layanannya sebesar 160,66%. Namun disisi lain, terdapat 2 (dua) kecamatan yang cakupan layanannya masih rendah, yaitu; 1) Kecamatan Sumpur Kudus sebesar 63,64% dan 2) Kecamatan Lubuk Tarok sebesar 66,67%. Kondisi ini mencerminkan ketersediaan sarana telekomunikasi di Kabupaten Sijunjung belum merata setiap wilayah. Sehingga daya saing daerah dari sisi fasilitas telekomunikasi relatif rendah, sehingga perlu adanya terobasan baru agar terlayani seluruh wilayah.

Rasio ketersediaan sarana telekomunikasi nirkabel masing-masing kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.64.**  
**Rasio Ketersediaan Telekomunikasi Nirkabel Kabupaten Sijunjung tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah BTS (unit)	Jumlah Nagari/Desa	Rasio (%)
1	Kamang Baru	21	11	190,91
2	Tanjung Gadang	11	9	122,22
3	Sijunjung	26	9	288,89
4	Lubuk Tarok	4	6	66,67
5	IV Nagari	9	5	180,00
6	Kupitan	6	4	150,00
7	Koto VII	14	6	233,33
8	Sumpur Kudus	7	11	63,64
	<b>Jumlah/Rata-rata</b>	<b>98</b>	<b>61</b>	<b>160,66</b>

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)*

#### 2.4.4.3. Ketaatan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menambah daya saing Kabupaten Sijunjung, karena RTRW bertujuan untuk melihat rencana pemanfaatan ruang daerah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun. Sehubungan dengan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sijunjung implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020) secara umum telah sesuai dengan tujuan, sasaran, arah dan kebijakan pemanfaatan rencana pola dan peruntukan ruang. Kondisi ini tercermin dari keselarasan antara rencana pola dan peruntukan ruang dengan lokasi rencana pembangunan daerah yang disusun setiap tahunnya.

Seiring waktu berjalan dengan mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi daerah terhadap rencana pola dan peruntukan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5/2012 yang belum terakomodir secara optimal. Oleh karena itu, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan perubahan terhadap substansi RTRW yang ada yang disesuaikan kebutuhan daerah saat ini dan diharapkan pada tahun 2021 perubahan RTRW dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### 2.4.4.4. Lahan Produktif

Berdasarkan data peta citra satelit pada tahun 2020, terdapat lahan produktif di Kabupaten Sijunjung seluas 156.059,6 ha atau 49,25% terhadap luas daerah 316.903,4 ha. Cukup kecilnya ketersediaan luas lahan produktif di Kabupaten Sijunjung memberikan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan



Iaju pertumbuhan PDRB dan pendapatan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Komposisi lahan produktif yang paling luas berada di Kecamatan Kamang Baru sebesar 53.511,5 ha dan Kecamatan Sijunjung seluas 23.771,1 ha. Sedangkan luas lahan produktif yang paling kecil luasnya berada di Kecamatan Kupitan sebesar 5.671,5 ha dan Kecamatan IV Nagari sebesar 10.515,0. Rincian luas dan rasio lahan produktif di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.65.**  
**Luas dan Rasio Lahan Produktif Kabupaten Sijunjung tahun 2020**

<b>No .</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Penggunaan dan Ketersediaan Lahan Produktif (ha)</b>				<b>Luas Lahan (ha)</b>
		<b>Perkebunan</b>	<b>Sawah</b>	<b>Tegalan/ Ladang</b>	<b>Tanah Terbuka</b>	
1	Kamang Baru	50.071,0	1.377,0	1.823,0	240,5	53.511,5
2	Tanjung Gadang	15.655,0	1.147,0	988,2	0,7	17.790,9
3	Sijunjung	20.004,0	2.343,0	1.408,0	16,1	23.771,1
4	Lubuk Tarok	10.189,0	929,9	1.504,0	44,2	12.667,1
5	IV Nagari	7.121,0	1.322,0	2.072,0	0	10.515,0
6	Kupitan	3.730,0	921,4	1.019,0	1,1	5.671,5
7	Koto VII	8.987,0	1.944,0	581,0	9,4	11.521,4
8	Sumpur Kudus	13.840,0	1.584,0	5.146,0	30,8	20.600,8
<b>Jumlah</b>		<b>129.602,0</b>	<b>11.570,3</b>	<b>14.544,2</b>	<b>343,1</b>	<b>156.059,6</b>
		<b>Luas daerah (ha)</b>				<b>316.903,4</b>
		<b>Rasio lahan produktif (%)</b>				<b>49,25</b>

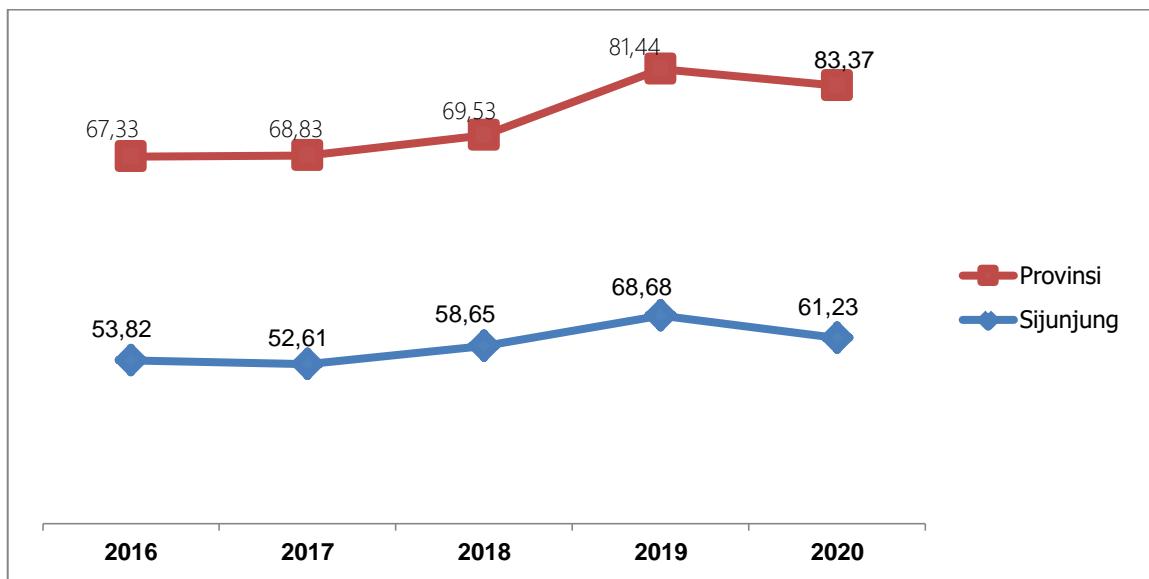
*Sumber: Interpretasi Peta Citra 2020 (diolah)*

#### 2.4.4.5. Ketersediaan Air Minum

Ketersediaan air minum yang memadai di suatu daerah mencerminkan aspek daya saing daerah dari sisi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan akses air minum bagi masyarakat sudah menjadi keharusan dalam pembangunan. Indikator terhadap akses air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan SDG's yang dikemas dalam program *unirversal accses goal's* pada tahun 2019 sebesar 100%.

Perkembangan akses air minum bagi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung fluktuatif dan capaiannya hingga tahun 2020 sebesar 61,23 % atau masih dibawah target SDG's. Disisi lain, capaian akses air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan daerah lain. Hal ini ditandai dengan ketercapaian akses air bersih bagi masyarakat masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan dan posisi relatif capaian akses air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik berikut ini.





Sumber: Sumbar Dalam Angka, 2021

**Gambar 2.19 Grafik Perkembangan Capaian Akses Air Minum bagi Masyarakat Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)**

#### 2.4.4.6. Ketersediaan Penginapan dan Restoran

Salah satu indikator daya saing daerah adalah ketersediaan sarana prasarana penginapan dan restoran yang sesuai dengan standar. Ketersediaan penginapan dan restoran yang layak akan berimplikasi terhadap kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah. Oleh sebab itu, kebijakan penyediaan penginapan dan restoran yang sesuai standar merupakan keharusan.

Hingga tahun 2020 ketersediaan sarana prasarana penginapan di Kabupaten Sijunjung sebanyak 17 unit dengan jumlah kamar sebanyak 259 buah dan jumlah tempat tidur sebanyak 382 unit. Sementara itu, sarana prasarana penginapan yang memenuhi standar hanya 1 (satu) unit dengan klasifikasi hotel bintang 1 dan selebihnya merupakan kategori wisma. Ketersediaan penginapan hanya berada di Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan IV Nagari.

Jumlah dan lokasi penginapan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan jenisnya hingga tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.66.**  
**Jumlah dan Lokasi Penginapan di Kabupaten Sijunjung tahun 2020.**

No.	Kecamatan	Jenis Penginapan (unit)		Jumlah Kamar (buah)	Jumlah Tempat Tidur (unit)
		Hotel	Wisma		
1	Kamang Baru	-	6	71	104
2	Tanjung Gadang	-	-	-	-
3	Sijunjung	1	9	182	272
4	Lubuk Tarok	-	-	-	-



<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Penginapan (unit)</b>		<b>Jumlah Kamar (buah)</b>	<b>Jumlah Tempat Tidur (unit)</b>
		<b>Hotel</b>	<b>Wisma</b>		
5	IV Nagari	-	1	6	6
6	Kupitan	-	-	-	-
7	Koto VII	-	-	-	-
8	Sumpur Kudus	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>16</b>	<b>259</b>	<b>382</b>

*Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021*

Sedangkan perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2019 meningkat secara signifikan. Ketersediaan restoran dan rumah makan tahun 2017 sebanyak 47 buah dan tahun 2020 meningkat jumlahnya sebanyak 130 buah. Kondisi ini menunjukkan usaha penyediaan jasa kuliner mempunyai prospek yang menjanjikan di Kabupaten Sijunjung empat tahun terakhir. Disisi lain, ketersediaan restoran atau rumah makan belum sesuai standar yang layak yang ditetapkan pemerintah. Hal ini diebabkan karena keterbatasan permodalan bagi dunia usaha dalam mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar.

Perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2020 di masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.67.**  
**Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten Sijunjung**  
**tahun 2017-2020 (buah)**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Kamang Baru	7	11	7	23
2	Tanjung Gadang	4	4	4	4
3	Sijunjung	19	37	47	38
4	Lubuk Tarok	1	1	1	1
5	IV Nagari	5	16	20	13
6	Kupitan	5	5	7	10
7	Koto VII	6	6	10	28
8	Sumpur Kudus	0	14	17	13
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>94</b>	<b>113</b>	<b>130</b>

*Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021*

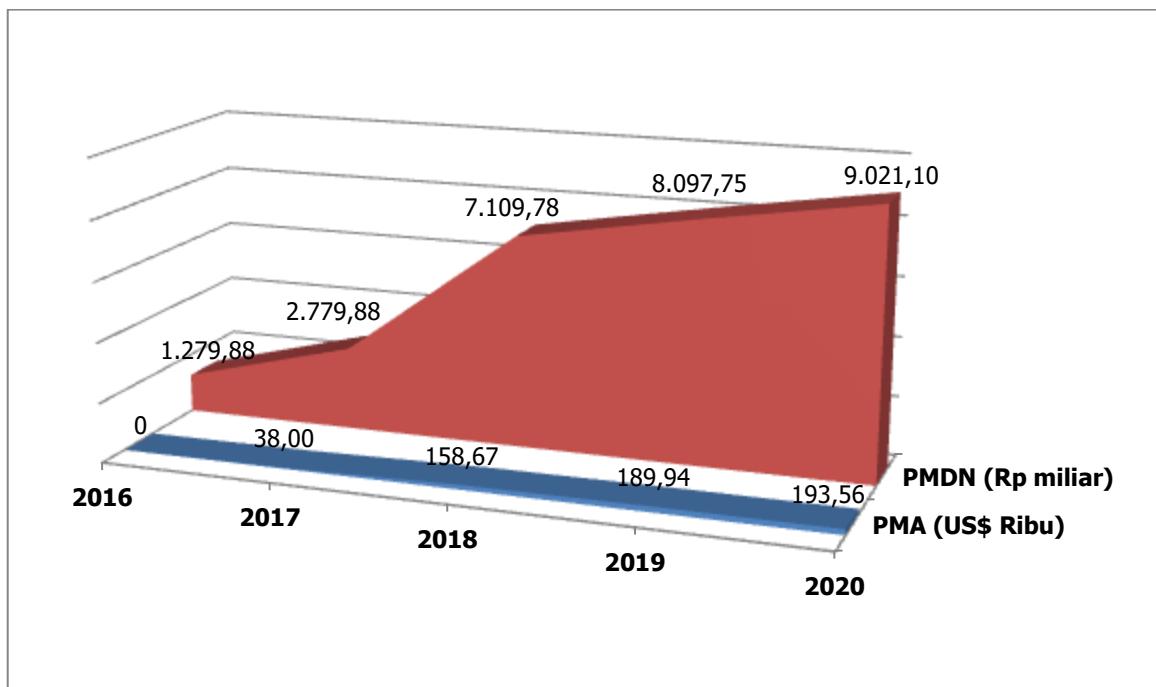
Berdasarkan data-data diatas, terlihat bahwa ketersediaan penginapan dan restoran atau rumah makan dari sisi perspektif daya saing daerah secara kuantitas cukup memadai. Namun dari sisi kualitasnya belum memadai karena belum sesuai dengan standar yang layak. Sehingga akan berimplikasi terhadap pengembangan sektor pariwisata dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya mengkaji ulang kebijakan disektor usaha penyediaan jasa penginapan dan restoran/rumah makan.



#### **2.4.5. Fokus Iklim Investasi**

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Berbagai kemudahan bagi masuknya investasi telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2017, antara lain; 1) penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk investasi baru dan 2) memberikan kemudahan dalam perizinan melalui penggunaan teknologi informasi terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional.

Dengan adanya kebijakan terhadap kemudahan investasi tersebut, maka nilai investasi PMDN dan PMA dalam kurun waktu lima terakhir ini (2016-2020) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tergambar dalam grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Sijunjung, 2021

**Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Sijunjung dalam kurun lima tahun terakhir tersebut, disamping adanya kebijakan kemudahan berinvestasi juga didukung oleh kebijakan pemerintahan daerah terkait penanaman modal melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan dalam proses perizinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan setiap daerah dalam proses penertiban izin berusaha harus berbasis elektronik dan terintegrasi melalui



*Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat memperpendek lama proses perizinan dan pemerintah mengetahui izin yang diterbitkan oleh daerah. Disisi lain, meningkatnya nilai investasi belum berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya nilai investasi terealisir akibat berbelit-belit proses ganti rugi tanah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi meningkatnya nilai investasi adalah dapat ditekannya angka kriminalitas. Angka tersebut, dihitung berdasarkan total kasus kriminalitas dalam setahun dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sedangkan, peristiwa demonstrasi dan unjuk rasa di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif tidak mempengaruhi terhadap iklim berinvestasi.

Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 0,05%. Sedangkan perkembangan jumlah kasus kriminalitas lebih banyak di Kecamatan Kamang Baru. Sementara itu, Kecamatan Kupitan nihil terhadap jumlah kasus kriminalitas tahun 2016-2019. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung relatif aman dalam berinvestasi. Perkembangan jumlah dan angka kriminalitas Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.68.**  
**Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2020**

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Kamang Baru	72	47	46	28
2	Tanjung Gadang	37	39	17	13
3	Sijunjung	40	38	21	20
4	Lubuk Tarok	11	12	7	2
5	IV Nagari	47	52	7	2
6	Kupitan	0	0	0	0
7	Koto VII	39	34	23	26
8	Sumpur Kudus	38	27	16	25
<b>Jumlah kriminalitas (kasus)</b>		<b>246</b>	<b>222</b>	<b>165</b>	<b>107</b>
<b>Jumlah penduduk (jiwa)</b>		<b>226.300</b>	<b>230.104</b>	<b>237.376</b>	<b>235.045</b>
<b>Angka kriminalitas (%)</b>		<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Sedangkan dari sisi aspek demonstrasi di Kabupaten Sijunjung perkembangannya selama lima tahun terakhir secara jumlahnya cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena sejalan dengan perkembangan pembangunan, politik dan demokrasi pada tingkat nasional maupun regional, maka demonstrasi/penyampaian aspirasi oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung memiliki kecenderungan meningkat. Sebagian besar tuntutan yang disampaikan



meliputi bidang politik dan keamanan, seperti aspirasi untuk penindakan terhadap peredaran narkoba, miras, pemberantasan penyakit masyarakat lainnya serta politik lokal.

Perkembangan jumlah demostrasi di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.69.**  
**Perkembangan Jumlah Demonstrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020**

No.	Jenis Demostrasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang politik	2	2	3	3	0
2	Bidang ekonomi	0	0	0	1	1
3	Bidang pemogokan kerja	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Dinas Satpol dan Damkar, 2021

#### 2.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis daya saing sumber daya manusia salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan di atas 60 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia produktif (15-59 tahun). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif. Jika sebaliknya persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah, menunjukkan beban yang ditanggung penduduk usia yang produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif.

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari capaian rasio ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 57,14%. Artinya, setiap 100 orang usia yang produktif mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang usia yang non produktif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.70.**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020**

No	Aspek	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk berusia < 15 Tahun	65.627	66.940	68.278	74.167	59.402
2	Jumlah Penduduk berusia > 60 Tahun	22.630	23.083	23.544	20.074	24.781
3	Jumlah Penduduk berusia Tidak Produktif	88.257	90.022	91.823	94.241	86.203
4	Jumlah Penduduk berusia 15-59 Tahun	138.043	140.082	141.987	143.135	150.862
5	<b>Rasio Ketergantungan ( % )</b>	<b>63,94</b>	<b>63,93</b>	<b>64,26</b>	<b>64,67</b>	<b>57,14</b>

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)



Sementara itu, kualitas penduduk usia penduduk produktif yang diukur melalui jenjang pendidikan yang ditamatkan hingga tahun 2020 mayoritas lulusan SD sebesar 23,26% dan diikuti yang tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 22,34%. Sedangkan penduduk usia produktif yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 9,25%. Kondisi ini mencerminkan penduduk usia produktif Kabupaten Sijunjung belum menujukkan kualitas. Oleh sebab itu, menjadi tantangan bagi daerah dalam pembangunan di masa akan datang.

Rincian penduduk usia produktif Kabupaten Sijunjung yang menamatkan jenjang pendidikan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.71.**

**Penduduk Usia Produktif Menamatkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sijunjung tahun 2020**

No.	Uraian	Angkatan Kerja (orang)		Bukan Angkatan Kerja (orang)	Jumlah (orang)	Rasio (%)
		Bekerja	P.Terbuka			
1	Tidak sekolah/tidak tamat SD	20.969	291	10.716	31.976	22,34
2	SD	23.071	453	9.763	33.287	23,25
3	SLTP	11.017	813	15.757	27.587	19,27
4	SMA	12.027	972	7.152	20.151	14,08
5	SMK	7.485	1.238	4.079	12.802	8,94
6	Diploma I-III	3.343	250	492	4.085	2,85
7	Perguruan Tinggi	11.594	203	1.450	13.247	9,25
<b>Jumlah</b>		<b>89.506</b>	<b>4.220</b>	<b>49.409</b>	<b>143.135</b>	<b>100</b>

*Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021 (data diolah)*

Berdasarkan analisis terhadap fokus aspek daya saing daerah, tergambar bahwa daya saing daerah dalam kurun waktu lima terakhir pada umumnya belum memiliki daya ungkit yang kuat untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini akan memberikan tantangan bagi daerah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan tuntutan pembangunan daerah saat ini.

## **2.5. Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2016 – 2021**

Ruang lingkup evaluasi realisasi RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi seluruh program pembangunan daerah menurut kategori urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Realisasi program pembangunan yang tidak memenuhi target kinerja hasil (*outcome*) yang direncanakan.
2. Realisasi program pembangunan yang telah memenuhi target kinerja hasil (*outcome*) yang direncanakan.



3. Realisasi program pembangunan yang melebihi target kinerja hasil (*outcome*) yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program pembangunan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 yang dihitung melalui indikator kinerja program pada masing-masing urusan pemerintahan daerah, terlihat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap pencapaian sasaran akhir program RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini ditandai dengan cukup rendahnya jumlah indikator kinerja program pembangunan yang tercapai dengan menggunakan tingkat capaian kinerja program pembangunan sama atau lebih besar dari 97%. Asumsi ini gunakan karena pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 belum berakhir, sehingga diindikasikan akan tercapai 100%. Gambaran tingkat capaian indikator kinerja program pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.72.**  
**Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan RKPD Tahun 2020**

No.	Kriteria Capaian	Jml Indikator Kinerja Program	Tkt. Capaian (%)	Simbol Kriteria Capaian
1	Tercapai ( $\geq 97\%$ )	121	60,20	●
2	Belum Tercapai ( $< 97\%$ )	80	39,80	▼
	<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>100</b>	

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Sijunjung Triwulan IV-2020

Berdasarkan data diatas, terlihat jelas bahwa realisasi kinerja program pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 tercapai sebanyak 121 indikator kinerja program atau 60,20%. Belum optimalnya pencapaian realiasi RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan. Namun disisi lain ada faktor keberhasilan yang mempengaruhi, sehingga terdapat juga beberapa indikator kinerja program yang telah memenuhi target dan bahkan ada yang telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2016-2021. Faktor hambatan dan keberhasilan realisasi RPJMD Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.73.**  
**Faktor Hambatan dan Keberhasilan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021**

<b>Faktor Hambatan</b>		<b>Faktor Keberhasilan</b>
<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam merumuskan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan</li> <li>2) Keterbatasan pemahaman sumber daya aparatur dalam menentukan target kinerja, tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sehingga masih terdapatnya indikator kinerja program yang capaiannya masih jauh dari target akhir RPJMD.</li> <li>3) Belum konsistennya Perangkat Daerah dalam merencanakan program dan kegiatan yang tidak mempedomani target akhir RPJMD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.</li> <li>2) Terjadinya perubahan kebijakan <i>readiness criteria</i> kegiatan DAK setiap tahun berjalan</li> <li>3) Terjadinya bencana alam dan non alam (pandemi covid-19), sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan RPJMD.</li> <li>4) Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah karena cukup rendahnya kesadaran dunia usaha/masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perangkat daerah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk merumuskan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode selanjutnya yang lebih substantif dan integratif sesuai dengan sasaran misi RPJMD.</li> <li>2) Perangkat Daerah berupaya secara optimal melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara berkala.</li> </ol>

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Sijunjung Triwulan IV-2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas faktor penghambat cukup rendahnya realisasi kinerja program pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 pada umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sehingga sangat berimplikasi terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan belum optimal pencapaian indikator kinerja pembangunan baik dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek layanan umum aspek daya saing daerah.

Gambaran umum realisasi kinerja program pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 per-urusan pemerintahan yang diklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.74.**  
**Capaian Program Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 Tahun 2020**

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab					
					%	Kriteria						
<b>I. URUSAN LAYANAN WAJIB DASAR</b>												
<b>Urusan Pendidikan</b>												
1)	Program Pendidikan Anak Usia Dini a) APK PAUD b) Persentase PAUD terakreditasi c) Persentase Jorong yang memiliki PAUD	% % %	79,60 20,02 95,00	70,56 79,26 82,24	88,64 392,08 86,57	▼●▼	Dinas Dikbud					
2)	Program Pendidikan Sekolah Dasar a) APK SD/MI/Paket A b) APM SD /MI/Paket A c) Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah d) Angka melanjutkan ke SMP e) Persentase ruang kelas baik SD f) Rata-rata nilai Ujian SD g) Persentase SD yang mencapai SPM h) Persentase SD yang berakreditasi minimal B i) Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD j) Jumlah SD yang memenuhi SNP	% % % % % % % % %	114,15 99,9 137 95,00 90,00 75,00 90,00 90,00 8 5	114,81 99,87 123,86 88,57 91,47 75,67 36,36 88,89 6 3	100,58 99,97 90,41 93,23 101,63 100,89 40,40 98,76 75 60	●●●●●●●●●●	Dinas Dikbud					
3)	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama a) APK SMP/MTs/Paket B b) APM SMP/MTs/Paket B c) Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah d) Persentase ruang kelas baik SD e) Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs f) Persentase SMP/MTs yang mencapai SPM g) Persentase SMP/MTs yang berakreditasi minimal B h) Jumlah sekolah rujukan i) Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP/MTs j) Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP	% % % % poin % % % % %	107 82,25 137 100 70 90,00 100 3 8 5	109,83 84,66 222,85 88,01 63,45 62,50 70,37 4 11 6	102,64 102,93 162,66 88,01 90,64 69,44 70,37 133,33 137,50 120	●●●●●●●●●●	Dinas Dikbud					
4)	Program Pendidikan Non Formal a) Angka Melek Huruf b) Jumlah PKBM	% PKBM	99,8 18	99,70 21	99,90 116,66	●●	Dinas Dikbud					
5)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a) Persentase guru yang bersertifikat pendidik b) Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80 c) Persentase guru berkualifikasi S1	% % %	75,00 75,00 95,00	83,40 60,00 95,00	111,21 80,00 100	●●●●	Dinas Dikbud					



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
6)	Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter 1) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter 2) Persentase siswa yang mendapatkan nilai perilaku minimal baik 3) Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan sekolah sehat	%	50	40,00	80,00	▼	Dinas Dikbud
7)	Program Pendidikan Inklusif 1) Jumlah sekolah inklusif	sklh	90	90,50	100,56	●	Dinas Dikbud
2.	<b>Urusan Kesehatan</b>						
1)	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan a) Persentase UPTD kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi b) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan	%	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
2)	Program Upaya Pelayanan Kesehatan a) Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	%	80	100	125	●	Dinas Kesehatan
3)	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Persentase pelayanan kunjungan neonatal 1 (KN1) sesuai standar	%	90	87,00	96,67	▼	Dinas Kesehatan
4)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat a) Persentase balita gizi kurang	%	9,0	9,40	104,44	●	Dinas Kesehatan
5)	Program Pencapaian Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan a) Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
6)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	%	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
7)	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular a) Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	100	95,20	95,20	▼	Dinas Kesehatan
8)	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	60	55	91,67	▼	Dinas Kesehatan
9)	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan a) Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
10)	Program Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan a) Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan pemeliharaan kesehatan	%	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
11)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a) Persentase nagari siaga aktif b) Persentase sekolah sehat	%	80,00	76,57	95,71	▼	Dinas Kesehatan



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
12)	Program Penyehatan Lingkungan a) Persentase nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) b) Persentase kecamatan yang memfasilitasi kawasan sehat	%	50,00	44,58	89,17	▼	Dinas Kesehatan
13)	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a) Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar rumah sakit tipe C	%	100	90,16	90,16	▼	RSUD
14)	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan a) Kategori akreditasi rumah sakit b) Persentase tingkat hunian rumah sakit (bed occupancy rate) c) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD	Kate-gori	Paripurna	utama	90,00	▼	RSUD
15)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a) Persentase peningkatan pendapatan BLUD	%	20	16,13	80,65	▼	RSUD
<b>3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1)	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan a) Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap b) Persentase panjang jembatan pada jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	65,0	41,08	63,20	▼	Dinas PUPR
2)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Cakupan luas daerah irigasi dengan kondisi baik	%	85,00	68,88	81,04	▼	Dinas PUPR
3)	Program Pemutakhiran Data Base jalan dan jembatan a) Persentase tersedianya data/informasi jalan dan jembatan untuk perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	%	100	100	100	●	Dinas PUPR
4)	Program Penguatan dan Normalisasi Sungai a) Panjang sungai yang dinormalisasi	Mtr	1.300	765,44	58,88	▼	Dinas PUPR
5)	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku a) Luas cakupan layanan air baku yang dikelola/ dibangun	Ha	7.500	5.862,72	78,17	▼	Dinas PUPR
6)	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik a) Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik	%	100	100	100	●	Dinas PUPR
7)	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	%	100	100	100	●	Dinas PUPR
8)	Program Pengembangan Utilitas Perkotaan a) Panjang akses pejalan kaki dan disabilitas b) Luas Ruang Terbuka Hijau	Mtr m <sup>2</sup>	2.000 4.000	0 3.548,77	0 88,72	▼	Dinas PUPR



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
9)	Program Perencanaan Tata Ruang a) Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	80	80	▼	Dinas PUPR
10)	Program Pembangunan Gedung Kantor a) Persentase gedung kantor Pemda yang representatif	%	100	86,00	86,00	▼	Dinas PUPR
11)	Program Pembinaan Jasa Konstruksi a) Persentase rekomendasi usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	%	100	90,56	90,56	▼	Dinas PUPR
<b>4.</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
1)	Program Lingkungan Sehat Perumahan a) Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	%	70	91,22	130,31	●	Disperkim & LH
2)	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum a) Cakupan akses air minum aman bagi masyarakat	%	100	69,11	69,11	▼	Disperkim & LH
3)	Program Pengelolaan Limbah a) Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	%	100	72,11	72,11	▼	Disperkim & LH
4)	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	%	60	55,67	92,78	▼	Disperkim & LH
5)	Program Penataan Kawasan Perdesaan a) Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	%	55	97,61	177,47	●	Disperkim & LH
<b>5.</b>	<b>Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
1)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a) Persentase menurunnya kasus tindak kriminal b) Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	5	4,6	92	▼	Dinas Satpol PP & Damkar
2)	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat a) Persentase nagari yang terlayani kamtibmas	%	100	100	100	●	Kantor Kesbangpol
3)	Program Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati a) Persentase kasus pelanggaran Perda/Perbup yang diselesaikan	%	100	96,09	96,09	▼	Dinas Satpol PP & Damkar
4)	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran a) Persentase kejadian kebakaran yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas pemadam kebakaran	%	100	100	100	●	Dinas Satpol PP & Damkar
5)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Persentase pemahaman generasi muda dan tokoh agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	%	100	73,46	73,46	▼	Kantor Kesbangpol



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
6)	Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada	%	75	70,51	94,01	▼	Kantor Kesbangpol
7)	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat a) Persentase penurunan penyakit masyarakat dalam tahun	%	5	4,6	108,70	●	Kantor Kesbangpol
8)	Program Peningkatan Mitigasi Bencana a) Jumlah dokumen mitigasi bencana	Dok.	4	0	0	▼	BPBD
9)	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana a) Jumlah nagari tangguh bencana	Naga ri	8	6	75	▼	BPBD
b)	Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana	KSSB / KSB	4	4	100	●	
10)	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana a) Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanganan bencana	%	100	100	100	●	BPBD
11)	Program Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam a) Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan	%	100	40	40	▼	BPBD
<b>6.</b>	<b>Urusan Sosial</b>						
1)	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial a) Persentase RTSM/KSM yang menerima bantuan dasar	%	100	100	100	●	Dinas Sos, PPr & PA
2)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	100	100	100	●	Dinas Sos, PPr & PA
3)	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial a) Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	●	Dinas Sos, PPr & PA
<b>II.</b>	<b>URUSAN LAYANAN WAJIB NON DASAR</b>						
<b>1.</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>						
1)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Persentase pencari kerja yang telah dilatih	%	38,00	90,40	237,90	●	Dinas Nakertrans
2)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	%	35,00	36,94	105,54	●	Dinas Nakertrans
3)	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	●	Dinas Nakertrans
<b>2.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
1)	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak a) Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan b) Jumlah kasus tidak terlindunginya hak anak yang ditangani.	Ka-sus	16	17	106,25	●	Dinas Sos, PPr & PA
2)	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	92,45	93,01	100,61	●	Dinas Sos, PPr & PA
		%	56,33	55,47	98,47	●	



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Krite-ria	
<b>3.</b> 1)	<b>Urusan Pangan</b> Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Skor Pola Pangan Harapan	%	95,90	88,00	91,76	▼	Dinas Paperi
<b>4.</b> 1)	<b>Urusan Pertanahan</b> Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan a) Persentase sengketa lahan dan konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda yang diselesaikan	%	100	100	100	●	Dinas PUPR
<b>5.</b> 1) 2) 3)	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b> Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Indeks kualitas lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a) Persentase perlindungan dan konservasi SDA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	%	73,80	82,53	111,83	●	Dinas Perkim & LH
		%	87,00	81,85	94,08	▼	Dinas Perkim & LH
		%	20,00	31,23	141,15	●	Dinas Perkim & LH
<b>6.</b> 1)	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> Program Penataan Administrasi Kependudukan a) Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga b) Persentase penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik c) Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	95,00	93,50	98,42	●	Dinas Duk & Capil
		%	95,00	96,13	101,19	●	
		%	75,00	78,81	105,09	●	
<b>7.</b> 1) 2)	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b> Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Nagari a) Persentase Kerapatan Adat Nagari yang aktif b) Jumlah nagari/desa berkembang Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari a) Persentase nagari yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu b) Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya	%	100	100	100	●	Dinas PMN
		Nag/desa	30	61	203,33	●	
		Org	248	244	98,38	●	
<b>8.</b> 1) 2) 3)	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> Program Keluarga Berencana a) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif Program Pembangunan Keluarga a) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Program Pengendalian Penduduk a) Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	%	72,24	70,82	98,04	●	Dinas Dalduk & KB
		%	23,62	20,90	113,01	●	
		%	2,68	2,75	97,45	●	
<b>9.</b> 1)	<b>Urusan Perhubungan</b> Program peningkatan Pelayanan Angkutan jalan dan Perkeretaapian a) Persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan	%	100	100	100	●	Dinas Perhubungan



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
2)	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas a) Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten	%	80,00	65,20	81,56	▼	Dinas Perhubungan
<b>10.</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>						
1)	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik a) Jumlah media elektronik dan tradisional Pemerintah Daerah yang dapat diakses publik	Media	11	8	72,73	▼	Dinas Kominfo
2)	Program Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah a) Persentase OPD yang menerapkan e-government	%	100	100	100	●	Dinas Kominfo
<b>11.</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
1)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah a) Persentase peningkatan jumlah UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan b) Rata-rata nilai SHU Koperasi	% Rp juta/thn	50,00 12.545	50 72.500	100 577,92	● ●	Dinas Dagperinkop & UMKM
2)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Persentase koperasi aktif	%	45,51	79,10	173,80	●	Dinas Dagperinkop & UMKM
3)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Jumlah pelaku UKM yang meningkat pengetahuan kewirausahaannya b) Persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan "Sehat"	Orang %	85 18	106 15	124,71 83,33	● ▼	Dinas Dagperinkop & UMKM
<b>12.</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>						
1)	Program Peningkatan Promosi, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a) Jumlah investor PMDN b) Jumlah investor PMA c) Realisasi investasi PMDN d) Realisasi investasi PMA	Perusa-haan M. Rp US\$	154 12 8.779,88 190.000	167 10 9.021,10 193.559	108,44 83,33 102,75 101,87	● ▼ ● ●	Dinas PMPTSP
<b>13.</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>						
1)	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Org.	25	25	100	●	Dinas Parpora
2)	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a) Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Pering-kat	9	9	100	●	Dinas Parpora
3)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak/terstandarisasi	%	70	60	85,71	▼	Dinas Parpora
<b>14.</b>	<b>Urusan Statistik</b>						
1)	Program Pengembangan Statistik Sektoral a) Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia tepat waktu	dok.	15	13	86,67	▼	Dinas Kominfo



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
<b>15.</b>	<b>Urusan Persandian</b>						
1)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah a) Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	%	100	75,00	75,00	▼	Dinas Kominfo
<b>16.</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>						
1)	Program Pengelolaan Kekayaan Sejarah dan Budaya a) Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	89,75	89,75	▼	Dinas Dikbud
2)	Program Pengembangan Nilai Budaya a) Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK	Lembaga	15	15	100	●	Dinas Dikbud
3)	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah dan Budaya a) Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan b) Jumlah SDM seni budaya yang dikembangkan potensinya c) Jumlah SDM sejarah dan kepurbakalaan yang dikembangkan potensinya	Seko l-ah Orang Orang	60 375 375	61 275 225	101,66 73,33 60	● ▼ ▼	Dinas Dikbud
<b>17.</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>						
1)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a) Jml buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun b) Jml perpustakaan c) Jml perpustakaan terstandar d) Jml anggota perpustakaan e) Jml pengunjung perpustakaan/pemustaka dalam setahun	Eksemplar unit unit Org Org	14.580 345 170 39.700 28.000	13.260 297 150 37.504 15.810	90,94 86,08 88,24 94,47 56,46	▼ ▼ ▼ ▼ ▼	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
<b>18.</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>						
1)	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah a) Persentase OPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku b) Jumlah box arsip yang berada dalam depo/ lembaga karsipan daerah	% Box arsip	100 3.000	65,60 2.952	65,60 98,40	▼ ●	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan a) Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan	Dok	5	5	100	●	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
3)	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a) Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan karsipannya per tahun b) Jumlah dokumen/arsip daerah yang dialih mediakan per tahun c) Jumlah arsip konvensional/naskah kuno yang dipelihara	Orang Dok Naskah	80 120 200	60 104 202	75,00 86,67 101	▼ ▼ ●	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
<b>III.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>						
<b>1.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>						
1)	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian a) Persentase UP3HP yang terbina	%	100	100	100	●	Dinas Pertanian



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
2)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,21	100,65	100,44	●	Dinas Pertanian
3)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian a) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/ perkebunan per tahun	%	5,00	4,50	90,00	▼	Dinas Pertanian
4)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan a) Produktivitas padi b) Produksi karet	Ton/ha Ton/ha	6,0 71.600	5,4 64255	90,00 89,74	▼ ▼	Dinas Pertanian
5)	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Produksi daging sapi/ kerbau b) Produksi telur ayam ras	Ton/kg 416.000	720 416.000	695 608.000	96,57 146,15	▼ ●	Dinas Pertanian
6)	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak a) Tingkat kematiian ternak	%	3	3,6	75,00	▼	Dinas Pertanian
7)	Program penjaminan produk hewan yang asuh dan berdaya saing a) Persentase pemotongan hewan yang ASUH di RPU/RPA/RPH	%	100	100	100	●	Dinas Pertanian
8)	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a) Jumlah ternak yang terjual di pasar ternak	Ekor / thn	20.000	17.000	85,00	▼	Dinas Pertanian
9)	Program Pemberdayaan Penyalur Pertanian/ Perkebunan Lapangan a) Jumlah kelompok usaha pertanian dengan agribisnis yang terintegrasi	Klpk. Usaha	40	31	77,50	▼	Dinas Pertanian
<b>2.</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>						
1)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Produksi perikanan budidaya	Ton/ thn	14.000	13.879	99,14	●	Dinas Paperi
2)	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a) Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Unit usaha	9	9	100	●	Dinas Paperi
<b>3.</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>						
1)	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata a) Jumlah kemitraan pariwisata	Kerja sama	2	2	100	●	Dinas Parpora
2)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a) Jumlah even promosi even pariwisata yang diikuti dan diselenggarakan	Unit usaha	20	19	95,00	▼	Dinas Parpora
3)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Jumlah destinasi wisata yang berkembang	Ob- jek wisata	11	6	54,55	▼	Dinas Parpora
4)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif a) Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	Ora- ng	30	30	100	●	Dinas Parpora
<b>5.</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>						
1)	Program Peningkatan Usaha Perdagangan a) Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,49	6,45	99,38	●	Dinas Dagperinkop & UMKM
<b>6.</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>						
1)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Potensi Lokal dan Sentra a) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	4,56	4,57	100,22	●	Dinas Dagperinkop & UMKM



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
	b) Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda	Sentra	4	5	125	●	
2)	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna Industri Kecil dan Menengah a) Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna	IKM	180	39	21,66	▼	Dinas Dagperinkop & UMKM
<b>7.</b>	<b>Urusan Transmigrasi</b>						
1)	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi a) Jumlah transmigran yang ditempatkan per tahun	KK	100	191	191	●	Dinas Nakertrans
	b) Jumlah transmigran yang dibina	KK	300	221	73,67	▼	
2)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) a) Persentase sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi yang di bangun	%	100	60,99	60,99	▼	Dinas Nakertrans
<b>IV.</b>	<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>						
<b>1.</b>	<b>Fungsi Perencanaan</b>						
1)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Tingkat keselarasan Renstra terhadap RP JMD`	%	100	100,00	100,00	●	Bapppeda
	b) Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	100	100,00	100,00	●	
	c) Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPd	%	100	95,00	95,00	▼	
<b>2.</b>	<b>Fungsi Keuangan</b>						
1)	Program Peningkatan dan Pengembangan Penge Iolaan Keuangan Daerah a) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	●	BKAD
	b) Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	M. Rp	123,28	90.740	73,60	▼	
2)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Persentase kasus TPTGR yang diselesaikan	%	100	85,60	85,60	▼	BKAD
<b>3.</b>	<b>Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>						
1)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselonering`)	%	100,00	69,50	69,50	▼	BKPSDM
	b) Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi	%	100,00	56,45	56,45	▼	
	c) Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar/izin belajar per tahun	orang	1.430	536	37,48	▼	
2)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	%	100,00	100,00	100	●	BKPSDM
	b) Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu	%	100,00	100,00	100	●	
	c) Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	%	75,00	100,00	100	●	



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Krite-ria	
3)	d) Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	75,00	80,00	106,67	●	BKPDSM
	e) Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian	%	100,00	100,00	100	●	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti b) Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun	% orang	65 600	53 600	81,54 100	▼ ●	
4.	<b>Fungsi Penelitian dan Pengembangan</b>						Bapppeda
1)	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah a) Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan/dipedomani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	%	75	65	86,67	▼	
5.	<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>						
1)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi kinerja dan Keuangan a) Nilai AKIP Pemda b) Nilai LPPD	Skor Predi-kat	B Sangat Tinggi	B Sangat Tinggi	100 100	● ●	Setdakab
2)	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah a) Presentase SKPD yang melakukan Analisa Jabatan	%	100	100	100		Setdakab
3)	Program Peningkatan Masyarakat Pelayanan Publik a) Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan b) Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	% In-deks	100 82,00	100 80,20	100 97,80	● ●	Setdakab
4)	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	%	100	92,00	92,00	▼	Setdakab
5)	Program Mengintensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat a) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	89,11	89,11	▼	Setdakab
6)	Program Pengendalian Pembangunan Daerah a) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Wak-tu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	●	Setdakab
7)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Leveling Maturitas SPIP b) Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan		4 100	3 90,00	75,00 90,00	▼ ▼	Inspektorat Daerah
8)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a) Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat kompetensi teknis pengawasan	%	90,00	85,56	95,06	▼	Inspektorat Daerah
9)	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a) Penetapan RAPBD	Wak-tu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	●	Setwan



No.	Urusan/Sub Urusan/Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target RPJMD s/d 2021	Real RPJMD s/d 2020	Tkt. Kinerja Real RPJMD s/d 2020		OPD Penanggung Jawab
					%	Kriteria	
10)	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	In-deks	84,0	84,51	100,61	●	DPMPTSP

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Sijunjung Triwulan IV-2020

Berdasarkan gambaran tabel diatas, terlihat jelas cukup besarnya jumlah realisasi kinerja program pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD. Sehingga berimplikasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah yang tergambar pada pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020. Pencapaian ini, tentu saja menjadi salah satu poin penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang. Selanjutnya akan terjabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Analisis kondisi umum daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2016-2020 mengacu kepada target TPB nasional dan target akhir RPJMD Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.75.**  
**Hasil Analisis Kondisi Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi				
			2016	2017	2018	2019	2020					
<b>A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>												
<b>1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>												
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,26	5,07	4,81	-1,10	Belum tercapai				
1.2	Angka kemiskinan	%	7,60	7,35	7,11	7,04	6,78	Belum tercapai				
1.3	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	17.120	16.830	16.550	16.650	16.280	Belum tercapai				
1.4	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	32.873	34.671	36.423	38.477	38.810	Belum tercapai				
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4	3,32	3,22	3,64	5,30	Belum tercapai				
1.6	Gini Ratio	nilai	0,33	0,33	0,3	0,29	0,27	Tercapai				
<b>2. Fokus Kesejahteraan Sosial</b>												
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74	Belum tercapai				
2.2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,24	92,34	92,74	93,21	93,01	Belum tercapai				
2.3	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	56,21	56,68	56,84	55,47	59,96	Belum tercapai				
<b>B. Aspek Pelayanan Umum</b>												
<b>1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>												
<b>1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>												
1.1.1	Harapan lama sekolah	Thn.	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37	Belum tercapai				
1.1.2	Rata-rata lama sekolah	Thn.	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11	Belum tercapai				
1.1.3	APS SD/MI	%	96,56	97,89	98,50	99,63	99,99	Belum tercapai				
1.1.4	APS SMP/MTs	%	82,67	84,56	85,89	87,76	89,98	Belum tercapai				
1.1.5	APK PAUD	%	75,43	75,53	75,65	79,41	70,56	Belum tercapai				
1.1.6	APK SD/MI/Paket A	%	113,79	110,73	110,81	113,77	114,81	Belum tercapai				
1.1.7	APK SMP/MTs/ Paket B	%	98,48	99,98	101,12	101,42	109,83	Tercapai				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.8	APM SD/MI/Paket A	%	99,65	99,69	99,83	99,84	99,87	Tercapai
1.1.9	APM SMP/MTs/ Paket B	%	79,99	81,90	82,25	85,02	84,66	Tercapai
1.1.10	Angka kelulusan SD/MI	%	99,79	100	98,95	100,14	99,88	Tercapai
1.1.11	Angka kelulusan SLTP/MTs	%	99,97	94,14	100	92,55	99,49	Tercapai
1.1.12	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,1	0,2	0,1	0,07	0,06	Tercapai
1.1.13	Angka Putus Sekolah SLTP/MTs	%	0,7	1,3	1,0	0,35	0,40	Tercapai
1.1.14	Persentase guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	83,98	86,70	89,98	92,61	94,85	Belum tercapai
1.1.15	Persentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	83,35	85,04	92,85	93,32	97,33	Belum tercapai
<b>1.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>							
1.2.1	Usia Harapan Hidup	Thn.	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21	Belum tercapai
1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	17	19	15,84	6,2	15,3	Belum tercapai
1.2.3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	%	95	141	113	143	170	Belum tercapai
1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	8	9	6,79	7,6	7,8	Belum tercapai
1.2.5	Prevelansi balita gizi buruk	%	14,5	18,9	14,65	16,06	15,5	Belum tercapai
1.2.6	Prevelansi balita stunting	%	28,20	38,70	27,40	22,40	23,40	Belum tercapai
1.2.7	Angka kejadian Malaria	%	3,98	1,74	4,7	2,5	2,9	Belum tercapai
<b>1.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1.3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	24,50	32,46	34,86	38,94	66,54	Belum tercapai
1.3.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,62	0,62	0,79	0,79	0,79	Belum tercapai
1.3.3	Rasio Jaringan Irigasi	%	54,23	52,32	59,47	58,58	41,87	Belum tercapai
1.3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,46	57,34	58,6	60,73	60,90	Belum tercapai
1.3.5	Persentase penduduk berakses air bersih	%	67,70	68,78	69,40	69,10	69,50	Belum tercapai
1.3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	67,73	69,56	71,60	71,10	71,37	Belum tercapai
1.3.7	Persentase luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	n.a	2,30	2,30	2,30	2,70	Belum tercapai
1.3.8	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	7,99	8,34	8,80	9,10	9,10	Belum tercapai
1.3.9	Persentase ketataan terhadap RTRW	%	n.a	n.a	n.a	n.a	59,96	Belum tercapai
<b>1.4</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
1.4.1	Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	%	n.a	63,19	64,67	62,41	77,03	Belum tercapai
1.4.2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	n.a	96,77	96,92	98,47	100	Tercapai
1.4.3	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	%	0	0	0	0	0	Belum tercapai
<b>1.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat per 1.000 penduduk	%	0,79	0,80	0,83	0,83	0,71	Belum tercapai



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.5.2	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) Damkar	%	20	20	20	18	15	Belum tercapai
1.5.3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Belum tercapai
<b>1.6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>							
1.6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	53,77	56,7	61,88	54,38	52,73	Belum tercapai
1.6.2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	n.a	9,32	8,51	7,87	7,87	Belum tercapai
<b>2.</b>	<b>Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>							
2.1.1	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	8,83	48,74	54,43	36,48	36,94	Belum tercapai
2.1.2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	81,81	88,88	91,42	90,40	90,18	Belum tercapai
<b>2.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	56,21	56,68	56,84	55,47	59,96	Belum tercapai
2.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	n.a	64	64	64	64	Belum tercapai
2.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	10	10	10	13	13	Belum tercapai
2.2.4	Rasio KDRT	%	n.a	0,001	0,001	0,001	0,017	Tercapai
2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	n.a	0,03	0,03	0,03	0,03	Belum tercapai
2.2.6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	n.a	100	100	100	100	Tercapai
<b>2.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>							
2.3.1	Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk	Nilai	n.a	291,23	310,75	282,10	295,87	Belum tercapai
2.3.2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	73,80	75,30	78,20	79,30	88,00	Belum tercapai
2.3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	35,71	44,44	40,00	7,69	7,69	Belum tercapai
<b>2.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>							
2.4.1	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	%	n.a	50	100	100	100	Tercapai
<b>2.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>							
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	n.a	n.a	67,83	66,45	69,06	Belum tercapai
2.5.2	Indeks Kualitas Air	Skor	n.a	n.a	30,00	78,13	50,00	Belum tercapai
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	Skor	n.a	n.a	91,25	86,93	89,05	Tercapai
2.5.4	Indeks Tutupan lahan	Skor	n.a	n.a	65,56	64,82	64,46	Belum tercapai
2.5.5	Persentase penanganan sampah	Skor	n.a	n.a	n.a	19,24	15,65	Belum tercapai
<b>2.6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	89,71	94,10	97,12	93,34	92,93	Belum tercapai
2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	76,41	90,75	88,71	86,04	93,48	Belum tercapai
<b>2.7</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
2.7.1	Indeks Desa Membangun	Nilai	n.a	n.a	n.a	0,6985	0,7024	Belum tercapai
2.7.2	Jumlah Desa Mandiri	Nagari/Desa	0	0	0	4	9	Belum tercapai



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.7.3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Nagari/Desa yang baik	%	65	75	85	90	95	Belum tercapai
<b>2.8</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
2.8.1	Total Fertility Rate (TFR)	nilai	2,8	2,9	2,5	2,68	2,75	Belum tercapai
2.8.2	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	n.a	50	50	50	50	Belum tercapai
2.8.3	Ratio Akseptor KB	%	78,94	70,57	72,56	69,09	70,82	Belum tercapai
2.8.4	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	78,94	70,57	72,56	69,09	70,53	Belum tercapai
2.8.5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	7,73	13,50	10,42	14,31	12,03	Belum tercapai
2.8.6	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terhadap total keluarga	%	62,45	19,84	19,84	20,90	20,90	Belum tercapai
<b>2.9</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>							
2.9.1	Persentase pemasangan rambu-rambu jalan	%	82	87	90	92	75	Belum tercapai
2.9.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	n.a	n.a	n.a	n.a	16,44	Belum tercapai
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>							
2.10.1	Maturitas SPBE	Skor	n.a	n.a	1,46	2,04	2,84	Belum tercapai
2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	%	n.a	8	11	11	11	Belum tercapai
<b>2.11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	42,1	47,5	47,5	47,5	79,10	Belum tercapai
2.11.2	Persentase BPR/LKM aktif	%	51,5	72,3	72,3	72,7	72,7	Belum tercapai
2.11.3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	10,0	13,3	11,5	25,6	25,6	Belum tercapai
<b>2.12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>							
2.12.1	Jumlah investor PMDN	Persh.	98	118	124	144	167	Tercapai
2.12.2	Jumlah investor PMA	Persh.	6	6	9	10	10	Tercapai
2.12.3	Jumlah nilai investasi PMDN	Miliar Rp	1.279,88	4.133,36	7.109,78	8.097,75	9.021,10	Tercapai
2.12.4	Jumlah nilai investasi PMA	US\$	32.370	122.171	158.668	189.937	193.559	Tercapai
2.12.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n.a	76,90	83,14	83,53	84,51	Tercapai
<b>2.13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>							
2.13.1	Persentase wirausaha muda	%	n.a	n.a	n.a	12,97	0,12	Belum tercapai
2.13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	96,19	96,19	92,60	96,87	75	Belum tercapai
2.13.3	Cakupan pembinaan atlet muda	%	70,91	76,94	78,85	78,79	33,78	Belum tercapai
<b>2.14</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>							
2.14.1	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	0	0	0	0	0	Belum tercapai
2.14.2	Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB	buku	3	3	3	3	3	Tercapai
<b>2.15</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>							
2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	%	n.a	10	15	20	23	Belum tercapai



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>								
2.16.1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	n.a	30	54,55	60	99,71	Tercapai
2.16.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	n.a	2	9	9	0	Belum tercapai
2.16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	n.a	12	14	18	18	Tercapai
<b>2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>								
2.17.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001	Belum tercapai
2.17.2	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun		9.143	9.204	9.674	6.665	5.810	Belum tercapai
2.17.3	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	20.140	20.956	21.480	21.480	13.260	Belum tercapai
2.17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	1	1	1	3	1	Belum tercapai
<b>2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>								
2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	n.a	n.a	15,60	65,60	65,60	Belum tercapai
2.18.2	Jumlah SDM pengelola karsipan sesuai kompetensi	orang	33	50	67	75	75	Tercapai
<b>3 Urusan Pilihan</b>								
<b>3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>								
3.1.1	Nilai Tukar Petani Perikanan	Nilai	106,48	109,48	107,89	104,43	94,52	Belum tercapai
3.1.2	Persentase produksi perikanan terhadap target	%	75,91	79,32	82,45	92,57	78,21	Belum tercapai
3.1.3	Persentase konsumsi ikan terhadap target	%	96,68	96,42	86,50	92,52	91,70	Belum tercapai
<b>3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>								
3.2.1	Persentase jumlah kunjungan wisata terhadap target	%	96,11	128,77	112,09	109,08	101,01	Tercapai
3.2.2	Rata-rata kunjungan Wisata per tahun	%	8.861	12.466	14.968	16.021	10.234	Belum tercapai
<b>3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>								
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	32,00	31,55	30,64	29,59	27,71	Belum tercapai
3.3.2	Jumlah produksi pertanian/perkebunan :							
	• Padi	Ton	110.128	88.468	120.175	99.367	109.277	Belum tercapai
	• Jagung	Ton	4.849	1.880	2.868	3.638	5.646	Belum tercapai
	• Manggis	Ton	3.184,6	444,5	827,6	1.736,6	4.071,2	Belum tercapai
	• Karet	Ton	48.194	52.492	50.256	62.005	64.255	Belum tercapai
	• Kelapa sawit	Ton	37.329	107.949	116.069	117.473	113.370	Tercapai
	• Coklat	Ton	1.263	1.261	1.326	1.130	1.171	Belum tercapai
3.3.3	Jumlah produksi peternakan :							
	• Daging Sapi/Kerbau	Ton	585,43	573,86	452,64	548,88	584,09	Belum tercapai
	• Telur unggas	Ton	547,02	869,32	691,26	1.168,98	1.495,95	Tercapai
3.3.4	Tingkat produktivitas padi	Ton/ha	5,42	4,99	4,57	3,96	5,40	Belum tercapai



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>								
3.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,08	11,50	11,74	11,80	11,71	Belum tercapai
3.4.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	0	0	0	Belum tercapai
<b>3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>								
3.5.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	3,18	3,04	3,00	2,53	2,60	Belum tercapai
3.5.2	Cakupan bina Industri Kecil dan Menengah	%	n.a	100	100	106	106	Tercapai
<b>3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>								
3.6.1	Percentase transmigran swa-karsa	%	0	0	0	0	0	Belum tercapai
3.6.2	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan dalam kawasan transmigrasi	KK	30	0	191	221	221	Tercapai
3.6.3	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai	0	0	0	0	0	Belum tercapai
<b>4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	n.a	n.a	n.a	n.a	47,97	Belum tercapai
4.1.2	Nilai SAKIP	Nilai	40,42	43,12	57,67	60,58	62,11	Belum tercapai
4.1.3	Nilai LPPD	Nilai	3,0918	2,9238	3,0514	3,1510	0	Belum tercapai
4.1.4	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72,26	77,79	74,60	78,34	80,20	Belum tercapai
<b>5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>								
<b>5.1 Unsur Perencanaan Pembangunan</b>								
5.1.1	Percentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD.	%	85	90	90	95	95	Belum tercapai
5.1.2	Percentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	n.a	n.a	n.a	n.a	59,96	Belum tercapai
<b>5.2 Unsur Keuangan</b>								
5.2.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
5.2.2	Percentase SILPA terhadap APBD	%	0,06	0,14	0,11	0,88	0,11	Tercapai
5.2.3	Percentase belanja pendidikan	%	34	82	29	28	29,54	Tercapai
5.2.5	Percentase belanja kesehatan	%	13	34	14	16	16,94	Tercapai
5.2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	47 : 53	48 : 52	49 : 51	49 : 51	41:58	Belum tercapai
<b>5.3 Unsur Kepegawaian</b>								
5.3.1	Indeks Merit Sistem	indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Belum tercapai
5.3.2	Percentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	66,65	63,08	63,38	61,85	59,67	Belum tercapai
<b>5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>								
5.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n.a	n.a	37,42	52,45	53,76	Belum tercapai
5.4.2	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Nilai	1,79	1,84	1,00	2,74	1,68	Belum tercapai



No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Tahun dan Capaian					Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020	
5.4.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	6,24	6,61	6,48	3,22	0,69	Belum tercapai
<b>5.5</b>	<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>							
5.5.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangaan	%	n.a	n.a	40	45	65	Belum tercapai
5.5.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n.a	n.a	n.a	8,57	8,57	Belum tercapai
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>							
5.5.1	Maturitas SPIP	Level	n.a	1+	2+	2+	3	Belum tercapai
5.5.2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	1	2	2	2+	2+	Belum tercapai
5.5.3	Jumlah temuan BPK	Jml	16	37	23	7	18	Belum tercapai
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>							
7.7.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahannya	Nilai	n.a	n.a	n.a	n.a	72,45	Belum tercapai
7.7.2	Persentase nagari/desa dengan Kategori Minimal Maju	%	n.a	n.a	n.a	n.a	10	Belum tercapai
7.7.3	Persentase penurunan potensi konflik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	2	Belum tercapai
7.7.4	Persentase administrasi pemerintahan dan keuangan Nagari/Desa yang dilaksanakan sesuai standar	%	n.a	n.a	n.a	n.a	85	Belum tercapai
<b>C.</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>							
<b>1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
1.1	Pengeluaran ril per-kapita	Rp juta	60,81	64,51	67,54	70,05	73,14	Tercapai
1.2	Nilai Tukar Petani	Nilai	97,67	96,97	95,31	96,01	100,58	Tercapai
<b>2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
2.1	Jumlah ketersediaan energi listrik	Juta kwh	47,00	50,31	50,41	52,65	55,95	Belum tercapai
2.2	Cakupan layanan internet setiap nagari/desa	%	43	43	43	48	48	Belum tercapai
2.3	Cakupan akses air minum bagi masyarakat	%	53,83	52,61	58,65	68,68	61,23	Belum tercapai
<b>3.</b>	<b>Fokus Iklim Investasi</b>							
3.1	Angka Kriminalitas	%	0,04	0,11	0,10	0,07	0,05	Belum tercapai
3.2	Jumlah demonstrasi	Jml	2	2	3	4	1	Tercapai
<b>4.</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
4.1	Rasio Ketergantungan	%	63,94	63,93	64,26	64,67	57,14	Belum tercapai

Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kurun waktu lima tahun terakhir, secara rata-rata capaian indikator kinerja belum sesuai dengan target nasional dan RPJMD Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang implementatif terhadap penyusunan RPJMD periode berikutnya melalui upaya-upaya; 1) penajaman terhadap isu strategis daerah secara holistik-tematik, sehingga dapat diperoleh arah dan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran, 2) menciptakan kerangka kerja logis (*logical framework*) perencanaan pembangunan yang selaraskan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah terpilih, sehingga dapat menjawab isu-isu strategis daerah lima tahun mendatang, dan 3) menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya secara integrasi dan spasial, sehingga terwujudnya visi dan sasaran misi RPJMD.

## **2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian, pembbiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian / Lembaga (K/L).

Penerapan SPM menjadi sangat *urgent* dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Di setiap Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan pendanaan yang tertuang dalam APBD/APBN. Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai kegiatan masing-masing unit kerja.

Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi Unit Kerja, tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD/APBN. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja. Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.76.**  
**Jenis Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	5	2020
2	Kesehatan	12	12	2020
3	Sosial	5	5	2020
4	Perumahan	2	2	2022
5	Pendidikan	3	3	2020
6	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	2	2020

Berdasarkan jenis SPM diatas, maka capaian SPM sesuai dengan target dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.77.**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
<b>I. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Percentase Perda/Perkada yang ditegakan	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	35.000	30.500	87,14
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35.000	30.500	87,14
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	30.550	0
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	0	25	0
<b>II. Bidang Kesehatan</b>					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	a) Cakupan Pelayanan Ibu sesuai standar b) Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi ditangani	5.699	5.220	92
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	a) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Fasyankes b) Cakupan pelayanan KF 3	46.353	33.980	73



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
		c) Cakupan Pelayanan KB Aktif			
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	a) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani b) Cakupan pelayanan KN Lengkap	4.747	4.286	90,29
4	Pelayanan kesehatan balita	a) Anak Balita sesuai standar b) Cakupan Imunisasi lengkap pada bayi, c) Cakupan Imunisasi Booster Lengkap d) Cakupan Pemberian Vit. A Anak Balita e) Cakupan Pelayanan Bayi f) Cakupan D/S Balita	69.780	57.059	82
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	a) Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SD dan setingkat. b) Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SLTP dan setingkat c) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SD dan setingkat d) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SLTP dan setingkat e) Cakupan Pelaksanaan UKGS f) Cakupan Pelaksanaan Kesehatan Indera g) Cakupan Imunisasi Anak Sekolah	20.867	9.861	47
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	a) Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SLTA dan setingkat b) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa baru SLTA. c) Cakupan Skrening di Posbindu d) Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil e) Cakupan Skrening di UKK f) Cakupan Paracite Indek (API)<1 Per 1000 penduduk	403.036	231.345	57



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
		g) Visite Rate h) Cakupan Pelaksanaan Gigi dan Mulut i) Cakupan Pelayanan Kesehatan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat j) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia 7 s.d 15 tahun di luar lembaga Pendidikan formal			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Skrining Lansia sesuai standar	23.279	20.739	89,09
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan Pelayanan Hipertensi sesuai standar	34.883	20.804	59,64
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Diabetes Sesuai Standar	914	3.074	336
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat sesuai Standar	450	450	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	a) Cakupan Penemuan terduga TB b) Cakupan Penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar c) Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	3.643	2.787	77
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	a) Cakupan Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan konseling dan Screening HIV b) Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan konseling dan Screening HIV c) Cakupan Penderita TB yang mendapat screening dan Konseling HIV. d) Cakupan Kelompok beresiko yang mendapat screening dan konseling HIV	8.680	7.400	85
<b>III. Bidang Sosial</b>					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	65 orang	65 orang	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	33 orang	33 orang	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	280 orang	280 orang	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	3 orang	3 orang	100
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	833 orang	827 orang	99,27
<b>IV. Bidang Perumahan Rakyat</b>					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tekena relokasi program pemerintah	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	0	0	0
<b>V. Bidang Pendidikan</b>					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10.226	10.226	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	42.423	42.423	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1.339	1.339	100
<b>VI. Bidang Pekerjaan Umum</b>					
1	Penyedia Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	152.250 SR	72.956 SR	47
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	753 SR	753 SR	100

Sumber; Laporan Pelaksanaan SPM 2020, Setdakab 2021



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa belum optimalnya pencapaian SPM dari ke-6 jenis pelayanan dasar sampai dengan tahun 2020, terutama bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan indikator capaian urusan perumahan rakyat belum dapat diimplementasikan sampai dengan tahun 2020, karena belum tersedianya alokasi anggaran belanja. Selain itu, dipengaruhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terhadap pencapaian kualitas layanan SPM, terutama bidang kesehatan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang Sosial. Oleh sebab itu, pencapaian SPM urusan wajib berkaitan pelayanan dasar menjadi prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026.

## **2.7. Evaluasi Realisasi RPJPD Tahun 2005–2025**

Realisasi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 sampai dengan pelaksanaan tahap III, belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 89,60% dan laju pertumbuhan ekonomi tercapai -13,68% dari target akhir RPJPD. Belum optimalnya capaian indikator utama sasaran RPJPD hingga tahapan ke-3 RPJPD, disebabkan karena dinamika sosial ekonomi global dan nasional sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami perubahan yang tidak menentu atau anomali.

Namun disisi lain, pencapaian APM SLTP/SLTA, Angka Melek Huruf, PDRB, PDRB per Kapita, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka melampaui dari target akhir RPJPD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.78.**  
**Capaian Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 Sampai Dengan Tahun 2020**

No.	Bidang/Indikator	Target Akhir RPJPD	Realisasi s/d 2020	Capaian (%)
<b>A.</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,60	67,74	89,60
2	Angka Melek Huruf (%)	94,99	99,70	104,96
3	APK SD	123,56	110,29	89,26
4	APK SLTP	79,38	86,71	109,23
5	APK SLTA	65,18	79,55	122,04
6	APM SD	119,82	99,69	83,20
7	APM SLTP	60,91	75,08	123,26
8	APM SLTA	46,83	60,64	129,49
9	Jumlah Penduduk (jiwa)	265.099	235.045	88,66
<b>B.</b>	<b>Ekonomi</b>			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,04	-1,10	-13,68
2	PDRB ADHK (Rp triliun)	5,79	6,68	115,37
3	PDRB per Kapita (Rp Juta)	21,84	38,81	177,70
4	Angka Kemiskinan (%)	10,17	6,78	150
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	13,19	5,30	248,87

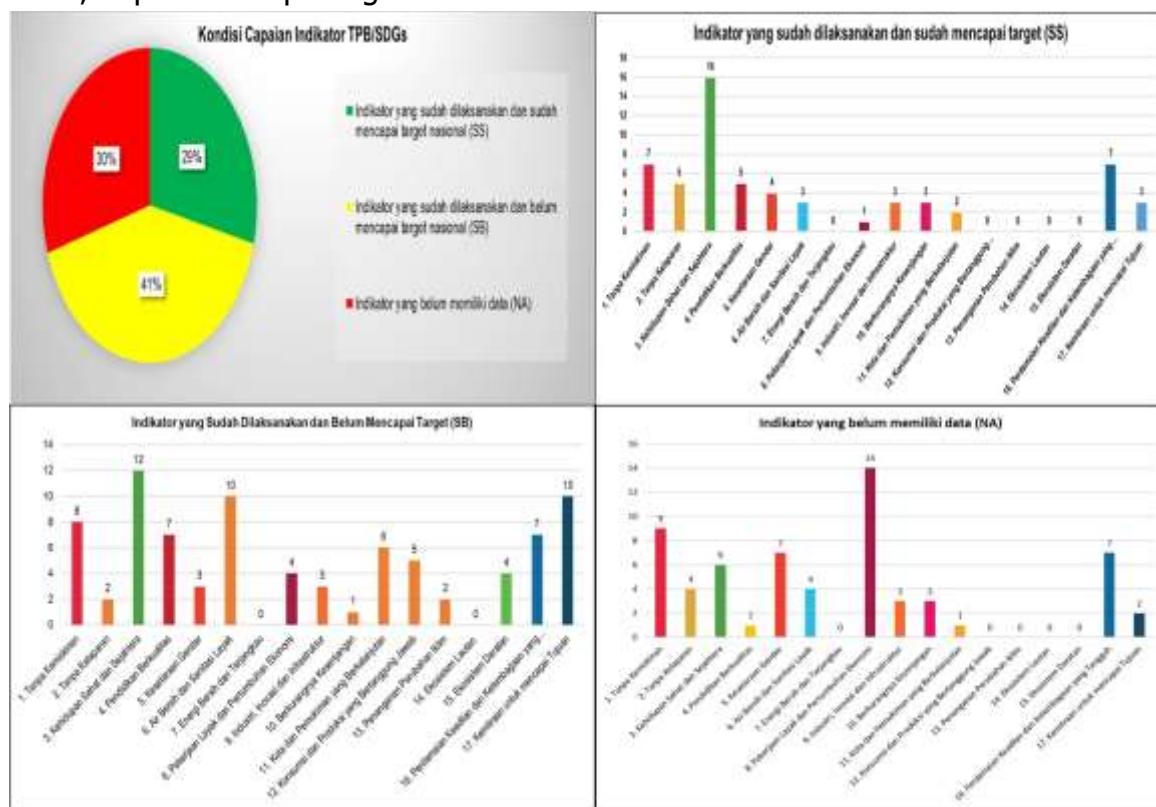
Sumber data : Perda Kab. Sijunjung 4/2009 ttg RPJPD 2005-2025 & Sijunjung Dalam Angka 2021



## 2.8. Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's sebanyak 204 indikator sampai dengan tahun 2020 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai rata-rata capaian indikator SDG's yang belum mencapai target nasional sebesar 41% atau 84 indikator. Sedangkan yang telah mencapai target nasional sebesar 29% atau 59 indikator. Rendahnya capaian indikator SDG's terhadap target nasional, disebabkan karena keterbatasan sumber daya dalam mengungkit pencapaian TPB dan terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Disamping itu, masih terbatasnya ketersediaan data yang ditandai belum tersedianya sebanyak 30% atau 61 indikator. Hal ini ini disebabkan karena keterbatasannya Perangkat Daerah pengampu yang memahami indikator SDG's secara teknis, sehingga ketersediaan data belum optimal.

Perkembangan capaian SDG's Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

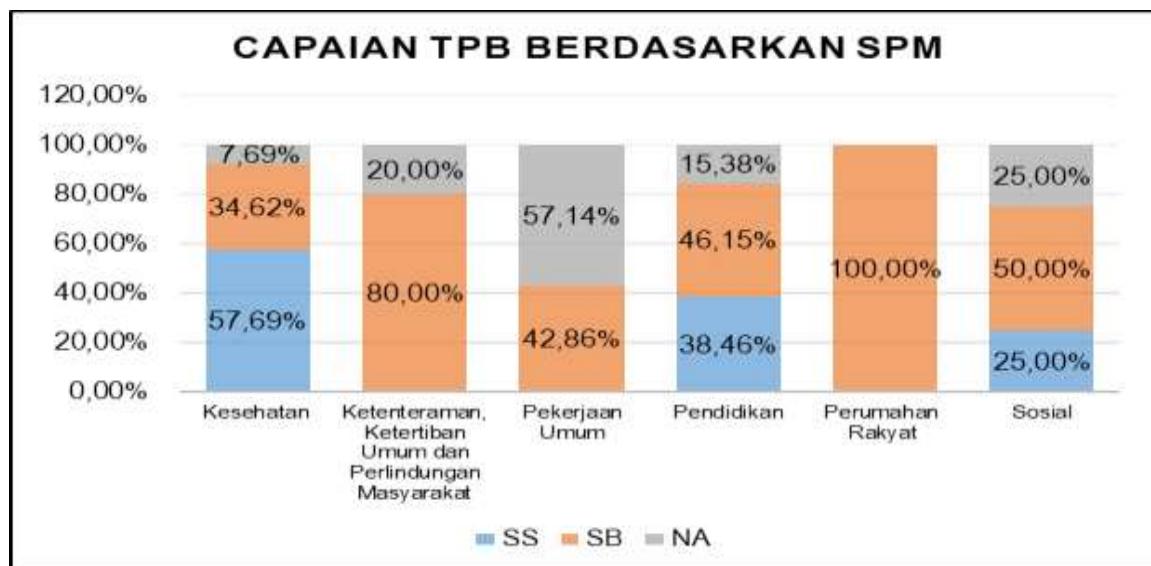


Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

**Gambar 2.21 Grafik Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2020**



Sedangkan capaian TPB/SDG's berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 61 indikator atau 27,73 % secara rata-rata belum memenuhi target SPM nasional, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

**Gambar 2.22 Grafik Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020**

Belum optimalnya pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan target nasional, merepresentasikan kondisi umum pembangunan berkelanjutan belum tercapai secara optimal. Capaian masing-masing Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga Tahun 2020, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.79.**  
**Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan**  
**Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Satatus Capaian
1	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-18%	6,78%	SS
1	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95%	119,29%	SS
1	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-	NA
1	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17,12%	1,58%	SB
1	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta RT	7.168 RT	SB
1	1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	92,49%	SS
1	1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	-	NA
1	1.4.1 (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	72,46%	SS
1	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100%	69,50%	SB
1	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100%	71,37%	SB
1	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	94,78%	99,87%	SS
1	1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	82,2%	84,66%	SS
1	1.4.1 (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77,4%	94,25%	SS
1	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan non PLN.	100%	32,81%	SB
1	1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	4	SB
1	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 daerah	23 Nagari/Desa	SB
1	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	151 ribu	3.058	SB
1	1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	81,5 ribu	-	NA
1	1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana).	450 daerah	-	NA
1	1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	118,6	107,2	SS
1	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	NA
1	1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Belum Ada	SB
1	1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,06	SB



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Status Capaian
1	1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	42,66	SB
2	2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Menurun	-	NA
2	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	17%	15,5%	SS
2	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	-	NA
2	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,5 %	-	NA
2	2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	23,40	SB
2	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	28%	1,86	SS
2	2.2.2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	9,41	SB
2	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28%	11,21%	SS
2	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	88,76%	SS
2	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH92,5; Tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	98,15	SS
2	2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	-	NA
3	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI).	306	170,52	SS
3	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	93,32%	SS
3	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	95%	93,32%	SS
3	3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	15,59	SB
3	3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7,80	SB
3	3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24	1,48	SS
3	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95%	88,6%	SB
3	3.1.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<0,5%	0	SS
3	3.3.2 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245	99,62	SS
3	3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	2	SS
3	3.3.3 (a) Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	300 61 Nagari/Desa	61	SS
3	3.3.4 (a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 37)	Meningkat	100%	SS
3	3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Meningkat	0 orang	SS
3	3.3.5 (a) Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat	8 Kec.	SS
3	3.3.5 (b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	35 Kabupaten	0	SS



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Satatus Capaian
3	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5,4%	-	NA
3	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	24,3%	12,87%	SS
3	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0	SS
3	3.4.2 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	-	NA
3	3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	280	13	SS
3	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0,02%	-	NA
3	3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	-	NA
3	3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66%	100%	SS
3	3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	-	NA
3	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23,5%	20,31%	SB
3	3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38	-	NA
3	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	2,28	2,75	SB
3	3.8.1 Unmet need pelayanan kesehatan.	9,91%	12,03%	SB
3	3.8.2 (a) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	8	SB
3	3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	75,52%	SB
3	3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	-	NA
3	3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	-	NA
3	3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	SS
3	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	2,98	SB
4	4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,	Meningkat	-	NA
4	4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84,2%	86,26%	SS
4	4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81%	77,41%	SB
4	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	114,09	110,29	SB
4	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	106,94	86,71	SB
4	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,8 tahun	8,11 tahun	SB
4	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77,2%	76,4%	SB
2	3.3.1 (a) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	152,06%	SS



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Status Capaian
4	4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	174,77%	SS
4	4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96,1%	98,9%	SS
4	4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	86,26%	SB
4	4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	21,05%	SS
4	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidikan.	Meningkat	42,36%	SB
5	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	-	NA
5	5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	NA
5	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	20,48%	-	NA
5	5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	NA
5	5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	-	NA
5	5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	32,91%	SB
5	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21 tahun	-	NA
5	5.3.1 (a) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38 tahun	-	NA
5	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	13%	SB
5	5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	19,48%	SB
5	5.6.1 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	0	SS
5	5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,9%	12,03%	SB
5	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	85%	72,46%	SB
5	5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	55,85%	SS
6	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	61,12%	SS
6	6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/detik	7,13 m3/detik	SB
6	6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	61,12%	SB



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Satatus Capaian
6	6.2.1 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (a)	Meningkat	45%	SB
6	6.2.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (b)	100%	87%	SB
6	6.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (c)	45.000	62 Nagari	SS
6	6.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). (d)	Meningkat	62 Nagari	SS
6	6.2.1 Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. (e)	438 Kab/Kota	10	SB
6	6.2.1 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. (f)	Meningkat	0	SB
6	6.3.1 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). (a)	408 Kab/Kota	0	SB
6	6.3.1 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. (b)	Meningkat	0	SB
6	6.3.2 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. (b)	Meningkat	70,04	SB
6	6.4.1 Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. (a)	Ada	0	SB
6	6.5.1 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (a)	Ada	Belum ada	SB
6	6.5.1 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. (c)	8 WS	-	NA
6	6.5.1 Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. (f)	10 WS (skalanasional)	-	NA
6	6.5.1 Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. (g)	Ada	Belum ada	SB
8	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-1,10%	SB
8	8.1.1 PDB per kapita. (a)	Rp 50 Juta	Rp 38,80 juta	SB
8	8.3.1 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. (c)	25%	20,6%	SB
8	8.3.1 Persentase tenaga kerja formal. (a)	51%	-	NA
8	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	5,53	SS
8	8.5.2 Tingkat setengah pengangguran. (a)	Menurun	-	NA
8	8.5.2 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). (b)	90%	90,18%	SS
8	8.9.1 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	8%	0,91	SB
8	8.9.1 Jumlah wisatawan mancanegara. (a)	Meningkat	6 Orang	SB
8	8.9.1 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (b)	Meningkat	28.674 orang	SS
8	8.9.1 Jumlah devisa sektor pariwisata. (c)	Meningkat	-	NA
8	8.9.1 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. (d)	Meningkat	-	NA
8	8.10.1 Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	21 Bank 22 ATM	SB
8	8.10.1 Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). (a)	Mendekat	-	NA



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Status Capaian
8	8,10.1 (b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	-	NA
9	9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	0,0008	SB
9	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Labih tinggi dari pertumbuhan PDB	1,96	SS
9	9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	-	NA
9	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	-	NA
9	9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	NA
9	9.5.1 Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,0001	SB
9	9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	55,85%	SS
9	9.c.1 (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	55,85%	SS
9	9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	55,85%	SS
10	10.1.1 Koefisien Gini.	0,36	0,27	SS
10	10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	6,78%	SS
10	10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri.	2.000 desa	4	SB
10	10.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	-	NA
10	10.3.1 (a) Indeks Kebebasan Sipil.	87	-	NA
10	10.3.1 (d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Belum ada	SB
10	10.4.1 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-	NA
11	11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	0,69	SB
11	11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	Belum ada	SB
11	11.2.1 (a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada	Belum ada	SB
11	11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,42	SB
11	11.5.1 (a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30%	107,2	SB
11	11.5.1 (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	Belum ada	SB
11	11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	NA
11	11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	30,01	SB
11	11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	Belum ada	SB
12	12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri)	150 juta ton (skala nasional)	5,98 ton	SB
12	12.5.1 (a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton per hari	5,30 ton/hari	SB



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Satatus Capaian
12	12.6.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. (a)	Meningkat	0	SB
12	12.7.1 Jumlah produk ramah lingkungan yang terregister. (a)	Meningkat	0	SB
12	12.8.1 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan terregister. (a)	Meningkat	0	SB
13	13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	0	SB
13	13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,42	SB
15	15.1.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. (a)	Meningkat	130.837 ha	SB
15	15.1.1 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. (b)	5,5 juta ha	102.007 ha	SB
15	15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	Belum ada	SB
15	15.9.1 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. (a)	Meningkat	0	SB
16	16.1.1 Jumlah kasus kejadian pembunuhan pada satu tahun terakhir. (a)	Menurun	0	SS
16	16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. (a)	Menurun	0,415	SS
16	16.1.3 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (a)	Menurun	0,0004	SS
16	16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	-	NA
16	16.2.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. (a)	Menurun	-	NA
16	16.2.1 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (b)	Menurun	-	NA
16	16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (a)	Menurun	-	NA
16	16.5.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). (a)	4,0	3,1	SB
16	16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	41,90 %	SB
16	16.6.1 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). (a)	Meningkat	WTP	SS
16	16.6.1 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). (b)	50%	0,03	SB
16	16.6.1 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (b)	80%	80,96%	SS
16	16.6.1 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). (d)	80%	80,96%	SS
16	16.6.2 Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal ; Indeks kepatuhan pelayanan publik (a)	80%	31,57	SB
16	16.7.1 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (a)	Meningkat	13%	SB



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional Tahun 2030 (Perpres 59/2017)	Capaian s/d 2020	Satatus Capaian
16	16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	5,71%	SB
16	16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	93,48%	SS
16	16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	77.40%	-	NA
16	16.9.1 (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85%	94,25%	SS
16	16.10.1 (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0	SB
16	16.b.1 (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Belum ada	SB
17	17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,75	SB
17	17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,14	SB
17	17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	1,57	SS
17	17.6.2 (b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah angga dan 6%populasi	-	NA
17	17.6.2 (c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Perdesaan 52% populasi.	-	NA
17	17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	55,85 %	SS
17	17.17.1 (a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	Belum ada	SB
17	17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Ada	Belum ada	SB
17	17.18.1 (a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	91,26%	SS
17	17.18.1 (b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	83,33%	SB
17	17.18.1 (c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Ada	Belum ada	SB
17	17.18.1 (d) Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	Meningkat	69,82%	SB
17	17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada  Ada Kehirian : 13.813 Kematian : 446	SB	
17	17.19.2 (c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	8.169	SB
17	17.19.2 (d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	97,12	SS

Keterangan :

SS : telah melampaui target nasional

SB : belum mencapai target nasional

NA : data tidak tersedia



Berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020, SPM dan target TPB/SDG's secara umum belum tercapai secara optimal. Sehingga berimplikasi terhadap kemajuan pembangunan daerah ditingkat regional dan nasional. Kondisi ini mencerminkan tantangan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang cukup berat, apalagi saat ini ekonomi global dan nasional sedang dalam tahap pemulihan paska pandemi covid-19. Oleh sebab itu, dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah agar dilakukan penelaahan secara mendalam terhadap penyebab masalah yang terjadi. Sehingga tepat dalam menentukan isu strategis daerah lima tahun mendatang, agar dapat ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang.



# BAB



3

# **BAB III**

# **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis gambaran keuangan daerah pada bab ini dimaksud, untuk menghasilkan gambaran tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada bab ini analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sijunjung selama lima tahun sebelumnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat danmewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Disamping itu, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan,transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Namun masih berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD tahun 2021-2026.



### **3.1. Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020**

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2016-2020 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Sijunjung periode tahun 2016-2020 dapat dilihat berikut ini

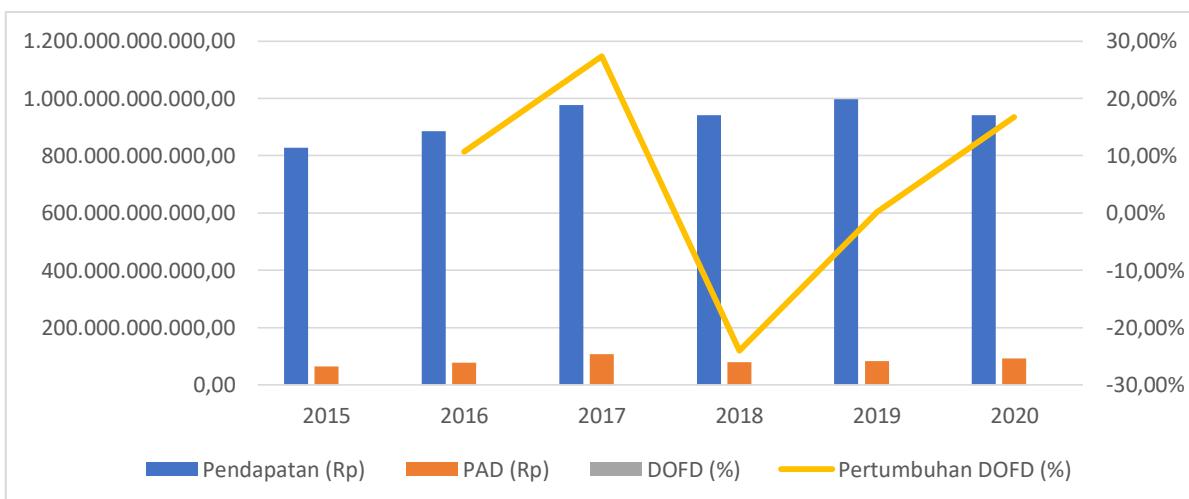
**Tabel 3.1  
Pertumbuhan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rp Juta)</b>	<b>PAD (Rp Juta)</b>	<b>DOFD (%)</b>	<b>Pertumbuhan DOFD (%)</b>
2015	828.391,85	65.008,44	7,85%	0
2016	884.731,20	76.833,97	8,68%	10,66%
2017	975.949,63	107.915,78	11,06%	27,33%
2018	941.608,64	79.055,94	8,40%	-24,07%
2019	997.601,92	83.906,45	8,41%	0,18%
2020	941.763,32	92.474,38	9,82%	16,75%
<b>Rata-Rata</b>			<b>9,27%</b>	<b>6,17%</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa DOFD Kabupaten Sijunjung periode 2016-2020 rata-rata sebesar 9,27%. Secara keseluruhan DOFD Kabupaten Sijunjung menunjukkan *trend* peningkatan kecuali untuk tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 6,17%. Penurunan yang signifikan pada tahun 2018 disebabkan oleh penurunan Lain-lain PAD yang Sah dimana dana BOS pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, Dana Bos yang pada tahun sebelumnya baik anggaran maupun realisasinya dicatat sebagai komponen Lain-lain PAD yang Sah, sesuai dengan permendagri 33 tahun 2017 dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2016–2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.





Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.1 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2016 – 2020**

Perkembangan nilai DOFD Kabupaten Kabupaten Sijunjung periode 2016-2020 yang berfluktuatif dengan tingkat kemandirian yang belum tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Hal ini menunjukkan sedang terjadinya perkembangan ekonomi yang membaik. Tingkat kemandirian yang masih rendah tersebut merupakan hal yang wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Namun demikian tantangan terbesar Kabupaten Sijunjung kedepan peningkatan DOFD Kabupaten Sijunjung agar lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020**

Komponen APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah**

Komponen pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung selama tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun 2,79%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 55.838,60 juta menjadi sebesar Rp. 941.763,32 juta akibat dampak pandemi covid-19. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada berikut ini.

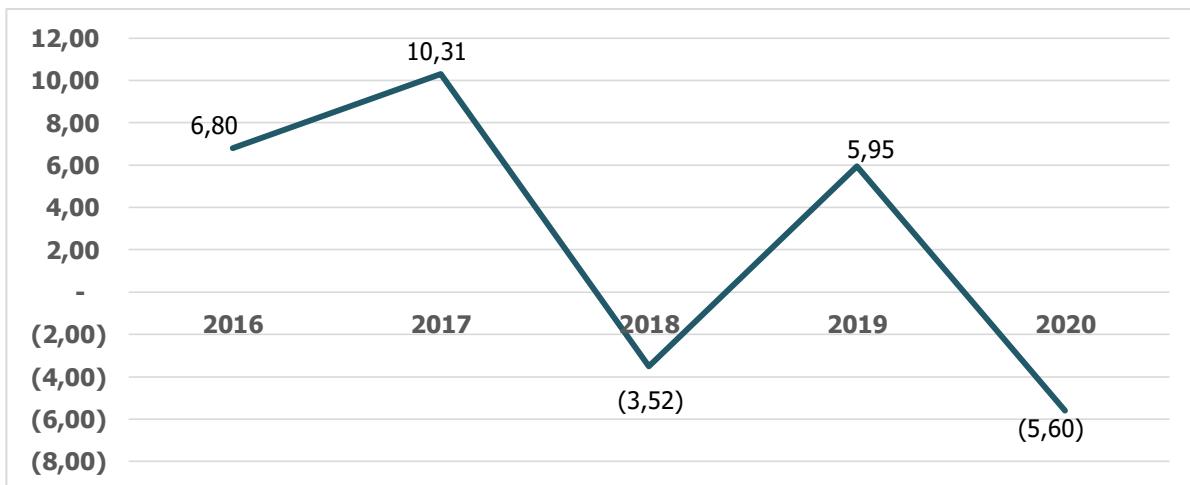


**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	921.976,33	884.731,20	95,96	10,48	6,80
2017	1.002.836,39	975.949,63	97,32	8,77	10,31
2018	954.029,47	941.608,64	98,70	(4,87)	(3,52)
2019	1.028.609,17	997.601,92	96,99	7,82	5,95
2020	979.835,85	941.763,32	96,11	(4,74)	(5,60)
<b>Rata-rata</b>	<b>977.457,44</b>	<b>948.330,94</b>	<b>97,02</b>	<b>3,49</b>	<b>2,79</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan di atas realisasi pencapaian atas pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 98,70% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 95,96%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 3,49% dan pertumbuhan realisasi setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 2,79%. Pertumbuhan realisasi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020**

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan kabupaten Sijunjung terbaik pada tahun 2017. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten tahun 2016 – 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta)**

No.	Uraian	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>828.391.85</b>	<b>884.731.19</b>	<b>975.949.62</b>	<b>941.608.63</b>	<b>997.601.91</b>	<b>941.763.31</b>	<b>2,79</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>65.008.43</b>	<b>76.833.96</b>	<b>107.915.71</b>	<b>79.055.94</b>	<b>83.906.45</b>	<b>92.474.35</b>	<b>9,65</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	8.778.64	10.787.38	13.427.63	14.110.24	14.284.70	12.813.27	<b>8,68</b>
1.1.2.	Retribusi Daerah	22.251.95	6.377.76	4.813.74	4.487.076	4.347.99	3.195.65	(26,45)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.636.51	11.781.75	12.082.24	10.777.41	12.334.97	14.623.18	<b>9,40</b>
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	24.341.32	47.887.06	77.592.08	49.681.20	52.938.77	61.842.24	<b>29,23</b>
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>618.274.19</b>	<b>725.803.70</b>	<b>710.605.07</b>	<b>700.524.75</b>	<b>737.765.48</b>	<b>661.686.08</b>	<b>1,78</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.576.19	17.087.12	11.357.20	12.445.76	11.079.92	13.733.23	(3,80)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	516.685.15	558.382.08	548.573.10	548.573.10	562.028.28	509.071.53	(0,13)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	83.012.85	150.334.49	150.674.76	139.505.88	164.657.27	138.881.32	<b>15,26</b>
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>145.109.22</b>	<b>82.093.52</b>	<b>157.428.83</b>	<b>162.027.93</b>	<b>175.929.97</b>	<b>187.602.87</b>	<b>13,30</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	19.460.00	32.803.29	50.136.93	42.965.22	<b>41,42</b>
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.876.23	34.593.37	37.146.57	37.467.62	44.556.772	38.654.03	<b>2,62</b>
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	87.636.63	0	0	0	81.236.26	105.983.61	<b>6,09</b>
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.439.50	6.822.40	1.725.00	6.855.54	0	0	<b>35,28</b>
1.3.5	Alokasi dana Desa yang Berasal Dari APBN	18.156.85	40.677.75	51.629.92	49.651.47	0	0	<b>9,43</b>
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0	0	47.467.32	35.250.00	0	0	(5,15)

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama tahun 2016-2020 sebesar 9,65% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama lima tahun terakhir secara rata-rata mencapai 106,62%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan capaian yang optimal. Oleh sebab itu, fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber PAD. Perkembangan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

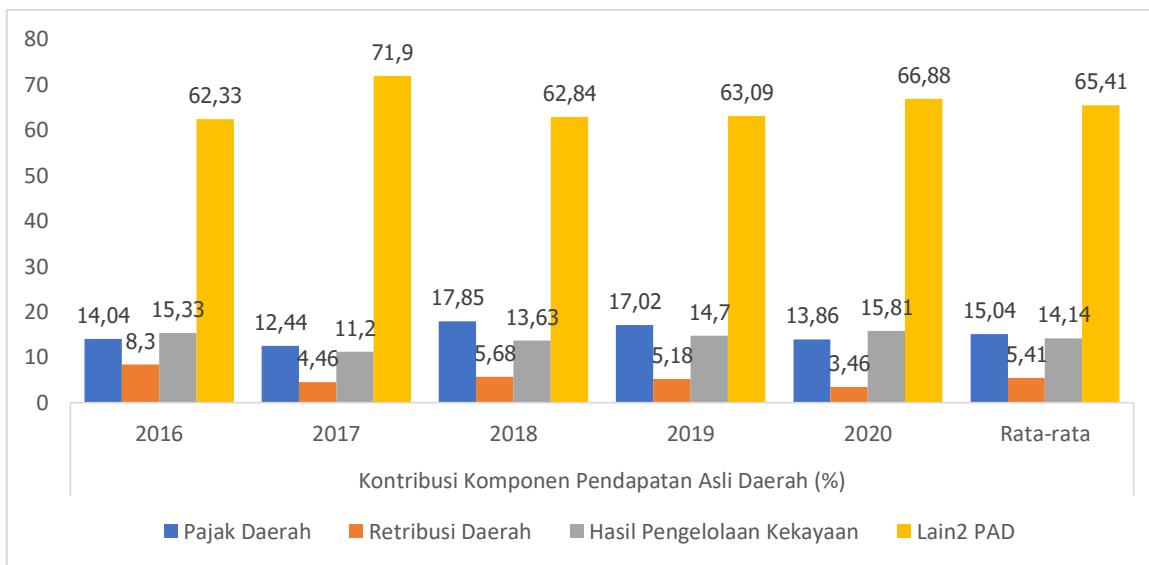


**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran Dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	72.673,65	76.833,97	105,72	27,79	18,19
2017	104.883,66	107.915,72	102,89	44,32	40,45
2018	72.743,64	79.055,94	108,68	(30,64)	(26,74)
2019	77.630,64	83.906,45	108,08	6,72	6,14
2020	85.857,32	92.474,36	107,71	10,60	10,21
<b>Rata-rata</b>	<b>82.757,78</b>	<b>88.037,29</b>	<b>106,62</b>	<b>11,76</b>	<b>9,65</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Ditinjau dari sisi kontribusi komponen PAD terhadap PAD masih didominasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 65,41% disusul oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 14,14% dan pajak daerah sebesar 15,04%. Sedangkan yang terendah dalam memberikan kontribusi adalah retribusi daerah sebesar 5,41%. Perkembangan kontribusi komponen PAD Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



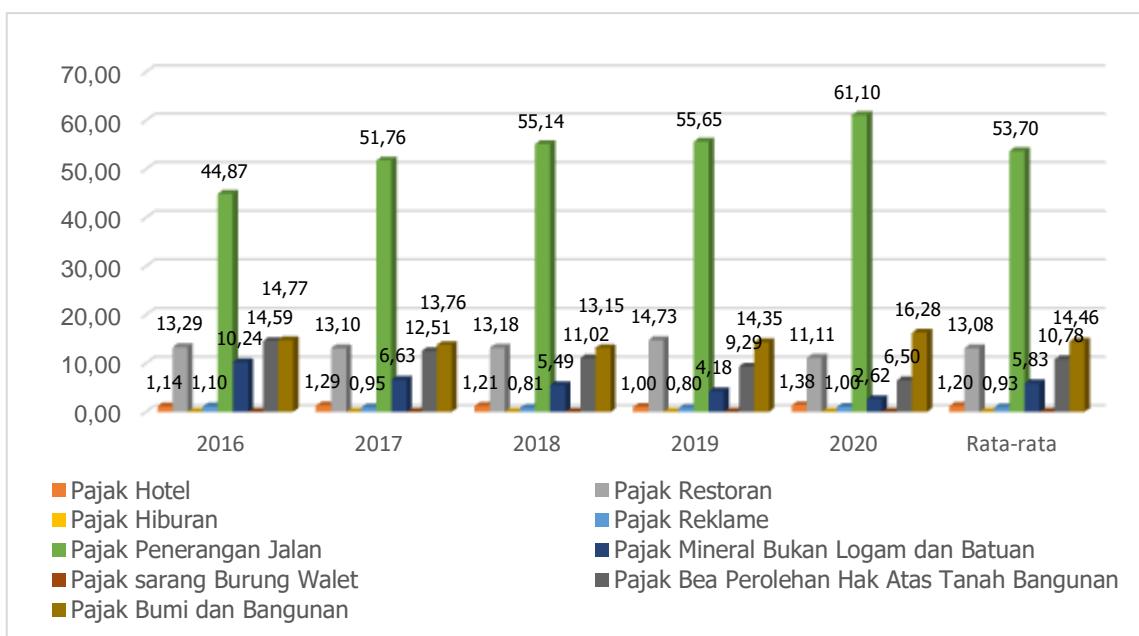
Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.3 Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Sedangkan kontribusi komponen pajak daerah terhadap PAD tahun 2016-2020, pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah selama tahun 2016-2020 dengan rata-rata kontribusi sebesar 53,70%. Meningkatnya jumlah pelanggan PT PLN (Persero) dan konsumsi listrik masyarakat salah satu faktor penyebab meningkatnya penerimaan pajak daerah dari sektor ini. Selain itu, diikuti adanya peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Dan Bumi dan Bangunan. Hal ini disebabkan adanya insentifikasi pajak, salah satu upaya dilakukan pendataan ulang objek pajak ekonomi di Kabupaten Sijunjung.



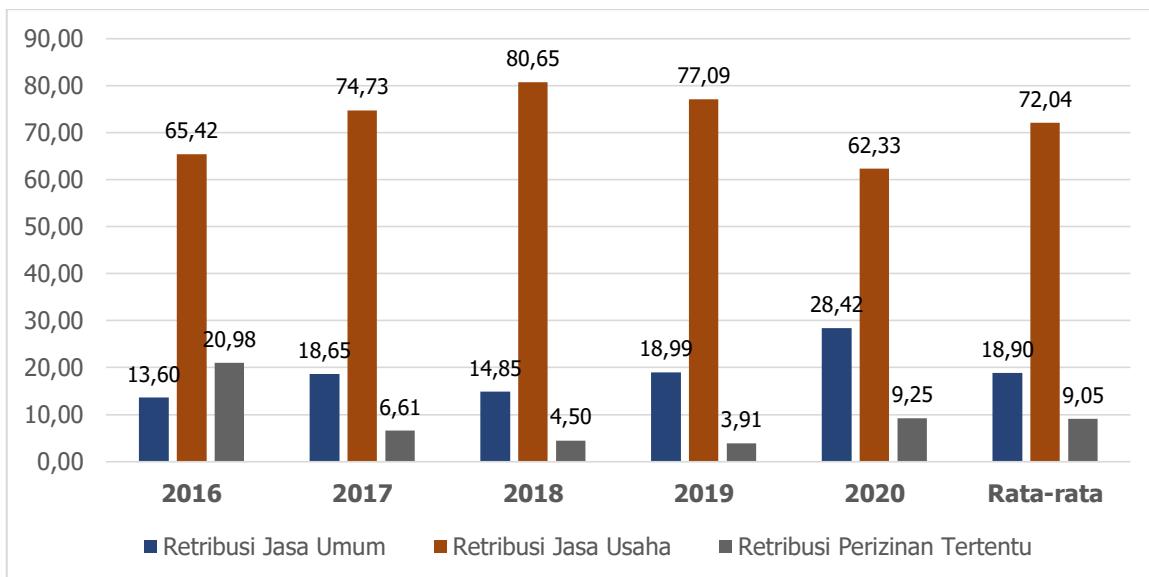
Perkembangan Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.4 Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2020**

Sementara itu, kontribusi retribusi daerah tahun 2016-2020 lebih dominan berasal dari retribusi jasa usaha rata-rata sebesar 72,04% dan diikuti retribusi jasa umum rata-rata sebesar 18,90%. Sedangkan retribusi perizinan tertentu memberikan kontribusi rata-rata 9,05%. Perkembangan kontribusi komponen retribusi daerah terhadap retribusi daerah Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.5 Kontribusi Komponen Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2016-2020**

Kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016-2020 lebih mengandalkan dari dividen bersumber dari Bank Nagari Sumatera Barat.



Kondisi ini menunjukkan BUMD yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sijunjung belum maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Sedangkan komponen laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta hanya menyumbang rata-rata 0,20% Perkembangan kontribusi komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>Kontribusi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata</b>
Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	99,22	99,98	100,00	100,00	99,80	99,80
Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,78	0,02	0,00	0,00	0,20	0,20

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Disamping itu, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen terbesar dalam PAD selama tahun 2016-2020. Penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sijunjung merupakan penyumbang terbesar terhadap lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata sebesar 60,78%. Perkembangan kontribusi komponen Lain2 PAD yang sah terhadap Lain2 PAD yang Sah (%) tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>Kontribusi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Lain-lain PAD yang Sah (%)</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,15	0,12	0,35	0,54	0,36	0,30
Penerimaan Jasa Giro	6,94	2,97	4,11	4,06	3,33	4,28
Pendapatan dari Bunga	19,38	12,73	19,94	14,15	8,77	14,99
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,89	0,40	1,56	1,71	4,27	1,76
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,92	2,78	1,67	0,46	4,60	2,29
Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,04	0,92	4,86	8,76	2,92
Pendapatan dari Pengembalian	8,85	0,18	0,24	0,36	0,41	2,01
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,04	0,28	0,13	0,02	0,10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	2,25	1,55	2,53	2,44	0,97	1,95
Pendapatan BLUD	59,63	36,10	68,39	71,29	68,50	60,78
Pendapatan Dana BOS	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	<b>8,62</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)



## 2. Dana Perimbangan

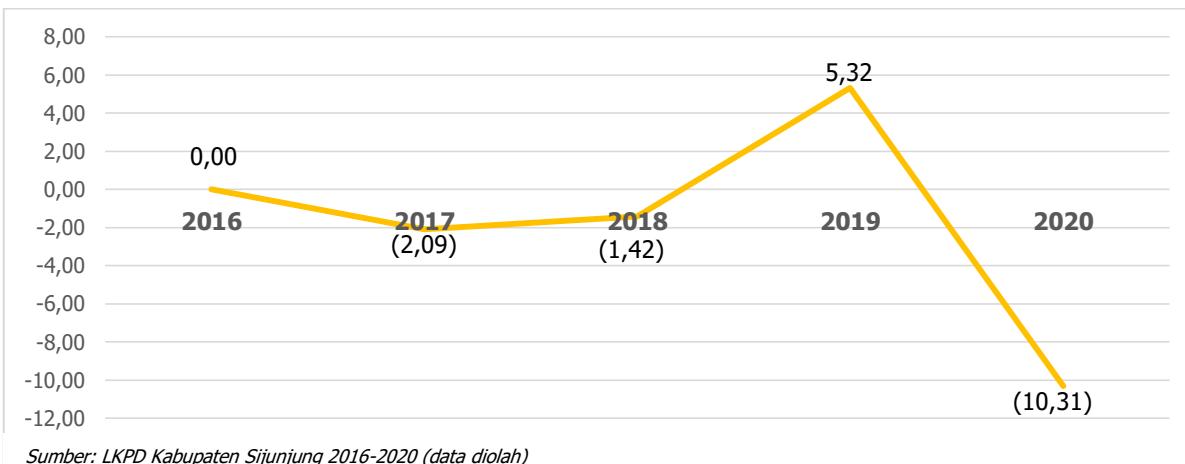
Perkembangan dana perimbangan Tahun 2016-2020 cenderung stagnan, hal ini ditandai belum optimalnya tingkat capaian realisasi berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan capaian realisasi dana perimbangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Perkembangan Capaian Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2016	765.752,33	725.803,70	94,78
2017	742.987,87	710.605,07	95,64
2018	709.425,94	700.524,76	98,75
2019	771.717,88	737.765,49	95,60
2020	701.825,81	661.686,09	94,28

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Sedangkan dari sisi pertumbuhan dana perimbangan tahun 2016-2020 cenderung minus dari tahun ke tahun. Kondisi ini berimplikasi terhadap kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Artinya, dalam membiayai belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat sulit mengandalkan dana perimbangan, sehingga diperlukan sebuah terobosan dalam peningkatan kapasitas riil keuangan. Perkembangan pertumbuhan dana perimbangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.6 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

### 2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Perkembangan realisasi target dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2019-2020 mengalami capaian realisasi yang cukup rendah dibawah angka 80% dan cenderung menurun. Perkembangan capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

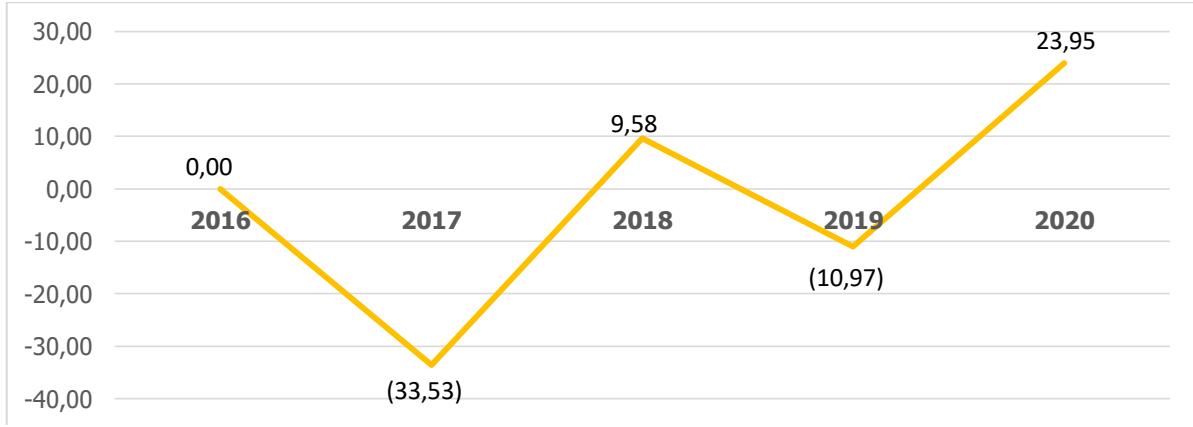


**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2016	17.204,52	17.087,12	99,32
2017	11.498,67	11.357,21	98,77
2018	14.546,71	12.445,77	85,56
2019	14.557,66	11.079,92	76,11
2020	20.645,44	13.733,23	66,52

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Sedangkan dari sisi pertumbuhan dana bagi hasil pajak/bukan pajak tahun 2016-2020 cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.7 Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2016-2020**

## 2.2. Dana Alokasi Umum

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 pada umumnya sesuai dengan target. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 bertumbuh minus sebesar 9,42%. Kecendrungan minusnya pertumbuhan DAU ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAU Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	558.382,09	558.382,09	100,00	0,00
2017	548.573,11	548.573,11	100,00	(1,76)
2018	548.573,11	548.573,11	100,00	-
2019	562.028,29	562.028,29	100,00	2,45
2020	513.243,25	509.071,53	99,19	(9,42)

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)



### **2.3. Dana Alokasi Khusus**

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020 pada umumnya tidak dengan target dan cenderung stagnan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK tidak sesuai dengan diharapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, pada umumnya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait dan terjadinya perubahan kebijakan tahun anggaran berjalan. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 bertumbuh minus sebesar 9,42%. Kecendrungan minusnya pertumbuhan DAK ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAK Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	190.135,72	150.334,49	79,07	0,00
2017	182.916,09	150.674,76	82,37	0,23
2018	146.306,12	139.505,88	95,35	(7,41)
2019	195.131,93	164.657,28	84,38	18,03
2020	167.937,12	138.881,32	82,70	(15,65)

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

### **3. Lain-lain pendapatan yang sah**

Perkembangan capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 cenderung memenuhi target. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh besarnya proporsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Disisi lain, pertumbuhan cenderung lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020 cenderung sangat kecil. Kondisi ini disebabkan karena dipengaruhi oleh jumlah proporsi yang diperoleh oleh daerah berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**  
**Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan lain-lain Pendapatan Yang Sah**  
**Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	83.550,35	82.093,53	98,26	0,00
2017	154.964,86	157.428,83	101,59	91,77
2018	171.859,89	162.027,94	94,28	2,92
2019	179.260,65	175.929,97	98,14	8,58
2020	192.152,72	187.602,87	97,63	6,63

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)



### **3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung, maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kabupaten Sijunjung selama periode 2016-2020. Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2021-2026 untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Proses penganggaran belanja daerah kabupaten Sijunjung untuk tahun anggaran 2016-2020 disusuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga terjadinya perubahan klasifikasi belanja daerah menjadi; belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga dan belanja subsidi. Namun dari sisi penyajian kinerja belanja daerah Tahun 2016-2020 disesuaikan dengan struktur APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan dari sisi penyajian proyeksi keuangan tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 cenderung tidak optimal karena hanya capaiannya berada dibawah angka 91% dengan rata-rata anggaran yang terserap 88,14% dan diikuti rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 3,42%. Hal ini disebabkan, karena belum selarasnya antara perencanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran belanja pembangunan, sehingga belum sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan mengalami stagnan.

Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan serta realisasi belanja daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.12**  
**Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	1.027.360,02	932.031,39	90,72	11,38	16,59
2017	1.053.081,68	896.035,33	85,09	2,50	(3,86)
2018	1.076.051,87	958.138,80	89,04	2,18	6,93
2019	1.124.395,50	1.000.514,06	88,98	4,49	4,42
2020	1.071.293,21	930.483,14	86,86	(4,72)	(7,00)
<b>Rata-rata</b>	<b>1.070.436,46</b>	<b>943.440,54</b>	<b>88,14</b>	<b>3,17</b>	<b>3,42</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan komponen belanja daerah Kabupaten Sijunjung periode 2016-2020 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena belanja langsung bertumbuh secara rata-rata sebesar 2,40% dan diikuti pertumbuhan komponen belanja tidak langsung dengan sebesar 4,54%. Sementara itu, pertumbuhan belanja langsung yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja pegawai secara rata-rata sebesar 7,84% dan diikuti belanja barang dan jasa dengan rata-rata sebesar 5,48% Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 0,24%. Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.

Disamping itu, pertumbuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan terdapat pada belanja tidak terduga sebesar 4.469,07 % dan diikuti komponen belanja bantuan sosial dengan rata-rata sebesar 276,86 %. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 komponen belanja tidak terduga dialokasikan untuk penanganan covid-19 yang pengalokasian belanja berasal dari hasil *refocussing* terhadap anggaran program/kegiatan pembangunan SKPD, sehingga berimplikasi terhadap penurunan realisasi anggaran belanja langsung. Perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13**  
**Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>496.037,27</b>	<b>463.862,76</b>	<b>491.309,00</b>	<b>514.793,24</b>	<b>544.816,99</b>	<b>4,54</b>
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	283.664,64	340.454,93	367.769,54	380.879,74	357.960,66	(0,27)
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Hibah	8.992,14	8.973,85	13.145,57	11.631,25	40.105,76	45,10
5. Belanja Bantuan Sosial	603,94	401,52	220,20	3.097,50	-	276,86
6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2.489,88	1.836,15	1.978,46	2.002,14	1.516,14	9,46
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	99.610,86	111.832,34	106.931,35	117.032,46	112.506,96	21,35
8. Belanja Tidak Terduga	204,79	363,91	1.263,88	150,15	32.727,48	4.469,07



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>B. Belanja Langsung</b>	<b>435.994,11</b>	<b>432.172,56</b>	<b>466.829,81</b>	<b>485.720,83</b>	<b>385.666,15</b>	<b>2,40</b>
1. Belanja Pegawai	33.405,23	41.606,70	37.919,37	36.462,77	43.038,41	7,84
2. Belanja Barang dan Jasa	158.631,89	200.809,76	223.091,93	245.047,16	199.104,42	5,48
3. Belanja Modal	243.956,93	189.756,10	205.818,51	204.210,89	143.523,33	0,24
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>932.031,38</b>	<b>896.035,32</b>	<b>958.138,80</b>	<b>1.000.514,06</b>	<b>930.483,14</b>	<b>3,42</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

### 3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang digunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan SilPA Tahun 2016-2020 tercapai 12,30%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Cukup tingginya SilPA tahun 2016–2020, hal ini disebabkan karena disamping adanya kebijakan pengunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, juga terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga menjadi salah satu hambatan bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>Pendapatan</b>	<b>884.731,20</b>	<b>975.949,63</b>	<b>941.608,64</b>	<b>997.601,92</b>	<b>941.763,32</b>	<b>2,79</b>
<b>Belanja</b>	<b>932.031,39</b>	<b>896.035,33</b>	<b>958.138,80</b>	<b>1.000.514,06</b>	<b>930.483,14</b>	<b>3,42</b>
Surplus / (defisit)	(47.300,19)	79.914,30	(16.530,17)	(2.912,15)	11.280,17	(244,54)
<b>Pembiayaan daerah</b>	<b>103.109,51</b>	<b>52.108,10</b>	<b>122.568,73</b>	<b>95.318,43</b>	<b>90.850,70</b>	<b>14,85</b>
Penerimaan pembiayaan	117.509,52	63.254,10	136.393,73	110.179,83	<b>95.600,70</b>	9,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	115.473,39	57.032,81	132.008,96	106.038,56	91.957,19	12,30
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	236,14	1.730,29	1.384,77	893,50	754,50	132,35
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	1.800,00	4.491,00	3.000,00	3.247,77	2.889,00	17,68
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>14.400,00</b>	<b>11.146,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>14.861,40</b>	<b>4.750,00</b>	<b>(12,23)</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.400,00	10.000,00	13.000,00	13.396,90	4.000,00	(15,32)
Pemberian Pinjaman Daerah	0	1.146,00	825,00	1.464,50	750,00	17,96
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>103.109,51</b>	<b>52.108,10</b>	<b>122.568,73</b>	<b>95.318,43</b>	<b>90.850,70</b>	<b>14,85</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>55.809,32</b>	<b>132.022,40</b>	<b>106.038,56</b>	<b>92.406,28</b>	<b>102.130,87</b>	<b>12,35</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2016, 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada. Sedangkan tahun 2017 dan 2020, APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalami surplus anggaran hal ini membuktikan bahwa upaya – upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung terus ditingkatkan serta dilakukan upaya-upaya efektif untuk memacu peningkatan Pendapatan Daerah. Sehingga proses pembangunan Daerah dapat berjalan maksimal dengan kemampuan belanja daerah yang optimal.

### **3.1.1.4 Neraca Daerah**

Neraca Daerah mengambarkan posisi keuangan atau kekayaan daerah pada akhir periode tertentu. Neraca daerah terdiri dari gambaran aset atau kekayaan daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas atau modal daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada periode tertentu. Neraca daerah memberikan informasi penting kepada semua *stakeholder* terutama kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif maupun para kreditur/pemberi pinjaman serta masyarakat luas lainnya tentang jumlah aset atau hak yang harus diterima, kewajiban yang harus dibayar serta ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca tersebut disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sijunjung dan rata-rata pertumbuhannya Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan kondisi relatif baik. Hal ini ditandai rendahnya rata-rata pertumbuhan aset sebesar 19,61 % dan rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 23,43%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan karena cukup tingginya pertumbuhan penyusutan aset tetap dan penyisihan investasi dana bergulir penguatan modal dengan rata-rata 8.762,89%. Kondisi ini mencerminkan relatif banyaknya jumlah aset tetap yang tidak bernilai ekonomis, sehingga membebankan terhadap kondisi keuangan daerah. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.15**  
**Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun Anggaran 2016–2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Kas Daerah	40.465.893.590	114.573.448.910	81.915.738.858	83.245.814.544	91.177.854.252	56
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.012.100	7.810.509	31.285.300	0	0	92
Kas di Bendahara Penerimaan	68.661.309	10.909.380	29.488.535	2.425.250	0	53
Kas di BLUD	5.804.512.229	6.254.121.252	8.071.018.276	7.162.178.438	8.631.795.107	29
Kas Lainnya	1.736.945.186	1.725.746.954	1.542.671.696	2.018.243.503	2.537.361.211	29
Setara Kas	9.500.000.000	9.500.000.000	14.500.000.000	0	0	(28)
Piutang	0	0	0	0	0	(20)
Penyisihan Piutang	7.919.286.351	8.437.333.722	4.501.410.978	4.936.850.797	2.718.431.159	(19)
Piutang Pajak Netto	2.163.609.862	1.953.540.318	1.865.949.528	2.012.080.091	2.013.111.149	2
Piutang Retribusi	14.206.000	62.746.000	244.229.500	76.606.000	64.619.500	89
Penyisihan Piutang Retribusi	(8.668.943)	(8.302.080)	(9.506.498)	(20.765.680)	(11.656.573)	1.914
Piutang Retribusi Netto	5.537.058	54.443.920	234.723.003	55.840.320	52.962.928	207
Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	13.777.812	13.777.812	409.230.736	409.230.736	574
Penyisihan Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	(68.889)	(1.377.781)	(40.923.074)	(40.923.074)	934
Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	0	13.708.923	12.400.031	368.307.662	368.307.662	572
Piutang Lain-Lain PAD	2.149.386.709	2.737.489.278	1.886.776.359	11.784.271.615	934.593.286	45.582
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	(90.587.509)	(63.797.470)	(74.369.087)	(229.719.679)	(534.869.184)	46
Piutang Lain-Lain PAD Netto	2.058.799.200	2.673.691.808	1.812.407.272	11.554.551.936	399.724.102	43.666
Piutang Dana Perimbangan	0	0	0	2.617.648.645	0	0
Penyisihan Piutang Dana Perimbangan	0	0	0	(13.088.243)	0	(40)
Piutang Dana Perimbangan Netto	0	0	0	2.604.560.402	0	0
Piutang Dana Bagi Hasil	1.389.237.803	1.455.449.145	3.682.157.809	3.173.109.813	8.947.338.066	68
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(6.946.189)	(7.277.246)	(106.380.418)	(15.865.549)	(44.736.690)	296
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	1.382.291.614	1.448.171.899	3.575.777.391	3.157.244.264	8.902.601.376	68
Piutang Dana Bergulir	0	4.888.633.836	4.781.181.169	0	0	(0)
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0	(3.134.002.907)	(3.436.426.446)	0	0	2
Piutang Dana Bergulir Netto	0	1.754.630.928	1.344.754.723	0	0	(5)
Piutang Lainnya	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
Penyisihan Piutang Lainnya	(36.000.000)	(36.000.000)	(36.000.000)	(36.000.000)	(36.000.000)	0
Piutang Lainnya Netto	0	0	0	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	315.605.205	301.109.301	101.233.897	199.336.305	322.613.899	18
Persediaan	12.881.088.395	9.807.121.196	12.266.383.251	12.638.334.074	11.854.043.948	1
Jumlah Aset Lancar	76.385.955.747	150.078.455.297	127.303.811.760	125.018.916.789	126.260.375.634	7
INVESTASI JANGKA PANJANG	100.936.518.106	104.206.749.593	126.666.412.371	139.724.226.804	141.506.603.138	10
ASET TETAP	1.342.169.126.620	1.337.141.443.442	1.412.824.497.371	1.487.957.398.685	1.532.962.489.001	10
ASET LAINNYA	11.438.111.954	13.547.929.040	15.109.889.667	13.919.856.150	7.876.203.382	117
JUMLAH ASET	1.530.929.712.427	1.604.974.577.373	1.681.904.631.169	1.766.620.398.428	1.808.605.671.155	8
<b>KEWAJIBAN</b>						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18.812.280.806	12.020.728.095	10.512.758.566	9.567.791.777	6.726.659.624	(7)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	18.812.280.806	12.020.728.095	10.512.758.566	9.567.791.777	6.726.659.624	7
<b>EKUITAS</b>						
EKUITAS	1.512.117.431.621	1.592.953.849.278	1.671.391.872.603	1.757.052.606.651	1.801.879.011.531	8
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.530.929.712.427	1.604.974.577.373	1.681.904.631.169	1.766.620.398.428	1.808.605.671.155	8

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan neraca daerah di atas, maka dilakukan analisis terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban-jangka panjang. Analisis rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar dan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Hasil perhitungan menunjukkan perkembangan kurang baik karena kedua rasio masih diatas 1, sedangkan analisis rasio solvabilitas yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan asset dalam memenuhi kewajiban entitas



dimasa mendatang dan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan memenuhi kewajiban entitas dimasa yang akan datang . Hasil analisis rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio Total hutang terhadap modal menunjukan dibawah 1 per 100, yang mengambarkan bahwa asset mampu untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang.

Perkembangan analisis rasio keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.16**  
**Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun Anggaran 2016–2020 (%)**

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	4,06	12,48	12,11	13,07	18,77
	Rasio quick	3,38	11,67	10,94	11,75	17,01
Rasio Solvabilitas	Rasio total hutang terhadap total aset	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	Rasio Total hutang terhadap modal	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung pada masa lalu dari sisi pendapatan daerah mengacu kepada paradigma pendapatan daerah yang diarahkan untuk:

- a. Menciptakan keseimbangan baru antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat, karena keduanya merupakan dua sisi mata uang yang mempunyai ketergantungan saling berkaitan.
- b. Membuat regulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian daerah sehingga dalam siklus panjang akan menciptakan potensi pendapatan daerah.

Selain itu, dalam rangka memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai indikator makro pembangunan di Kabupaten



Sijunjung dilakukan implementasi melalui upaya antara lain :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kegiatan secara intensifikasi dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pencapaian target melebihi dari target yang telah ditetapkan semula. Untuk mendapatkan target dan potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang akurat maka upaya-upaya yang dilakukan adalah pemuktahiran data dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pada saat penetapan target di awal tahun telah berdasarkan pada penghitungan potensi dengan formula yang mendekati tepat dan benar. Kegiatan lainnya dalam bentuk mengintensifikasi sistem penagihan pajak dan retribusi daerah langsung kepada wajib pajak dan wajib retribusi sesuai dengan objek pajaknya sehingga bisa meminimalisir timbulnya tunggakan atau piutang pada akhir tahun anggaran.  
Kegiatan yang bersifat ekstensifikasi meliputi pengkajian dan penggalian potensi-potensi PAD yang baru yang ada pada suatu daerah dan penetapan target baru yang bisa dicapai melalui Peraturan Daerah.
- b. Mengembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait secara sinergis termasuk dengan Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dunia usaha.

Sedangkan kebijakan Pemerintah dari sisi belanja daerah yang dilakukan antara lain adalah :

- a. Menyusun anggaran yang diprioritaskan untuk prioritas pembangunan dengan menekan anggaran untuk belanja aparatur, khusus belanja pegawai.
- b. Melakukan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan belanja.

Sementara itu, disisi kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2016-2020, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan
  - a. melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
  - b. Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung.
  - c. Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.
2. Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan
  - a. Melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah seperti Bank Nagari, BPR, PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung dan Perusda Kinantan.
  - b. Melakukan pembentukan dana cadangan untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari satu tahun anggaran.

Selain kebijakan sebagaimana tersebut diatas, dengan adanya pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran tertentu, Perubahan Alokasi,



dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, Kepala Daerah diminta melakukan penyesuaian belanja daerah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal sekurang-kurangnya 50%. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah mengalokasikan Anggaran untuk percepatan penanganan Covid 19 pada pos Belanja Tak Terduga yang diralokasikan untuk:

- a. Belanja Bidang Kesehatan
- b. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
- c. Penanganan Dampak Ekonomi

Penyesuaian belanja daerah dilakukan melalui rasionalisasi terhadap belanja barang dan belanja modal. Rasionalisasi pada belanja barang dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk perjalanan dinas, pemeliharaan, pakaian dinas dan atributnya, jasa kantor, makanan dan minuman, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta objek belanja barang lain yang dirasionalisasi berdasarkan skala prioritas. Rasionalisasi pada belanja modal dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk pengadaan tanah, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan gedung baru dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir tetap didominasi oleh komponen belanja gaji dan tunjangan yang dengan rata-rata penggunaan sebesar 73,08%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS. Sedangkan proporsi realisasi belanja langsung lima tahun terakhir didominasi komponen belanja barang dan jasa yang ditandai dengan rata-rata penggunaan sebesar 46,54%. Kondisi ini mencerminkan kebijakan penggunaan anggaran belum proporsional terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perkembangan proporsi realisasi komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020, dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.17**  
**Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020 (%)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>53,22</b>	<b>51,77</b>	<b>51,28</b>	<b>51,45</b>	<b>58,55</b>	<b>53,25</b>
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	77,44	73,40	74,86	73,99	65,70	73,08
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Hibah	1,81	1,93	2,68	2,26	7,36	3,21
5. Belanja Bantuan Sosial	0,12	0,09	0,04	0,60	0,00	0,17
6. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab	0,50	0,40	0,40	0,39	0,28	0,39
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	20,08	24,11	21,76	22,73	20,65	21,87

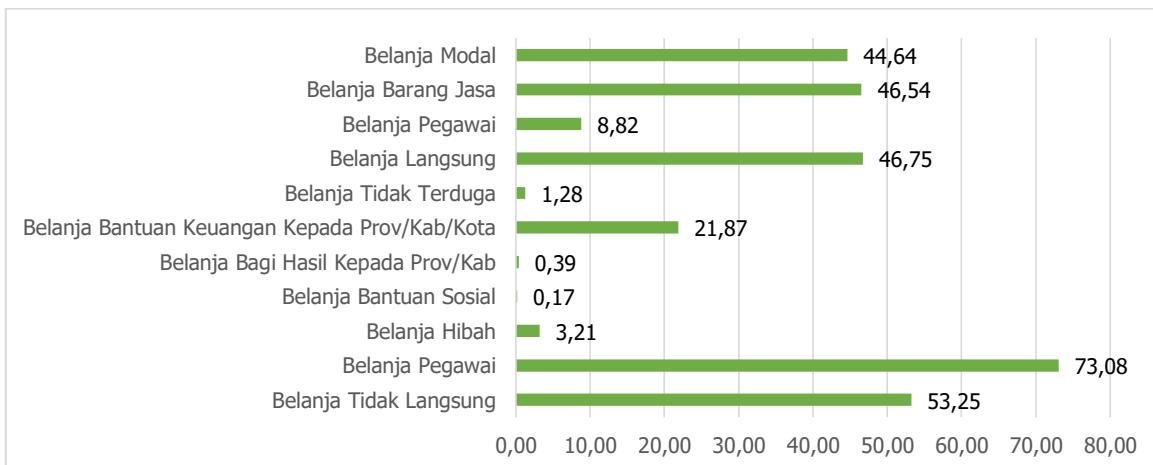


Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
8. Belanja Tidak Terduga	0,04	0,08	0,26	0,03	6,01	1,28
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>46,78</b>	<b>48,23</b>	<b>48,72</b>	<b>48,55</b>	<b>41,45</b>	<b>46,75</b>
1. Belanja Pegawai	7,66	9,63	8,12	7,51	11,16	8,82
2. Belanja Barang dan Jasa	36,38	46,47	47,79	50,45	51,63	46,54
3. Belanja Modal	55,95	43,91	44,09	42,04	37,21	44,64
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel atas proporsi belanja daerah Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini ditandai perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung, dimana pada tahun 2016 perbandingannya 53,22% : 46,79% dan pada tahun 2019 perbandingannya 51,45%: 48,54%. Cenderung membaiknya proporsi belanja daerah menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *money follow program*, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah lebih optimal (*program follow result*). Seiring terjadinya wabah virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020, sehingga perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung tidak proporsional sebesar 58,75%: 41,29%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya belanja tidak terduga dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19.

Gambaran rata-rata proporsi komponen belanja daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

**Gambar 3.8 Rata-rata proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020**

Disisi lain, penggunaan realisasi anggaran dialokasi kepada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penggunaan realisasi anggaran tersebut, selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, tapi dengan rata-rata pertumbuhan relatif kecil sebesar 7,22%. Disisi lain, penggunaan realisasi anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sangat rendah dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.18**  
**Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016 – 2020 (Rp Juta)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>288.043,18</b>	<b>252.478,20</b>	<b>316.547,21</b>	<b>328.814,80</b>	<b>363.250,46</b>	<b>6,84</b>
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	283.664,64	247.785,05	309.496,30	321.827,09	358.214,58	6,89
2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.888,66	2.857,00	5.072,45	4.985,57	3.436,60	24,01
3. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
4. Belanja Bagi Hasil	2.489,88	1.836,15	1.978,46	2.002,14	1.599,28	-9,36
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.731,71</b>	<b>198.61,91</b>	<b>22.413,98</b>	<b>23.905,47</b>	<b>26.216,39</b>	<b>16,00</b>
1. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	92,40	184,80	100,00	54,32	2,11
2. Belanja Jasa Kantor	14.731,71	19.769,51	22.229,18	23.805,47	26.162,07	15,91
<b>C. PEMBIAYAANPENGELUARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
2. Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>302.774,89</b>	<b>272.340,11</b>	<b>338.961,19</b>	<b>352.720,27</b>	<b>389.466,85</b>	<b>7,22</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Berdasarkan analisis pembiayaan tersebut, maka defisit riil anggaran yang terjadi pada tahun anggaran 2016, 2018 dan 2019 ditutupi melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan penutupan defisit riil anggaran tidak mempengaruhi anggaran belanja daerah. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan defisit riil anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2020, terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.19**  
**Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sijunjung  
Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan	884.731,20	975.949,63	941.608,64	997.601,92	941.763,32	2,79
Belanja	932.031,39	896.035,33	958.138,80	1.000.514,06	930.483,14	3,42
Pengeluaran pembiayaan	14.400,00	11.146,00	13.825,00	14.861,40	4.750,00	(12,23)
<b>Defisit riil</b>	<b>(61.700,19)</b>	<b>68.768,30</b>	<b>(30.355,16)</b>	<b>(17.773,54)</b>	<b>6.530,18</b>	<b>16,55</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)

Sedangkan perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.20**  
**Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun Anggaran 2018-2020**

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp Juta	% dari SiLPA	Rp Juta	% dari SiLPA	Rp Juta	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	132.008,96	253,50	106.038,56	100,00	91.957,6	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	9.927,70	7,52				
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	16.478,47	165,98				
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	2.000,00	1,52				
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	84.812,63	64,25	106.038,56	100,00	91.957,6	100,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan						

*Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung 2016-2020 (data diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 realisasi SILPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Berbeda dengan Tahun 2018, pada tahun 2019 dan 2020 realisasi silpa berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

### **3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan program unggulan Kepala Daerah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kebijakan pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari proses perencanaan keuangan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikan Pendapatan Daerah terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil



Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengalami perubahan dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026**

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-umsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.





Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

**Gambar 3.9 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2026**

Dengan mempertimbangkan performa pendapatan daerah Tahun 2016-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memulihkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak pandemi COVID-19;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten dan provinsi;
6. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah;
7. Penguatan sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
9. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; dan
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan BLUD dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lainnya.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.21**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026**  
(Rp Juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>87,414</b>	<b>96.163</b>	<b>105.779</b>	<b>116.357</b>	<b>127.993</b>	<b>140.792</b>
Pendapatan Pajak Daerah	15.201	16.721	18.393	20.232	22.255	24.481
Pendapatan Retribusi Daerah	4.737	5.211	5.732	6.305	6.936	7.629
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.670	16.145	17.759	19.535	21.488	23.637
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.805	58.086	63.894	70.284	77.312	85.043
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>857.868</b>	<b>654.827</b>	<b>720.310</b>	<b>737.099</b>	<b>755.567</b>	<b>831.124</b>
Transfer pemerintah pusat	813.474	610.433	671.477	683.383	696.479	766.127
Dana perimbangan	718.045	515.004	66.504	567.913	569.462	626.409
- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	12.805	12.805	14.086	15.495	17.044	18.749
- Dana Alokasi Umum (DAU)	502.198	502.198	552.418	552.418	552.418	607.660
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.424	0	0	0	0	0
- Dana Insentif Daerah (DID)	33.087	33.087	36.396	40.035	44.039	48.443
- Dana Desa	62.342	62.342	68.576	5.433	82.977	91.275
Transfer Antar Daerah	44.393	44.393	48.833	53.716	59.088	64.997
Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi	44.393	44.393	48.833	53.716	59.088	64.997
<b>Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>37.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan hibah dari pusat	2.000	0	0	0	0	0
Hibah	35.392	0	0	0	0	0
<b>Pendapatan</b>	<b>982.675</b>	<b>750.991</b>	<b>826.090</b>	<b>853.457</b>	<b>883.561</b>	<b>971.917</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. Untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tahun 2022 diperkirakan tidak mengalami peningkatan. Asumsi ini didasarkan pada di tahun 2022 perekonomian Indonesia secara umum belum pulih akibat adanya pandemi Covid-19 dan masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023 sampai dengan 2025 TKDD diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan asumsi perekonomian nasional telah kembali stabil. Hal ini dapat terlihat dari alokasi DAU yang mengalami peningkatan dikisaran 10% dibandingkan dengan alokasi tahun 2022.

Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID) juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan asumsi dan harapan semakin baiknya kinerja pemerintah daerah, sehingga Kabupaten Sijunjung setiap tahun mendapatkan *reward* berupa peningkatan DID yang meningkat setiap tahunnya. Untuk Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi juga diharapkan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Hal ini diasumsikan dengan telah pulihnya perekonomian di Provinsi Sumatera Barat berbanding lurus dengan tingkat realisasi pendapatan daerah di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN diharapkan bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, belum dapat diproyeksikan. Hal ini disebabkan DAK dan dana hibah sifatnya temporer dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah lebih giat dan lebih gencar lagi melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi berupa program dan kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah



Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mendapatkan dukungan dana, baik berupa dana DAK maupun dana hibah.

### **3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026**

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

**Gambar 3.10 Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2021-2026**

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja pegawai berdasarkan pada *acress* 2,5% dengan menjadikan realisasi 2020, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan.
2. Belanja hibah berdasarkan pada rata-rata realisasi lima tahun (2016-2020).
3. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah nagari/desa serta bentuk bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja tidak terduga berdasarkan pada rata-rata anggaran lima tahun (2016-2021).

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sijunjung;
2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.22**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026 (Rp Juta)**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.036.253</b>	<b>792.568</b>	<b>885.543</b>	<b>992.476</b>	<b>937.138</b>	<b>1.013.494</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>775.954</b>	<b>612.465</b>	<b>686.998</b>	<b>721.053</b>	<b>691.974</b>	<b>713.079</b>
Belanja Pegawai	501.465	501.465	551.612	557.128	577.456	589.005
Belanja Barang dan Jasa	215.146	95.146	104.963	105.459	99.005	108.510
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	58.956	15.000	30.000	58.000	15.000	15.000
Belanja Bantuan Sosial	385	385	424	466	512	564
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>134.472</b>	<b>54.471</b>	<b>59.918</b>	<b>61.910</b>	<b>80.700</b>	<b>119.505</b>
Belanja Tanah	467	467	514	565	622	684
Belanja Peralatan dan Mesin	37.927	17.927	19.720	19.692	29.661	42.627
Belanja Bangunan dan Gedung	38.405	18.405	20.246	20.270	26.896	39.961
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.605	17.605	19.366	21.302	23.432	36.135
Belanja Aset Tetap Lainnya	67	67	74	81	89	98
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0



Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>7.251</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>
Belanja Tak Terduga	6.592	6.592	7.251	5.000	5.500	6.050
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>119.234</b>	<b>119.234</b>	<b>131.375</b>	<b>144.513</b>	<b>158.964</b>	<b>174.861</b>
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Nagari/Desa	117.239	119.234	128.963	144.513	156.045	171.650
Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1.995	1.995	2.413	2.654	2.919	3.211
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.036.253</b>	<b>792.568</b>	<b>885.543</b>	<b>922.476</b>	<b>937.138</b>	<b>1.013.494</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(53.577)</b>	<b>(41.577)</b>	<b>(59.453)</b>	<b>(69.019)</b>	<b>(53.577)</b>	<b>(41.577)</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa belanja dari tahun 2022 sampai dengan 2026 adalah proyeksi belanja diluar dari belanja yang bersumber dari dana DAK dan dana hibah. Dari tabel diatas tergambar bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang ada sebagian besar terproyeksikan untuk mendanai belanja pegawai. Alokasi belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun ke tahun proyeksi alokasinya selalu kecil. Pada tahun 2023 dan 2024 belanja hibah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak di seluruh Indonesia sehingga di tahun 2023 dana hibah meningkat dengan asumsi pada tahun 2023 telah dimulainya tahapan pemilu, sehingga dibutuhkan anggaran persiapan Pemilu baik hibah ke KPU, Bawaslu maupun TNI-Polri. Demikian juga di tahun 2024, pelaksanaan Pemilu membutuhkan dana hibah yang cukup besar ke penyelenggara pemilu, diantaranya hibah ke KPU, Bawaslu maupun TNI-Polri.

### **3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026**

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah yang akan disertakan disetiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2021-2026 terlihat tabel berikut ini:



**Tabel 3.23**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026**  
(Rp Juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pembiayaan Bersih</b>	<b>53.577</b>	<b>41.577</b>	<b>59.453</b>	<b>69.019</b>	<b>53.577</b>	<b>41.577</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>57.577</b>	<b>57.577</b>	<b>63.453</b>	<b>73.019</b>	<b>57.577</b>	<b>57.577</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	53.077	53.077	58.953	68.519	53.077	53.077
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Penerimaan Kembali Investasi Daerah	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat tergambar bahwa penerimaan pembiayaan bersih setiap tahunnya dapat menutup defisit anggaran akibat dari lebih besarnya porsi belanja dibandingkan dengan proyeksi pendapatan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya; 1) sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, 2) hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan 3) efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.

Pada tahun 2022 dan 2026 direncanakan adanya alokasi penambahan penyertaan modal ke Bank Nagari dalam rangka penguatan dan pengembangan bank tersebut. Penyertaan modal lainnya adalah penyertaan modal ke PDAM yang sifatnya hanya dana talangan dan akan dikembalikan lagi melalui penerimaan pembiayaan. Selain itu, peningkatan kuantitas pemberian pinjaman pokok UKM kepada usaha kecil, menengah dan koperasi dalam upaya memperluas usaha akibat pandemi covid-19.

### 3.3.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk melihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2021-2026 terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.24**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026** (Rp Juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	<b>982.676</b>	<b>750.991</b>	<b>826.090</b>	<b>853.457</b>	<b>883.561</b>	<b>971.917</b>
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	57.577	57.577	63.453	73.019	57.577	57.577
<b>Total Penerimaan</b>	1.040.253	808.568	889.543	926.476	941.138	1.029.494
Dikurangi :						
4. Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	408.940	429.387	450.856	473.399	497.069	521.922
5. Pengeluaran pembiayaan	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah</b>	<b>627.313</b>	<b>363.181</b>	<b>434.687</b>	<b>449.077</b>	<b>440.069</b>	<b>491.571</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021



Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata 1,5%/tahun. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung masih sangat tergantung kepada TKDD dari Pemerintah. Sedangkan kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi RPJMD dengan fokus mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, perlindungan sosial dan reformasi birokrasi.
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.25**

**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung  
Tahun Anggaran 2021-2026 (Rp Juta)**

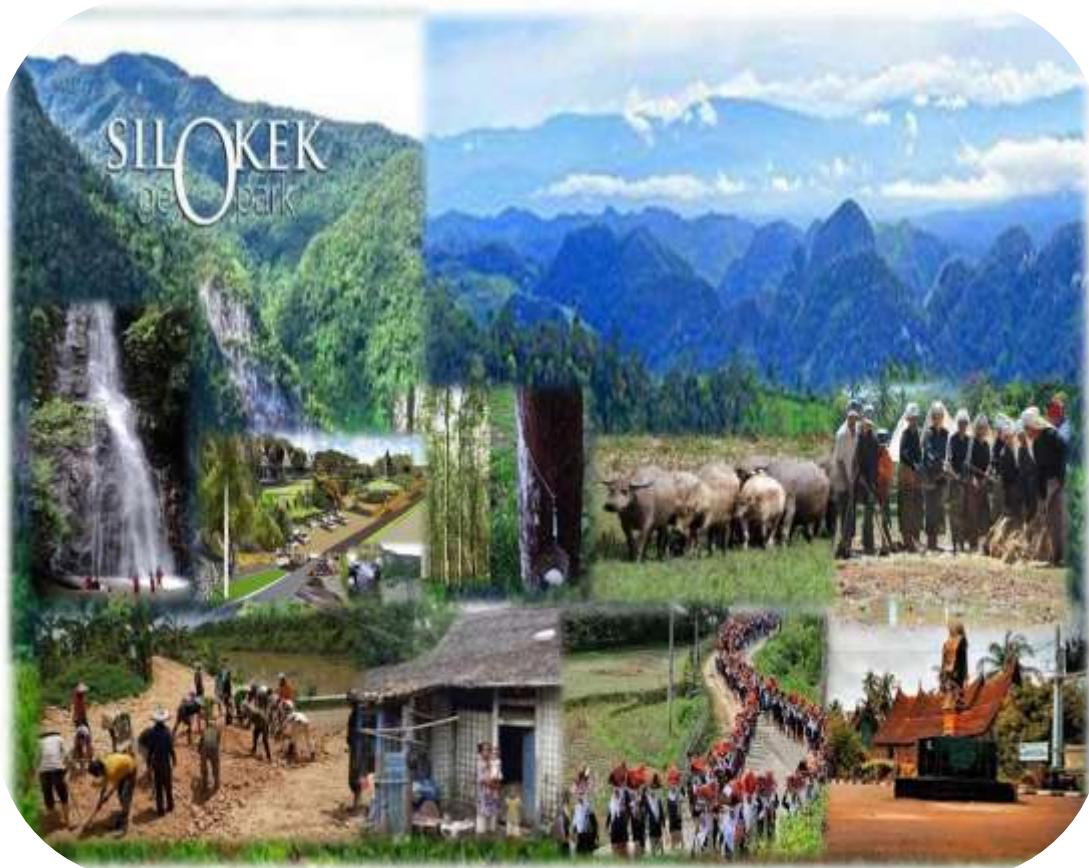
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah</b>	<b>627.313</b>	<b>363.181</b>	<b>434.687</b>	<b>449.077</b>	<b>440.069</b>	<b>491.571</b>
Penggunaan :						
Prioritas I	282.291	163.431	195.609	202.085	198.031	221.207
Prioritas II	250.925	145.272	173.875	179.631	176.028	196.629
Prioritas III	94.097	54.477	65.203	67.362	66.010	73.736

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Keberhasilan suatu pembangunan daerah tidak lepas dari kolaborasi dan partisipasi efektif dari banyak *stakeholders*. Oleh karena itu kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan daerah disertai partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi kunci tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung telah dan akan dilakukan kerjasama serta kolaborasi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satunya melalui pemanfaatan dan pengefektifian anggaran APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kabupaten Sijunjung dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan serta sumber pendanaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# BAB



4

# **BAB IV**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menguraikan isu strategis daerah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap pencapaian kinerja penyelengaraan Pemeritah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan pokok pembangunan dan isu strategis daerah.

### **4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Pada dasarnya tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah periode yang lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Pada hakekatnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Suatu permasalahan pembangunan daerah dianggap memiliki nilai prioritas, jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan daerah yang bersifat mandatori. Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan capaian kinerja penyelengaraan Pemeritah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's) serta capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya.

Selain itu, permasalahan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota tetangga serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung. Kebijakan pembangunan nasional adalah dengan ditariknya beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kewenangan yang ditarik tersebut adalah bidang pendidikan menengah atas, bidang pertambangan dan energi dan bidang kehutanan. Kondisi tersebut, sudah tentu memiliki pengaruh terhadap



kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola potensi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada; 1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, 2) evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2020 3) evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan tahun 2020 dan 4) evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's. Selain itu, juga memperhatikan evaluasi capaian terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria antara lain; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak.

Berdasarkan indentifikasi permasalahan diatas, sehingga secara umum dapat diuraikan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Sijunjung, pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Sijunjung**

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan/Akar Masalah
1	Cenderung melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Krisis ekonomi global dan nasional akibat pandemi covid-19</li><li>2. Menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat</li><li>3. Menurunnya kontribusi lapangan usaha sektor unggulan daerah.</li><li>4. Belum optimalnya realisasi investasi.</li><li>5. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi unggulan daerah.</li></ol>
2	Cukup tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya angka penganguran terbuka</li><li>2. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian.</li><li>3. Belum optimalnya pengembangan sektor perindustrian, khususnya industri rumah tangga/kecil.</li><li>4. Belum berkembangnya koperasi, usaha mikro dan BUMNag.</li><li>5. Kompetensi dan keterampilan tenaga kerja masih rendah</li><li>6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan efektif.</li><li>7. Belum optimalnya layanan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li></ol>
3	Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan target SPM dan TPB</li><li>2. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan target SPM dan TPB</li><li>3. Belum optimalnya ketahanan pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman</li><li>4. Belum optimalnya pengarustamaan gender</li><li>5. Belum optimalnya kualitas perlindungan anak</li></ol>



No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan/Akar Masalah
3	Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	6. Belum optimalnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan
4	Cenderung menurunnya penerapan nilai-nilai sosial budaya berlandaskan <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> (ABS-SBK)	1. Belum optimalnya revitalisasi kelembagaan nagari, agama dan adat. 2. Belum berkembangnya pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya dan kearifan lokal 3. Belum optimalnya penerapan ABS-SBK secara terstruktur dan berkelanjutan 4. Tingginya potensi terkikisnya kebudayaan lokal
5	Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastuktur wilayah serta prasarana dasar masyarakat	1. Kondisi topografi daerah yang berbukit-bukit dan keterbatasan lahan 2. Terbatasnya sumberdaya daerah. 3. Belum optimalnya kualitas layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM dan TPB. 4. Belum optimalnya kualitas layanan bidang perumahaan rakyat sesuai dengan target SPM dan TPB.
6	Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup.	1. Cukup rendahnya kualitas lingkungan hidup. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. 3. Belum optimalnya pengelolaan limbah masyarakat yang bernilai ekonomis 4. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif yang berwawasan lingkungan. 5. Belum optimalnya mitigasi dan penanggangan bencana secara efektif dan partisipatif
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	1. Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi 2. <i>Softkiil management</i> masih berorientasi kepada pelaksanaan fungsi kelembagaan. 3. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
8	Terbatasnya pembiayaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Belum optimalnya pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak daerah 3. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efektif dan efisien

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Sijunjung tersebut, tergambar bahwa permasalahan pembangunan tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selaku regulator, koordinator, fasilitator dan katalisator dalam upaya mendorong *stakeholders* untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Permasalahan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing bidang urusan, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.2**  
**Permasalahan Penyelengaraan Bidang Urusan Pemerintahan**

No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pendidikan	1. Cukup rendahnya harapan lama sekolah. 2. Cukup rendahnya rata-rata lama sekolah. 3. Cukup rendahnya tingkat partisipasi masyarakat seluruh jenjang pendidikan 4. Cukup rendahnya mutu pendidikan 5. Belum meratanya kualitas pendidikan berbasis karakter. 6. Cukup tingginya angka putus sekolah	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. 2. Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Pendidikan. 3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
2	Kesehatan	1.Cukup rendahnya usia harapan hidup. 2.Tingginya angka prevelansi stunting. 3.Cukup rendahnya Cakupan Nagari/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI). 4.Cukup tingginya tingkat kematian karena tuberkulosis 5.Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. 6.Rendahnya cakupan Nagari/ Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat prilaku hidup sehat dan bersih 3. Masih rendahnya kondisi sanitasi yang layak dan air bersih. 4. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan. 2. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung jalan. 3. Masih rendahnya cakupan layanan irigasi. 4. Masih rendahnya kualitas jaringan irigasi. 5. Cukup rendahnya akses air bersih bagi masyarakat. 6. Cukup rendahnya rumah yang bersanitasi yang layak 7. Masih rendahnya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan standar 8. Masih rendahnya ketataan terhadap RTRW 9. Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum	1. Kondisi topografi daerah yang berbukit-bukit dan lahan yang terbatas 2. Belum tersedianya revisi RTRW Kabupaten sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan berdimensi kewilayahan saat ini. 3. Belum sepenuhnya masyarakat memahami terkait lingkungan sehat karena faktor kebiasaan atau tradisi
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1.Cukup rendahnya ketersediaan rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga. 2.Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat	Banyaknya spot permukiman yang kecil-kecil sehingga membutuhkan koefisien biaya pembangunan yang besar.



No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya capaian kinerja layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan target SPM	1. Belum tersedianya <i>roadmap</i> Trantib dan Limas sesuai dengan target SPM. 2. Belum tersedianya <i>roadmap</i> Mitigasi Bencana yang testruktur dan terukur.
6	Sosial	Belum optimalnya capaian kinerja layanan sosial sesuai dengan target SPM	1. Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan PPKS yang sesuai target TPB dan SPM. 2. Belum optimalnya kinerja tenaga pendamping masalah sosial.
7	Tenaga kerja	1.Cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka 2.Rendahnya angka pencari kerja yang bekerja di dunia usaha. 3.Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil	1. Terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 2. Kurangnya daya saing tenaga kerja dalam dunia kerja.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.Cukup rendahnya kualitas pemberdayaan perempuan. 2.Belum optimalnya kualitas perlindungan anak	1. Masih rendahnya pemahaman perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Belum selarasnya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lintas sektoral. 3. Belum adanya kesamaan persepsi masyarakat terhadap perlindungan anak
9	Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman	1. Cenderung menurunnya produksi komoditas pangan utama. 2. Terbatasnya ketersediaan, harga dan akses pangan (swasembada pangan) 3. Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelesaian kasus tanah untuk kepentingan pembangunan	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk kepentingan publik.
11	Lingkungan Hidup	1. Cukup rendahnya kualitas lingkungan hidup 2. Belum optimalnya pengelolaan limbah masyarakat yang bernilai ekonomis	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pemilihan, dan pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomis
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kinerja administrasi kependudukan sesuai dengan target nasional.	Cukup rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum berkembangnya program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal	Belum seluruhnya masyarakat memahami arti pentingnya pembangunan berbasis pemberdayaan secara terstruktur dan masif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya capaian kinerja layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	1. Belum optimalnya integrasi program kampung KB lintas sektoral 2. Belum optimalnya peran kader



No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
15	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya ketersediaan rambu-rambu keselamatan berlalu lintas.</li> <li>2. Belum optimalnya ketersediaan angkutan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi topografi daerah dan rendahnya kualitas infrastruktur jalan.</li> <li>2. Tingginya kecenderungan masyarakat memiliki kendaraan pribadi.</li> </ul>
16	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya akses jaringan komunikasi broadband 4GLTE disetiap nagari/desa</li> <li>2. Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi topografi daerah</li> <li>2. Kebutuhan nilai investasi besar terhadap pengembangan jaringan nirkabel</li> </ul>
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cukup rendahnya koperasi yang berkualitas</li> <li>2. Belum berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).</li> <li>3. Rendahnya penumbuhan wirausaha baru pada jenis usaha mikro, kecil, menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan.</li> <li>2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro akibat belum optimalnya pengembangan usaha</li> </ul>
18	Penanaman Modal	Belum optimalnya realisasi investasi, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB	Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerima investor.
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembangunan kepemudaan sesuai dengan isu nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya regulasi yang memadai terkait pembangunan kepemudaan.</li> <li>2. Belum tergalinya potensi atlit dalam menciptakan prestasi olahraga.</li> </ul>
20	Statistik	Belum terintegrasinya data statistik sektoral dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).	Belum tersedianya regulasi terkait terintegrasinya data statistik sektoral dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
21	Persandian	Belum optimalnya penerapan sertifikat digital untuk menjamin terjaganya keamanan administrasi pemerintahan.	Belum tersedianya regulasi terkait penerapan persandian berbasis digital.
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni budaya untuk dimanfaatkan.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dan seni budaya
23	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.</li> <li>2. Masih rendahnya budaya minat baca masyarakat ditandai kecilnya kunjungan perpustakaan.</li> </ul>	Rendahnya budaya literasi masyarakat
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan karsipan dalam tataran penyelenggaraan pemerintah.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya (dana, SDM, sarana dan prasarana).



No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
25	Pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor parawisata dalam memperkembangkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum direvisinya regulasi terkait pengembangan destinasi wisata seiring ditetapkannya kawasan Siokek sebagai <i>Geopark</i> nasional</li> <li>Belum adanya kesamaan persepsi <i>stakeholders</i> terhadap pengembangan sektor pariwisata.</li> </ol>
26	Pertanian	Belum optimalnya layanan urusan pertanian, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap upaya peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan luas lahan petani yang masih rendah di bawah skala ekonomi usaha tani.</li> <li>Kelembagaan pelaku usaha pertanian masih lemah dan belum terintegrasi secara konfrehensif serta kemandirian usaha belum tumbuh.</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan hilirisasi produk pertanian, sehingga produk yang dijual berupa bahan mentah</li> <li>Cukup panjang proses tata niaga, sehingga harga yang diterima petani sangat rendah</li> </ol>
27	Perdagangan	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya sarana dan prasarana pasar komoditi produk unggulan.</li> <li>Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi hasil produk unggulan daerah</li> <li>Belum tersedianya data kelompok pedagang/ usaha informal.</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada sektor UMKM</li> </ol>
28	Perindustrian	Belum optimalnya kontribusi sektor perindustrian terhadap pertumbuhan PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.</li> <li>Masih kecilnya nilai tambah bahan baku atau sumberdaya lokal dalam proses produksi barang dan jasa.</li> </ol>
29	Transmigrasi	Belum berkembangnya satuan permukiman transmigrasi yang mandiri sesuai dengan prioritas kementerian terkait.	Terbatasnya sumber daya dalam mengembangkan satuan permukiman transmigrasi yang mandiri
30	Perikanan	Belum berkembangnya sektor perikanan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil budidaya perikanan dan tangkap
31	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena <i>softskill management</i> masih berorientasi kepada pelaksanaan fungsi kelembagaan.</li> <li>Terbatasnya kemampuan fiskal daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum seluruhnya perangkat daerah memahami <i>roadmap</i> reformasi birokrasi.</li> <li>Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN akibat belum tersedianya <i>roadmap</i> sistem merit yang terstruktur dan terukur.</li> <li>Belum optimalnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).</li> </ol>



No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
31	Penunjang Urusan Pemerintahan		<ul style="list-style-type: none"><li>4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.</li><li>5. Cukup rendahnya tingkat kapabilitas APIP.</li><li>6. Belum optimalnya mengembangkan potensi PAD</li></ul>

## 4.2 Analisis Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, antara lain; 1) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Sijunjung, 2) dinamika ekonomi global dan nasional, 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), 4) kebijakan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN dan SPM), 5) kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat (RPJMD), 6) kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung jangka panjang (RPJPD dan RTRW) dan 7) kebijakan pembangunan daerah sekitarnya yang berkaitan dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang.

### 4.2.1 Penentuan Isu Strategis

Berbagai unsur yang menjadi pertimbangan, seperti yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1.1 Penelaahan Terhadap Ekonomi Global dan Nasional

Kondisi ekonomi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan antara lain; Pertama, perekonomian global yang diprediksi cenderung melambat semenjak terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menjadi wabah global secara masif pada akhir tahun 2019. Sehingga pada umumnya membawa dampak terhadap struktur ekonomi, hal ini ditandai melambatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara maju. Sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan produk industry, meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala negatif, namun perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat,



seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang eropa akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu, terjadinya gejolak harga minyak dunia, dimana disatu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatkan suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut, dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat.

Kedua, pergeseran peran ekonomi kawasan asia pasifik dalam perekonomian global. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecederungan ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

Ketiga, stabilitas politik global yang dinamis. Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat dengan jargon America First, dan diikuti dengan penarikan diri AS dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik/TPP, akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah saat ini, serta di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan global. Gerakan radikalisme dan terorisme juga terus menjadi tantangan stabilitas politik nasional, serta merebaknya peredaran NAPZA lintas negara yang semakin tidak terbendung. Perkembangan transportasi dunia yang semakin cepat, berakibat pada terbukanya kemudahan akses distribusi barang dan jasa, serta pergerakan manusia lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, untuk bisa lebih pro aktif mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

Keempat, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Kabupaten Sijunjung kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan



potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Kelima, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 atau diartikan, industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan dan serba internet. Sehingga menjadi tantangan bagi Kabupaten Sijunjung yang perekonomiannya bertumpu kepada sektor pertanian dan perkebunan rakyat secara tradisional.

Sementara itu, dinamika ekonomi nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan, antara lain;

Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguatan bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horizontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Kedua, kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional tahun 2020-2024 di Kabupaten Sijunjung, antara lain, pengembangan kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek dan pengembangan Perkampungan Adat Padang Ranah sebagai kawasan warisan budaya nasional. Ketiga, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*) dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi



tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

#### 4.2.1.2 Penelaahan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Menindaklanjuti TPB, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait penyusunan RPJMD harus mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Regulasi tersebut, dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Kebijakan tersebut, bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahteraan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan. Indikator TPB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi;

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;



13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem, daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di kota/kabupaten. Pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis terhadap; 1) kondisi umum daerah, 2) analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, dan 3) analisis kontribusi pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

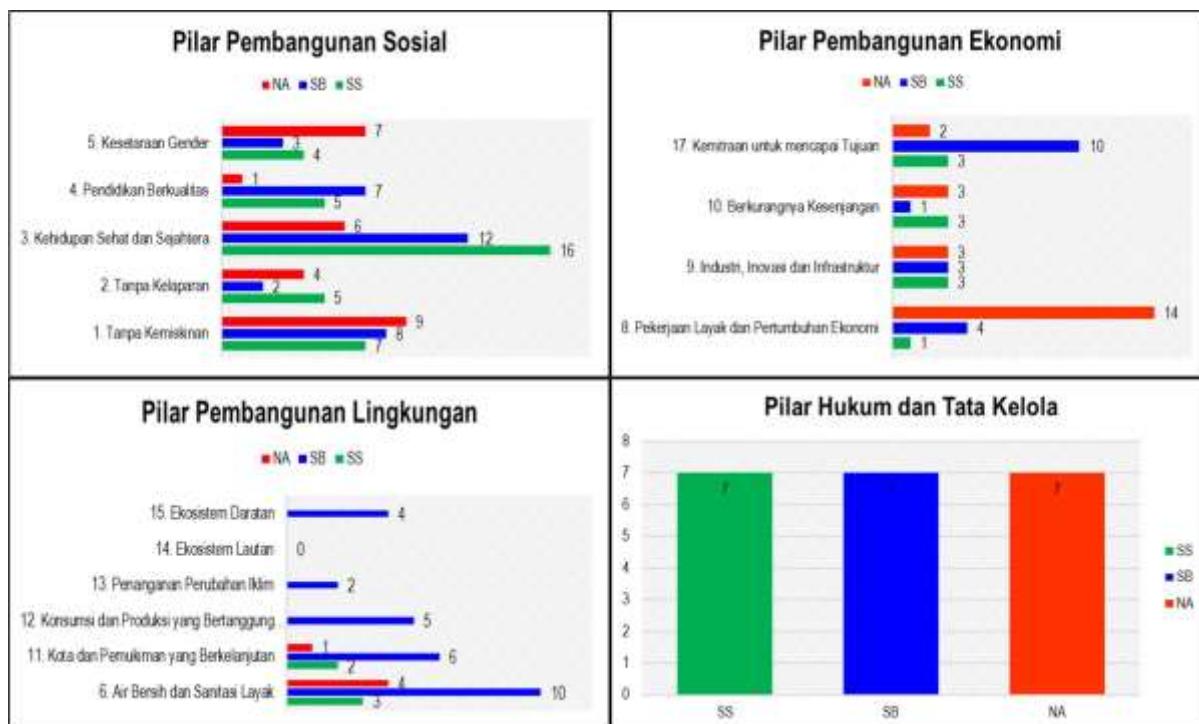
Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. alternatif proyeksi ini diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi: 1) jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat sebanyak 308 indikator, 2) jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 235 indikator, 3) jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator, dan 4) jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota sebanyak 222 indikator. Berdasarkan hasil indentifikasi data melalui Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026, maka Kabupaten Sijunjung memiliki kewajiban untuk mencapai target TPB sebanyak 204 indikator. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dimiliki oleh



Kabupaten Sijunjung serta kewenangannya.

Pencapaian 204 indikator TPB di Kabupaten Sijunjung berdasarkan 4 (empat) pilar SDG's, antara lain; 1) sosial, 2) ekonomi, 3) lingkungan, dan 4) hukum dan tata kelola, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2021-2026

**Gambar 4.1 Capaian Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

Berdasarkan hasil capaian TPB diatas, terlihat jelas bahwa pilar lingkungan dan ekonomi serta hukum dan tata kelola capaianya masih banyak belum mencapai target nasional (SB). Sedangkan pilar sosial menunjukkan capaian yang lebih baik dari ketiga pilar lainnya, karena capaianya yang melampui target nasional (SS) lebih banyak. Mencermati capaian TPB Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2020, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Isu strategis berdasarkan capaian pilar-pilar TPB, antara lain :
  - 1) Rendahnya kualitas air.
  - 2) Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah.
  - 3) Tingginya intensitas illegal logging.
  - 4) Tingginya risiko bencana alam.
  - 5) Tingginya *illegal mining*.
  - 6) Rendahnya kualitas infrastruktur
  - 7) Tingginya intensitas alih fungsi lahan.
  - 8) Rendahnya ketaatan tata ruang.
  - 9) Tingginya pengangguran dan kemiskinan.
  - 10) Tingginya angka putus sekolah.
  - 11) Rendahnya kapasitas pengelolaan limbah cair.
  - 12) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat.



- 13) Rendahnya produktivitas lahan pertanian.
- 14) Cukup luas lahan yang tidak produktif.
- 15) Rendahnya keamanan pangan.
- 16) Berkurangnya keanekaragaman hayati.
- 17) Cenderung meningkatnya kekerasan anak dan perempuan.
2. Isu strategis berdasarkan hasil pembobotan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9, antara lain:
  - 1) Rendahnya kualitas air.
  - 2) Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah.
  - 3) Tingginya intensitas illegal logging.
  - 4) Tingginya risiko bencana alam.
  - 5) Tingginya *illegal mining*.

#### 4.2.1.3 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2020, yaitu; "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**".

Visi tersebut, dicapai melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, secara operasional ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

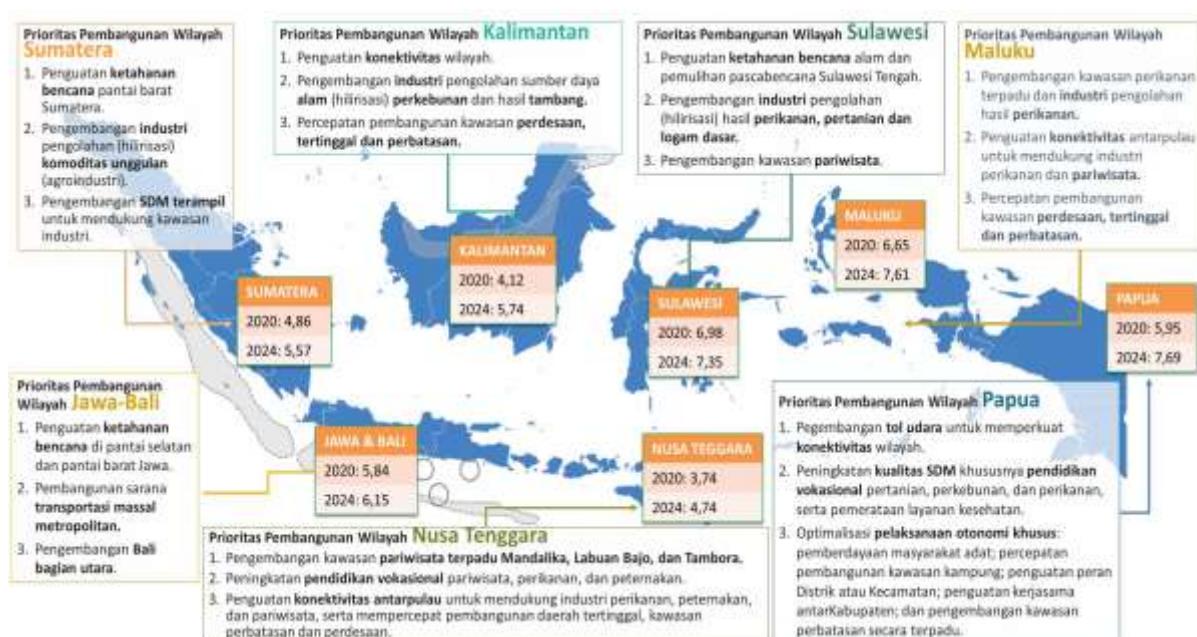
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda pembangunan ini diwujudkan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Agenda pembangunan ini diwujudkan melalui pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Agenda pembangunan ini diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, agenda pembangunan ini diwujudkan melalui gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap,



- perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Agenda pembangunan ini diwujudkan melalui perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
  6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Agenda pembangunan ini diwujudkan melalui penguatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
  7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, agenda pembangunan ini diwujudkan melalui hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Berdasarkan agenda pembangunan tersebut, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,4-6,0% per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,0-5,0%. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0%. Selain itu, tingkat kemiskinan dan TPT diproyeksikan turun menjadi 6,5-7,0% dan 4,0-4,6% pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Merujuk kepada target makro pembangunan nasional tersebut, maka daerah perlu melakukan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kondisi umum daerah.

Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional terhadap pembangunan daerah perlu diperhatikan program dan kegiatan prioritas pembangunan berkewilayahnasional 2020-2024, sehingga dapat disinkronisasikan melalui strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 berbasis kewilayah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.2 Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Berkewilayahnasional Tahun 2020-2024**



Sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan nasional tersebut, seyogianya menjadi peluang bagi Kabupaten Sijunjung untuk memanfaatkannya melalui sinergitas kebijakan pembangunan lima tahun kedepan secara terstruktur dan terukur.

#### 4.2.1.4 Penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara, selanjutnya menjadi jenis SPM, terdiri atas :

1. Bidang pendidikan, terdiri dari; a) pendidikan anak usia dini, b) pendidikan dasar dan c) pendidikan kesetaraan.
2. Bidang kesehatan terdiri dari; a) pelayanan kesehatan ibu hamil, b) pelayanan kesehatan ibu bersalin, c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, d) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, e) pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia produktif, g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, i) pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*, j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
3. Bidang pekerjaan umum terdiri dari; a) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan b) Penyediaan pelayanan pengelolahan air limbah domestik.
4. Bidang perumahan rakyat terdiri dari; a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
5. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari; a) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, b) pelayanan informasi rawan bencana, c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan d) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Bidang sosial terdiri dari; a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial, c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial dan d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial, e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pentingnya penerapan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan insentif dan



disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan SPM Pemerintah Daerah yang optimal dapat digunakan sebagai instrumen bagi pemerintah, antara lain:

1. Penilaian kinerja Pemerintahan Daerah.
2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, tergambar jelas penerapan SPM bagi Pemerintah Daerah merupakan kewajiban yang utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan isu strategis daerah penerapan SPM menjadi perhatian utama, karena berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan. Selain itu, penerapan SPM yang optimal menentukan keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD.

#### 4.2.1.5 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Penelaahan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merujuk kepada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan dokumen tersebut, arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi, misi dan program Gubernur Sumatera Barat terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020.

Adapun visi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terpilih, yaitu; **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut, diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan Industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Ke-7 misi tersebut diimplementasikan melalui program unggulan sebagai berikut :



<b>Tema</b>	<b>Program Unggulan</b>
Sumbar Sehat dan Cerdas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian. pelacakan. isolasi dan pengobatan untuk penanganan. pencegahan dan pengendalian covid-19.</li><li>2. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi Kebiasaan baru.</li><li>3. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru.</li><li>4. Tunjangan khusus sebesar 2.5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SL8 di daerah 3T (terdepan. terluar dan tertinggal)</li><li>5. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.</li><li>6. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.</li><li>7. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri</li><li>8. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan</li></ol>
Sumbar Religius dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya. gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi</li><li>2. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan.</li><li>3. Menjadikan Gedung Kebudayaan. Museum. dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (<i>education tourism</i>).</li><li>4. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan</li></ol>
Sumbar Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian.</li><li>2. Mewujudkan Sumatera 8arat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.</li><li>3. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian</li><li>4. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif</li><li>5. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.</li><li>6. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.</li><li>7. Membangun industri pariwisata melalui destinasi wisata berkelas dunia dan destinasi wisata unggulan.</li></ol>



<b>Tema</b>	<b>Program Unggulan</b>
Sumbar Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional.</li><li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan herupa irigasi, hendungan dan pelabuhan serta akses transportasi kesentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.</li><li>2. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang.</li><li>3. Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas.</li><li>4. Optimalisasi pengelolaan sampah yang herkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (<i>waste to energy</i>) dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3)</li><li>5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-government</i>)</li></ol>

#### 4.2.1.6 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagai landasan utama penyusunan RPJMD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dinyatakan, bahwa pada tahun tahun 2025 dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Sijunjung masyarakat yang bertakwa, sejahtera, mandiri, cinta tanah air, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, sadar lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tergambar melalui visi RPJPD, yaitu; "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIJUNJUNG YANG MADANI**". Cita-cita tersebut, sebuah kondisi ideal yang akan diwujudkan disaat penyusunan RPJPD. Visi pembangunan daerah 2005-2025 sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan berbasis potensi riil daerah yang ingin dicapai.

Tingkat kemajuan masyarakat Sijunjung dinilai dari kualitas sumber daya manusia yang tinggi berkarakter cerdas, kreatif, inovatif, produktif, bermoral, berakhhlak mulia, berkualitas pendidikan tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan yang berkualitas dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, produktivitas sumber daya manusia yang makin tinggi. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat Sijunjung diukur dengan pendapatan per kapita yang makin tinggi, stabil dan berkelanjutan, berkurangnya angka pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sumber yang makin merata, taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat yang makin baik dan berkualitas, menurunnya kesenjangan antar wilayah pembangunan, kondisi nagari yang aman, tenram dan damai dalam nuansa masyarakat religius.



Ditinjau dari tingkat kemajuan ekonomi berbasis potensi riil sumber daya daerah Sijunjung, maka struktur perekonomian yang kuat ditandai oleh peran agribisnis dan agroindustri yang kompetitif tercermin didalam struktur dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sektor agribisnis dan agroindustri, menurunnya kesenjangan antar wilayah, antar pelaku, antar sektor dan antar golongan pendapatan, selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembangunan agribisnis dan agroindustri dengan mengedepankan efisiensi dan peningkatan produktivitas, meluasnya penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam pembangunan pertanian dan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang merujuk kepada isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yaitu:

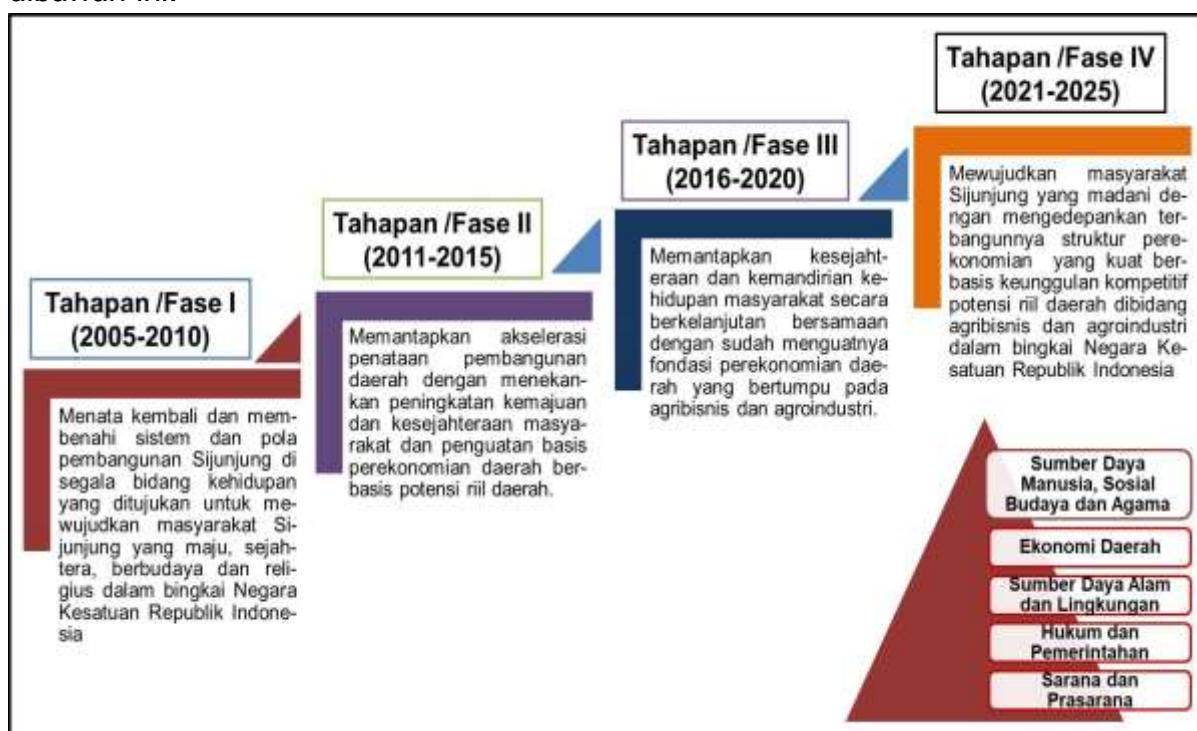
- 1. Mewujudkan masyarakat Sijunjung yang sejahtera, berkualitas, berakhlak mulia dan religius** adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat; pemantapan kehidupan beragama untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara kerukunan antar warga ditengah keberagaman (suku, budaya, maupun agama), serta tetap menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
- 2. Mewujudkan masyarakat Sijunjung yang sehat, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; penumbuhan dan pengembangan daya kreatif dan inovasi produktif yang berkelanjutan.
- 3. Mewujudkan perekonomian Sijunjung yang lebih tangguh, merata dan berkeadilan, stabil dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan agroindustri** adalah memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis keunggulan potensi riil daerah dengan membangun sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang tangguh berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; mengedepankan penurunan kesenjangan ekonomi antarwilayah, antarsektor, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan; memantapkan kelembagaan yang menjamin ketahanan, kemandirian dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah; dan membangun infrastruktur yang maju menjangkau setiap wilayah pembangunan ekonomi.
- 4. Mewujudkan pembangunan Sijunjung yang berwawasan lingkungan dan lestari** adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya bagi kenyamanan sistem kehidupan masa kini dan mendatang; memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan; meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung perbaikan kualitas dan keberlanjutan kehidupan.
- 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sijunjung yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum** adalah memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan, memantapkan kehidupan demokrasi, menjamin kebebasan berpendapat dan mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya taat hukum, menegakkan hukum secara adil, konsekuensi, dan tidak



diskriminatif.

- 6. Mewujudkan sinergi harmonis dunia usaha, masyarakat dan pemerintah menuju Sijunjung yang madani** adalah memantapkan kerjasama yang efektif dan saling mendukung antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah; mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat dalam mencapai kemajuan dan kemandirian.
- 7. Mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan antisipatif terhadap perkembangan perekonomian global** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh melalui peningkatan pembangunan pada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan publik, dan mengembangkan daerah perbatasan yang potensial.
- 8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai** adalah menyelenggarakan perumahan yang sehat dan layak huni; meningkatkan ketersediaan sumber daya air bagi kebutuhan rumah tangga dan pertanian; membangun dan memperkuat jaringan sarana dan prasarana perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lainnya terutama pada daerah terpencil dan terisolir; pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat secara efisien dan merata; memperluas jaringan informasi dan telekomunikasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD tersebut, maka diklasifikasikan melalui 4 (empat) tahapan atau fase pembangunan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.3 Tahapan dan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025**

Berdasarkan gambaran tahapan dan arah pembangunan daerah jangka panjang tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 telah memasuki tahapan atau fase ke-IV RPJPD (2021-2025). Oleh sebab itu, dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun



mendatang mengacu kepada arah pembangunan tahapan atau fase ke-4 RPJPD sesuai dengan tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Arah dan Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung 2005-2025 Tahapan ke-4**

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Strategi Pembangunan
<b>A. Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Agama</b>		
1	Terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkualitas, berakhlaq mulia dan religius.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan pemantapan nilai agama untuk modal pembangunan.</li> <li>b) Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan SDM.</li> <li>c) Mengoptimalkan penggunaan dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.</li> </ul>
2	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan dan mengembangkan pola hidup sehat dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>b) Pengembangan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik.</li> <li>c) Menjadikan pendidikan modern sebagai sistem pendidikan yang terpadu</li> <li>d) Menjadikan SDM yang memiliki IPTEK yang tinggi dan IMTAQ yang kuat.</li> <li>e) Melanjutkan peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang kreatif produktif.</li> </ul>
<b>B. Ekonomi Daerah</b>		
1	Terwujudnya ekonomi daerah yang lebih tangguh, merata dan berkeadilan, stabil dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan penerapan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam perluasan untuk agribisnis dan agro-industri</li> <li>b) Meningkatkan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang berdaya saing tinggi</li> <li>c) Meningkatkan pemantapkan keberlanjutan sumber-sumber pertumbuhan</li> <li>d) Menjadikan kemandirian dan kemampuan bersaing para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah sebagai modal utama dalam peningkatan usaha dan perekonomian</li> <li>e) Meningkatkan pemantapan kemampuan dan keman-dirian pengelolaan keuangan daerah</li> </ul>
2	Terwujudnya sinergi harmonis dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatkan sinergi positif dan lingkungan yang kondusif
3	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata dan antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global	Mengoptimalkan peningkatan aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha
<b>C. Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>		
1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengoptimalkan peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</li> <li>b) Mengembangkan penerapan teknologi informasi dalam usaha pemanfaat dan melindungi keanekaragaman sumber daya alam</li> <li>c) Mengoptimalkan integrasi perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>
<b>D. Hukum dan Pemerintahan</b>		
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melanjutkan peningkatan SDM, daya saing dan profesionalisme aparatur</li> <li>b) Mengembangkan koordinasi kelembagaan pemerintahan yang menjunjung tinggi amanat de-mokrasi</li> </ul>
2	Mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional dan mempunyai legitimasi yang kuat	Mengoptimalkan manajemen profesionalisme lembaga adat dan nagari dalam pemerintahan.
<b>E. Sarana dan prasarana</b>		
1	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jaringan sarana prasarana publik</li> <li>b) Mengoptimalkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</li> </ul>



No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Strategi Pembangunan
2	Terwujudnya Ibu Kota Kabupaten dan Nagari yang maju dan berkembang	Menjadikan lokasi-lokasi strategis di sekitar ibu kota Kabupaten dan nagari sebagai pusat pertumbuhan baru

Mencermati arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 pada tahapan atau fase ke-4 RPJPD tersebut, memiliki tantangan berat bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan jangka menengah kedepannya agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani pada Tahun 2025. Mengingat dinamika tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami perubahan yang signifikan karena terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi awal tahun 2020, hal ini ditandai terkontraksi laju pertumbuhan ekonomi daerah dibawah angka 0 atau minus dan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelaahan kembali kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan periode yang lalu sesuai dengan dinamika saat ini. Sehingga perwujudan visi RPJPD Tahun 2005-2025 tidak mengalami deviasi yang cukup besar.

#### 4.2.1.7 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 adalah; "**Terwujudnya ruang Kabupaten Sijunjung berbasis pertanian dengan didukung oleh pertambangan, agroindustri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat**". Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, meliputi :

- A. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui pengolahan produk per anian dan perikanan dan pertambangan, melalui:
  - a. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan dan perikanan, dengan upaya antara lain:
    - a) Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
    - b) Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
    - c) Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.



- d) Meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan.
  - e) Mengoptimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten Sijunjung.
  - f) Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri pakan ikan di daerah yang berpotensi untuk mendukung usaha perikanan.
  - g) Meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan pemasaran produksi ikan oleh masyarakat.
- b. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata, dengan upaya antara lain:
- a) Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung,
  - b) Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- c. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan, dengan upaya antara lain:
- a) Peruntukan kawasan untuk sektor Pertambangan dan Energi.
  - b) Peningkatan kegiatan explorasi terhadap sumber daya Mineral dan Migas yang berwawasan lingkungan, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta.
  - c) Pembinaan usahan pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan syarakat tanpa merusak lingkungan.
  - d) Mendorong sektor industri pengolahan hasil tambang melalui kemudahan berinvestasi di sektor pertambangan.
- B. Pemanfaatan kawasan hutan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Kebijakan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan melalui strategi :
- a. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan sesuai hirarki pelayanan dan tetap memperhatikan kaidah lingkungan, terutama kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 %, prasarana pejalan kaki dan pedagang informal.
  - b. Penetapan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.
  - c. Pembatasan alihfungsi lahan pertanian dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif.
  - d. Meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
    - a) Pemantapan fungsi kawasan lindung;
    - b) Prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
    - c) Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan kabupaten yang berbatasan.



- C. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian wilayah dengan memperhatikan pemerataan pembangunan; Kebijakan untuk pemerataan pembangunan ini dilakukan melalui strategi :
- Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan kabupaten yang dapat menghubungkan seluruh nagari-nagari di Kabupaten Sijunjung.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
  - Fasilitasi peningkatan fungsi Kota Muaro Sijunjung menjadi kawasan pemerintahan, pendidikan dan pariwisata melalui kajian wilayah dan kecamatan sekitar sebagai pendukungnya.
  - Fasilitasi peningkatan infrastruktur sarana transportasi kereta api guna peningkatan aksesibilitas Kabupaten Sijunjung dengan wilayah di sekitarnya
  - Menyusun sinkronisasi penataan ruang pengembangan kawasan perkotaan Muaro Sijunjung dan ibukota kecamatan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan.
  - Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah.
  - Mengembangkan kawasan strategis sesuai dengan potensi unggulan yang meliputi beberapa kawasan strategis yang ditetapkan.

Sedangkan untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan struktur ruang melalui rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Rencana Sistem Perkotaan Tahun 2031**

<b>PKL</b>	<b>PKLp</b>	<b>PPK</b>	<b>PPL</b>
• Muaro Sijunjung	• Tanjung Ampalu • Sungai Tambang	• Sijunjung • Lubuk Tarok • Tanjung Gadang • Padang Sibusuk • Kumanis • Palangki • Kamang	• Pematang Panjang • Aie Angek • Aie Amo • Sungai Lansek • Muaro Bodi • Sumpur Kudus • Tanjung Bonai Aur • Koto Tanjung • Koto Padang Laweh • Buluh Kasok • Pulasan • Pamuatan

Sumber; Perda Kab. Sijunjung No 5/2012

Keterangan :

PKL : Ditetapkan Atas Usulan Sesuai Potensi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.

PKLp, PPK dan PPL: Ditetapkan Atas Usulan Sesuai Potensi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sijunjung

Sedangkan rencana pola ruang terdiri atas pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 terdiri atas; 1) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung, dan 2) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Sesuai Peraturan



Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka rencana kawasan lindung di daerah Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2031 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi; kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi; sempadan sungai, dan kawasan terbuka hijau kota .
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi; kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Kawasan rawan bencana alam yang meliputi; kawasan rawan tanah longsor, kawasan gerakan tanah, dan kawasan rawan banjir.
- e. Kawasan lindung geologi yang meliputi; kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Mempertimbangkan RTRW Nasional dan kondisi eksisting pemanfaatan ruang daerah, maka rencana pola ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

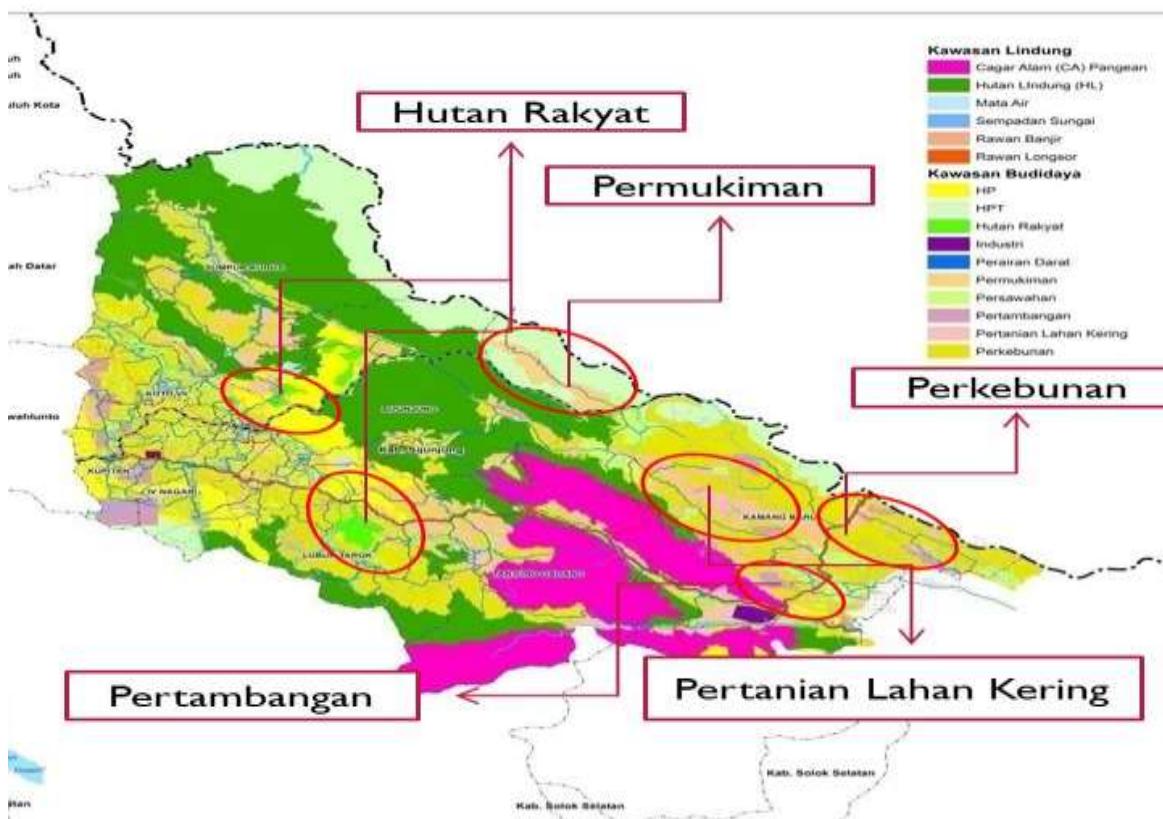
**Tabel 4.5**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031**

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (ha)
<b>A.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	
1	Hutan Lindung	80.460
2	Kawasan Perlindungan Setempat :	
	a. Mata Air	625
	b. Sempadan Sungai	1.809
	c. Sungai	0
3	Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam	40.530
4	Kawasan Rawan Bencana :	
	a. Rawan Banjir	311
	b. Rawan Longsor	318
<b>B.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	
1	Kawasan Hutan Produksi :	
	a. Hutan Produksi	16.450
	b. Hutan Produksi Terbatas	28.383
	c. Hutan Rakyat	2.517
2	Kawasan Pertanian :	
	a. Pertanian Lahan Basah	13.078
	b. Pertanian Lahan Kering	21.356
3	Kawasan Perkebunan	91.029
4	Kawasan Pertambangan	7.354
5	Kawasan Industri	1.066
6	Kawasan Permukiman :	
	a. Permukiman Perkotaan	2.906
	b. Permukiman Perdesaan	4.888
	<b>Jumlah</b>	<b>313.080</b>

Sumber; Perda Kab. Sijunjung No 5 tahun 2012

Secara lengkap, rencana pola ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031, dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Sumber: Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No 5/2012

**Gambar 4.4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031**

#### 4.2.1.8 Penelaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah Sekitarnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara administratif Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan daerah lain, antara lain; 1) Kota Sawahlunto, 2) Kabupaten Dharmasraya, 3) Kabupaten Tanah Datar, 4) Kabupaten Solok, 5) Kabupaten 50 Kota, 6) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan 7) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dari ke-7 daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung tersebut, terdapat 5 (lima) daerah saat ini, sedang dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, kecuali Kota Sawahlunto dan Kabupaten Kampar. Sementara itu, daerah perbatasan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berada dikawasan hutan lindung dengan luas daerah cukup kecil. Sehingga kebijakan pembangunan tidak memiliki simplifikasi yang kuat untuk melakukan kerjasama pembangunan antar daerah.

Penelaahan RPJMD daerah perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung yang memiliki simplifikasi yang kuat agar terjalinnya kerjasama pembangunan dibidang sosial ekonomi pembangunan, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.6**  
**Indentifikasi RPJMD Daerah Lain**

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Perda No. 5 Tahun 2019)	<p>a) Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur Kota</p> <p>b) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</p> <p>c) Peningkatan kualitas promosi pariwisata yang tepat sasaran</p>	<p>Salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur Kota adalah pembangunan jaringan infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mencermati salah satu arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Sawahlunto tahun 2018-2023, bisa dijadikan isu sektoral dalam meng-sinergikan kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan lima tahun mendatang.</p> <p>Salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor. Mencermati salah satu arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 tersebut, sangat menguntungkan bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjaga kualitas air Batang Kuantan mengingat salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Ombilin berada diwilayah Kota Sawahlunto.</p> <p>Salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas promosi pariwisata yang tepat sasaran adalah meningkatkan pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan koneksiitas. Mencermati salah satu arah kebijakan kualitas pomosi pariwisata Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 tersebut, bisa dijadikan isu sektoral dalam upaya peningkatan kualitas promosi pariwisata bagi Kabupaten Sijunjung mengingat produk wisata Kota Sawahlunto sama dengan Kabupaten Sijunjung.</p>
2	RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 (Rancangan Akhir)	Meningkatkan kerjasama antar wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam penanggulangan bencana.	Kebijakan terkait ini dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin rangka upaya pencegahan bencana alam (banjir) daerah perbatasan (Kec. Kamang Baru). Sehingga akan mengurangi dampak bencana alam di Kabupaten Sijunjung. Oleh sebab itu, perlu ada kerjasama pemeliharaan DAS Batang Takung secara efektif dan berkelanjutan.



No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
3	RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 (Rancangan Akhir)	1. Sinergitas pengembangan kawasan ekonomi strategis  2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kebijakan terkait ini dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Sijunjung dalam mengembangkan sektor ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan, baik dari sisi infrastruktur dasar, maupun pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.  Mencermati salah satu arah kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 tersebut, sangat menguntungkan bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjaga kualitas air Batang Kuantan mengingat salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Sinamar sebagai besar berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang bersatu di Batang Ombilin berada di Kecamatan Koto VII.
4	RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 (Rancangan Akhir)	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Solok tahun 2021-2026 tersebut, sangat menguntungkan bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjaga kualitas air Batang Kuantan mengingat salah satu hulu Batang Palangki dan Batang Sukam berasal dari wilayah Kabupaten Solok
5	RPJMD Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2021-2026	-	Penelaahan dokumen RPJMD belum dapat dilakukan karena masih bersifat rancangan.

#### 4.2.2 Isu Strategis Daerah

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam penentuan isu-isu strategis daerah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang yang diklasifikasikan melalui 4 (empat) aspek, yaitu; 1) aspek daya saing ekonomi, 2) aspek kesejahteraan sosial, 3) aspek pembangunan berkelanjutan, dan 4) aspek kelembagaan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Isu Strategis Daerah Tahun 2021-2026



Kesembilan isu strategis daerah tahun 2021-2026 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Isu pengentasan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini karena sejalan dengan target SDG's tingkat kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yang berada di bawah garis kemiskinan hingga tahun 2020 sebanyak 16.280 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 6,78% yang diukur melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,97 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,27.

Disisi lain, penduduk miskin Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang berpeluang meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena belum stabilnya harga komoditas pertanian/perkebunan dan meningkatnya pengangguran terbuka akibat dampak krisis ekonomi global empat tahun terakhir dan juga dipengaruhi dampak pandemi covid-19 secara global yang terjadi pada tahun 2020 ini. Sehingga berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat, terutama petani dan tenaga kerja informal. Sementara itu, diversifikasi usaha masyarakat petani lima tahun terakhir belum berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain; prilaku atau kebiasaan sosial dan budaya masyarakat petani cenderung statis.

Seiring adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, berindikasi meningkatnya jumlah penduduk miskin absolut yang berada pada 20% penduduk berpendapatan terbawah adalah; 1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga petani berlahan sempit dan rumah tangga sektor informal, 2) usaha mikro kecil, termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*), dan 3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Sementara itu, lapangan pekerjaan bagi penduduk berpendapatan terbawah belum berkembang secara optimal.

Sementara itu, secara faktual yang dihadapi penduduk miskin Kabupaten Sijunjung secara struktural adalah, masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi, akses rumah layak, ketersediaan pangan, pendidikan, dan kesehatan serta infrastruktur dan prasarana dasar. Selain itu, lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan dan kesetaraan gender serta produktivitas rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasi, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Disamping itu, kemiskinan struktural juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang serta kurang optimalnya memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh dalam dimensi politik yang lebih luas dengan menciptakan ruang aspirasi



masyarakat dalam proses politik dan pembangunan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik berada di ranah maupun di rantau dalam proses pembangunan daerah.

Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat atau kemiskinan kultural. Mengingat melunturnya identitas dan kekuatan sosial budaya. Sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Oleh sebab itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu adanya pendekatan (*approach*). Pertama, peningkatan kualitas kehidupan hidup masyarakat secara terintegrasi berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti; layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, sanitasi, air bersih dan layanan pendidikan yang inklusif. Kedua, peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi dan terstruktur. Ketiga, peningkatan kesetaraan gender secara berkeadilan dalam upaya pembangunan keluarga yang berkualitas. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan dasar SPM bidang sosial, bidang perumahan rakyat dan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Pendekatan tersebut, pada dasarnya merupakan derivasi pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*).

## **2. Isu pengembangan ekonomi kerakyatan**

Pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan isu strategis yang perlu dijadikan perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung berada di angka minus 1,10%. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung dipengaruhi cenderung menurunnya kontribusi lapangan usaha pertanian dan perdagangan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua lapangan usaha tersebut, merupakan sektor unggulan untuk mengungkit laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama ini.

Cenderung menurunnya kontribusi lapangan usaha pertanian dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB, seyoginya harus diantisipasi agar memberikan pengaruh terhadap struktur perekonomian daerah lima tahun kedepannya. Oleh karena itu, isu pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu isu strategis daerah dalam upaya menciptakan struktur ekonomi daerah yang kuat melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat sebagai berikut:

### **1) Sektor pertanian**

Sektor pertanian, sejatinya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepannya. Hal ini disebabkan karena 75% masyarakat Kabupaten Sijunjung bekerja di sektor pertanian (*on farm*). Namun hingga saat ini masyarakat cenderung menurun minat dalam mengolah lahan pertanian. Hal ini ditandai semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi usaha lainnya oleh masyarakat. Disamping itu, terbatasnya lahan pertanian yang akan diolah disebabkan kondisi topografi daerah sebagian besar tingkat kemiringan berada di atas 40°. Selain itu, kecenderungan masyarakat bekerja di sektor formal (lembaga



pemerintahan dan swasta) semakin tinggi.

Terjadinya alih fungsi lahan dan berkurangnya minat masyarakat pada sektor pertanian berimplikasi terhadap menurunnya jumlah produksi pada sektor pertanian. Sehingga kebutuhan pangan utama masyarakat cenderung menurun ketersediannya, terutamanya beras. Jika kondisi ini dibiarkan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat kedepannya. Sehingga berimplikasi terhadap kebutuhan dasar masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dimasa mendatang. Oleh karena itu, pengembangan bibit unggul padi yang saat ini sedang digalakan, agar kedepannya lebih menyebar keseluruh wilayah Kabupaten Sijunjung. Selain itu, industrialisasi pertanian/perkebunan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Disisi lain, belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian lainnya, seperti tanaman hortikultura. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum menganggap tanaman hortikultura sebagai daya dukung dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilahirkan kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura. Hal ini mengingat arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak diikuti dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah.

Selain itu, kebutuhan pangan masyarakat yang perlu dikembangkan secara struktur dan tepat sasaran adalah isu peningkatan produktivitas sektor perikanan. Meningkat potensi sektor ini memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan. Disamping itu, mempunyai sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam mengelola pembibitan ikan serta didukung adanya kearifan lokal masyarakat dalam menjaga ekosistem perikanan.

Isu lain pengembangan sektor pertanian terkait dengan sistem distribusi pangan, seyoginya pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level nagari/desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Selain itu, penting juga untuk penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan melalui kebijakan yang berbasis pemberdayaan.

Selain itu, tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam ketahanan pangan. Hal ini ditandai Skor Pola Pangan Harapan masih berada dibawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Kabupaten Sijunjung tertinggi adalah beras, bisa digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sijunjung belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya, yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan, karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasi tidak terjamin mutu dan keamanannya.



Isu lain adalah peningkatan kualitas produk pangan berorientasi ekspor dan mampu bersaing di pasar global dan nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani. Kesemua upaya tersebut, secara langsung akan meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi pendapatan petani, disamping terjaminnya ketersediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Sijunjung.

## 2) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan secara terstruktur, sehingga dapat memasarkan hasil pertanian lebih efektif. Hingga saat ini kontribusi sektor perdagangan terhadap peningkatan pendapatan bagi petani belum optimal hasilnya. Hal ini ditandai masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) akibat nilai harga jual produk pertanian yang diperoleh petani sangat kecil.

Berangkat permasalahan tersebut, diperlukan adanya kebijakan penanganan hasil pemasaran pertanian yang lebih tepat dan terukur sasarannya. Terdapat beberapa isu strategis dalam perumusan kebijakan, antara lain; a) peningkatan daya saing hasil pertanian, sehingga petani dapat menjadi penentu harga (*price maker*) dalam memasarkan hasil pertanian, b) penciptaan kerjasama antara petani dengan komoditas yang sama, berupa membentuk sentra atau gudang penjualan yang dikelola oleh kelompok petani tersebut, dan c) peningkatan peran pemerintahan daerah dalam menjaga stabil harga komoditi pertanian melalui pembangunan pasar lelang yang terstruktur dan tepat sasaran.

Selain itu, sektor perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan yang tidak kalah strategisnya adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM hingga saat ini belum sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena lemahnya akses permodalan, lemahnya pengelolaan usaha cenderung mempertahankan sektor primer dan pengembangan *e-commerce* belum diikuti kemampuan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM kedepannya perlu diperhatikan isu-isu strategis, antara lain; a) pemanfaatan pasar yang ada, b) peningkatan kualitas produk dan layanan, c) perluasan pasar melalui diversifikasi produk, dan d) peningkatan kapasitas koperasi dan lembaga keuangan mikro.

## 3. Isu pengembangan potensi unggulan daerah

Isu pembangunan ini merupakan salah satu yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini ditandai rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap pembentukan PDRB. Walaupun nilai investasi Kabupaten Sijunjung membaik dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menerima investasi. Selain itu juga, pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Kabupaten Sijunjung karena sebagian besar masih berada di wilayah selatan/perbatasan.

Disisi lain, peran anggaran belanja pemerintah daerah dalam mengungkit laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung belum optimal. Hal ini terlihat dari alokasi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah



pada lapangan usaha konstruksi dan administrasi pemerintahan dan jaminan layanan sosial masyarakat bersifat wajib. Kontribusi APBD Kabupaten Sijunjung dalam waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan yang melambat, dari 17,34% tahun 2016 menjadi 17,56% pada tahun 2017. Sedangkan peran APBD dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam lima tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB cenderung meningkat akibat adanya mandatori anggaran. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif baik, walaupun belanja modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sijunjung yang belum dikembangkan secara optimal, antara lain;

1) Pariwisata dan ekonomi kreatif

Isu strategis pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

Disisi lain, pengembangan pariwisata Kabupaten Sijunjung mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Kabupaten Sijunjung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat. Pengembangan *geopark* sektor pariwisata Kabupaten Sijunjung dititik beratkan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*eco-socio tourism*) dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk ekowisata. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat nagari/desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

2) Sektor perindustrian.

Isu pengembangan sektor perindustrian merupakan salah satu terbesar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir karena memiliki potensi cukup besar. Terutama, untuk penyediaan industrilisasi hilir komoditi pertanian/perkebunan unggulan daerah. Namun saat ini sektor perindustrian dalam mengembangkan potensi sumber daya alam masih didominasi oleh industri padat karya karena lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain, perkembangan sektor perindustrian sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Kondisi lain yang harus diantisipasi dengan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dapat diolah dan didukung stabilitas keamanan serta meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengolahan galian tambang yang berwawasan



lingkungan. Selain itu, optimalisasi pengembangan industri kecil berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Sijunjung.

Berangkat dari isu tersebut, maka kedepannya Pemerintah Daerah agar memberikan kesempatan kepada penduduk usia produktif melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi melalui perluasan akses pendidikan. Selain itu, diupayakan juga membangun koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi pada kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Upaya ini berkaitan penyediaan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan penduduk usia produktif (*labour*) yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global di era industri 4.0 dan menuju era industri 5.0 pada tahun 2025.

#### **4. Isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia**

Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan. Hal ini ditandai masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional yang diukur melalui; 1) usia harapan hidup, 2) angka harapan lama sekolah dan 3) angka rata-rata lama sekolah. Ketiga indikator pengukuran tersebut, merupakan komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan karena belum optimalnya tumbuh kembang anak, tingginya tingkat gizi buruk dan marasmus serta *stunting*, sehingga akan terjadinya kehilangan generasi (*loss generation*) dimasa mendatang. Selain itu, adaptasi terhadap situasi pembelajaran pasca pandemi Covid-19, seperti peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kapasitas pedagogi guru yang sesuai keberagaman anak, pola-pola inovasi pembelajaran pasca pandemi, dan lainnya

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung cukup rendah, maka diperlukan penanganan yang serius dan konsisten terhadap isu-isu pembangunan sumberdaya manusia lima tahun mendatang, terutama pada sektor-sektor berikut ini :

##### **1) Kesehatan**

Sektor kesehatan menjadi hal yang penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia, karena angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penanganan kesehatan tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan seharusnya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif.

Hal ini ditandai masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta masih tingginya angka prevalensi *stunting*. Isu *stunting* saat ini menjadi isu nasional karena berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang. Secara terminologi *stunting* adalah masalah kurang gizi



kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) dan pelayanan kesehatan, sehingga *stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Selain itu, adanya gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi. Sehingga cenderung penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Isu lain berkaitan dengan bidang kesehatan adalah tantangan bonus demografi, dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sijunjung terutama usia produktif akan menjadi beban yang berat dalam lima tahun ke depan, jika tidak diantisipasi sejak saat ini. Dinamika bonus demografi akan terlihat dampaknya dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan berupa penuaan penduduk (*population ageing*), dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya.

Sehingga usia lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia baik potensial dan non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberian penghargaan serta migrasi antar daerah. Oleh karena itu, kondisi tersebut menuntut adanya jaminan perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (*senecsent diseases*) dan degeneratif. Disamping itu, tekanan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular semakin berat tantangannya kedepan, seiring munculnya covid-19 yang mewabah dari awal tahun 2020 secara global.

Menyikapi tantangan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang, isu peningkatan kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlu dicermati dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang.



## 2) Pendidikan

Sektor pendidikan perlu penanganan yang lebih diprioritaskan lima tahun kedepan. Hal ini ditandai angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2020 sebesar 12,37 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh pendidikan formal hanya sampai jenjang pendidikan SMA/SMK. Rendahnya harapan lama sekolah juga diikuti dengan rendahnya rata-rata lama sekolah, hingga tahun 2020 sebesar 8,11 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sijunjung lama mengenyam pendidikan formal sampai kelas II SLTP.

Rendahnya rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung tersebut, maka diperhatikan dalam penanganan isu pendidikan adalah sistem pendidikan untuk semua (*inclusif education*). Artinya, setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi serta pemerataan pendidikan guna mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat. Untuk menjawab isu strategis tersebut, perlu adanya kebijakan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur dan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang pendidikan. Disamping itu, perlu adanya kebijakan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan kearifan lokal.

## 3) Pegarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

Isu pengarustamaan gender dan perlindungan anak merupakan salah satu sasaran SDG's dan nasional. Oleh karena itu, daerah punya komitmen mempercepat pencapaian pembangunan pengarustamaan gender dan perlindungan anak karena hal tersebut sangat penting dalam menjamin pembangunan berkeadilan bagi semua. Mencermati kualitas gender dan perlindungan anak Kabupaten Sijunjung saat ini belum optimal menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengantisipasi isu stretegis ini, diantaranya; 1) meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan 2) peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

## 4) Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas kepemudaan pemuda dan prestasi olahraga merupakan salah satu isu strategis yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan sportif. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, antara lain; 1) pendidikan dan pelatihan dasar dasar kepemimpinan, 2) pengembangan lembaga kepemudaan, 3) peningkatan kreatifitas pemuda berwawasan wirausaha, 4) pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, 5) pendidikan kemasyarakatan produktivitas bidang kepemudaan, 6) Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat, 7) penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berkala dan 8) pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga. Kedelapan kebijakan pembangunan tersebut, menjadi jawaban untuk mewujudkan



sumber daya manusia pemuda yang kreatif, inovatif dan sportif.

### **5. Isu peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya**

Isu pembangunan ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi telah terjadi di Kabupaten Sijunjung saat ini. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya minangkabau ke dalam perilaku masyarakat Kabupaten Sijunjung. Walaupun selama ini nilai-nilai budaya minangkabau sebagian besar penduduk Kabupaten Sijunjung masih dipertahankan, seperti; a) *bakaua*, b) *batobo kongsi* dan c) seni budaya talempong dan randai serta masih banyak lainnya. Selain itu, Kabupaten Sijunjung termasuk kawasan warisan budaya nasional (perkampungan adat Padang Ranah, Nagari Sijunjung).

Namun seiring meningkatnya arus teknologi akan berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, isu strategis penguatan identitas nilai sosial dan budaya masyarakat penting diprioritaskan agar dapat memastikan jalinan hubungan antar masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Disatu sisi, membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya. Sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme.

Disisi lain, upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan pengembangan nilai-nilai dan penguatan identitas masyarakat melalui pelestarian seni budaya melalui peningkatan fasilitas ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi lokal maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal, maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni-budaya maupun ekspresi upacara adat. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat. Sehingga mendorong meningkatnya status kawasan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia (*word heritage*).

Selain peningkatan kualitas warisan budaya berbasis kearifan lokal, perlu juga diperhatikan budaya membaca masyarakat yang saling berkolerasi terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Isu strategis peningkatan minat dan budaya baca masyarakat lebih difokuskan aspek sosial budaya masyarakat. Sehingga dapat merubah tatanan masyarakat dalam memperoleh ilmu, selain pendidikan formal. Rendahnya budaya literasi bagi masyarakat merupakan isu yang selama ini belum menjadi prioritas pembangunan. Disamping itu, penguatan nilai-nilai budaya berbasis pemberdayaan gender juga merupakan isu strategis yang perlu menjadi prioritas utama lima tahun kedepan.

Isu strategis daerah tersebut, akan menjadi modal dasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan inklusif. Jika isu strategis daerah ini tidak ditanggani secara prioritas, maka secara tidak langsung akan menghambat roda pembangunan. Sehingga tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan.



## **6. Isu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah**

Isu pembangunan ini merupakan isu-isu aktual yang terjadi saat ini, mengingat masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah. Sehingga berimplikasi terhadap rendahnya daya saing daerah dan menimbulkan hilangnya peluang investasi di Kabupaten Sijunjung. Sejatinya, dalam menciptakan peluang investasi dibutuhkan daya saing ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata.

Isu strategis daerah dalam menjawab isu pembangunan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, baik infrastruktur maupun prasarana dasar berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga dapat terjaga pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Penanganan isu strategis daerah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah. Disamping itu juga, berdampak terhadap pemerataan pembangunan seluruh wilayah di Kabupaten Sijunjung, sehingga dapat mengurangi indeks ketimpangan pembangunan.

Isu strategis ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga dapat mempermudah akses distribusi barang dan jasa masyarakat secara efektif dan efisien serta mengurangi biaya transportasi. Selain itu, isu strategis daerah yang perlu dijadikan perhatian adalah pemenuhan sumber daya energi yang optimal. Isu strategis ini sangat diperlukan pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah saat ini.

Dalam upaya perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung diperlukan rencana pengembangan (*grand desain*) infrastruktur wilayah, diantaranya terkoneksi antar nagari/desa dan kawasan pertumbuhan baru sesuai dengan potensi pengembangan wilayah. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar (sanitasi dan air bersih) masyarakat serta pengembangan infrastruktur ibukota kabupaten yang terintegrasi dengan daerah penyangga.

## **7. Isu pelestarian lingkungan hidup**

Isu pelestarian lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem sungai/darat.

Isu strategis daerah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kabupaten Sijunjung. Hal ini disebabkan karena terganggunya kawasan tangkapan air (*catchment area*) dan daerah aliran sungai, sehingga kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Cenderung meningkatnya kejadian bencana alam, terutama tanah longsor, banjir, kebakaran



hutan dan kekeringan disebabkan karena perubahan iklim global , rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Sementara itu, pengelolaan hutan masih terjadi isu pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Disisi lain, masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dalam kurun waktu lima terakhir, sehingga berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur. Disisi lain, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup masih rendah antara lain, ditunjukkan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya terhadap isu lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. Jika melihat sisi pelayanan secara total masih rendah. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai dan diikuti keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, isu penanganan limbah industri yang bernilai ekonomis perlu juga menjadi prioritas lima tahun mendatang.

Isu-isu tersebut, jika dibiarkan tanpa ada penanganan yang efektif maka berimplikasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat kedepannya. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dan pemanfaatan sumber daya kehutanan oleh masyarakat yang terstruktur dan terintegrasi dengan instansi vertikal terkait. Selain itu, perlu juga adanya kebijakan penanganan risiko bencana dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan hukum. Sedangkan isu timbulan sampah akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka dibutuhkan *roadmap* penanganan sampah yang terstruktur dan terukur. Sehingga peningkatan jumlah timbulan sampah dapat ditangani secara optimal. Selain itu, perlu didorong masyarakat untuk menjadikan hasil limbah (sampah) bernilai ekonomis dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **8. Isu tata kelola pemerintahan**

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan. Jika didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi yang efektif, tata laksana yang optimal, akuntabilitas kinerja



pembangunan, sistem pengawasan yang efektif, pelayanan publik yang prima dan kualitas serta profesionalisme aparatur. Tantangan tersebut, merupakan salah satu tujuan adanya reformasi pada tatanan bernegara dan berbangsa yang terjadi pada tahun 1998. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap reformasi birokrasi pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Esensi dari Peraturan Presiden tersebut, mewujudkan pemerintah yang berkelas dunia tahun 2025.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan manajemen perubahan melalui, deregulasi kebijakan dan penataan organisasi yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta pengembangan teknologi informasi sebagai sarana efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintah yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Disamping itu, berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai media transparansi publik. Selain itu, pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan sampai pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan yang ditandai meningkatnya kepuasan massayarakat.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target nilai SAKIP yang optimal (minimum skor A), maka diperlukan peningkatan kinerja pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten serta terintegrasi dengan sistem yang mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercapai jika didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan yang diukur melalui indeks profesionalitas ASN dan disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan yang diukur melalui indeks sistem merit. Sehingga terwujudnya penguatan kelembagaan, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan sampai Pemerintah Nagari/Desa yang lebih efektif dan efisien yang diukur melalui Indeks Kelembagaan. Implikasi terhadap penanganan isu peningkatan kualitas ASN dan penguatan kelembagaan akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang prima. Oleh sebab itu, dibutuhkan ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat.

Isu lain yang berkaitan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah yang lebih efektif yang didukung tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan tingkat kapabilitas Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) pada level 5 serta terbangunnya zona integritas setiap unit layanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi



Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehingga dapat menurun indeks persepsi anti korupsi pada tatanan Pemerintah Daerah lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir, terlihat capaiannya belum optimal sesuai dengan tuntutan era reformasi dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, lima tahun kedepan isu tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung pemerintah yang bersih merupakan sebuah keharusan untuk penanganan yang lebih optimal, disamping mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi pemerintah tahun 2025. Selain itu, dapat mendorong terwujudnya daya saing ekonomi daerah, kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya IPM dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

## **9. Isu pembiayaan pembangunan daerah**

Isu pembiayaan pembangunan daerah merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal ini ditandai belum mandirinya daerah membiayai pembangunan. Kondisi ini terlihat dari tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung terhadap pendapatan daerah masih rendah. Secara faktual mencerminkan Kabupaten Sijunjung termasuk daerah memiliki ruas fiskal yang relatif sempit dan mengandalkan dana perimbangan (DAU dan DAK) dari pemerintah. Hal ini disebabkan belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Kabupaten Sijunjung.

Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakmampuan PAD mengimbangi kenaikan beban belanja pembangunan Kabupaten Sijunjung yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Sehingga menghambat tercapainya kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pencapaian hasil pembangunan daerah yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang inovasi dalam memperluas ruang fiskal pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain; a) pemanfaatan aset daerah yang produktif dan non produktif, b) peningkatan kualitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing dan c) penciptaan kerjasama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan pihak swasta.

Berdasarkan uraian isu strategis daerah tersebut, sehingga dirumuskan isu-isu strategis sektoral tahun 2021-2026 pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.7**  
**Isu-Isu Strategis Sektoral Tahun 2021-2026**

No.	Isu Strategis Daerah	Isu-isu Strategis Sektoral
1	Isu pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Isu peningkatan kualitas kebutuhan hidup dasar masyarakat miskin dan rentan miskin secara terintegrasi berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>2) Isu peningkatan kualitas perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> <li>3) Isu peningkatan kualitas pelayanan dasar SPM bidang sosial dan bidang perumahan rakyat dan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.</li> </ul>
2	Isu pengembangan ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Isu ketahanan pangan</li> <li>2) Isu peningkatan kapasitas petani.</li> <li>3) Isu pengembangan bibit unggul pertanian/perikanan.</li> <li>4) Isu industrialisasi pertanian (agro industri).</li> <li>5) Isu peningkatan produktivitas perikanan.</li> <li>6) Isu kemudahan akses pasar produk-produk pertanian/perikanan.</li> <li>7) Isu peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM.</li> <li>8) Isu perluasan pasar produk UMKM.</li> <li>9) Isu peningkatan kapasitas koperasi dan lembaga keuangan mikro</li> </ul>
3	Isu pengembangan potensi unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Isu peningkatan iklim investasi sektor unggulan daerah.</li> <li>2) Isu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dan kearifan lokal.</li> <li>3) Isu industrialisasi hilir komoditi pertanian/perkebunan unggulan daerah.</li> <li>4) Isu peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkompetensi</li> </ul>
4	Isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Isu laju pertumbuhan penduduk (bonus demografi).</li> <li>2) Isu peningkatan gizi ibu dan anak dalam upaya penurunan prevalensi stunting.</li> <li>3) Isu peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif.</li> <li>4) Isu peningkatan kualitas pelayanan dasar SPM bidang pendidikan dan kesehatan.</li> <li>5) Isu penanganan paska pandemi covid-19 secara efektif dan berkelanjutan</li> <li>6) Isu peningkatan kualitas gender dan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.</li> <li>7) Isu peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga</li> </ul>
5	Isu peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Isu peningkatan kualitas pemberdayaan gender berbasis nilai-nilai budaya</li> <li>2) Isu peningkatan kualitas minat dan budaya membaca masyarakat.</li> <li>3) Isu pemanfaatan seni dan cagar budaya</li> <li>4) Isu pelestarian seni budaya masyarakat.</li> <li>5) Isu peningkatan kawasan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia (<i>word heritage</i>).</li> </ul>



No.	Isu Strategis Daerah	Isu-isu Strategis Sektoral
6	Isu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Isu peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi publik, jaringan komunikasi dan jaringan energi.</li> <li>2) Isu peningkatan konektivitas antar nagari/desa dengan pusat-pusat pertumbuhan.</li> <li>3) Isu peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar (irigasi, sanitasi dan air bersih).</li> <li>4) Isu peningkatan kualitas pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum.</li> <li>5) Isu pengembangan infrastruktur ibukota kabupaten yang terintegrasi.</li> </ol>
7	Isu pelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Isu penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih.</li> <li>2) Isu pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat berbasis lingkungan.</li> <li>3) Isu pemanfaatan limbah rumah tangga, industri dan masyarakat bernilai ekonomis.</li> </ol>
8	Isu tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Isu penguatan kelembagaan pemerintah.</li> <li>2) Isu peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.</li> <li>3) Isu peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif.</li> <li>4) Isu peningkatan kualitas pengendalian intern pemerintah.</li> <li>5) Isu pembangunan zona integritas yang efektif dan berkesinambungan</li> </ol>
9	Isu pembiayaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> <li>2) Isu pemanfaatan aset daerah yang produktif dan non produktif.</li> <li>3) Isu peningkatan kualitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing.</li> <li>4) Isu penciptaan kerjasama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan pihak swasta.</li> </ol>



# BAB



5

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) sebagai jawaban permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis daerah lima tahun mendatang, maka visi RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, adalah:

#### VISI

**Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul  
dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani**

Perumusan visi RPJMD tersebut, merujuk kepada visi Kepala Daerah terpilih, yaitu: "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani". Mencermati dari perspektif pembangunan yang berkelanjutan konsep dari visi Kepala Daerah terpilih tersebut, memiliki arti dan makna yang kontekstual terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang serta sangat selaras dengan tema pembangunan tahapan/fase ke-IV RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025, yaitu; perwujudan masyarakat Sijunjung yang madani dengan mengedepankan terbangun sistem ekonomi yang kompetitif dan berkeunggulan.

Sedangkan arti dan makna dari visi RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani	Kab. Sijunjung Sejahtera	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung yang didukung dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya masyarakat yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat dan nilai tukar petani serta menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio.



Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
	Kab. Sijunjung Unggul	Terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan potensi yang ada untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga Kabupaten Sijunjung unggul secara kualitas pembangunan ditingkat regional dan nasional yang ditandai meningkatnya posisi daerah terhadap rata-rata provinsi dan nasional
	Kab. Sijunjung Berbudaya	Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sopan dan berbudi pekerti luhur, berakhlek dan berkesopanan serta memiliki rasa toleransi sesuai dengan falsafah adat minangkabau "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" yang ditandai berkurangnya konflik dan sengketa antar adat/nagari
	Masyarakat Madani	Cerminan masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat demokratis, maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian untuk mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya menuju masyarakat madani harus didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang memadai serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Sehingga menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, sosial budaya dan kemudahan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat dalam upaya terwujudnya masyarakat yang madani.

Keselarasan antara visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024, terlihat pada gambar berikut ini.



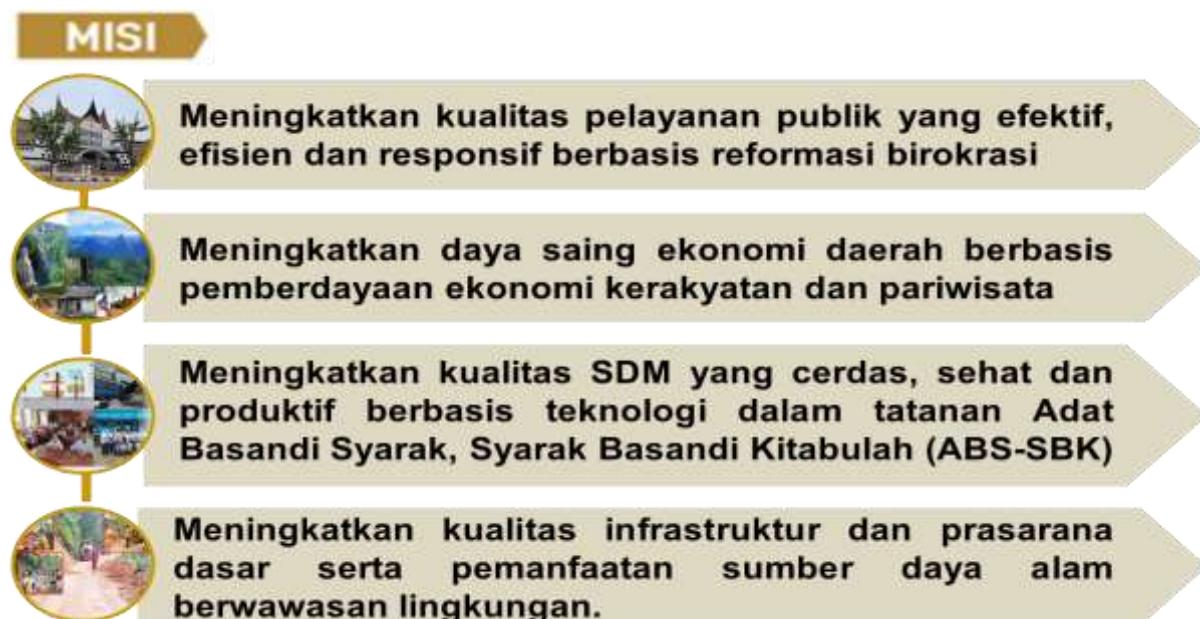
**Gambar 5.1 Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024**



## 5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021- 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Sijunjung yang berkelanjutan dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang kuat.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD yang telah ditetapkan diatas, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal daerah serta isu strategis daerah, maka misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:



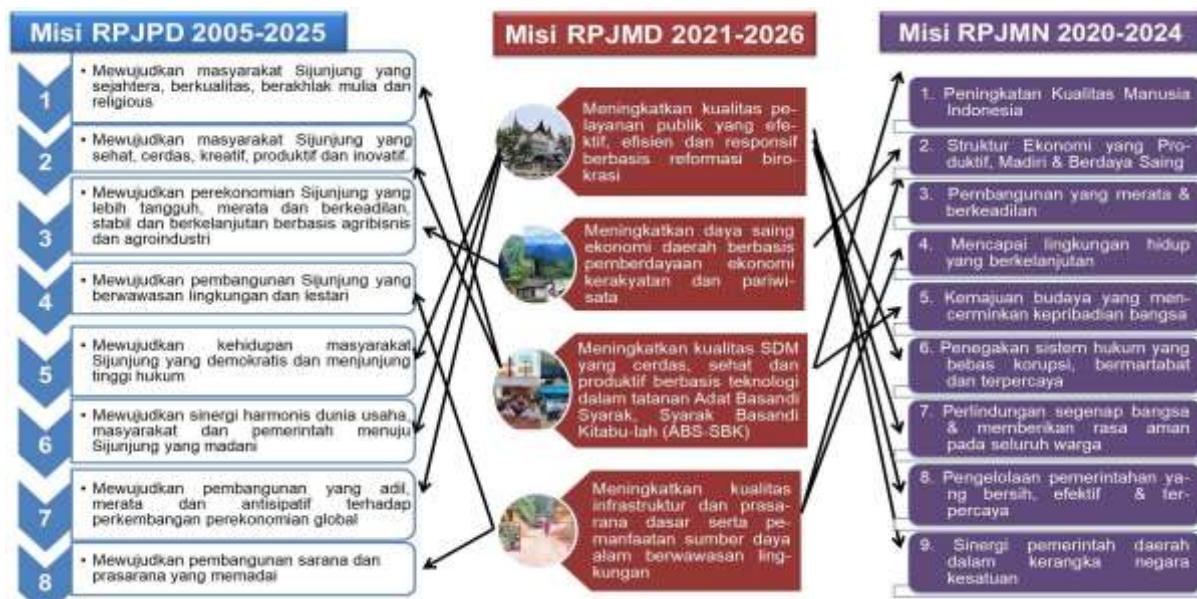
Empat butir misi diatas, merupakan janji politis Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sedangkan arti dan makna masing-masing misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, diuraikan melalui gambar berikut ini.





**Gambar 5.2 Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025 dengan misi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024, diuraikan melalui gambar berikut ini.



**Gambar 5.3 Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan misi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024**

Dalam upaya percepatan pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan yang lebih terkelola dengan efektif dan efisien, sehingga dirumuskan proses bisnis terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, diuraikan melalui gambar berikut ini.





Gambar 5.4 Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi dalam penanganan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang capaian kinerjanya terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan (*long term outcome*) tahunan.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat dirumuskan melalui metode pohon kinerja atau *performance cascading*. Sehingga terlihat jelas pembagian peran dan kinerja secara berjenjang yang diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD, dan 2) Indikator Kinerja Kunci merupakan alat ukur dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran masing-masing misi RPJMD, diuraikan sebagai berikut :

#### 5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi

Berdasarkan hasil rumusan tujuan dan sasaran pada misi 1 melalui pendekatan pohon kinerja, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Capaian tujuan tersebut, dapat dilihat melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu tata kelola pemerintaan yang perlu dituntaskan lima tahun kedepan, sehingga dapat mendorong tercapainya visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

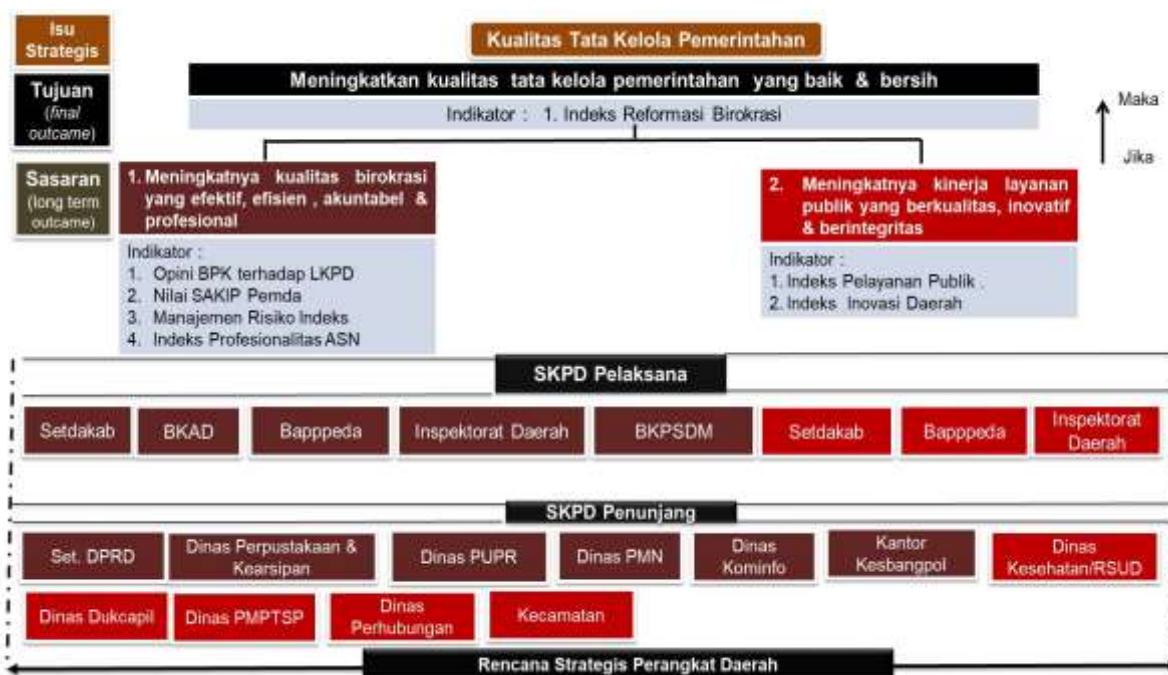


Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional dan 2) meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas. Ke-2 sasaran strategis tersebut, diukur capaiannya melalui 6 (enam) indikator, yaitu; 1) opini BPK terhadap LKPD, 2) nilai SAKIP Pemda, 3) Manajemen Risiko Indeks, 4) Indeks Profesionalitas ASN, 5) Indeks Pelayanan Publik, dan 6) Indeks Inovasi Daerah. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi 1, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1.**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional 1.2 Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	1.1.1 Opini BPK terhadap LKPD 1.1.2 Nilai SAKIP Pemda 1.1.3 Manajemen Risiko Indeks 1.1.4 Indeks Profesionalitas ASN 1.2.1 Indeks Pelayanan Publik 1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran misi 1 RPJMD tersebut, melalui pendekatan pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.5 Pohon Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.**



### **5.3.2. Tujuan dan Sasaran Misi 2; Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata**

Berdasarkan hasil rumusan tujuan dan sasaran pada misi 2 melalui pendekatan pohon kinerja, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan yaitu; 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah, dan 2) mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Capaian ke-2 tujuan tersebut, dapat dilihat melalui indikator laju pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Penetapan kedua tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan karena dalam kurun lima tahun terakhir cenderung mengalami pelambatan dan fluktuasinya angka kemiskinan. Cenderung menurunnya pertumbuhan daerah dan fluktuasinya angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi yang belum memadai dan adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020.

Sedangkan untuk pencapaian ke-2 tujuan tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari; yaitu; 1) meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi, 2) meningkatnya pendapatan masyarakat, 3) menurunnya pengangguran dan 4) meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat. Ke-4 sasaran strategis tersebut, diukur capaiannya melalui 9 (sembilan) indikator, yaitu; 1) kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, 2) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, 3) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, 4) kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, 5) pertumbuhan realisasi investasi, 6) PDRB per-kapita, 7) Tingkat Pengangguran Terbuka, 8) Indeks Desa Membangun dan 9) Jumlah penduduk miskin. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada Misi 2, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

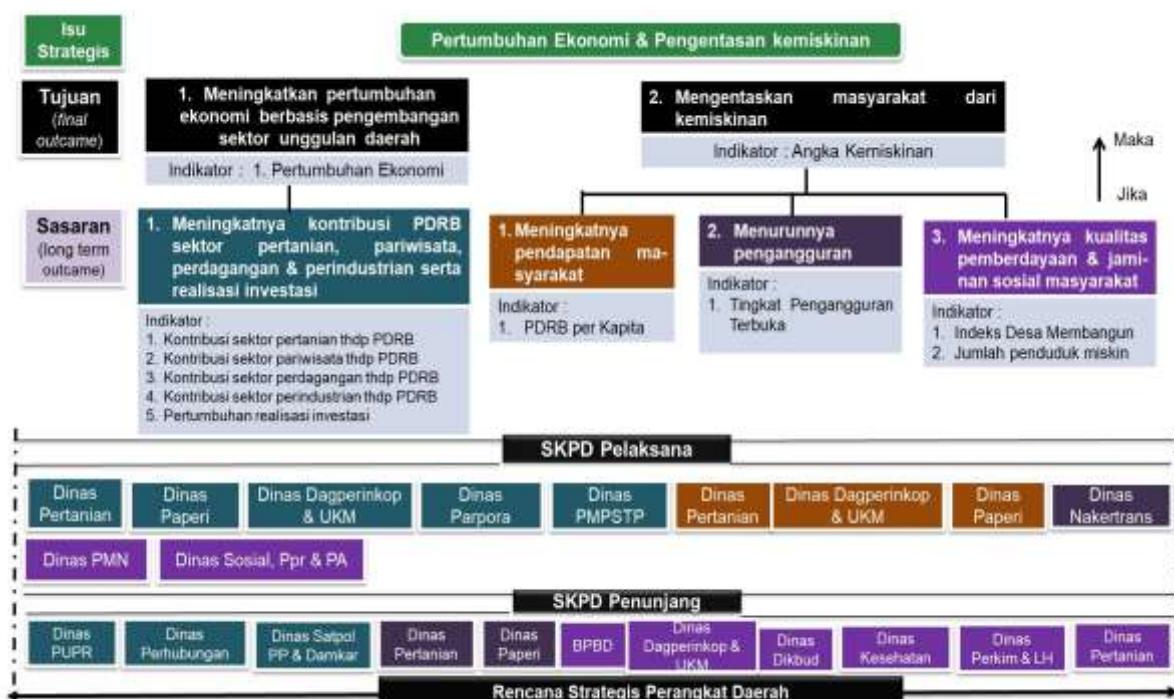
**Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2.**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	1.1.1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 1.1.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1.1.3 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 1.1.4 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB 1.1.5 Pertumbuhan realisasi investasi
2. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	2.1 Angka Kemiskinan	2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	2.1.1 PDRB per-kapita



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
3. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	2.1 Angka Kemiskinan	2.2 Menurunnya pengangguran 2.3 Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2.3.1 Indeks Desa Membangun 2.3.2 Jumlah penduduk miskin

Perumusan tujuan dan sasaran misi 2 RPJMD tersebut, melalui pendekatan pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.6 Pohon Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.**

### 5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)

Berdasarkan hasil rumusan tujuan dan sasaran pada misi 3 melalui pendekatan pohon kinerja, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan yaitu; 1) terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan 2) Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabulah*. Capaian ke-2 tujuan tersebut dapat dilihat pencapaiannya melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Tujuan dari misi 3 tersebut, merupakan jawaban dari isu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan isu penguatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hal ini ditandai belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan cenderung menurunnya penerapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Sedangkan untuk mencapai ke-2 tujuan tersebut, dijabarkan melalui 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari; yaitu; 1) meningkatnya kualitas pendidikan



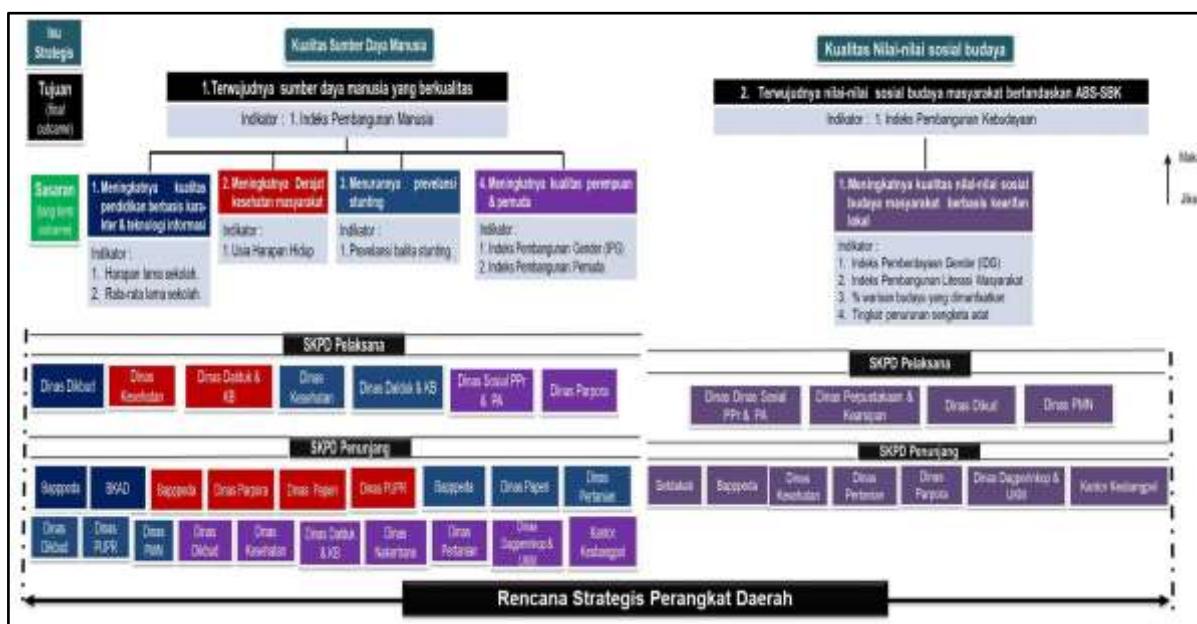
berbasis karakter dan teknologi informasi, 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 3) menurunnya prevalensi stunting, 4) meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda dan 5) meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal. Ke-5 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 10 (sepuluh) indikator, yaitu; 1) Harapan lama sekolah, 2) Rata-rata lama sekolah, 3) Usia harapan hidup, 4) Prevalensi balita stunting, 5) Indeks Pembangunan Gender (IPG), 6) Indeks Pembangunan Pemuda, 7) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 9) persentase warisan budaya yang dimanfaatkan dan 10) tingkat penurunan sengketa adat. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi 3, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3.**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1 Indeks Pembangunan Manusia	1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi 1.2 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat 1.3 Menurunnya prevalensi stunting 1.4 Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda	1.1.1 Harapan lama sekolah 1.1.2 Rata-rata lama sekolah 1.2.1 Usia Harapan Hidup 1.3.1 Prevalensi balita stunting 1.4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.4.2 Indeks Pembangunan Pemuda
2. Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	2.1 Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	2.1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2.1.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2.1.3 Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan 2.1.4 Tingkat penurunan sengketa adat

Perumusan tujuan dan sasaran misi 3 RPJMD tersebut, melalui pendekatan pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.





**Gambar 5.7 Pohon Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.**

### 5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4; Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan

Berdasarkan hasil rumusan tujuan dan sasaran pada misi 4 melalui pendekatan pohon kinerja, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu; 1) terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata, dan 2) terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Capaian ke-2 tujuan tersebut, dapat dilihat melalui indikator indeks infrastruktur dan indeks kualitas lingkungan hidup. Ke-2 tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial ekonomi serta isu pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Sedangkan untuk mencapai ke-2 tujuan tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, 2) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar, 3) meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, dan 4) meningkatnya kualitas mitigasi. Ke-4 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 10 (dua) indikator, yaitu; 1) indeks infrastruktur jalan, 2) rasio elektrifikasi, 3) rasio layanan broadband 4G LTE, 4) cakupan layanan irigasi, 5) cakupan layanan air bersih, 6) cakupan sanitasi yang layak, 7) indeks kualitas air, 8) indeks kualitas udara, 9) indeks tutupan lahan, dan 10) indeks risiko bencana.

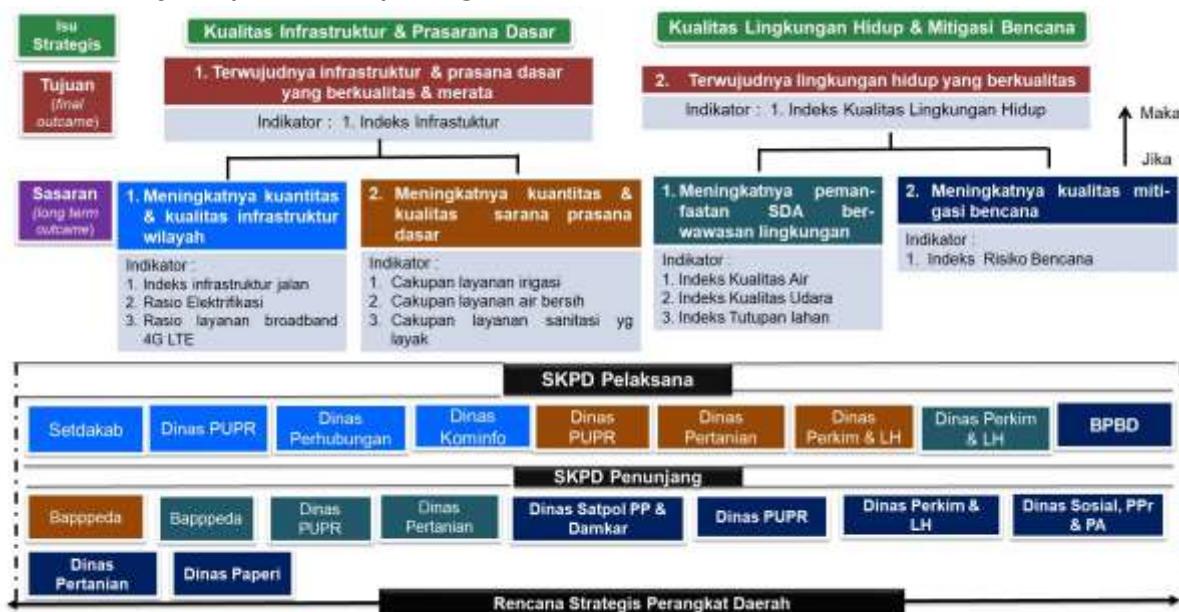
Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada Misi 4, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4.**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
1. Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	1.1 Indeks Infrastruktur	1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah  1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	1.1.1 Indeks Infrastruktur Jalan 1.1.2 Rasio Elektrifikasi 1.1.3 Rasio layanan broadband 4G LTE 1.2.1 Cakupan layanan irigasi 1.2.2 Cakupan layanan air bersih 1.2.3 Cakupan layanan sanitasi yang layak
2.Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.1 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan  2.2 Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	2.1.1 Indeks Kualitas Air 2.1.2 Indeks Kualitas Udara 2.1.3 Indeks Tutupan lahan 2.2.1 Indeks risiko bencana

Perumusan tujuan dan sasaran misi 4 RPJMD tersebut, melalui pendekatan pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.8 Pohon Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.**

Untuk itu, terwujudnya visi dan misi tersebut, maka dirumuskan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga lebih terfokus pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang. Ke-10 prioritas pembangunan tersebut, dikelompokan



menjadi 3 (tiga) agenda pembangunan, antara lain :

1. Agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, dijabarkan melalui 2 prioritas wajib, yaitu :
  - 1) Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi.
  - 2) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan.
2. Agenda peningkatan daya saing ekonomi daerah, dijabarkan melalui 3 prioritas unggulan, yaitu :
  - 3) Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
  - 4) Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
  - 5) Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah .
3. Agenda peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat dan reformasi birokrasi pelayanan publik, dijabarkan melalui 5 prioritas penunjang, yaitu :
  - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar
  - 7) Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.
  - 8) Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial.
  - 9) Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
  - 10) Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka digambarkan pilar pembangunan Kabupaten Sijunjung yang dikonstruksikan sesuai dengan sasaran (*goals*) pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 5.9 Pilar Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**



Sinkronisasi dan keselarasan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dan prioritas pembangunan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.10 Sikronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan penjelasan diatas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, maka dapat dilihat keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran. Sehingga terlihat efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran serta target indikator, dapat dilihat dalam matriks berikut ini.



**Tabel 5.6**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani

<b>Misi</b>	<b>No.</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sat.</b>	<b>Base-line (2020)</b>	<b>Kondisi Kinerja Awal*) (2021)</b>	<b>Tahun dan Target Capaian</b>					<b>Kondisi Akhir (2026)</b>
							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	1.1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	47,97	50-54	55-57	58-60	61-64	65-69	70-75	70-75
	1.1.1	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKPD Nilai SAKIP Manajemen Risiko Indeks Indeks Profesionalitas ASN	Opini Nilai Level Nilai	WTP 62,11 2 53,76	WTP 65-67 2+ 60,00	WTP 68-69 3+ 65,00	WTP 70-75 3 70,00	WTP 76-79 3+ 75,00	WTP 80-83 4 80,00	WTP 84-87 4 80,00	WTP 84-87 4 80,00
	1.1.2	Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi Daerah	Skor Nilai	n.a 1.274	2,51-3,00 1.500	3,01-3,30 2.000	3,40-3,70 2.500	3,80-4,00 3.000	4,01-4,20 3.500	4,21-4,50 4.000	4,21-4,50 4.000
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,10	2,58	2,92	4,21	4,65	4,96	5,26	5,26
	2.1.1	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,71	28,00	28,50	30,00	30,50	31,50	32,50	32,50
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,79	0,81	0,83	0,88	0,95	1,10	1,15	1,15
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,71	11,80	12,10	12,50	12,80	13,10	13,50	13,50
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	2,60	3,00	3,20	4,50	5,00	5,20	5,40	5,40
	2.2	Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan Meningkatnya pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan	%	6,78	6,69	6,56	6,43	6,30	6,00	5,50	5,50
			PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	38,81	40,23	42,03	44,92	47,47	50,46	54,00	54,00



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sat.	Base-line (2020)	Kondisi Awal*) (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	2.2	Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	Angka kemiskinan	%	6,78	6,69	6,56	6,43	6,30	6,00	5,50	5,50
	2.2.2	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Ter-buka	%	5,30	5,08	5,00	4,86	4,74	4,58	4,00	4,00
	2.2.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Desa Membangun Jumlah penduduk miskin	Nilai Rb Jiwa	0,7024 16,28	0,7273 16,18	0,7500 16,00	0,7900 15,80	0,8000 15,50	0,8300 15,30	0,8500 15,00	0,8500 15,00
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)	3.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,74	68,44	68,79	69,39	70,30	71,58	73,64	73,64
	3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi	Harapan lama sekolah Rata-rata lama sekolah	Tahun Tahun	12,37 8,11	12,82 8,15	12,99 8,19	13,17 8,23	13,45 8,62	13,83 8,91	14,50 9,00	14,50 9,00
	3.1.2	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,21	66,37	66,53	66,69	66,86	67,57	68,00	68,00
	3.1.3	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi balita stunting	%	23,40	20,00	17,00	15,00	14,00	10,00	7,00	7,00
	3.1.4	Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Pemuda	Poin Nilai	93,03 n.a	93,10 45,00	93,20 45,30	93,50 46,00	94,00 47,00	94,50 47,50	95,30 48,50	95,30 48,50
	3.2	Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	n.a	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	3.2.1	Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan Tingkat penurunan sengketa adat	Poin poin % %	59,93 n.a 9,31 21	59,97 8,00 13,80 18	60,00 9,00 18,00 16	61,00 11,00 22,60 13	63,00 12,00 27,85 10	64,00 13,00 36,20 7	65,00 15,00 42,40 5	65,00 15,00 42,40 5
	4.1	Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur	Nilai	59,38	62,54	66,99	75,54	85,00	88,30	91,00	91,00
	4.1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks infrastruktur jalan Rasio Elektrifikasi Rasio layanan broadband 4G LTE	Nilai % %	55,74 61,22 48,00	59,55 65,00 50,00	64,75 68,00 55,00	72,38 72,00 60,00	85,00 75,00 65,00	89,00 78,00 70,00	91,00 80,00 75,00	91,00 80,00 75,00



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sat.	Base-line (2020)	Kondisi Awal*) (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	4.1.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	Cakupan layanan irigasi Cakupan layanan air bersih Cakupan sanitasi yang layak	% % %	41,87 69,11 72,11	45,00 72,00 75,00	50,00 75,00 80,00	55,00 90,00 90,00	65,00 100 100	75,00 100 100	85,00 100 100	85,00 100 100
	4.2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	69,06	70,40	70,79	71,18	71,57	72,01	73,04	73,04
	4.2.1	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan lahan	Skor Skor Skor	50,00 89,05 64,46	52,60 89,05 65,90	52,70 89,45 67,33	52,80 89,55 68,77	52,90 89,65 70,20	53,20 90,00 70,50	53,80 90,20 71,00	53,80 90,20 71,00
	4.2.2	Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	Indeks risiko bencana	Skor	107,2	106,0	102,0	100,0	98,0	95,0	92,0	92,0

\*) Prognosa



# BAB



6

# **BAB VI**

## **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman.

Selain itu, penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program pembangunan. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *logic model*.

Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut, ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas *focus group discussion, scoring* dan analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026

### **6.1. Strategi Pembangunan**

Strategi pembangunan merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga



menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintahan Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh *stakeholders* pembangunan daerah.

Pemerintahan Daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perizinan, dokumen/akta, kartu identitas dan fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat, serta fungsi pembinaan/konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advokasi aktivitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, sehingga satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*). Analisis dan formulasi strategi masing-masing misi, diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1**

Analisis SWOT				
<b>Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional</b>				
Kekuatan (Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi birokrasi sangat kuat</li> <li>Kuantitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang produktif cukup besar</li> </ul>	<i>Build on Strengths</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem birokrasi di seluruh lini secara terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ASN melalui sistem merit</li> </ul>	
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kualitas birokrasi secara efektif dan efisien berbasis kinerja dan digitalisasi</li> <li>Relatif sempitnya ruang fiskal pembangunan daerah</li> <li>Cukup rendahnya kapasitas dan kompetensi serta sikap mental ASN</li> <li>Rendahnya supermasi hukum.</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional serta kemampuan keuangan daerah dan penegakan supremasi hukum secara berkelanjutan.</li> <li>Menyusun <i>roadmap</i> penerapan sistem merit</li> </ul>	
Peluang (Opportunities)	Penyederhanaan birokrasi yang lebih efektif dan efisien serta profesionalitas ASN	<i>Exploit Opportunities</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Right sizing</i> kelembagaan pemerintah daerah</li> <li>Melakukan evaluasi penerapan sistem merit yang efektif dan berkelanjutan</li> </ul>	
Ancaman (Threats)	Regulasi yang kontradiktif dan kontraproduktif	<i>Block Threats</i>	Menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah	
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena <i>softkill management</i> masih berorientasi kepada pelaksanaan fungsi kelembagaan</li> <li>Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>Terbatasnya pembiayaan pembangunan daerah</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif</li> <li>Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan</li> <li>Meningkatkan kualitas penegakan supremasi hukum melalui koordinasi yang harmonis dengan <i>stakeholders</i></li> </ul>	



<b>Analisis SWOT</b>			
<b>Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas</b>			
Kekuatan (Strengths)	Kuatnya komitmen seluruh jajaran Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berintegritas	<i>Build on Strengths</i>	Pengembangan kualitas layanan publik melalui pengembangan sistem inovasi daerah serta terbangunnya zona integritas
Kelemahan (Weakness)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	<i>Overcome Weakness</i>	Menciptakan pelayanan publik yang efektif, responsif dan berintegritas
Peluang (Oportunities)	Tuntutan regulasi terhadap meningkatkan kualitas layanan publik yang inovatif	<i>Exploit Opportunities</i>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Ancaman (Threats)	Cukup tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	<i>Block Threats</i>	Memberikan informasi pelayanan publik secara efektif berbasis teknologi informasi dan digitalisasi
Masalah	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.	Strategi	Menumbuhkembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif dan berintegritas

**Tabel 6.2**  
**Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2**

<b>Analisis SWOT</b>			
<b>Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi</b>			
Kekuatan (Strengths)	Posisi geografis daerah yang amat strategis.	<i>Build on Strengths</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan industri pertanian serta pariwisata</li> <li>Mendorong iklim investasi yang kondusif</li> </ul>
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum efektif dan efisiennya sarana dan sarana pertanian dalam menunjang produktivitas</li> <li>Kurangnya kemampuan dan kapasitas petani</li> <li>Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian</li> <li>Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM dan IKM</li> <li>Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata</li> <li>Belum optimalnya perluasan jaringan kemitraan pariwisata</li> <li>Belum intensifnya pemasaran pariwisata berbasis IT</li> <li>Rendahnya realisasi investasi</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pelatihan, akses modal, dan mentoring petani, pelaku UMKM dan IKM</li> <li>Integrasi sektor pertanian melalui sektor pariwisata dan meningkatkan akses pemasaran berbasis digitalisasi</li> <li>Mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis perberdayaan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal serta industrialisasi padat karya.</li> <li>Menciptakan iklim investasi yang kondusif</li> </ul>
Peluang (Oportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsern Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap sektor pertanian, UMKM dan pariwisata sangat kuat</li> <li>Tingginya perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekonomi kreatif</li> </ul>	<i>Exploit Opportunities</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, UMKM dan pariwisata secara efektif berbasis industri 4.0</li> <li>Menjadikan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ul>
Ancaman (Threats)	Cukup rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	<i>Block Threats</i>	Meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat secara efektif dan partisipatif
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi unggulan daerah.</li> <li>Belum optimalnya realisasi investasi.</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian.</li> <li>Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agrowisata secara berkelanjutan.</li> <li>Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan terjaganya stabilitas ketertiban umum yang aman</li> </ul>
<b>Sasaran 2.2.1: Meningkatnya pendapatan masyarakat</b>			
Kekuatan (Strengths)	Kurang terpengaruhnya sektor pertanian dalam menahan resesi ekonomi akibat pandemi covid-19	<i>Build on Strengths</i>	Penguatan struktur sektor pertanian berbasis kearifan lokal
Kelemahan (Weakness)	Pengentasan kesenjangan antara kelas pendapatan (gini rasio) masih stagnan	<i>Overcome Weakness</i>	Evaluasi dan inovasi pendekatan dalam pengentasan disparitas pendapatan
Peluang (Oportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya luas kawasan hutan lindung</li> <li>Perkembangan daerah tetangga cukup pesat</li> <li>Tersedianya regulasi yang memadai</li> </ul>	<i>Exploit Opportunities</i>	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif.



<b>Analisis SWOT</b>			
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Belum meratanya sebaran penduduk	<i>Block Threats</i>	Membangun dan menginisiasi pusat pertumbuhan baru sesuai kearifan lokal
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian.</li> <li>Belum berkembangnya koperasi, usaha mikro dan BUMNag.</li> </ul>	Strategi	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah dan membangun jaringan kerjasama pemasaran yang efektif dan berkelanjutan
<b>Sasaran 2.2.2: Menurunnya pengangguran</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Tersedianya penduduk usia produktif yang cukup besar	<i>Build on Strengths</i>	Peningkatan kualitas penduduk usia produktif dan memperluas kesempatan kerja
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Belum optimalnya angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.</li> <li>Peningkatan kualitas Kawasan Trasmigrasi</li> </ul>
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Adanya kebijakan prioritas pemerintah dalam menurunkan pengangguran terbuka	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan penurunan pengangguran terbuka
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Belum adanya kesamaan persepsi Pemerintahan Daerah dan stakeholders terkait penurunan pengangguran terbuka	<i>Block Threats</i>	Membangun kesamaan persepsi dalam penurunan pengangguran terbuka secara partisipatif
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya angka pengangguran terbuka</li> <li>Kompetensi dan keterampilan tenaga kerja masih rendah</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan</li> </ul>
<b>Sasaran 2.2.3: Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Cukup tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi pembangunan sosial ekonomi.	<i>Build on Strengths</i>	Peningkatan akses dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan jaminan sosial.
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cukup tingginya disparitas kawasan pedesaan.</li> <li>Jangkauan cakupan jaminan sosial dasar bagi PPKS belum menjangkau merata</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>Perluasan cakupan jaminan sosial dasar bagi PPKS</li> </ul>
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Adanya kebijakan prioritas pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan pedesaan dan jaminan sosial masyarakat	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial masyarakat antar daerah dengan nasional
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Belum adanya kesamaan persepsi Pemerintahan Daerah dan stakeholders terkait pemberdayaan masyarakat dan pemberian jaminan sosial masyarakat	<i>Block Threats</i>	Membangun kesamaan persepsi dalam pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat secara efektif, proporsional dan berkelanjutan
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan efektif</li> <li>Belum optimalnya layanan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin.</li> <li>Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara efektif dan berkelanjutan</li> </ul>

**Tabel 6.3**  
**Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3**

<b>Analisis SWOT</b>			
<b>Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Ketersediaan akses pendidikan cukup merata di seluruh wilayah	<i>Build on Strengths</i>	Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Belum optimalnya kualitas dan mutu pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi	<i>Overcome Weakness</i>	Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan sesuai dengan kearifan lokal dan tuntutan industri
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Cukup luasnya akses masyarakat mempelajari kesempatan dalam dunia pendidikan	<i>Exploit Opportunities</i>	Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap pendidikan lebih tinggi	<i>Block Threats</i>	Mengintensifkan jalinan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi
Masalah	Belum optimalnya kualitas pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan target SPM dan TPB	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi secara efektif dan partisipatif</li> <li>Meningkatkan aksesibilitas jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi bagi masyarakat melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi</li> </ul>



<b>Analisis SWOT</b>			
<b>Sasaran 3.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</b>			
Kekuatan (Strengths)	Ketersediaan akses kesehatan cukup merata di seluruh wilayah	<i>Build on Strengths</i>	Optimalisasi akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum meratanya layanan ke-sehatan secara inklusif</li> <li>Belum optimalnya program prilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>Belum optimalnya pembangunan keluarga sehat dan sejahtera</li> <li>Belum optimalnya pembangunan keolahragaan</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan serta prilaku hidup sehat dan bersih secara berkeadilan dan partisipatif</li> <li>Peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan olahraga secara partisipatif</li> </ul>
Peluang (Oportunities)	Adanya kebijakan prioritas pemerintah terhadap layanan kesehatan, pembangunan keluarga dan keolahragaan.	<i>Exploit Opportunities</i>	Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi dikalangan masyarakat terkait pentingnya kesehatan
Ancaman (Threats)	Munculnya virus baru penyakit menular	<i>Block Threats</i>	Mengintensifkan peran masyarakat dalam mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular secara partisipatif
Masalah	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan target SPM dan TPB	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan memfasilitasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindarnya masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular</li> <li>Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan</li> <li>Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga yang berkelanjutan</li> </ul>
<b>Sasaran 3.1.3: Menurunnya prevalensi stunting</b>			
Kekuatan (Strengths)	Adanya program yang melembaga dan terencana berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting secara global (SDG's) dan nasional (RPJMN)	<i>Build on Strengths</i>	Membangun kolaborasi yang efektif dengan stakeholders penurunan prevalensi stunting
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berlum tersedianya sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting</li> <li>Belum optimalnya perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan</li> <li>Belum optimalnya penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integratif</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	Optimalisasi penerapan kebijakan daerah terkait upaya penurunan prevalensi stunting secara efektif dan integratif berbasis data yang akurat.
Peluang (Oportunities)	Menjadi kebijakan prioritas pemerintah terhadap penurunan prevalensi stunting yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan penurunan prevalensi stunting berdasarkan skala prioritas (lokus stunting)
Ancaman (Threats)	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	<i>Block Threats</i>	Menciptakan sinergisitas program peningkatan kualitas sumber daya manusia antar sektor yang efektif.
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan target SPM dan TPB</li> <li>Belum optimalnya ketahanan pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting.</li> <li>Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan partisipatif.</li> </ul>
<b>Sasaran 3.1.4: Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda</b>			
Kekuatan (Strengths)	Cukup tingginya minat perempuan dan pemuda berpartisipasi dalam pembangunan	<i>Build on Strengths</i>	Peningkatan kualitas perempuan, dan pemuda secara efektif, inklusif dan berkelanjutan
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak</li> <li>Belum optimalnya program pemberdayaan kepemudaan</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pengarustamaan gender dan perlindungan anak yang efektif dan inklusif</li> <li>Penguatan kelembagaan dan perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan</li> </ul>
Peluang (Oportunities)	Adanya kebijakan prioritas pemerintah terhadap pengarustamaan gender dan pembangunan kepemudaan	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan pengarustamaan gender, dan pembangunan kepemudaan
Ancaman (Threats)	Belum ada kesamaan persepsi antara Pemerintahan Daerah dan stakeholders terhadap pengarustamaan gender dan pemberdayaan pemuda	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kesamaan persepsi yang efektif keseluruh lini masyarakat dan stakeholders



<b>Analisis SWOT</b>			
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengarustamaan gender dan kualitas perlindungan anak</li> <li>Belum optimalnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan</li> </ul>	Strategi	Meningkatkan kualitas pengarustamaan gender dan pemuda dalam pembangunan
<b>Sasaran 3.2.1: Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cukup terjaganya nilai-nilai sosial budaya berbasis kearifan lokal</li> <li>Cukup tingginya keanekaragaman seni budaya dan cagar budaya</li> </ul>	<i>Build on Strengths</i>	Peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya dan warisan budaya secara efektif.
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penguatan nilai-nilai budaya berbasis gender dan literasi</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya.</li> <li>Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya masyarakat berbasis kearifan lokal.</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender dan mengalakkan budaya literasi serta optimalisasi pemanfaatan warisan budaya dan nilai-nilai budaya berlandaskan ABS-SBK
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan prioritas pemerintah terhadap pembangunan kebudayaan</li> <li>Berkembangnya multi media</li> </ul>	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan pembangunan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan teknologi
Ancaman ( <i>Threats</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaruh budaya asing yang cepat</li> <li>Cenderung menurunnya ketidakpedulian masyarakat</li> </ul>	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kualitas penguatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat secara efektif dan berkelanjutan berbasis agama dan adat istiadat.
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum berkembangnya pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya dan kearifan lokal</li> <li>Belum optimalnya revitalisasi kelembagaan nagari, agama dan adat.</li> <li>Belum optimalnya penerapan ABS-SBK secara terstruktur dan berkelanjutan</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender berbasis kearifan lokal</li> <li>Menumbuhkembangkan budaya dan minat baca secara partisipatif</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya</li> <li>Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya penguatan identitas nilai-nilai agama, adat dan istiadat berlandaskan falsafah ABS-SBK</li> </ul>

**Tabel 6.4**  
**Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 4**

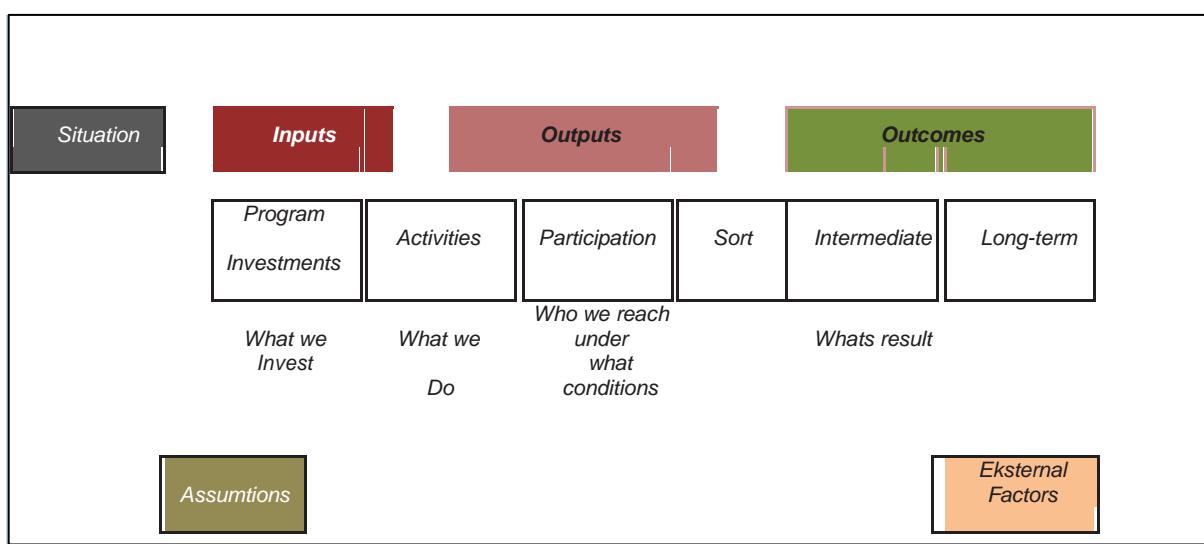
<b>Analisis SWOT</b>			
<b>Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan dan keberlanjutan	<i>Build on Strengths</i>	Peningkatan kualitas penerapan pembangunan berbasis kewi-layahan dan keberlanjutan
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum merata	<i>Overcome Weakness</i>	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur wilayah yang merata
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Berkurangnya luas kawasan hutan lindung	<i>Exploit Opportunities</i>	Meningkatkan pembangunan akses infrastruktur yang berkualitas
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Tingginya tuntutan pembangunan infrastruktur yang merata	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah berbasis RTRW
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kualitas layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM dan TPB.</li> <li>Terbatasnya sumberdaya daerah.</li> </ul>	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW.</li> <li>Sinerjisitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan daerah tetangga, provinsi dan nasional</li> <li>Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah</li> </ul>
<b>Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan prasarana dasar	<i>Build on Strengths</i>	Implementasi pembangunan prasarana dasar yang efektif
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Belum optimalnya prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat	<i>Overcome Weakness</i>	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar secara merata
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Adanya kebijakan pembangunan nasional dan provinsi	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergi kebijakan pembangunan
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Keterbatasan pembiayaan pembangunan	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kebijakan pembangunan prasarana dasar secara partisipatif
Masalah	Belum optimalnya kualitas layanan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat sesuai dengan target SPM dan TPB.	Strategi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Analisis SWOT			
<b>Sasaran 4.2.1: Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Cukup tersedianya kebijakan pelestarian lingkungan hidup	<i>Build on Strengths</i>	Implementasi kebijakan pelestarian lingkungan hidup
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	<i>Overcome Weakness</i>	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Adanya kebijakan pembangunan nasional	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergikan kebijakan pembangunan nasional dan daerah
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Tingginya potensi kerusakan lingkungan hidup	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kebijakan pelestarian lingkungan hidup
Masalah	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	Strategi	Mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara konsisten dan bernali ekonomis
<b>Sasaran 4.2.2: Meningkatnya kualitas mitigasi bencana</b>			
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebencanaan	<i>Build on Strengths</i>	Menciptakan kebijakan mitigasi bencana sesuai kebutuhan daerah
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya mitigasi bencana</li> <li>Belum optimalnya penanganan bencana</li> </ul>	<i>Overcome Weakness</i>	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanganan bencana secara efektif dan mearata
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	Adanya kebijakan pembangunan nasional terhadap ketahanan daerah	<i>Exploit Opportunities</i>	Mensinergikan kebijakan mitigasi bencana yang efektif
Ancaman ( <i>Threats</i> )	Tingginya potensi rawan bencana longsor dan banjir	<i>Block Threats</i>	Menciptakan kualitas mitigasi bencana
Masalah	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana secara efektif dan partisipatif	Strategi	Menerapkan mitigasi bencana secara efektif, partisipatif dan berkesinambungan

Selain perumusan strategi pembangunan jangka menengah melalui analisis SWOT, juga menggunakan pendekatan analisis model logika atau *logic model*. Model logika adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Model logika adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Disamping itu, model logika membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, *output* pada urusan teknis atau perangkat daerah. Visualisasi model logika dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 6.1 Logic Model**



Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.5**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**

<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi		
1.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.1.1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1.1.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif 1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan 1.1.1.3 Meningkatkan kualitas penegakan supremasi hukum melalui koordinasi yang harmonis dengan stakeholders
	1.1.2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	1.1.3.1 Menumbuhkembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif dan berintegritas
Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata		
2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	2.1.1 Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian 2.1.1.2 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agrowisata secara berkelanjutan. 2.1.1.3 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan terjaganya stabilitas ketertiban umum yang aman
2.2 Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	2.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	2.2.1.1 Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah dan membangun jaringan kerjasama pemasaran yang efektif dan berkelanjutan
	2.2.2. Menurunnya pengangguran	2.2.2.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan.
	2.2.3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin. 2.2.3.2. Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara efektif dan berkelanjutan
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK		
3.1.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi	3.1.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi secara efektif dan partisipatif 3.1.1.2 Meningkatkan aksesibilitas jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi bagi masyarakat melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
3.1.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	3.1.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindarnya masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular. 3.1.2.2 Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan 3.1.2.3 Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga bagi masyarakat yang berkelanjutan
	3.1.3 Menurunnya prevelansi stunting	3.1.3.1 Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting. 3.1.3.2 Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan partisipatif
	3.1.4. Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda	3.1.4.1 Meningkatkan kualitas pengaruhstamaan gender dan pemuda dalam pembangunan
3.2 Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	3.2.1 Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.1.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender berbasis kearifan lokal 3.2.1.2 Menumbuhkembangkan budaya dan minat baca secara partisipatif 3.2.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya 3.2.1.4 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya penguatan identitas nilai-nilai agama, adat dan istiadat berlandaskan falsafah ABS-SBK
Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar berwawasan lingkungan		serta pemanfaatan sumber daya alam
4.1 Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	4.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	4.1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW. 4.1.1.2 Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan daerah tetangga, provinsi dan nasional. 4.1.1.3 Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah
	4.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	4.1.2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4.2 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	4.2.1 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	4.2.1.1 Mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara konsisten dan bernilai ekonomis
	4.2.2 Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	4.2.2.1 Menerapkan mitigasi bencana secara efektif, partisipatif dan berkesinambungan

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga



merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah guna tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD secara bertahap dan berkesinambungan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan, baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, karena setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi, hal ini dapat dilihat keterkaitannya pada matrik berikut ini.



**Tabel 6.6**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>			
1.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<p>1.1.1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional</p> <p>1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan</p>	<p>1.1.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif</p>	<p>1. Reorganisasi struktur Perangkat Daerah</p> <p>2. Penetapan dan harmonisasi produk hukum daerah sesuai kebutuhan daerah</p> <p>3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, profesional dan akuntabel</p> <p>4. Peningkatan kuantitas Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan berkelanjutan</p> <p>5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan secara efektif dan berkelanjutan</p> <p>6. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP secara efektif dan akuntabel</p> <p>7. Penerapan SPBE yang terintegrasi</p> <p>8. Peningkatan kualitas arsip daerah dan informasi pemerintahan yang efektif</p> <p>9. Peningkatan kuantitas perkantoran yang representatif</p> <p>10. Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari yang efektif, akuntabel dan transparan</p> <p>11. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis teknologi informasi</p> <p>12. Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan dan program pemerintahan daerah</p> <p>1. Penetapan <i>road map</i> penerapan sistem merit</p> <p>2. Peningkatan kualitas ASN berdasarkan <i>road map</i> penerapan sistem merit</p> <p>3. Penerapan sistem merit secara efektif dan berkesinambungan</p> <p>4. Pembinaan aparatur berbasis <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara proporsional</p> <p>5. Peningkatan kualitas kinerja ASN secara efektif dan profesional.</p>



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>			
1.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.1.1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1.1.1.3 Meningkatkan kualitas penegakan supremasi hukum melalui koordinasi yang harmonis dengan <i>stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pencegahan dini potensi konflik dan penegakan supremasi hukum secara efektif</li> <li>2. Peningkatan kualitas kerjasama pemerintah dengan <i>stakeholders</i> yang lebih efektif dan berkesinambungan</li> </ol>
	1.1.2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	1.1.2.1 Menumbuhkembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan penerapan kebijakan pelayanan publik secara efektif dan efisien</li> <li>2. Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi</li> <li>3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan publik</li> <li>4. Penyediaan sistem informasi, pengaduan dan konsultasi pelayanan publik yang responsif</li> <li>5. Penerapan survei kepuasan masyarakat secara mandiri</li> <li>6. Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan riset dan ekosistem inovasi</li> <li>7. Penerapan zona integritas setiap unit layanan publik secara efektif dan berkesinambungan</li> </ol>
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>			
2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	2.1.1 Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh berbasis teknologi</li> <li>2. Penyediaan dana stimulan dalam upaya pengembangan budidaya pertanian/perikanan berbasis teknologi</li> <li>3. Pengembangan bibit unggul pertanian/perikanan secara efektif</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian/perikanan secara efektif dan partisipatif</li> <li>5. Peningkatan akses permodalan, kapasitas dan pengembangan usaha UMKM berbasis digital</li> <li>6. Peningkatan kualitas industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berdaya saing tinggi</li> <li>7. Revitalisasi pasar Nagari/serikat menuju pasar tradisional modern</li> </ol>
		2.1.1.2 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agrowisata secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Perda RIPPDa</li> <li>2. Pengembangan deliniasi dan destinasi kawasan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS)</li> <li>3. Pengembangan destinasi wisata berbasis pertanian</li> </ol>



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>			
2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	2.1.1 Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	2.1.1.2 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agrowisata secara berkelanjutan  2.1.1.3 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan terjaganya stabilitas ketertiban umum yang aman	4. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata berbasis digitalisasi 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku wisata secara efektif 6. Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan  1. Peningkatan kualitas kemudahan berinvestasi secara efektif dan efisien 2. Pemberian insentif perizinan industrialisasi perkebunan (agroindustri) 3. Penataan kepemilikan lahan dan batas wilayah 4. Peningkatan kualitas ketertiban umum secara efektif dan partisipatif
2.2 Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	2.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat  2.2.2 Menurunnya pengangguran  2.2.3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	2.2.1.1 Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah dan membangun jaringan kerjasama pemasaran yang efektif dan berkelanjutan  2.2.2.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan.  2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin.	1. Peningkatan kualitas nilai tambah produk pertanian/perikanan berdaya saing (agribisnis) 2. Pengembangan produk unggulan di setiap nagari berbasis kearifan lokal 3. Peningkatan kualitas produk industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang berdaya saing 4. Pembinaan koperasi dan BUMNag secara partisipatif 5. Perluasan akses pemasaran produk unggulan daerah berbasis digitalisasi 6. Perluasan usaha BUMD dalam memasarkan produk unggulan daerah (badan penyanga)
			1. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 2. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri 3. Perluasan akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil 4. Peningkatan kualitas pemanfaatan tenaga masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan prasarana 5. Pemanfaatan lahan produktif secara partisipatif  1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat nagari/desa yang inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat nagari/desa secara partisipatif



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>			
2.2 Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	2.2.3 Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	<p>2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin</p> <p>2.2.3.2 Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara efektif dan berkelanjutan</p>	<p>3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Nagari/Desa secara efektif dan efisien berbasis kearifan lokal</p> <p>4. Peningkatan kuantitas Nagari/Desa yang mandiri secara berkesinambungan</p> <p>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama rantau secara berkelanjutan</p> <p>1. Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan kuantitas jaminan sosial ekonomi masyarakat miskin</p> <p>3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar PPKS</p> <p>4. Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PPKS berlandaskan skala prioritas</p> <p>5. Peningkatan cakupan bantuan dan kualitas penanganan PPKS</p> <p>6. Peningkatan rumah layak huni secara partisipatif</p>
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK</b>			
3.1.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi	<p>3.1.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi secara efektif dan partisipatif</p> <p>3.1.1.2 Meningkatkan aksesibilitas jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi bagi masyarakat melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi</p>	<p>1. Penetapan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan</p> <p>2. Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar</p> <p>3. Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi</p> <p>4. Penguatan pendidikan karakter melalui program tahfiz seluruh jenjang pendidikan dan program <i>boarding school</i> jenjang pendidikan SLTP</p> <p>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas PKBM secara partisipatif</p> <p>1. Peningkatan kuantitas bea siswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan SLTA secara gratis</p> <p>3. Fasilitasi peningkatan status Perguruan tinggi swasta</p>



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK</b>			
3.1.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	3.1.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	<p>3.1.2.1 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindarnya masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>3.1.2.2 Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan</p> <p>3.1.2.3. Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga bagi masyarakat yang berkelanjutan</p>	<p>1. Revitalisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara mudah dan cepat</p> <p>3. Peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara partisipatif</p> <p>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaminan kesehatan terhadap masyarakat</p> <p>5. Peningkatan kualitas upaya deteksi dini terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>1. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas program Kampung KB</p> <p>3. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara partisipatif</p> <p>1. Peningkatan kualitas budaya masyarakat dalam berolahraga secara partisipatif</p> <p>2. Peningkatan kualitas prestasi olahraga unggulan daerah</p>
	3.1.3 Menurunnya prevalensi stunting	3.1.3.1 Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting.	<p>1. Membangun sistem manajemen data pencegahan dan penanggulangan stunting</p> <p>2. Percepatan perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan</p> <p>3. Pemberian gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan secara efektif dan berkesinambungan</p> <p>4. Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan secara efektif dan berkesinambungan</p> <p>5. Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum bulan secara efektif dan berkesinambungan</p>



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK</b>			
3.1.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	3.1.3 Menurunnya prevalensi stunting	3.1.3.1 Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting  3.1.3.2 Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan partisipatif	6. Penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integratif 7. Peningkatan kualitas perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting lebih intensif dan berkelanjutan 8. Penciptaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas secara konvergen dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat  1. Peningkatan ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan pangan 2. Peningkatan kualitas pangan yang layak konsumsi bagi masyarakat
	3.1.4.Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda	3.1.4.1 Meningkatkan kualitas pengarustamaan gender dan pemuda dalam pembangunan	1. Peningkatan kualitas pembangunan gender berbasis inklusif 2. Peningkatan internalisasi pembangunan gender antar sektor 3. Peningkatan kualitas perlindungan anak secara efektif dan berkeadilan 4. Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan 5. Penciptaan pemuda produktif dan kreatif yang berwawasan wirausaha
3.2 Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	3.2.2 Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.2.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender berbasis kearifan lokal  3.2.2.2 Menumbuhkembangkan budaya dan minat baca secara partisipatif  3.2.2.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya	1. Peningkatan kualitas pengarustamaan gender berbasis pengetahuan tradisional ( <i>local knowledge</i> ) 2. Perluasan akses gender berpartisipasi dalam pembangunan kebudayaan 3. Peningkatan kualitas gender dalam pengambilan kebijakan pembangunan sosial, ekonom dan politik  1. Perluasan akses masyarakat memperoleh kesempatan membaca 2. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berbasis digital  1. Peningkatan kualitas pembinaan seni budaya masyarakat secara efektif dan partisipatif



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK</b>			
3.2. Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	3.2.2 Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.2.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya 3.2.2.4 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya penguatan identitas nilai-nilai agama, adat dan istiadat berlandaskan falsafah ABS-SBK	2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan even seni budaya masyarakat 3. Peningkatan kualitas pemeliharaan benda cagar budaya 4. Pengembangan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia 1. Revitalisasi sarana dan prasarana adat, budaya dan agama dalam rangka peningkatan kualitas penerapan ABS-SBK 2. Peningkatan kualitas pembinaan kelembagaan agama dan adat secara efektif dan partisipatif 3. Peningkatan kualitas pembinaan TPQ dan TPSQ untuk menciptakan hafiz Al Qur'an 4. Peningkatan kuantitas perlombaan tentang adat bagi generasi muda 5. Fasilitasi tokoh agama dan adat dalam penerapan ABS-SBK
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>			
4.1 Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	1.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah  4.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	1.1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW.  1.2.1.2 Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan daerah tetangga, provinsi dan nasional.  1.2.1.3 Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah  4.1.2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Revisi RTRW 2. Penetapan RDTR kawasan strategis daerah 3. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik 4. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan kawasan unggulan daerah dan ibukota kabupaten 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana jalan  1. Pemetaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan strategis daerah perbatasan, provinsi dan nasional 2. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan perbatasan  Peningkatan kuantitas jaringan komunikasi dan energi listrik yang terjangkau keseluruh wilayah  1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi secara efektif dan merata 2. Pengembangan jaringan air bersih secara efektif dan partisipatif 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sanitasi layak secara partisipatif



<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>			
4.1 Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	4.1.2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasaran, sarana dan utilitas Umum secara efektif dan merata
4.2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	4.1.1 Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	4.2.1.1 Mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara konsisten dan bernilai ekonomis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara partisipatif</li> <li>2. Pemanfaatan sumber daya hutan melalui program perhutanan sosial secara partisipatif</li> <li>3. Pembangunan sistem pengelolaan limbah masyarakat/industri yang terpadu dan bernilai ekonomis</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasana persampahan secara partisipatif</li> <li>5. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif berwawasan lingkungan</li> <li>6. Peningkatan kuantitas pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ol>
	4.1.2 Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	4.2.2.1 Menerapkan mitigasi bencana secara efektif, partisipatif dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dokumen mitigasi bencana</li> <li>2. Peningkatan kualitas pencegahan bencana secara efektif dan partisipatif</li> <li>3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras serta SDM penanganan bencana secara partisipatif</li> <li>4. Peningkatan kualitas penanganan bencana secara cepat , efektif dan partisipatif</li> <li>5. Peningkatan kualitas rekonstruksi infrastruktur dan prasana dasar dampak bencana secara efektif dan partisipatif</li> </ol>



Merujuk kepada perumusan dan penetapan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode, namun dibutuhkan juga lebih dari satu tahun. Selain itu, arah kebijakan pembangunan dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor, salah satunya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud. Sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.7**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026**

Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan (Tahun)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>					
<b>Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>					
<b>Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional</b>					
1.1.1.1 PMengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif	Reorganisasi struktur Perangkat Daerah				
	Penetapan dan harmonisasi produk hukum daerah sesuai kebutuhan daerah				
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, profesional dan akuntabel				
	Peningkatan kuantitas Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan berkelanjutan				
	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan secara efektif dan berkelanjutan				
	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP secara efektif dan akuntabel				
	Penerapan SPBE yang terintegrasi				
	Peningkatan kualitas arsip daerah dan informasi pemerintahan yang efektif				
	Peningkatan kuantitas perkantoran yang representatif				
	Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari yang efektif, akuntabel dan transparan				
1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis teknologi informasi				
	Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan dan program pemerintahan daerah				
	Penetapan road map penerapan sistem merit				
	Peningkatan kualitas ASN berdasarkan road map penerapan sistem merit				
	Penerapan sistem merit secara efektif dan berkesinambungan				
1.1.1.3. Meningkatkan kualitas penegakan supremasi hukum melalui koordinasi yang harmonis dengan stakeholders	Pembinaan aparatur berbasis reward dan punishment secara proporsional				
	Peningkatan kualitas kinerja ASN secara efektif dan profesional.				
	Peningkatan kualitas pencegahan dini potensi konflik dan penegakan supremasi hukum secara efektif				
<b>Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas</b>					
1.1.3.1 Menumbuhkembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif dan ber-integritas	Penetapan dan penerapan kebijakan pelayanan publik secara efektif dan efisien				
	Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi				
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan publik				
	Penyediaan sistem informasi, pengaduan dan konsultasi pelayanan publik yang responsif				
	Penerapan survei kepuasan masyarakat secara mandiri				
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan riset dan ekosistem inovasi				
	Penerapan zona integritas setiap unit layanan publik secara efektif dan berkesinambungan				



Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan (Tahun)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>					
<b>Tujuan 2.1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah</b>					
<b>Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi</b>					
2.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian	Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh berbasis teknologi Penyediaan dana stimulan dalam upaya pengembangan budidaya pertanian/perikanan berbasis teknologi Pengembangan bibit unggul pertanian/perikanan secara efektif Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian/perikanan secara efektif dan partisipatif Peningkatan akses permodalan, kapasitas dan pengembangan usaha UMKM berbasis digital Peningkatan kualitas industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berdaya saing tinggi Revitalisasi pasar Nagari/serikat menuju pasar tradisional modern				
2.1.1.2 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agro wisata secara berkelanjutan	Perubahan Perda RIPPDa Pengembangan deliniasi dan destinasi kawasan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS) Pengembangan destinasi wisata berbasis pertanian Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata berbasis digitalisasi Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku wisata secara efektif Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan				
2.1.1.3 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan terjaganya stabilitas ketertiban umum yang aman	Peningkatan kualitas kemudahan berinvestasi secara efektif dan efisien Pemberian insentif perizinan industrialisasi perkebunan (agroindustri) Penataan kepemilikan lahan dan batas wilayah Peningkatan kualitas ketertiban umum secara efektif dan partisipatif				
<b>Tujuan 2.2 : Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan</b>					
<b>Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat</b>					
2.2.1.1 Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah dan membangun jaringan kerjasama pemasaran yang efektif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas nilai tambah produk pertanian/perikanan berdaya saing (agribisnis) Pengembangan produk unggulan di setiap nagari berbasis kearifan lokal Peningkatan kualitas produk industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang berdaya saing Pembinaan koperasi dan BUMNag secara partisipatif Perluasan akses pemasaran produk unggulan daerah berbasis digitalisasi Perluasan usaha BUMD dalam memasarkan produk unggulan daerah (badan penyangga)				
<b>Sasaran 2.2.2 : Menurunnya pengangguran</b>					
2.2.2.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri Perluasan akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil Peningkatan kualitas pemanfaatan tenaga masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan prasarana dasar Pemanfaatan lahan produktif secara partisipatif				
<b>Sasaran 2.2.3 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat</b>					
2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin.	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat nagari/desa yang inklusif dan merata Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat nagari/desa secara partisipatif Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Nagari/Desa secara efektif dan efisien berbasis kearifan lokal Peningkatan kuantitas Nagari/Desa yang mandiri secara berkesinambungan Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama rantau secara berkelanjutan				
2.2.3.2 Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara efektif dan berkelanjutan	Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan Peningkatan kuantitas jaminan sosial ekonomi masyarakat miskin Peningkatan kuantitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar PPKS Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PPKS berlandaskan skala prioritas Peningkatan cakupan bantuan dan kualitas penanganan PPKS Peningkatan rumah layak huni secara partisipatif				
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK</b>					
<b>Tujuan 3.1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas</b>					
<b>Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi</b>					
3.1.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi secara efektif dan partisipatif	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi Penguatan pendidikan karakter melalui program tahfiz seluruh jenjang pendidikan dan program boarding school jenjang pendidikan SLTP Peningkatan kuantitas dan kualitas PKBM secara partisipatif				



<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan Pembangunan (Tahun)</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
3.1.1.2 Meningkatkan aksesibilitas jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi bagi masyarakat melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi	Peningkatan kuantitas bea siswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi Peningkatan kualitas layanan pendidikan SLTA secara gratis Fasilitasi peningkatan status Perguruan tinggi swasta				
<b>Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</b>					
3.1.2.1 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindarnya masyarakat dari penyakit menular & tidak menular	Revitalisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara mudah dan cepat Peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara partisipatif Peningkatan kuantitas dan kualitas jaminan kesehatan terhadap masyarakat Peningkatan kualitas upaya deteksi dini terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular				
3.1.2.2 Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Peningkatan kuantitas dan kualitas program Kampung KB Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara partisipatif				
3.1.2.3 Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas budaya masyarakat dalam berolahraga secara partisipatif Peningkatan kualitas prestasi olahraga unggulan daerah				
<b>Sasaran 3.1.3 : Menurunnya prevalensi stunting</b>					
3.1.3.1 Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting	Membangun sistem manajemen data pencegahan dan penanganan stunting Percepatan perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan Pemberian gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan secara efektif dan berkesinambungan Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan secara efektif dan berkesinambungan Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum bulan secara efektif dan berkesinambungan Penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integratif Peningkatan kualitas perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting lebih intensif dan berkelanjutan Penciptaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas secara konvergen dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat				
3.1.3.2 Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan partisipatif	Peningkatan ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan pangan Peningkatan kualitas pangan yang layak konsumsi bagi masyarakat				
<b>Sasaran 3.1.4 : Meningkatkan kualitas pengarustamaan gender dan pemuda dalam pembangunan</b>					
3.1.4.1 Meningkatkan kualitas pengarustamaan gender dan pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pembangunan gender berbasis inklusif Peningkatan internalisasi pembangunan gender antar sektor Peningkatan kualitas perlindungan anak secara efektif dan berkeadilan Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan Penciptaan pemuda produktif dan kreatif yang berwawasan wirausaha				
<b>Tujuan 3.2 : Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK</b>					
<b>Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal</b>					
3.2.1.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender berbasis kearifan lokal	Peningkatan kualitas pengarustamaan gender berbasis pengetahuan tradisional ( <i>local knowledge</i> ) Perluasan akses gender berpartisipasi dalam pembangunan kebudayaan Peningkatan kualitas gender dalam pengambilan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi politik				
3.2.1.2 Menumbuhkembangkan budaya dan minat baca secara partisipatif	Perluasan akses masyarakat memperoleh kesempatan membaca Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berbasis digital				
3.2.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya	Peningkatan kualitas pembinaan seni budaya masyarakat secara efektif dan partisipatif Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan even seni budaya masyarakat Peningkatan kualitas pemeiliharaan benda cagar budaya Pengembangan kawasan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia				
3.2.1.4 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya penguatan identitas nilai-nilai agama, adat dan istiadat berdasarkan falsafah ABS-SBK	Revitalisasi sarana dan prasarana adat, budaya dan agama dalam rangka peningkatan kualitas penerapan ABS-SBK Peningkatan kualitas pembinaan kelembagaan agama dan adat secara efektif dan partisipatif Peningkatan kualitas pembinaan TPQ dan TPSQ untuk menciptakan hafiz Al Qur'an Peningkatan kuantitas perlombaan tentang adat bagi generasi muda Fasilitasi tokoh agama dan adat dalam penerapan ABS-SBK				



Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan (Tahun)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>					
<b>Tujuan 4.1 : Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata</b>					
<b>Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah</b>					
4.1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW	Revisi RTRW				
		Penetapan RDTR kawasan strategis daerah			
		Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik			
		Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan kawasan unggulan daerah dan ibukota kabupaten			
<b>Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar</b>					
4.1.1.2 Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan daerah te-tangga, provinsi dan nasional	Pemetaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan strategis daerah perbatasan, provinsi dan nasional				
		Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan perbatasan			
	4.1.1.3 Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah	Peningkatan kuantitas jaringan komunikasi dan energi listrik yang terjangkau keseluruh wilayah			
<b>Tujuan 4.2 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</b>					
<b>Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>					
4.2.1.1 Mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara konsisten dan bernilai ekonomis	Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi secara efektif dan merata				
	Pengembangan jaringan air bersih secara efektif dan partisipatif				
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sanitasi layak secara partisipatif				
	Peningkatan kuantitas dan kualitas pasarana, sarana dan utilitas Umum secara efektif dan merata				
<b>Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya kualitas mitigasi bencana</b>					
4.2.2.1 Menerapkan mitigasi dan pasca bencana secara efektif, partisipatif dan berkesinambungan	Penyediaan dokumentasi mitigasi bencana				
	Peningkatan kualitas pencegahan bencana secara efektif dan partisipatif				
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras serta SDM penanganan bencana secara partisipatif				
	Peningkatan kualitas penanganan bencana secara cepat, efektif dan partisipatif				
	Peningkatan kualitas rekonstruksi infrastruktur dan prasarana dasar dampak bencana secara efektif dan partisipatif				

### 6.2.1 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan dua pendekatan yakni, pendekatan yang berorientasi kepada proses perencanaan itu sendiri dan berorientasi pada substansi. Secara artifisialnya pendekatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada substansi terdiri dari; tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan merupakan salah satu upaya menerapkan THIS. Sehingga dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dapat menjawab permasalahan pembangunan yang berorientasi integratif dan spasial sesuai dengan prioritas pembangunan.

Kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan program/kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memanfaatkan potensi keragaman dan kesamaan aspek



pembangunan serta memperhatikan arah pembangunan pengembangan wilayah, maka pembangunan berdimensi kewilayahan mengacu kepada rencana pola ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031. Selain mengacu kepada rencana pola ruang daerah Tahun 2011-2031, pembangunan dimensi kewilayahan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan, juga memperhatikan kebijakan pembangunan dimensi kewilayahan nasional dan provinsi.

#### 6.2.1.1 Kebijakan Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek

Seiring ditetapkannya Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS) sebagai kawasan taman bumi (*geopark*) nasional dan sebagai salah lokasi rencana pengembangan kawasan geo-wisata dan budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan dan kelembagaan GRMS menjadi salah satu referensi dalam merumuskan dan menetapkan arah kebijakan pembangunan RPJMD. Pengembangan kelembagaan, deliniasi dan destinasi GMRS akan memberikan dampak pembangunan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

Secara terminologi taman bumi (*geopark*) adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*). Jika taman bumi dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitar kawasan. Masa depan bangsa Indonesia bukan pada kegiatan ekstraktif. Guna menjamin eksistensi umat manusia di muka bumi dan kehidupan yang lebih baik, sudah saatnya merubah mindset pengelolaan Sumber Daya Alam dari ekstraksi ke konservasi dan peningkatan nilai tambah.

Penyelenggaraan kegiatan pengembangan taman bumi secara berkelanjutan dimaknai sebagai kegiatan dan upaya penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha konservasi. Objek-objek warisan bumi di dalam taman bumi berpeluang menciptakan nilai ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata berbasis alam (geologi) atau geowisata merupakan salah satu pilihan. Pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB/PDRB, devisa dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah. Pengembangan taman bumi mendorong terciptanya ekonomi kreatif dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru. Status taman bumi dari sebuah kawasan geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata.

Dalam konteks perkembangan daerah, laju sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi paling cepat ketimbang sektor-sektor lain. Faktanya, konsep Geopark memang berpotensi menghadirkan pendapatan yang signifikan. Tiongkok misalnya, dari pendapatan wisata sekitar 6 miliar dollar AS atau Rp 80 Triliun, sekitar 62% di antaranya atau mencapai Rp 49 Triliun, disumbangkan dari pengelolaan 33



kawasan taman bumi dunia.

Dalam konsep pengembangan taman bumi, SDG's adalah sebagai *framework* yang melibatkan pemerintah dan aktor non pemerintah (OMS, filantropy, akademisi, media, dan lain-lain), integrasi sumber pembiayaan (pemerintah dan non pemerintah, pusat-daerah, dan lain-lain), serta menerapkan prinsip kemitraan (*trust, equal partnership, mutual benefit*, akuntabilitas dan transparansi). Adapun peran taman bumi atau *geopark* untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (9 dari 17 goals) adalah sebagai berikut:

- 1) *Geopark* melakukan kemitraan dan kerja sama, tidak hanya antara pemangku kepentingan lokal, tetapi juga secara internasional.
- 2) Masyarakat diberikan pengetahuan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan efek perubahan iklim.
- 3) *Geopark* mendidik dan menciptakan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup.
- 4) *Geopark* mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.
- 5) *Geopark* merupakan ruang kelas terbuka dan inkubator.
- 6) *Geopark* sangat menekankan pemberdayaan perempuan.
- 7) Promosi geowisata berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama *Geopark*.
- 8) Melindungi, menjaga dan merayakan warisan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*geopark*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan *geopark* sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pengembangan *geopark*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan *geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata oleh Pemerintah Daerah, sedangkan peran Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor dalam mendukung pengembangan *geopark* sesuai dengan prioritas dan strategi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) *geopark*.

Tujuan dan substansi RAN *geopark* antara lain; memberikan prinsip dasar pengembangan Geopark yang baik dan berkelanjutan; menetapkan jenis dan standar pelayanan nasional bagi *geopark* tertentu (perencanaan, infrastruktur, konservasi, pemeliharaan); melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memberikan layanan nasional; penyusunan target, indikator, dan tahun guna mendukung peningkatan target nasional jumlah kunjungan wisata mancanegara; meningkatkan kuantitas dan kualitas *geopark* Nasional dan UNESCO *Global Geopark*; serta kerangka pendanaan dan kelembagaan.

Sementara itu, dukungan Pemerintah Pusat dalam penyusunan rencana induk dalam rangka penetapan Geopark, antara lain:

- 1) Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
- 2) Program konservasi *geoheritage, geodiversity, biodiversity dan cultural diversity*;
- 3) Program pengembangan pendidikan dan Litbang;
- 4) Program pelestarian sosial budaya;
- 5) Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif;



- 6) Pengembangan destinasi pariwisata;
- 7) Inventarisasi amenitas dan infrastruktur pendukung;
- 8) Promosi nilai ilmiah Geopark;
- 9) Pengembangan kerjasama dan kemitraan *Geopark* Nasional, Regional dan Global.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memegang peran penting (kunci) dalam proses pengembangan *geopark* di Kabupaten Sijunjung karena *geopark* menganut asas *bottom up*. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan kawasan utama pengembangan GMRS adalah; 1) Kecamatan Sijunjung dan 2) Kecamatan Sumpur Kudus. Sedangkan kecamatan lainnya menjadi kawasan penyanga dan penunjang pengembangan GMRS dalam upaya menuju UNESCO *Global Geopark*. Pengembangan kawasan GMRS dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 6.2 Kebijakan Pengembangan Kawasan Geopark Ranah Minang Siloek**

#### 6.2.1.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan Kabupaten Sijunjung lima tahun, juga menyelaraskan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan. Adapun kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung, antara lain;

- 1) Kawasan sentra produksi pertanian, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dengan Tanaman yang diunggulkan.
- 2) Kawasan peruntukan industri pengolahan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 14 tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038.



3) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025,

Rincian rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian, industri pengolahan dan sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

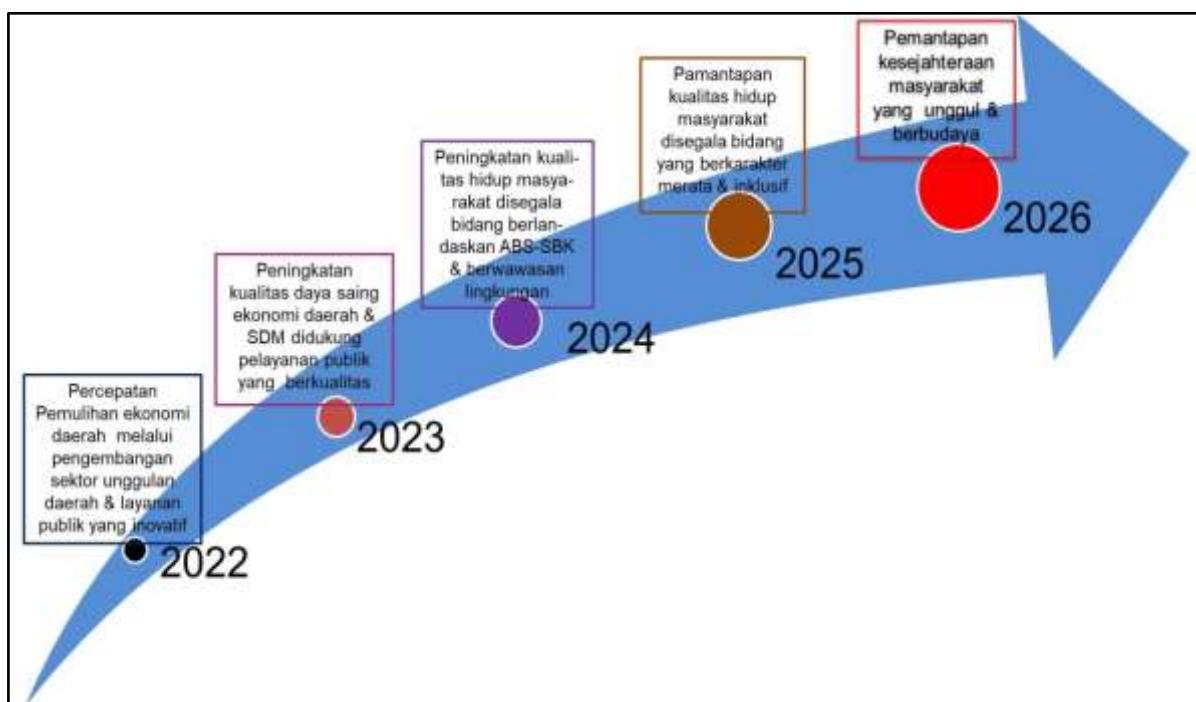
**Tabel 6.8**  
**Rencana Pengembangan Budidaya Pertanian, Industri Pengolahan dan Sektor Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung**

No	Rencana Pengembangan	Jenis Pengembangan	Lokasi
1	Pengembangan sentra produksi tanaman pangan dan holtikultura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra produksi padi</li><li>• Sentra produksi jagung</li><li>• Sentra produksi manggis</li></ul>	Kec. Tanjung Gadang Kec. Kamang Baru <ul style="list-style-type: none"><li>• Kec. Lubuk Tarok</li><li>• Kec. Tanjung Gadang</li><li>• Kec. Koto VII</li></ul>
2	Pengembangan komoditi unggulan perkebunan	Karet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kec. Koto VII</li><li>• Kec. Sumpur Kudus</li><li>• Kec. Sijunjung</li><li>• Kec. Lubuk Tarok</li></ul>
3	Pengembangan sentra produksi komoditi peternakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sapi Bali</li><li>• Kerbau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kec. Kamang Baru</li><li>• Kec. Koto VII</li></ul>
4	Kawasan integrasi ternak sapi dan tanaman perkebunan	Sapi dan Sawit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kec. Kamang Baru</li><li>• Kec. Lubuk Tarok</li></ul>
5	Kawasan pengembangan dan komoditi perikanan budidaya	Ikan Nila	-
6	Kawasan pengembangan agribisnis	Produksi daging	-
7	Pengembangan kawasan dan sentra industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Industri pengolahan makanan (pisang, nangka, kandis, gelugur dan susu kerbau)</li><li>• Industri alsintan (alat mesin pertanian, alat pengupas, alat penyuling, alat pengering dan mesin rumah tangga)</li></ul>	
8	Industri pengolahan semen	Batu Kapur	Kec. Tanjung Gadang
9	Pengembangan Kawasan geowisata dan budaya	Pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara ( <i>Coal Mining Heritage Tourism</i> )	Geopark Silokek dan Perkampungan Kampung Adat Padang Ranah

Berdasarkan uraian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026 diatas, maka ditetapkan tema pembangunan lima tahunan, yaitu: **"Integrasi Geopark Ranah Minang Silokek secara lintas sektoral dan wilayah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan"**.

Melalui konsep *geopark* tersebut, arah pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun ke depan akan lebih terfokus dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara optimal. Tema tersebut, diimplementasikan melalui tema pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dapat dilihat pada gambar berikut ini.





**Gambar 6.3 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan diatas, memiliki keterkaitan yang relevan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah tahapan/fase ke-4 RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.9**  
**Keterkaitan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
<b>A.</b>	<b>Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Agama</b>		
1	Terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkualitas, berakhlaq mulia dan religius.	2.2.3.2 Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara efektif dan berkelanjutan  3.2.1.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender berbasis kearifan lokal  3.2.1.2 Menumbuhkembangkan budaya dan minat baca secara partisipatif	1. Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkelanjutan 2. Peningkatan kuantitas jaminan sosial ekonomi masyarakat miskin 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar PPKS 4. Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PPKS berlandaskan skala prioritas 5. Peningkatan cakupan bantuan dan kualitas penanganan PPKS 6. Peningkatan rumah layak huni secara partisipatif  1. Peningkatan kualitas pengaruh-tamaan gender berbasis pengetahuan tradisional ( <i>local knowledge</i> ) 2. Perluasan akses gender berpartisipasi dalam pembangunan kebudayaan 3. Peningkatan kualitas gender dalam pengambilan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik  1. Perluasan akses masyarakat memperoleh kesempatan membaca 2. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berbasis digital



No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
1	Terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkualitas, berakhhlak mulia dan religius.	<p>3.2.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan dan melestarikan warisan budaya</p> <p>3.2.1.4 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya penguatan identitas nilai-nilai agama, adat dan istiadat berlandaskan falsafah ABS-SBK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pembinaan seni budaya masyarakat secara efektif dan partisipatif</li> <li>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan even seni budaya masyarakat</li> <li>3. Peningkatan kualitas pemeliharaan benda cagar budaya</li> <li>4. Pengembangan kawasan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi sarana dan prasarana adat, budaya dan agama dalam rangka peningkatan kualitas penerapan ABS-SBK</li> <li>2. Peningkatan kualitas pembinaan kelembagaan agama dan adat secara efektif dan partisipatif</li> <li>3. Peningkatan kualitas pembinaan TPQ dan TPSQ untuk menciptakan hafiz Al Qur'an</li> <li>4. Peningkatan kuantitas perlombaan tentang adat bagi generasi muda</li> <li>5. Fasilitasi tokoh agama dan adat dalam penerapan ABS-SBK</li> </ol>
2	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif.	<p>3.1.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi secara efektif dan partisipatif</p> <p>3.1.1.2 Meningkatkan aksesibilitas jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi bagi masyarakat melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi</p> <p>3.1.2.1 Mendorong dan memfasilitasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindarnya masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular</p> <p>3.1.2.2. Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan</li> <li>2. Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar</li> <li>3. Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi</li> <li>4. Penguatan pendidikan karakter melalui program tahliz seluruh jenjang pendidikan dan program <i>boarding school</i> jenjang pendidikan SLTP</li> <li>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas PKBM secara partisipatif</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas bea siswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan SLTA secara gratis</li> <li>3. Fasilitasi peningkatan status Perguruan tinggi swasta</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara mudah dan cepat</li> <li>3. Peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara partisipatif</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaminan kesehatan terhadap masyarakat</li> <li>5. Peningkatan kualitas upaya deteksi dini terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas program Kampung KB.</li> <li>3. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara partisipatif.</li> </ol>



No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
2	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif.	<p>3.1.2.3 Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga yang berkelanjutan</p> <p>3.1.3.2 Meningkatkan kualitas sinergi lintas sektor dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting</p> <p>3.1.3.3 Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkesinambungan dan partisipatif</p> <p>3.1.4.1 Meningkatkan kualitas pengarustamaan gender dan pemuda dalam pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas budaya masyarakat dalam berolahraga secara partisipatif</li> <li>Peningkatan kualitas prestasi olahraga unggulan daerah</li> <li>Membangun sistem manajemen data pencegahan dan penanganan stunting</li> <li>Percepatan perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan</li> <li>Pemberian gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan secara efektif dan berkesinambungan</li> <li>Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan secara efektif dan berkesinambungan</li> <li>Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum bulan secara efektif dan berkesinambungan</li> <li>Penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integratif</li> <li>Peningkatan kualitas perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting lebih intensif dan berkelanjutan</li> <li>Penciptaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas secara konvergen dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat</li> <li>Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan</li> <li>Peningkatan kualitas pangan yang layak konsumsi bagi masyarakat</li> <li>Peningkatan kualitas pembangunan gender berbasis inklusif</li> <li>Peningkatan internalisasi pembangunan gender antar sektor</li> <li>Peningkatan kualitas perlindungan anak secara efektif dan berkeadilan</li> <li>Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan</li> <li>Penciptaan pemuda produktif dan kreatif yang berwawasan wirausaha</li> </ol>
<b>B. Ekonomi Daerah</b>			
1	Terwujudnya ekonomi daerah yang lebih tangguh, merata dan berkeadilan, stabil dan berkelanjutan	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas petani dan penyuluhan berbasis teknologi</li> <li>Penyediaan dana stimulan dalam upaya pengembangan budidaya pertanian/perikanan berbasis teknologi</li> </ol>



No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
1	Terwujudnya ekonomi daerah yang lebih tangguh, merata dan berkeadilan, stabil dan berkelanjutan	<p>2.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan industri pertanian</p> <p>2.1.1.2 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta agro wisata secara berkelanjutan</p> <p>2.2.1.1 Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah dan membangun jaringan kerjasama pemasaran yang efektif dan berkelanjutan</p>	<p>3. Pengembangan babit unggul pertanian/perikanan secara efektif</p> <p>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian/ perikanan secara efektif dan partisipatif</p> <p>5. Peningkatan akses permodalan, kapasitas dan pengembangan usaha UMKM berbasis digital</p> <p>6. Peningkatan kualitas industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berdaya saing tinggi</p> <p>7. Revitalisasi pasar Nagari/serikat menuju pasar tradisional modern</p> <p>1. Perubahan Perda RIPPDA</p> <p>2. Pengembangan deliniasi dan destinasi kawasan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS)</p> <p>3. Pengembangan destinasi wisata berbasis pertanian</p> <p>4. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata berbasis digitalisasi</p> <p>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku wisata secara efektif</p> <p>6. Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan</p> <p>1. Peningkatan kualitas nilai tambah produk pertanian/perikanan berdaya saing (agribisnis)</p> <p>2. Pengembangan produk unggulan di setiap nagari berbasis kearifan lokal</p> <p>3. Peningkatan kualitas produk industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang berdaya saing</p> <p>4. Pembinaan koperasi dan BUMNag secara partisipatif</p> <p>5. Perluasan akses pemasaran produk unggulan daerah berbasis digitalisasi</p> <p>6. Perluasan usaha BUMD dalam memasarkan produk unggulan daerah (badan penyanga)</p>
2	Terwujudnya sinergi harmonis dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam penyelempgaraan pembangunan daerah	2.1.1.3 Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan terjaganya stabilitas ketertiban umum yang aman	<p>1. Peningkatan kualitas kemudahan berinvestasi secara efektif dan efisien</p> <p>2. Pemberian insentif perizinan industrialisasi perkebunan (agroindustri)</p> <p>3. Penataan kepemilikan lahan dan batas wilayah</p> <p>4. Peningkatan kualitas ketertiban umum secara efektif dan partisipatif</p>
3	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata dan antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global	<p>2.2.2.1 Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan</p> <p>2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja</p> <p>2. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri</p> <p>3. Perluasan akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil</p> <p>4. Peningkatan kualitas pemanfaatan tenaga masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan prasarana dasar</p> <p>5. Pemanfaatan lahan produktif secara partisipatif</p> <p>1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat nagari/desa yang inklusif dan merata</p> <p>2. Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat nagari/desa secara partisipatif</p>



No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
3	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata dan antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global	2.2.3.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin.	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama rantau secara berkelanjutan
<b>C. Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>			
1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan lestari	4.2.1.1 Mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara konsisten dan bernilai ekonomis  4.2.2.1 Menerapkan mitigasi dan pasca bencana secara efektif, partisipatif dan berkesinambungan	1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara partisipatif 2. Pemanfaatan sumber daya hutan melalui program perhutanan sosial secara partisipatif 3. Pembangunan sistem pengelolaan limbah masyarakat/industri yang terpadu dan bernilai ekonomis 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan secara partisipatif 5. Peningkatan kuantitas pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  1. Penyediaan dokumen mitigasi bencana 2. Peningkatan kualitas pencegahan bencana secara efektif dan partisipatif 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras serta SDM penanggangan bencana secara partisipatif 4. Peningkatan kualitas penanggangan bencana secara cepat, efektif dan partisipatif 5. Peningkatan kualitas rekonstruksi infrastruktur dan prasarana dasar dampak bencana secara efektif dan partisipatif
<b>D. Hukum dan Pemerintahan</b>			
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum	1.1.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif  1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan	1. Reorganisasi struktur Perangkat Daerah 2. Penetapan dan harmonisasi produk hukum daerah sesuai kebutuhan daerah 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, profesional dan akuntabel 4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan secara efektif 5. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP secara efektif 6. Penerapan SPBE yang terintegrasi 7. Peningkatan kualitas arsip daerah dan informasi pemerintahan yang efektif 8. Peningkatan kuantitas perkantoran yang representatif 9. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 10. Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan dan program pemerintahan daerah  1. Penetapan <i>road map</i> penerapan sistem merit 2. Peningkatan kualitas ASN berdasarkan <i>road map</i> penerapan sistem merit 3. Penerapan sistem merit secara efektif dan berkesinambungan

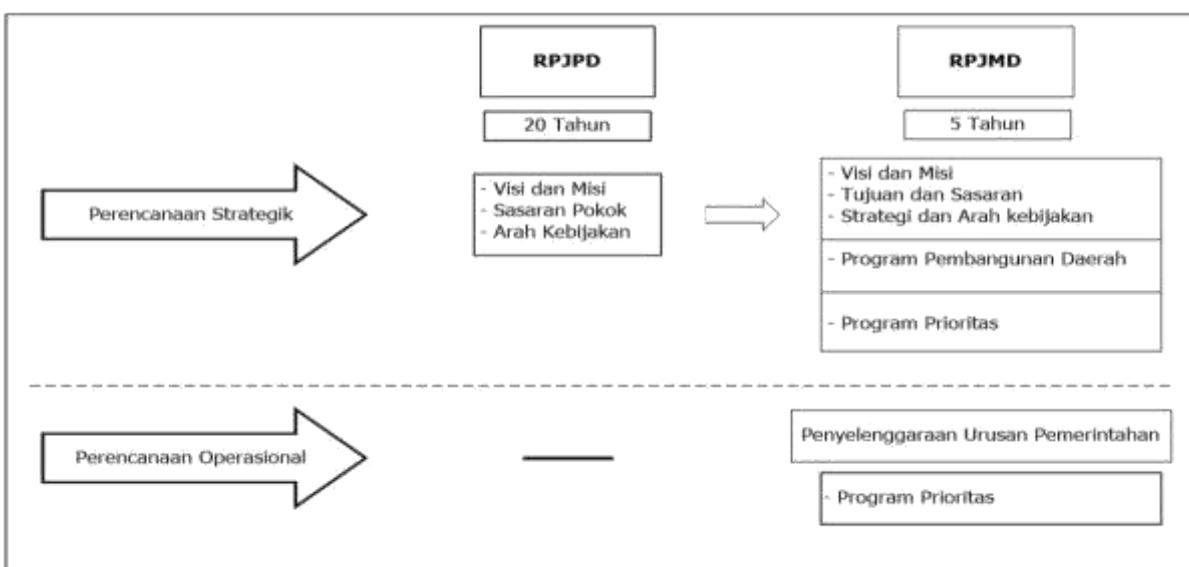


No.	Bidang/Arah Pembangunan Tahapan ke-4 RPJPD 2005-2025	Strategi RPJMD 2021-2026	Arah dan Kebijakan RPJMD 2021-2026
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum	1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit melalui pengembangan ASN yang efektif, proporsional dan berkesinambungan 1.1.1.3 Meningkatkan kualitas penegakan supremasi hukum melalui koordinasi yang harmonis dengan <i>stakeholders</i> 1.1.2..1 Menumbuhkembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif dan berintegritas	4. Pembinaan aparatur berbasis <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara proporsional 1. Peningkatan kualitas pencegahan dini potensi konflik dan penegakan supremasi hukum secara efektif 2. Peningkatan kualitas kerjasama pemerintah dengan <i>stakeholders</i> yang lebih efektif 1. Penetapan dan penerapan kebijakan pelayanan publik secara efektif dan efisien 2. Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan publik 4. Penyediaan sistem informasi, pengaduan dan konsultasi pelayanan publik yang responsif 5. Penerapan survei kepuasan masyarakat secara mandiri 6. Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan riset dan ekosistem inovasi 7. Penerapan zona integritas setiap unit layanan publik secara efektif & berkesinambungan
2	Mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional dan mempunyai legitimasi yang kuat	1.1.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis SAKIP dan digitalisasi secara integratif	Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari/Desa yang efektif, akuntabel dan transparan
<b>E. Sarana dan prasarana</b>			
1	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan prasarana yang memadai	4.1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW 4.1.1.2 Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dengan daerah tetangga, provinsi dan nasional 4.1.1.3 Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah 4.1.2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Revisi RTRW 2. Penetapan RDTR kawasan strategis daerah 3. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana jalan 1. Pemetaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan strategis daerah perbatasan, provinsi dan nasional 2. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan perbatasan 3. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan perbatasan Peningkatan kuantitas jaringan komunikasi dan energi listrik yang terjangkau keseluruhan wilayah 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi secara efektif dan merata 2. Pengembangan jaringan air bersih secara efektif dan partisipatif 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sanitasi layak secara partisipatif 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasaran, sarana dan utilitas umum secara efektif dan merata
2	Terwujudnya Ibu Kota Kabupaten dan Nagari yang maju dan berkembang	4.1.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis RTRW	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan kawasan unggulan daerah dan ibukota kabupaten



### 6.3. Program Pembangunan

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan dengan 2 (dua) jenis, yaitu; 1) perencanaan strategik, adalah perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan 2) perencanaan operasional, adalah perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan pemerintahan. Kedua arsitektur perencanaan pembangunan daerah tersebut, dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 6.3 Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program pembangunan. Oleh sebab itu, harus mempunyai keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Sehingga program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis Kepala Daerah pada periode RPJMD yang menjadi prioritas atau target selama lima tahun. Dalam operasionalnya program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menurut urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur, relevan dan dapat dicapai. Selain untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, program pembangunan daerah diarahkan juga untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,



urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas; 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD diwujudkan dalam program Perangkat Daerah, sehingga menjadi bagian dalam program pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.10**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab Urusan
<b>I. SPM Pendidikan</b>				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pendidikan
2	Pendidikan Dasar		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Pendidikan
<b>II. SPM Kesehatan</b>				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a) Cakupan Pelayanan Ibu sesuai standar b) Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi ditangani	Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		a) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Fasyankes b) Cakupan pelayanan KF 3 c) Cakupan Pelayanan KB Aktif	Kesehatan/Dalduk & KB
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		a) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani b) Cakupan pelayanan KN Lengkap	Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan Balita		a) Anak Balita sesuai standar b) Cakupan Imunisasi lengkap pada bayi, c) Cakupan Imunisasi Booster Lengkap d) Cakupan Pemberian Vit. A Anak Balita e) Cakupan Pelayanan Bayi f) Cakupan D/S Balita	Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		a) Cakupan penajaran kesehatan siswa baru SD dan setingkat b) Cakupan penajaran kesehatan siswa baru SLTP dan setingkat	Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab Urusan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	c) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SD dan setingkat d) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SLTP dan setingkat e) Cakupan Pelaksanaan UKGS f) Cakupan Pelaksanaan Kesehatan Indera g) Cakupan Imunisasi Anak Sekolah	Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Skrining Lansia sesuai standar	Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		a) Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SLTA dan setingkat b) Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa baru SLTA dan setingkat c) Cakupan Skrening di Posbindu d) Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil e) Cakupan Skrening di UKK f) Cakupan Paracite Indek (API) < 1 Per 1000 penduduk g) Visite Rate h) Cakupan Pelaksanaan Gigi dan Mulut i) Cakupan Pelayanan Kesehatan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat j) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia 7-15 tahun diluar lembaga Pendidikan formal	Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		Cakupan Pelayanan Hipertensi sesuai standar	Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus		Cakupan Pelayanan Diabetes Sesuai Standar	Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat sesuai Standar	Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB		a) Cakupan Penemuan terduga TB b) Cakupan Penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar c) Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		a) Cakupan Orang dengan resiko terinveksi HIV yang mendapatkan konseling dan Screening HIV b) Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan konseling	Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab Urusan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	c) dan Screening HIV c) Cakupan Penderita TB yang mendapat screening dan Konseling HIV. d) Cakupan Kelompok berisiko yang mendapat screening dan konseling HIV	
<b>III. SPM Pekerjaan Umum</b>				
1	Penyedia Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>IV. SPM Perumahan Rakyat</b>				
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Perumahan dan Kawasan Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tekena relokasi program pemerintah		Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	Perumahan dan Kawasan Perumahan
<b>V. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>				
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
<b>VI. Sosial</b>				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti		Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar anak dan lanjut usia telantar diluar Panti		Jumlah lanjut usia memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya geladangan dan pengemis diluar panti		Jumlah warga negara geladangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sosial



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab Urusan
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Sosial

Selain itu, program pembangunan merupakan internalisasi dari program Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada proses politik dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Internalisasi program Kepala Daerah terpilih ke dalam program pembangunan merujuk kepada makna/penjelasan dari program atau janji politik tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.11  
Program Kepala Daerah**

No.	Program/Janji Politik	Penjelasan Janji Politik	Penanggung Jawab
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>			
1	Reorganisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah	Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien	Setdakab
2	Pengembangan dan pembinaan aparatur berbasis <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka peningkatkan kinerja	BKPSDM
3	Pemetaan kemampuan aparatur daerah pejabat struktural dan non struktural melalui uji kompetensi	Memastikan penempatan ASN yang lebih tepat.	BKPSDM
4	Penempatan aparatur daerah sesuai dengan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan responsif	BKPSDM
5	Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah ( <i>e-government</i> ).	Menciptakan sistem pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam upaya efektivitas dan efisiensi proses bisnis	Dinas Kominfo
6	Penguatan manajemen BUMD yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan PAD	Meningkatkan daya saing BUMD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Setdakab
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>			
1	Pengembangan budi daya pertanian/perkebunan/perikanan yang ekonomis melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani.	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian/perkebunan/perikanan dengan pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Dinas Pertanian Dinas Papreri
2	Penyediaan tanaga penyuluh pertanian/perkebunan/perikanan se-tiap Jorong		
3	Penyediaan dana stimulan kepada petani dalam upaya peningkatan produktivitas		
4	Fasilitasi petani dalam memperoleh permodalan di perbankan	Memperluas usaha petani dalam meningkatkan pendapatan	Dinas Pertanian
5	Pengembangan kepemilikan lahan secara efektif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang diatur melalui Peraturan Daerah	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif sesuai status kepemilikan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dinas PUPR
6	Perluasan akses dan memperpendek pemasaran hasil pertanian/ perkebunan/perikanan	Meningkatkan pendapatan petani sesuai harga yang ekonomis	Dinas Dagperindagkop dan UKM
7	Peningkatan kapasitas UMKM melalui penguatan permodalan dan pengembangan usaha	Mengembangkan usaha pelaku usaha mikro yang berdaya saing, sehingga menjadi usaha kecil dan menengah	Dinas Dagperindagkop dan UKM



No.	Program/Janji Politik	Penjelasan Janji Politik	Penanggung Jawab
8	Fasilitasi industri kecil dan menengah dalam memperoleh permodalan dan perluasan pasar	Meningkatkan produksi industri kecil dan menengah yang bernilai tambah	Dinas Dagerindagkop dan UKM
9	Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal	Mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kontribusi PDRB	Dinas Parpora
10	Implementasi Rencana Induk Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek secara sinergi dan terintegrasi lintas sektoral		
11	Pengembangan produk unggulan di setiap nagari berbasis kearifan lokal/adat	Memperluas usaha bagi masyarakat selain non pertanian	Dinas PMN
12	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi nagari/desa melalui kerjasama rantau	Meningkatkan kualitas pembangunan Nagari/Desa dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan	Dinas PMN
13	Pemberian insentif perizinan industrialisasi hilir perkebunan karet dan pengolahan kayu karet.	Meningkatkan realisasi investasi dalam upaya hilirisasi hasil perkebunan	DPMPTSP
Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)			
1	Peningkatan anggaran bea siswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi	Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah	Dinas Dikbud
2	Penyediaan bea siswa transisi bagi siswa berprestasi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.		
3	Peningkatan anggaran bea siswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat	BKAD Dinas Dikbud
4	Peningkatan status perguruan tinggi swasta yang ada di Kab. Sijunjung		Bapppeda Dinas Dikbud
5	Penyediaan bea siswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan lanjutan	Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan	Dinas Dikbud
6	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi informasi jenjang pendidikan SLTP		
7	Penciptaan integrasi pendidikan agama dan umum melalui program <i>boarding school</i> jenjang pendidikan SLTP	Meningkatkan akses pendidikan yang berkarakter	Dinas Dikbud
8	Penyediaan layanan pendidikan non formal berbasis masyarakat	Meningkatkan kualitas kesetaraan pendidikan	Dinas Dikbud
9	Penambahan insentif kepada tenaga medis dan non medis di nagari terpencil.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar	Dians Kesehatan
10	Penempatan Bidan Desa di setiap nagari		
11	Peningkatan anggaran dan kualitas pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan	Dians Kesehatan
12	Revitalisasi sarana dan prasarana adat, budaya dan agama dalam rangka peningkatan kualitas penerapan ABS-SBK	Meningkatkan kualitas nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	Setdakab Dinas PMN
13	Peningkatan anggaran operasional KAN & honor guru TPQ serta TPSQ		Setdakab
14	Peningkatan kualitas pembinaan setiap TPQ serta TPSQ dalam upaya meningkatnya kualitas baca & seni Al Qur'an serta bertambahnya jumlah tahlif Al Qur'an		Setdakab



No.	Program/Janji Politik	Penjelasan Janji Politik	Penanggung Jawab
15	Penciptaan pemuda pelopor ditingkat nagari berbasis program pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan KNPI dan Organisasi Ke pemudaan	Meningkatkan kualitas pemuda yang kreatif dan produktif	Dinas Paprpora
Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan			
1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang terkoneksi antar nagari	Meningkatkan kualitas daya saing daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi	Dinas PUPR
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan unggulan daerah, kawasan partumbuhan baru dan daerah perbatasan	Meningkatkan kualitas daya saing daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi	Dinas PUPR
3	Pengembangan jaringan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di setiap jorong	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Dinas PUPR
4	Percepatan pembangunan Ibukota Kabupaten yang representatif sebagai ikon daerah	Meningkatkan kualitas ibukota kabupaten yang representatif	Dinas PUPR
5	Pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan bernilai ekonomis	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bernilai ekonomis	Dinas Perkim dan LH
6	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.	Terpeliharanya lingkungan yang baik	Dinas Perkim dan LH
7	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan pemanfaatan ruang	Tersedianya kawasan yang berwawasan lingkungan yang sehat dan nyaman	Dinas PUPR

Uraian program pembangunan daerah dalam upaya tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada matrik berikut ini.



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Tabel 6.12**  
**Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026**

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani

Kode	Misi/Tujuan/Saaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Base-line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
<b>Misi1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>																			
4 01 02	Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK terhadap LKPD Nilai SAKIP Pemda Manajemen Risiko Indeks Indeks Profesionalitas ASN Nilai LPPD Persentase Perda ditetapkan	47,97 WTP 62,11 n.a 53,76 n.a 3000-3200 85	50-54 WTP 65-67 2+ 60,00 3200- 3400 100	55-57 WTP 68-69 2+ 65,00 3200- 3400 100	58-60 WTP 70-75 3 70,00 3400- 3500 100	61-64 WTP 76-79 3+ 75,00 3500- 3700 100	65-69 WTP 80-83 4 80,00 3700- 3800 100	70-75 WTP 84-87 4 80,00 3800- 4000 100	Setdakab									
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	n.a	n.a	10	700	50	725	80	813	100	825	100	830	100	3.893	Setdakab		
4 01 04	Program Administrasi Umum	Indeks kelembagaan Nilai komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	n.a 9,75	0 10-11	60-63 12-13	16.963	63-65 13-14	17.573	64-66 13-14	19.696	66-69 14-15	19.850	70-73 14-15	20.114	70-73 14-15	94.196	Setdakab Setdakab		
4 02 03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan/ Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat Dewan Persentase Ranperda yang difasilitasi menjadi Perda Persentase penjaringan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	90 100 100	95 100 100	100 100 100	16.962	100 100 100	17.573 100 100	100 100 100	19.696 100 100	100 100 100	20.000 100 100	100 100 100	20.114 100 100	100 100 100	94.345	Set. DPRD Set. DPRD		
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20,21	21-22	21-22	1.834	23-25	1.900	26-28	2.129	29-30	2.150	30	2.175	30	10.188	Bapppeda		



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capain IKU Persentase capain IKD	86,21 76,27	90,00 80,00	95,00 85,00	1.834	100 90,00	1.900	100 100	2.129	100 100	2.150	100 100	2.175	100 100	10.188	Bapppeda
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan	80	85	90	2.817	100	2.918	100	3.271	100	3.300	100	3.339	100	15.645	Bapppeda
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanaan pembangunan	65	65	70	1.050	75	1.088	80	1.219	85	1.151	90	1.245	90	5.753	Bapppeda
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPd dan KUA-PPAS (%)	85	90	100	153.480	100	159.005	100	178.213	100	180.276	100	181.990	100	852.964	BKAD
				Penetapan APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat waktu 90,11	Tepat waktu 95,00	Tepat waktu 97,00		Tepat waktu 100		Tepat waktu 100		Tepat waktu 100		Tepat waktu 100		Tepat waktu 100		
				Persentase penyaluran belanja daerah	100	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penyampaian laporan tepat waktu	100	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100	100	100		100		100		100		100		100		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	90	95	100	925	100	958	100	1.074	100	1.080	100	1.097	100	5.134	BKAD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	9,94 107,71	10,00 110	12,00 110	924	14,00 110	958	16,00 115	1.074	18,00 115	1.085	20,00 120	1.096	20,00 120	5.137	BKAD
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP Jumlah temuan BPK	3 18	3 15	3 10	776	3+ 5	804	4 3	901	4+ 0	915	5 0	920	5 0	4.316	Inspektorat Daerah
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen risiko	3 0	3 0	4 50	452	4+ 75	468	5 85	524	5 95	530	5 100	535	5 100	2.509	Inspektorat Daerah



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah bernilai SAKIP sempurna Nilai MCP Pencegahan Korupsi	0 n.a	10 80	50 85	452 90	80 91	468 524	85 92	524 95	90 100	530 535	100 95	100 95	2.509	Inspektorat	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari Persentase nagari/desa dengan indeks transparansi dana desa kategori baik	10 0	10 25	40 32	2.316 41	50 49	2.399 2.689	60 57	2.689 65	70 80	2.700 2.746	80 65	80 65	12.850	Dinas PMN	
2	13	06	Program peningkatan kerjasama Desa	Jumlah kerjasama	0	1	5	140	5	145	5	163	5	165	5	166	16	779	
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	30	30	50	2.070	100	2.145	100	2.404	100	2.430	100	2.455	100	11.504	Dinas Kominfo
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94 50	94 50	97 60	2.070 70	100 80	2.145 2.404	100 90	2.404 100	100 90	2.270 100	100 100	2.455 100	100 100	11.342	Dinas Kominfo
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	26	41	56	140	70	145	85	163	95	165	100	166	100	779	Dinas Kominfo



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	26	41	56	140	70	145	85	163	95	165	100	166	100	779	Dinas Kominfo
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah	23	23	38	150	45	155	50	174	55	175	75	178	75	832	Dinas Kominfo
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip statis daerah Persentase peningkatan SDM pengelola arsip	65,60	70,00	75,00	167	85,00	173	95,00	194	100	195	100	198	100	927	Dinas Pusip
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	65,60	70,00	75,00	167	85,00	173	95,00	194	100	195	100	198	100	927	Dinas Pusip
2	24	04	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase pelayanan izin arsip tertutup	0	35	35	20	35	21	35	23	40	22	50	24	50	110	Dinas Pusip
1	3	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung pemerintah sesuai standar	79,45	79,45	82,35	7.558	85,29	7,830	88,24	8.775	91,18	8.286	97,06	8.961	97,06	41.410	Dinas PUPR
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan NSPK	50	50	55	1.630	60	1.689	65	1.893	75	1.910	75	1.933	75	9.055	BKPSDM
5	04	02	Program Pengembangan SDM	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pendidikan menengah /dasar Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan Rasio jabatan fungsional selain guru dan tenaga kesehatan bersertifikat Kompetensi	87,02	87,02	87,5	2.230	88	2.310	88,5	2.589	89	2.600	89,5	2.644	89,5	12.373	BKPSDM



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026					
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
5	04	02	Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	87	87	88	2.230	89	2.310	90	2.589	91	2.445	92	2.644	92	12.219	BKPSDM	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	20	20	20	282	20	292	20	328	20	330	20	335	100	1.567	Kantor Kesbangpol	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	50	60	70	30	80	31	90	35	100	35	100	36	100	167	Kantor Kesbangpol	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75	80	20	339	20	351	20	393	20	400	20	401	100	1.884	Kantor Kesbangpol	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	5	3	0	570	0	590	0	662	0	625	0	676	100	3.123	Kantor Kesbangpol	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar Persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	85	90	95	626	100	649	100	727	100	686	100	742	100	3.430	Kecamatan	
x	xx	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	481.164	100	498.485	100	558.703	100	563.551	100	570.546	100	2.672.449	Seluruh PD	
			Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	n.a	2,51-3,00	3,01-3,50		3,51-4,00		4,01-4,50		4,51-5,00				4,51-5,00			
4	01	04	Program Administrasi Umum	Indeks Inovasi Daerah	1.274	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	Setdakab



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				
Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	50	75	85	1.050	95	1.088	100	1.219	100	1.151	100	1.245	100	5.753	Bapppeda
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase UKPP yang berzona integritas	0	0	25	776	20	804	40	901	66	851	100	920	100	4.251	Inspektorat Daerah
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KK Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	92,93 92,93	95,23 95,23	98,00 98,00	240	100 100	249	100 100	279	100 100	283	100 100	285	100 100	1.336	Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak pada anak usia 0-17 tahun Persentase cakupan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan yang dilaporkan Persentase cakupan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya yang dilaporkan	93,48	95,65	98,00	505	100	523	100	586	100	590	100	599	100	2.803	Dinas Dukcapil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	9	9	15	245	20	254	25	284	30	287	35	291	35	1.361	Dinas Dukcapil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data profil	100	100	100	40	100	41	100	46	100	48	100	50	100	225	Dinas Dukcapil
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pernibitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan Persentase pemenuhan standar pelayanan publik perizinan	8 90	8 95	11 100	347	13 100	360	15 100	403	16 100	405	16 100	412	16 100	1.927	DPMPTSP
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	5	8	10	300	15	311	20	348	25	350	35	356	35	1.665	Dinas Kesehatan



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026					
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Percentase ketercukupan tenaga kesehatan sesuai standar RS Tipe C	10	15	20	300	35	311	50	348	70	350	85	356	85	1.665	RSUD	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Percentase pemenuhan Standar Pelayanan Publik pengujian kendaraan bermotor	85	90	100	8.790	100	9.107	100	10.207	100	9.638	100	10.423	100	48.166	Dinas Perhubungan	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	72,45	75,00	82,00	163	82,00	169	85,00	189	85,00	190	88,00	193	88,00	904	Kecamatan	
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>																				
			Tujuan 2.1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi	Pertumbuhan Ekonomi  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)  Pertumbuhan realisasi investasi (%)	-1,10	2,58	2,92		4,21		4,85		4,96		5,26		5,26			
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Percentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	25	25	25	3.014	30	3.122	35	3.499	40	3.530	45	3.573	45	16.738	Dinas Pertanian	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase peningkatan ketersediaan prasarana pertanian	1	1	1	5.081	1	5.264	1	5.900	1	6.000	1	6.025	1	28.270	Dinas Pertanian	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Percentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	5	5	825	4	855	3	958	2	968	1	978	1	4.584	Dinas Pertanian	



Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase penyuluhan pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	75	75	75	3.426	80	3.550	80	3.978	90	4.000	90	4.062	90	19.016	Dinas Pertanian
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	12	12	15	50,00	18	97,71	21	122,71	24	147,71	27	172,71	105	540,84	Dinas Paperi
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	825	288	855	313	958	338	960	363	979	1.565	4.577	Dinas Paperi
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak	0	5	5	17	5	17	5	19	5	18	5	20	20	92	Dinas Paperi
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10,00	13,00	1.254	15,00	1.299	20,00	1.456	22,00	1.475	25,00	1.487	25,00	6.971	Dinas Parpora
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	1.259	85,19	1.305	86,04	1.462	100	1.481	150	1.493	725	7.000	Dinas Parpora
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	0	1	1	195	2	202	3	226	4	214	5	231	5	1.082	Dinas Parpora
3	26	05	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	0	0	0	0	1	250	2	250	3	300	5	350	5	1.150	Dinas Parpora
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	15	27	37	345	51	357	64	401	82	404	100	409	100	1.916	Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	7,11	10,5	14,5	60	19	62	23	70	27	70	32	71	32	333	Dinas Dagperinkop & UKM
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah IKM yang masuk SIINas	1	15	20	45	30	180	40	180	50	190	60	220	60	848	Dinas Dagperinkop & UKM



Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daeah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	7,2	18,1	27,2	50	45,4	50	63,6	50	81,8	50	100	50	250 Dinas Dagperinkop & UKM
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	1,6	2,1	3,2	85	4,3	88	5,4	99	6,5	100	8,7	101	8,7 473 Dinas Dagperinkop & UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	4,1	4,3	4,5	150	5	155	5,5	174	6	175	6,5	178	6,5 832 Dinas Dagperinkop & UKM
1	5	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk Persentase menurunnya gangguan ketenteraman ketertiban umum	100 0,71	100 0,72	100 0,75	2.420	100 0,90	2.507	100 1	2.810	100 1	2.845	100 1	2.870	100 1 13.452 Dinas Satpol PP & Damkar
2	10	04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	65	65	70	100	75	104	75	116	80	117	80	119	80 556 Dinas PUPR
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang dilaksanakan	50	55	100	680	100	705	100	790	100	800	100	806	5 3.781 Dinas PUPR
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	100	100	100	104	100	116	100	110	100	119	100	125	100 574 Dinas PUPR
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah sesuai ketentuannya	0	65	70	104	100	116	100	110	100	119	100	125	100 574 Dinas PUPR
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha	0	0	0	130	0	134	0	151	0	152	0	154	0 721 DPMPTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN dan PMA	187	187	3	342	3	355	3	397	3	400	3	406	202 1.900 DPMPTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN (Rp Triliun) Realisasi investasi PMA ( US\$ Ribu)	9,02 193,56	10,10 193,56	11,42 197,4 3	465	13,13 201,3 8	482	15,75 207,4 2	540	19,69 217,7 9	545	24,62 233,0 4	552	24,62 233,04 2.584 DPMPTSP



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi Penanaman Modal	0	80	81	119,57	82	300	83	350	84	400	85	450	85	1.689,15	DPMPTSP	
7	01	04	Program Koordinasi Keten-traman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	0	0	88	0	100	0	120	0	150	20	180	0	658	Kecamatan	
3	27	02	Tujuan 2.2 : Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka kemiskinan PDRB per-kapita (Rp Juta)	6,78	6,69	6,56		6,43		6,30		6,00		5,50		5,50			
				Jumlah teknologi pasca panen yang diterapkan pada komoditi pertanian	38,81	40,23	42,03		44,92		47,47		50,46		54,00		54,00		Dinas Pertanian	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas kelompok madya	2	0	1	3.426	2	3.550	3	3.978	4	4.000	5	4.062	5	19.016	Dinas Pertanian	
3	27	08	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian	2	2	3	100	4	100	6	100	7	100	10	100	10	500	Dinas Pertanian	
3	25	05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12	12	12,20		81	12,40	84	12,60	94	12,80	95	12,80	96	62,80	450	Dinas Paperi
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi	Rata-rata omset Koperasi aktif (Rp Juta)	147,37	153,26	158,70		20	166,89	21	174,90	23	183,82	22	192,74	24	192,74	329	Dinas Dagperinkop & UKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	18	25,4	32,7		60	40	62	47	70	54	70	68	71	68	333	Dinas Dagperinkop &
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	41,6	62,5	83,3		100	88,5	104	93,7	116	96,8	117	100	119	100	556	Dinas Dagperinkop & UKM
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	42,11	48,68	55,26		25	61,48	26	68,42	29	75	32	81,57	39	81,57	151	Dinas Dagperinkop & UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset UMKM	4,1	4,3	4,5		150	5	155	5,5	174	6	164	6,5	178	6,5	822	Dinas Dagperinkop & UKM
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana & prasarana perdagangan yang representatif	17,64	21,56	25,48		265	29,4	275	33,32	308	37,28	310	41,16	314	41,16	1.472	Dinas Dagperinkop & UKM
3	30	04	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7	7	7		95	7	98	7	110	7	111	7	113	7	527	Dinas Dagperinkop & UKM



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang & perlengkapan (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku	32,02	18,51	37,02	170	55,54	176	66,64	197	74,05	199	81,45	202	81,45	944 Dinas Dagperinkop & UKM	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	25	30	40	50	45	52	60	58	75	58	85	59	85	277 Dinas Dagperinkop & UKM	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) berkembang	5	5	10	2.316	10	2.399	10	2.689	10	2.539	10	2.746	50	12.690	Dinas PMN
2	07	02	Sasaran 2.2.2 : Menurunnya pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,08	5,00	0	4,86	200	4,74	200	4,58	200	4,00	200	4,00	800 Dinas Nakertrans	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	23,43	23,43	24,00	373	25,00	386	30,00	433	34,00	437	35,00	442	35,00	2.071 Dinas Nakertrans	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	27,40	30,00	31,00	418	32,00	433	33,00	485	34,00	480	35,00	495	35,00	2.311 Dinas Nakertrans	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	100	100	100	155	100	161	100	180	100	180	100	184	100	849 Dinas Nakertrans	
3	32	02	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase dokumen perencanaan kawasan permukiman transmigrasi yang disusun	0	0	20	150	30	250	40	255	40	270	45	350	45	1.275 Dinas Nakertrans	
3	32	04	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun	0	20	20	250	30	270	35	350	40	450	45	500	45	1.820 Dinas Nakertrans	
3	32	05	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	72,48	72,48	73,00	509	75,00	527	80,00	591	85,00	600	90,00	604	90,00	2.831 Dinas Nakertrans	



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2	13	02	Sasaran 2.2.3 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat Program Penataan Desa	Indeks Desa Membangun Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	0,702 16,28	0,727 16,18	0,750 16,00		0,790 15,80		0,800 15,50		0,830 15,30		0,850 15,00		0,850 15,00		Dinas PMN
				Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri Jumlah desa mandiri Persentase Nagari/Desa yang dilaksanakan penataan	1,25 4 10	2 9 10	1 12 40	366	2 15 50	379	2 18 60	425	2 21 70	430	2 24 80	434	2 24 80	2,034	
				Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga Persentase kawasan kumuh yang ditangani	77,03 0	78,00 10	82,00 17,06	299	85,00 17,79	310	90,00 18,53	347	95,00 18,51	350	100 17,07	355	100 88,97	1.661	Dinas Perkim & LH
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	10	15	5	292	5	302	5	339	5	320	5	346	35	1.600	Kecamatan
1	6	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	5	10	25	400	30	414	40	464	50	470	55	474	55	2.222	Dinas Sosial, PPr & PA
1	6	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	9,23 52,73	12,21 54,00	15,00 58,00	405	20,00 63,00	420	25,00 66,00	470	30,00 70,00	475	35,00 75,00	480	35,00 0	2.250	Dinas Sosial, PPr & PA  Dinas Sosial, PPr & PA
1	6	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	75	80	85	325	90	337	100	377	100	380	100	385	100	1.804	Dinas Sosial, PPr & PA



Kode		Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)</b>																
1	1	02	Tujuan 3.1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia  Harapan lama sekolah Rata-rata lama sekolah  Rasio sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah : <ul style="list-style-type: none"><li>• PAUD</li><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Persentase kondisi bangunan sekolah baik : <ul style="list-style-type: none"><li>• PAUD</li><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah terakreditasi <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah yang memenuhi SNP <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah yang menerapkan teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul>	67,74  12,37 8,11  Rasio sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah : <ul style="list-style-type: none"><li>• PAUD</li><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Persentase kondisi bangunan sekolah baik : <ul style="list-style-type: none"><li>• PAUD</li><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah terakreditasi <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah yang memenuhi SNP <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul> Jumlah sekolah yang menerapkan teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"><li>• SD/MI</li><li>• SMP/MTs</li></ul>	68,44  12,82 8,15  31.276  1:23 1:142 1:244  75,5 69,33 73,66  208 54  76 8  5 2	68,79  12,99 8,19  32.402  1:23 1:142 1:200  80 70 75  82,5 75 80  85 80 85  88 85 90  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51	69,39  13,17 8,23  36.316  1:23 1:142 1:200  80 75 80  85 80 85  88 85 90  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51	70,30  13,45 8,62  36.916  1:23 1:142 1:200  85 80 85  88 85 90  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51	71,58  13,83 8,91  37.086  1:23 1:142 1:200  85 80 85  88 85 90  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51	73,64  14,50 9,00  173.996  1:20 1:130 1:150  95 90 95  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51	73,64  14,50 9,00  Dinas Dikbud  1:20 1:130 1:150  95 90 95  95 90 95  95 90 95  90 30  157 14  157 51				



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026					
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
1	1	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum • SD/MI • SMP/MTs Percentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum • SD/MI • SMP/MTs Percentase siswa dengan nilai karakter minimal baik : • SD/MI • SMP/MTs Percentase peningkatan kepemilikan ijazah pendidikan kesetaraan	n.a n.a	20 50	20 65	31.276	32.402	36.316	36.916	37.086	173.996	Dinas Dikbud  Dinas Dikbud	80 85	80 85	80 85	80 85	80 95	80 55
1	1	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase dokumen kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	0	0	100	387,50	100	705,00	100	722,50	100	740	100	757,5	100	3.312,50	Dinas Dikbud	
1	1	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK bersertifikat Profesi Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap rombel	36,67	36,67	40	200	45	207	50	232	55	235	60	237	60	1.111	Dinas Dikbud	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan/ lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikeluarkan izin operasional	0	0	20	142	10	138	10	182	15	235	20	284	75	981	Dinas Dikbud	
			Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	66,21	66,37	66,53		66,69		66,86		67,57		68,00		68,00			



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. Jt		
1	2	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	13.852	100	14.351	100	16.085	100	16.285	100	16.426	100	76.999	Dinas Kesehatan/RSUD	Kesehatan/RSUD
				Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88		95		98		100		100		100		100	
				Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78,00	81,00		85,00		90,00		100		100		100		100	



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
1	2	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	104	100	116	100	117	100	119	100	556	Dinas Kesehatan	
1	2	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83,00	253	88,00	275	93,00	300	98,00	330	100	380	100	1.538	Dinas Kesehatan
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	2,95 0	2,22 53,69	2,22 53,75	801	2,22 53,85	829	2,22 54	930	2,15 54,5	940	2,15 55	949	2,15 55	4.449	Dinas Dalduk & KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,46	73,85	75,24	784	76,63	812	78,02	910	79,41	920	80,8	929	80,8	4.355	Dinas Dalduk & KB
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan kualitas cabang olah raga	33	33	45	963	45	998	50	1.119	50	1.130	50	1.143	50	5.353	Dinas Parpora
			Sasaran 3.1.3 : Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi balita stunting (%)	23,40	20,00	17,00		15,00		14,00		10,00		7,00		7,00		
1	2	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting Cakupan ASI Ekslusif	35,34	40,00	45	13.852	50	14.351	65	16.085	75	15.188	90	16.426	90	75.902	Dinas Kesehatan
1	2	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga Cakupan STBM Persentase balita ditimbang (D/S)	76,57	80,23	83,00	253	88,00	275	93,00	300	98,00	330	100	380	100	1.538	Dinas Kesehatan
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	28,09	30,90	33,71	626	36,52	648	36,52	727	39,33	735	42,13	742	42,13	3.478	Dinas Dalduk & KB



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				
Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
2	9	02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan	15	10	10	500	20	674,85	20	742,34	20	816,50	20	898,15	90	3.131,83	Dinas Paperi
2	9	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	623	82,50	646	82,50	724	84,50	730	84,50	739	84,50	3.462	Dinas Paperi
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	14	14	13	19	12	19	11	22	10	20	10	22	10	102	Dinas Paperi
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu & keamanan pangan	85	85	85	34	85	35	85	40	85	38	85	41	85	187	Dinas Paperi
			Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Pemuda	93,03 n.a	93,10 45,00	93,20 45,30		93,50 46,00		94,00 47,00		94,50 47,50		95,30 48,50		95,30 48,50		
2	8	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,001	0,001	0,001	95	0,002	98	0,002	110	0,003	111	0,005	113	0,005	527	Dinas Sosial, PPr & PA
2	8	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	0,3	0,3	0,2	75	0,2	80	0,15	85	0,12	90	0,10	95	0,10	425	Dinas Sosial, PPr & PA
2	8	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100	100	100	100	100	150	100	175	100	200	100	225	100	850	Dinas Sosial, PPr & PA
2	8	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100	100	100	52	100	54	100	60	100	57	100	62	100	285	Dinas Sosial, PPr & PA
2	8	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	215	100	223	100	250	100	252	100	255	100	1.195	Dinas Sosial, PPr & PA
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11,75	13,75	15,75	853	17,75	884	20,00	990	30,00	1.000	40,00	1.011	40,00	4.738	Dinas Parpora
2	19	04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kepramukaan	75	80	90	315	95	331	100	347	100	365	100	383	100	1.741	Dinas Parpora



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2	8	02	Tujuan 3.2 : Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Percentase warisan budaya yang dimanfaatkan Tingkat penurunan sengketa adat (%) Percentase kelembagaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	n.a 59,93 n.a 9,31 21 75	35,00 59,97 8,00 13,80 18 80	40,00 60,00 9,00 18,00 16 85		45,00 61,00 11,00 22,60 13 95		50,00 63,00 12,00 27,85 10 90		55,00 64,00 13,00 36,20 7 110		60,00 65,00 15,00 42,40 5 100		60,00 65,00 15,00 42,40 5 113		521 Dinas Sosial, PPr & PA
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Percentase peningkatan jumlah layanan perpustakaan elektronik	1:16 1:478 0	1:16 1:450 1	1:15 1:425 2	544	1:14 1:400 3	564 1:380 4	1:13 1:340 5	632 1:315 6	1:12 1:315 6	640 1:315 6	1:12 1:315 6	645 1:315 6	1:12 1:315 6	3.035 Dinas Pusip Dinas Pusip	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Percentase peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Percentase naskah kuno yang dialih aksara atau alih bahasa	5 79,16	5 83,33	6 87,5	51 91,66	7 95,83	52 100	8 100	59 100	8 100	59 100	8 100	60 100	8 100	281 Dinas Pusip Dinas Pusip	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Percentase warisan budaya yang dikelola	82,58	82,58	85,58	792	88,58	821	91,59	920	94,59	925	97,59	939	97,59	4.397 Dinas Dikbud	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga seni budaya yang dikembangkan	4	4	6	100	8	104	10	116	12	117	12	119	12	556 Dinas Dikbud	



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang didokumentasikan	50	50	55	100	60	104	65	116	70	117	75	119	75	556	Dinas Dikbud
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	786	343	814	344	913	345	920	346	932	346	4.365	Dinas Dikbud
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan fasilitasi lambaga keagamaan dan kemasyarakatan	10	13	15	3.150	18	3.263	20	3.658	23	3.454	25	3.735	25	17.260	Setdakab
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat penurunan sengketa adat Persentase lembaga kemasyarakatan nagari yang aktif	21	18	16	1.366	13	1.415	10	1.586	7	1.600	5	1.620	5	7.587	Dinas PMN
1	6	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100	100	100	35	100	36	100	41	100	38	100	42	100	192	Dinas Sosial, PPr & PA
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya Persentase penurunan penyalahgunaan narkotika	5	3	0	570	0	590	0	662	0	670	0	676	100	3.168	Kantor Kesbangpol
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penurunan potensi konflik	2	0	0	552	0	572	0	641	0	650	20	680	0	3.115	Kecamatan
1	3	06	Tujuan 4.1 : Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Indeks Infrastruktur	59,38	62,54	66,99		75,54		85,00		88,30		91,00		91,00		
				Indeks infrastruktur jalan Rasio Elektrifikasi Rasio layanan broadband 4G LTE Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	59,38 61,22 48,00	62,54 65,00 50,00	64,75 68,00 55,00		72,38 72,00 60,00		85,00 75,00 65,00		89,00 78,00 70,00		91,00 80,00 75,00		91,00 80,00 75,00		Dinas PUPR
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	66,54	68,21	69,89	39.431	71,57	40.850	73,25	45.785	74,93	46.232	76,61	46.756	76,61	219.054	Dinas PUPR



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026				
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruktси	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	14,05	16,55	19,05	1.000	21,55	1.036	24,05	1.161	26,55	1.175	29,05	1.186	29,05	5.558	Dinas PUPR
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian ruang	66,54	68,5	70	1.600	71	1.658	72	1.858	73	1.870	74	1.897	74	8.883	Dinas PUPR
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan mantap yang terpenuhi prasarana jalan sesuai standar Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas Persentase peningkatan angkutan orang dan barang laik jalan	16,44	20,00	24,00	8.790	28,00	9.107	32	10.207	36	10.338	40,00	10.423	40,00	48.865	Dinas Perhubungan
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Elektrifikasi Rasio layanan 4G LTE	61,22 48,00	65,00 50,00	68,00 55,00	700	72,00 60,00	725	75,00 65,00	813	78,00 70,00	825	80,00 75,00	830	80,00 75,00	3.893	Setdakab
			Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	Cakupan layanan irigasi (%) Cakupan layanan air bersih (%) Cakupan sanitasi yang layak (%)	41,87 69,11	45,00 72,00	50,00 75,00		55,00 90,00		65,00 100		75,00 100		85,00 100		85,00 100		
1	3	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi (%) Indeks Kinerja Sistem Irigasi	41,87 57	45,00 59	50,00 61	19.821	55,00 63	20.534	65,00 65	23.015	75,00 66	23.332	85,00 66	23.503	85,00 66	110.205	Dinas PUPR
1	3	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum	69,11	72,00	75,00	674	90,00	698	100	783	100	788	100	799	100	3.742	Dinas PUPR
1	3	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	72,11	75,00	80,00	128	90,00	132	100	148	100	150	100	152	100	710	Dinas PUPR
1	03	07	Program pengembangan permukiman	Persentase pemukiman yang dikembangkan	75	80	20	220	20	227	20	255	20	241	20	260	100	1.203	Dinas PUPR
1	4	04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,33	90,00	95,00	45	100	47	100	52	100	52	100	53	100	249	Dinas Perkim & LH
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas lahan sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani (ha)	5.400	5.400	6.000	5.081	6.600	5.264	7.200	5.900	7.800	6.000	8.400	6.025	8.400	28.270	Dinas Pertanian



Kode	Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan</b>																			
		Tujuan 4.2 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,06	70,40	70,79		71,18		71,87		72,01		73,04		73,04			
2	11	02	Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan lahan	50,00 89,05 64,46	52,60 89,35 65,90	52,70 89,45 67,33		52,80 89,55 68,77		52,90 89,65 70,20		53,20 90,00 70,50		53,80 90,20 71,00		53,80 90,20 71,00		
2	11	03	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Penemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	50,00 89,05 64,46	52,60 89,35 65,90	52,70 89,45 67,33	208	52,80 89,55 68,77	215	52,90 89,65 70,20	241	53,20 90,00 70,50	244	53,80 90,20 71,00	247	53,80 90,20 71,00	1.155	Dinas Perkim & LH
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati	60	65	70	826	80	855	90	959	100	965	100	978	100	4.583	Dinas Perkim & LH
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	n.a	10	10	11	20	11	30	13	40	12	50	13	50	59	Dinas Perkim & LH
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketetaan jenis usaha dan kegiatan lainnya terhadap izin lingkungan	100	100	100	30	100	31	100	35	100	33	100	36	100	166	Dinas Perkim & LH
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kawasan hutan yang dilestarikan berbasis masyarakat	20	25	30	124	30	129	35	145	40	146	50	148	50	692	Dinas Perkim & LH
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan prestasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	5	5	5	75	5	77	5	86	5	87	5	88	25	413	Dinas Perkim & LH
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	15,65	17,00	20,00	2.438	23,00	2.526	30,00	2.831	40,00	2.850	50,00	2.891	50,00	13.536	Dinas Perkim & LH



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	30,22	32,50	35,00		38,00		40,00		45,00		50,00		50,00		Dinas Perkim & LH
1	03	09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase sarana publik (RTH) yang tersedia	10	20	30	4.473	50	4.634	60	5.193	65	5.250	70	5.303	70	24.853	Dinas PUPR
			Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	Indeks risiko bencana	107,2	106,0	102,0		100,0		98,0		95,0		92,0		92,0		
1	5	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana  Jumlah Nagari/Destana Minimal Destana Madya	30	35	45	1.420	55	1.471	65	1.649	75	1.657	85	1.684	85	7.881	BPBD
					20	20	25		25		30		30		30		30		
					60	75	80	1.420	90	1.471	100	1.649	100	1.557	100	1.684	100	7.781	BPBD
					2	12	10	1.420	10	1.471	10	1.649	10	1.557	10	1.684	62	7.781	BPBD
1	5	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap penanggangan kebakaran (menit)  Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	15	15	15	2.585	15	2.678	15	3.002	13	3.030	12	3.065	12	14.360	Dinas Satpol PP & Damkar
					100	100	100	2.585	100	2.678	100	2.678	100	2.834	100	3.065	100	14.164	Dinas Satpol PP & Damkar
1	4	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	0	50	65	440	75	456	85	511	95	517	100	522	100	2.466	Dinas Perkim & LH
1	6	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	390	100	404	100	453	100	458	100	462	100	2.167	Dinas Sosial, PPr & PA



Kode			Misi/Tujuan/Saaran/ Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT • Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan	95 90 80	95 90 80	350		363		406		410		415		1.944	Dinas Pertanian

\*Tahun 2021 bersifat prognosis



Program pembangunan daerah, disamping sebagai media untuk pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan SPM, juga menjadi media dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterkaitan indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap program pembangunan daerah Tahun 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.13**  
**Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Program Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2022-2026**

No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penataan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Perkim & LH Dinas Sosial, PPr & PA Dinas Sosial, PPr & PA Dinas Sosial, PPr & PA Dinas PMN Kecamatan
2	1	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	1	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakertrans
4	1	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, PPr & PA
5	1	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, PPr & PA
6	1	1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	1	1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	1	1.4.1 (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
9	1	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
10	1	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
11	1	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
12	1	1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
13	1	1.4.1 (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
14	1	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utama listrik baik dari PLN dan non PLN.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
15	1	1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
16	1	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17	1	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1. Program Penanggangan Bencana	Dinas Sosial, PPr & PA
			2. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim & LH
			3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
18	1	1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, PPr & PA
19	1	1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMA= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana).	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
20	1	1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
21	1	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
22	1	1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	1	1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, PPr & PA
24	1	1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
25	2	2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Paperi
			2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Paperi
			3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Paperi
26	2	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB
27	2	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Paperi
28	2	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
29	2	2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
30	2	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB
31	2	2.2.2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
32	2	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
33	2	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
34	2	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Paperi



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
35	2	2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
36	3	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
37	3	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38	3	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
39	3	3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
40	3	3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
41	3	3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
42	3	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
43	3	3.1.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
44	3	3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
45	3	3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
46	3	3.3.3 (a) Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
47	3	3.3.4 (a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 37)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
48	3	3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
49	3	3.3.5 (a) Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
50	3	3.3.5 (b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
51	3	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
52	3	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
53	3	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
54	3	3.4.2 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
55	3	3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menye-lenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
56	3	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
57	3	3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
58	3	3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
59	3	3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
60	3	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
61	3	3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
62	3	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
63	3	3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
64	3	3.8.2 (a) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
65	3	3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
66	3	3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
67	3	3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
68	3	3.b.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
69	3	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
70	4	4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
71	4	4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
72	4	4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
73	4	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
74	4	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
75	4	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
76	4	4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
77	2	3.3.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
78	4	4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
79	4	4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
80	4	4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
81	4	4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Dikbud
82	4	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Dikbud
83	5	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
84	5	5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial, PPr & PA
85	5	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
86	5	5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial, PPr & PA
87	5	5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
88	5	5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB
89	5	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB
90	5	5.3.1 (a) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
91	5	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
92	5	5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
93	5	5.6.1 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
94	5	5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
95	5	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Dalduk & KB
96	5	5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
97	6	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
98	6	6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
99	6	6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
100	6	6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
101	6	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
102	6	6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
103	6	6.2.1 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation (d) Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
104	6	6.2.1 Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
105	6	6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
106	6	6.3.1 (a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
107	6	6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
108	6	6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
109	6	6.4.1 (a) Inisiatif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Perkim & LH
110	6	6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Perkim & LH
111	6	6.5.1 (c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
112	6	6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Perkim & LH
113	6	6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Perkim & LH
114	8	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
			4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengelolaan Perikanan tangkap 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian Dinas Paperi
			7. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Paperi
			8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Parpora
			9. Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Parpora
			10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
			11. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Parpora
			12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Dagperinkop
			13. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Dinas Dagperinkop & UKM
			14. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Dagperinkop & UKM
			15. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Dagperinkop & UKM



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
114	8	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.	16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 17. Program Pengembangan UMKM 18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 19. Program Promosi Penanaman Modal 20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 21. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 22. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM Dinas PMPTSP Dinas PMPTSP Dinas PMPTSP Dinas PMPTSP Dinas PUPR
115	8	8.1.1 PDB per kapita. (a)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyuluhan Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi 6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 8. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi 9. Program Pengembangan UMKM 10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 11. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentiing 12. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 14. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Paperi Dinas Dagperinkop & UKM Dinas PMN
116	8	8.2.1 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
117	8	8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
118	8	8.3.1 (a) Persentase tenaga kerja formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
119	8	8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
120	8	8.3.1 (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Dagperinkop & UKM
121	8	8.3.1 (a) Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakertrans



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
122	8	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial 5. Perencanaan Kawasan Transmigrasi 6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans
123	8	8.5.2 Tingkat setengah pengangguran. (a)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
124	8	8.5.2 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
125	8	8.9.1 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Parpora Dinas Parpora
126	8	8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Parpora
127	8	8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Parpora
128	8	8.9.1 (c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Parpora
129	8	8.9.1 (d) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
130	8	8,10.1 Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
131	8	8,10.1 (a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
132	8	8,10.1 (b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Dagperinkop & UKM
133	9	9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM
134	9	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM Dinas Dagperinkop & UKM
135	9	9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans
136	9	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Dinas Dagperinkop & UKM
137	9	9.3.2 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Dinas Dagperinkop & UKM
138	9	9.5.1 Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapppeda
139	9	9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
140	9	9.c.1 (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
141	9	9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
142	10	10.1.1 Koefisien Gini.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo
143	10	10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penataan Desa	Dinas Perkim & LH Dinas Sosial, PPr & PA Dinas Sosial, PPr & PA Dinas Sosial, PPr & PA Dinas PMN
144	10	10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri.	1. Program Penataan Desa 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas PMN Kecamatan
145	10	10.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, PPr & PA
146	10	10.3.1 Indeks Kebebasan Sipil. (a)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kantor Kesbangpol
147	10	10.3.1 (d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setdakab
148	10	10.4.1 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. (b)	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakertrans
149	11	11.1.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (a)	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim & LH
150	11	11.3.2 Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. (b)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
151	11	11.2.1 Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. (a)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
152	11	11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
153	11	11.5.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). (a)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
154	11	11.5.1 (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
155	11	11.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. (a)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
156	11	11.6.1 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. (a)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perkim & LH
157	11	11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
158	12	12.4.2 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (a)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Perkim & LH
159	12	12.5.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (a)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perkim & LH
160	12	12.6.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. (a)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Perkim & LH
161	12	12.7.1 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. (a)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Perkim & LH
162	12	12.8.1 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. (a)	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas PUPR



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
163	13	13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
164	13	13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
165	15	15.1.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. (a)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Perkim & LH
166	15	15.1.1 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. (b)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Perkim & LH
167	15	15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
168	15	15.9.1 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. (a)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perkim & LH
169	16	16.1.1 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (a)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP & Damkar
170	16	16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. (a)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP & Damkar
171	16	16.1.3 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (a)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP & Damkar
172	16	16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP & Damkar
173	16	16.2.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. (a)	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PPr & PA
174	16	16.2.1 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (b)	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PPr & PA
175	16	16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (a)	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PPr & PA
176	16	16.5.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). (a)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
177	16	16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
178	16	16.6.1 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupa-ten/Kota).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
179	16	16.6.1 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). (b)	1. Program Administrasi Umum 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 5. Program Aplikasi Informatika	Setdakab Bapppeda  Bapppeda Inspektorat Daerah Dinas Kominfo
180	16	16.6.1 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (c)	Program Ekonomi dan Pembangunan	Setdakab
181	16	16.6.1 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). (d)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Bapppeda
182	16	16.6.2 Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal ; Indeks kepatuhan pelayanan publik (a)	Program Administrasi Umum	Setdakab
183	16	16.7.1 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (a)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
184	16	16.7.1 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). (b)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PPr & PA
185	16	16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
186	16	16.9.1 Persentase kepemilikan akta lahir untuk (a) penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
187	16	16.9.1 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (b)	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
188	16	16.10.1 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
189	16	16.b.1 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (a)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setdakab
190	17	17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKAD
191	17	17.1.1 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. (a)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKAD
192	17	17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
193	17	17.6.2 Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. (b)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
194	17	17.6.2 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (c)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
195	17	17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setdakab
196	17	17.17.1 Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (a)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
197	17	17.17.1 Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (b)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
198	17	17.18.1 Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target. (d)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapppeda
199	17	17.19.2 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) (b)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
200	17	17.19.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. (c)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo

Berdasarkan jumlah indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator. Namun Kabupaten Sijunjung memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan TPB sebanyak 200 indikator tahun 2022-2026. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung dan tidak sesuai dengan kewenangannya, yaitu;

1. Kualitas air danau.
2. Bauran energi terbarukan.
3. Intensitas energi primer.
4. Panjang pembangunan jalan tol.
5. Panjang jalur kereta api.
6. Jumlah dermaga penyeberangan.
7. Jumlah pelabuhan strategis.
8. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
9. Jumlah desa tertinggal.
10. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
11. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal



12. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
13. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
14. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
15. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
16. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
17. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
18. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
19. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
20. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)



# BAB



7

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Dalam perencanaan kinerja, program Perangkat Daerah seyogianya berkorelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, juga memperhatikan peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja langsung. Selain itu, amanatkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah dan penguatan kelembagaan Aparatur Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah serta alokasi belanja operasional nagari/desa sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. Kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Penentuan kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan RPJMD seyogianya menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021-2026 (Rp Juta)**

<b>Uraian</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.Pendapatan	<b>982.676</b>	<b>750.991</b>	<b>826.090</b>	<b>853.457</b>	<b>883.561</b>	<b>971.917</b>
2.Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	57.577	57.577	63.453	73.019	57.577	57.577
<b>Total Penerimaan</b>	1.040.253	808.568	889.543	926.476	941.138	1.029.494
Dikurangi :						
4.Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	408.940	429.387	450.856	473.399	497.069	521.922
5.Pengeluaran pembiayaan	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah</b>	<b>627.313</b>	<b>363.181</b>	<b>434.687</b>	<b>449.077</b>	<b>440.069</b>	<b>491.571</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program dan kegiatan pembangunan. Namun merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah merupakan belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan dan lain-lain), Bantuan Sosial dan belanja hibah termasuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan.

Sehubungan hal tersebut, maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020. Oleh sebab itu, kerangka pendaanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merujuk kepada proyeksi belanja daerah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 7.2**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (Rp Juta)**

Uraian	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>775.954</b>	<b>612.465</b>	<b>686.998</b>	<b>721.053</b>	<b>691.974</b>	<b>713.079</b>
Belanja Pegawai	501.465	501.465	551.612	557.128	577.456	589.005
Belanja Barang dan Jasa	215.146	95.146	104.963	105.459	99.005	108.510
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	58.956	15.000	30.000	58.000	15.000	15.000
Belanja Bantuan Sosial	385	385	424	466	512	564
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>134.472</b>	<b>54.471</b>	<b>59.918</b>	<b>61.910</b>	<b>80.700</b>	<b>119.505</b>
Belanja Tanah	467	467	514	565	622	684
Belanja Peralatan dan Mesin	37.927	17.927	19.720	19.692	29.661	42.627
Belanja Bangunan dan Gedung	38.405	18.405	20.246	20.270	26.896	39.961
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.605	17.605	19.366	21.302	23.432	36.135
Belanja Aset Tetap Lainnya	67	67	74	81	89	98
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>7.251</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>
Belanja Tak Terduga	6.592	6.592	7.251	5.000	5.500	6.050
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>119.234</b>	<b>119.234</b>	<b>131.375</b>	<b>144.513</b>	<b>158.964</b>	<b>174.861</b>
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Nagari/Desa	117.239	119.234	128.963	144.513	156.045	171.650
Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1.995	1.995	2.413	2.654	2.919	3.211
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.036.253</b>	<b>854.774</b>	<b>885.543</b>	<b>922.476</b>	<b>937.138</b>	<b>1.013.494</b>

\*) Prognosa

Rekapitulasi rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan dan dilengkapi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab, diuraikan pada matrik berikut ini.



**Tabel 7.3**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
1	1 01	02	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah : • PAUD • SD/MI • SMP/MTs	1:23 1:142 1:244	1:23 1:142 1:244	1:23 1:142 1:200	31.276 32.402 36.316	1:23 1:130 1:200	1:23 1:130 1:150	36.916 1:20 1:130	37.086 1:20 1:130	173.996	Dinas Pendidikan & Kebudayaan				
					Persentase kondisi bangunan sekolah baik • PAUD • SD/MI • SMP/MTs	75,5 69,33 73,66	75,5 69,33 73,66	80 70 75	82,5 75 80	85 80 85	88 85 90	95 90 95	95 90 95						
					Jumlah sekolah terakreditasi • SD/MI • SMP/MTs	33 208 54	35 208 54	43 208 54	48 209 54	48 209 54	48 209 54	48 209 54	48 209 54	48 209 54	48 209 54				
					Jumlah sekolah yang memenuhi SNP • SD/MI • SMP/MTs	76 8	76 10	80 15	82 17	85 20	89 24	90 30	90 30	90 30	90 30				
					Jumlah sekolah yang menerapkan teknologi informasi • SD/MI • SMP/MTs	5 2	37 4	67 5	97 7	117 9	127 12	157 14	157 14	157 14	157 14				
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum • SD/MI • SMP/MTs	n.a n.a	20 50	20 65	35 75	50 80	65 85	80 85	80 85	80 85	80 85				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
1   01   02	Program Pengelolaan Pendidikan	<p>Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD/MI</li> <li>• SMP/MTs</li> </ul> <p>Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD/MI</li> <li>• SMP/MTs</li> </ul> <p>Persentase peningkatan kepemilikan ijazah pendidikan kesetaraan</p>	n.a n.a	20 50	20 65	31.276	35 75	32.402	50 80	36.316	65 85	36.916	80 85	37.086	80 85	173.996	Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
1   01   03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase dokumen kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	0	0	100	387,50	100	705,00	100	722,50	100	740	100	757,5	100	3.312,50			
1   01   04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK bersertifikat Profesi	36,67	36,67	40	200	45	207	50	232	55	235	60	237	60	1.111			
		Rasio guru terhadap murid : Rasio guru terhadap rombel	1:12 '1:2	1:12 '1:2	1:15 '1:1		1:15 1:1		1:15 1:1		1:22 1:1		1:29 1:1		1:29 1:1				
1   01   05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikeluarkan izin operasional	0	0	20	142	10	138	10	182	15	235	20	284	75	981			
1   02   02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	13.852	100	14.351	100	16.085	100	16.285	100	16.426	100	76.999	Dinas Kesehatan/ RSUD		
		Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100				
		Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100				
		Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100		100		100		100		100		100				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	13.852	100	14.351	100	16.085	100	16.285	100	16.426	100	76.999	Dinas Kesehatan/ RSUD
		Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88		95		98		100		100		100		
1	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78,00	81,00		85,00		90,00		100		100		100		
		Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	16,13	18,00	22,00		25,00		28,00		30,00		35,00		35,00		
		Persentase balita wasting	35,34	40,00	45		50		65		75		90		90		
		Cakupan ASI Ekslusif	85	88	90		95		100		100		100		100		
1	02	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	5	8	10	300	15	311	20	348	25	350	35	356	35	1.665	
		Persentase ketercukupan tenaga kesehatan sesuai standar RS Tipe C	10	15	20		35		50		70		85		85		



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	104	100	116	100	117	100	119	100	556	Dinas Kesehatan/ RSUD		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif Cakupan PHBS Rumah Tangga Cakupan STBM Persentase balita ditimbang (D/S)	76,57	80,23	83,00	253	88,00	275	93,00	300	98,00	330	100	380	100	1.538			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																Dinas PUPR		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	41,87 57	45,00 59	50,00 61	19.821	55,00 63	20.534	65,00 65	23.015	75,00 66	23.332	85,00 66	23.503	85,00 66	110.205			
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum (%)	69,11	72,00	75,00	674	90,00	698	100	783	100	788	100	799	100	3.742			
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak (%)	72,11	75,00	80,00	128	90,00	132	100	148	100	150	100	152	100	710			
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,79	3	10	154	15	159	25	178	35	180	40	182	40	853			
1	03	07	Program pengembangan pemukiman	Persentase pemukiman yang dikembangkan	75	80	20	220	20	227	20	255	20	258	20	260	100	1.203			
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah sesuai standar	79,45	79,45	82,35	7.558	85,29	7,830	88,24	8.775	91,18	8.286	97,06	8.961	97,06	41.410			
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase sarana publik (RTH) yang tersedia	10	20	30	4.473	50	4.634	60	5.193	65	5.250	70	5.303	70	24.853			
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	66,54	68,21	69,89	39.431	71,57	40.850	73,25	45.785	74,93	46.232	76,61	46.756	76,61	219.054			
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	14,05	16,55	19,05	1.000	21,55	1.036	24,05	1.161	26,55	1.175	29,05	1.186	29,05	5.558			



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2022		2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt					
1	03	12	Program Penyelenggaraan Peningkatan Ruang	Persentase kesesuaian ruang	66,51	68,5	70	1.600	71	1.658	72	1.858	73	1.870	74	1.897	74	8.883	Dinas PUPR				
1	04	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		Program Pengembangan Perumahan		Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	0	50	65	440	75	456	85	511	95	517	100	522	100	2.466	Diinas Perkim & LH	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman		Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga		77,03	78,00	82,00	299	85,00	310	90,00	347	95,00	350	100	355	100	1.661	Dinas Perkim & LH		
1	04	04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		85,33	90,00	95,00	45	100	47	100	52	100	52	100	53	100	249			
1	05	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	100	100	100	2.420	100	2.507	100	2.810	100	2.845	100	2.870	100	13.452	Dinas Satpol PP & Damkar	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana		Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1.000 penduduk		0,71	0,72	0,75		0,90		1		1		1		1				
1	05	03			Persentase menurunnya gangguan ketentraman ketertiban umum		2	2	1		1		1		1		0		0				
1	05	03			Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		30	35	45	1.420	55	1.471	65	1.649	75	1.657	85	1.684	85	7.881			
1	05	03			Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		13	12	10		8		6		4		3		3				
1	05	03			Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana		60	75	80		90		100		100		100		100				
1	05	03			Jumlah Nagari/Desa Tangguh Bencana (Destana) minimal klasifikasi madya		2	12	10		10		10		10		10		62				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2022		2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt					
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran (menit)	15	15	15	2.585	15	2.678	15	3.002	13	3.030	12	3.065	12	14.360	Dinas Satpol PP Damkar				
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	100	100	100	2.585	100	2.678	100	3.002	100	2.834	100	3.065	100	14.164	Dinas Satpol PP Damkar				
1	06	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	5	10	25	400	30	414	40	464	50	470	55	474	55	2.222	Dinas Sosial, Ppr & PA		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,23	12,21	15,00	405	20,00	420	25,00	470	30,00	475	35,00	480	35,00	2.250		
							Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	52,73	54,00	58,00		63,00		66,00		70,00		75,00		75,00			
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Program Penanganan Bencana	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemukatihan DTKS	75	80	85	325	90	337	100	377	100	380	100	385	100	1.804			
1	06	06					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	390	100	404	100	453	100	458	100	462	100	2.167		
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100	100	100	35	100	36	100	41	100	41	100	42	100	195			
2	07	02					Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	0	0	0	0	0	40	200	50	200	55	200	60	200	60	800	Dinas Nakertras



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
2   07   03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,43	23,43	24,00	373	25,00	386	30,00	433	34,00	437	35,00	442	35,00	2.071	Dinas Nakertras		
2   07   04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	27,40	30,00	31,00	418	32,00	433	33,00	485	34,00	480	35,00	495	35,00	2.311			
2   07   05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	100	100	100	155	100	161	100	180	100	180	100	184	100	849			
<b>2   08   02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																Dinas Sosial, Ppr & PA		
2   08   02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,001	0,001	0,001	95	0,002	98	0,002	110	0,003	111	0,005	113	0,005	527			
2   08   03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	0,3	0,3	0,2	75	0,2	80	0,15	85	0,12	90	0,10	95	0,10	425			
2   08   05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100	100	100	100	100	150	100	175	100	200	100	225	100	850			
2   08   06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100	100	100	52	100	54	100	60	100	61	100	62	100	289			
2   08   07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	215	100	223	100	250	100	252	100	255	100	1.195			
<b>2   09   02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>																Dinas Pangan & Perikanan		
2   09   02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15	10	10	500	20	674,85	20	742,34	20	816,50	20	898,15	90	3.131,83			
2   09   03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	623	82,50	646	82,50	724	84,50	730	84,50	739	84,50	3.462			
2   09   04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	14	14	13	19	12	19	11	22	10	22	10	22	10	104			
2   09   05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85	85	85	834	85	35	85	40	85	40	85	41	85	189			



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
2   10   04	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelempaganraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	65	65	70	100	75	104	75	116	80	117	80	119	80	556	Dinas PUPR
2   10   05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang dilaksanakan	50	55	100	680	100	705	100	790	100	800	100	806	5	3.781	
2   10   07	Program penetapan tanah ulayat	Program penetapan tanah ulayat	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	100	100	100	104	100	116	100	110	100	119	100	125	100	574	
2   10   10	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuannya	0	65	70	104	75	116	80	110	85	119	90	125	90	574	
2   11   02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	50	55	65	338	70	350	75	392	80	370	85	400	85	1.850	Dinas Perkim & LH
2   11   03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan lahan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan lahan	50,00 89,05 64,46	52,60 89,35 65,90	52,70 89,45 67,33	208	52,80 89,55 68,77	215	52,90 89,65 70,20	241	53,20 90,00 70,50	244	53,80 90,20 71,00	247	53,80 90,20 71,00	1.155	
2   11   04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati	60	65	70	826	80	855	90	959	100	965	100	978	100	4.583	
2   11   05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	n.a	10	10	11	20	11	30	13	40	13	50	13	50	60	
2   11   06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketetapan jenis usaha dan kegiatan lainnya terhadap izin lingkungan	100	100	100	30	100	31	100	35	100	35	100	36	100	168	
2   11   08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kawasan hutan yang dilestarikan berbasis masyarakat	20	25	30	124	30	129	35	145	40	146	50	148	50	692	
2   11   09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan prestasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	5	5	5	75	5	77	5	86	5	87	5	88	25	413	



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
2   11   11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	15,65 30,22	17,00 32,50	20,00 35,00	2.438	23,00 38,00	2.526	30,00 40,00	2.831	40,00 45,00	2.850	50,00 50,00	2.891	50,00 50,00	13.536	Dinas Perkim & LH
2   12	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															Dinas Dukcapil	
2   12   02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KK Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	92,93 92,93	97,5 94,00	98,00 95,00	240	100 96,00	249	100 98,00	279	100 100	283	100 100	285	100 100	1.336	
		Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	30	35	40		45		50		55		60		60		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan yang dilaporkan Persentase cakupan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya yang dilaporkan	93,48 93,48 10 0	95,65 95,65 15 0	98,00 98,00 25 5	505	100 100 30 10	523	100 100 35 15	586	100 100 40 20	590	100 100 50 25	599	100 100 50 25	2.803	
2   12   04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	9	9	15	245	20	254	25	284	30	287	35	291	35	1.361	
2   12   05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data profil	100	100	100	40	100	41	100	46	100	48	100	50	100	225	
2   13	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																
2   13   02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri Jumlah desa mandiri Persentase Nagari/Desa yang dilaksanakan penataan	1,25 9 10	2 18 10	2 18 40	366	2 36 50	379	2 62 60	425	2 62 70	430	2 62 80	434	2 62 80	2.034	Dinas PMN



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt
2   13   04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari Persentase nagari/desa dengan indeks transparansi dana desa kategori baik Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) berkembang	10   10	10   25	40   2.316	50   2.399	60   2.689	70   2.700	80   2.746	80   12.850	Dinas PMN					
2   13   05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat penurunan sengketa adat Persentase lembaga kemasyarakatan nagari yang aktif	21   18	16   20	1.366   1.415	1.415   1.586	1.586   1.600	1.600   1.620	1.620   5	5   7.587						
2   13   06	Program peningkatan kerjasama Desa	Jumlah kerjasama	0   0	1   1	5   5	140   145	145   163	163   165	165   166	16   779						
<b>2   14  </b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>															
2   14   02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	2,95   0	2,22   53,69	2,22   53,75	801   53,85	829   54	930   54,5	940   55	949   55	2,15   55	4,449   55	Dinas Dalduk & KB			
2   14   03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,46   12,03	73,85   12,00	75,24   11,76	784   11,52	812   11,28	910   11	920   10,08	929   10,08	80,8   22	4.355   22				
2   14   04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	28,09   20,31	30,90   20,31	33,71   20,5	626   20,75	648   21	727   21,75	735   22	742   22	42,13   3.478					



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
2	15	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>																	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan mantap yang terpenuhi prasarana jalan sesuai standar Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas Persentase peningkatan angkutan orang dan barang laik jalan Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Publik pengujian kendaraan bermotor	16,44 10 75 85	20,00 9 80 90	24,00 8 85 100	8.790 7 8.790 100	28,00 5 90 100	9.107 100 9.107 100	32,00 100 100 100	10.207 100 10.207 100	36,00 4 100 100	10.338 3 9.638 100	40,00 3 100 100	10.423 100 10.423 100	40,00 3 100 100	48.865 48.166	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	
2	16	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	30	30	50	1.570	60	1.627	70	1.823	90	1.840	100	1.862	100	8.722	Dinas Kominfo
2	16	03	Program Aplikasi Informatika		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94 50	94 50	97 60	2.070	100	2.145	100	2.404	100	2.430	100	2.455	100	11.504	
2	17		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																	
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	7,2	18,1	27,2	50	45,4	50	63,6	50	81,8	50	100	50	100	250	Dinas Dagperinkop & UKM	
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi	Rata-rata omset Koperasi aktif (Rp Juta)	147,37	153,26	158,70	20	166,89	21	174,90	23	183,82	23	192,74	24	192,74	329		
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	18	25,4	32,7	60	40	62	47	70	54	70	68	71	68	333		



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	41,6	62,5	83,3	100	88,5	104	93,7	116	96,8	117	100	119	100	556	Dinas Dagperinkop & UKM		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	42,11	48,68	55,26	25	61,48	26	68,42	29	75	32	81,57	39	81,57	151			
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	1,6	2,1	3,2	85	4,3	88	5,4	99	6,5	100	8,7	101	8,7	473			
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	4,1	4,3	4,5	150	5	155	5,5	174	6	175	6,5	178	6,5	832			
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>																		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha	0	0	0	130	0	134	0	151	0	152	0	154	0	721	Dinas PMPTSP		
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN dan PMA	187	187	3	342	3	355	3	397	3	400	3	406	202	1.900			
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penerbitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan Persentase pemenuhan standar pelayanan publik perizinan	8	8	11	347	13	360	15	403	16	405	16	412	16	1.927			
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN (Rp Triliun) Realisasi investasi PMA ( US\$ Ribu)	9,02	10,10	11,42	465	13,13	482	15,75	540	19,69	545	24,62	552	24,62	2.584			
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>																		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11,75	13,75	15,75	853	17,75	884	20,00	990	30,00	1.000	40,00	1.011	40,00	4.738	Dinas Parpora		
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan kualitas cabang olah raga	33	33	45	963	45	998	50	1.119	50	1.130	50	1.143	50	5.353			
2	19	04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kepramukaan	75	80	90	315	95	331	100	347	100	365	100	383	100	1.741			



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
2	20	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	26	41	56	140	70	145	85	163	95	165	100	166	100	779	Dinas Kominfo
2	21	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah	23	23	38	150	45	155	50	174	55	175	75	178	75	832	Dinas Kominfo
2	22	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dikelola	82,58	82,58	85,58	792	88,58	821	91,59	920	94,59	925	97,59	939	97,59	4.397	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga seni budaya yang dikembangkan	4	4	6	100	8	104	10	116	12	117	12	119	12	556		
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang didokumentasikan	50	50	55	100	60	104	65	116	70	117	75	119	75	556		
2	22	05	Program Pelestasrian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	786	343	814	344	913	345	920	346	932	346	4.365		
2	23	02	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Persentase peningkatan jumlah layanan perpustakaan elektronik	1:16	1:16	1:15	544	1:14	564	1:13	632	1:12	640	1:12	645	1:12	3.035	Dinas Perpustakaan & Kearsipan



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase naskah kuno yang dialih aksara atau alih bahasa	5	5	6	51	7	52	8	59	8	59	8	60	8	281	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2	24	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip statis Persentase peningkatan SDM pengelola arsip	65,60	70,00	75,00	167	85,00	173	95,00	194	100	195	100	198	100	927	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	65,60	70,00	75,00	167	85,00	173	95,00	194	100	195	100	198	100	927	
2	24	04	Program Perijinan Penggunaan Arisp	Persentase pelayanan izin arsip tertutup	0	35	35	20	35	21	35	23	40	22	50	24	50	110		
3			<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
3	25		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>																	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	12	12	15	50,00	18	97,71	21	122,71	24	147,71	27	172,71	105	540,84	Dinas Paperi	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	825	288	855	313	958	338	960	363	979	1.565	4.577		
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak	0	5	5	17	5	17	5	19	5	19	5	20	20	93		
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12	12	12,20	81	12,40	84	12,60	94	12,80	95	12,80	96	62,80	450		
3	26		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>																	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10,00	13,00	1.254	15,00	1.299	20,00	1.456	22,00	1.475	25,00	1.487	25,00	6.971	Dinas Parpora	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	1.259	85,19	1.305	86,04	1.462	100	1.481	150	1.493	725	7.000		
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	0	1	1	195	2	202	3	226	4	228	5	231	5	1.068		



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
3   26   06	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	0	0	0	0	1	250	2	250	3	300	5	350	5	1.150	Dinas Parpora
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>																	
3   27   02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian  Jumlah teknologi pasca panen yang diterapkan pada komoditi pertanian	25	25	25	3.014	30	3.122	35	3.499	40	3.530	45	3.573	45	16.738	Dinas Pertanian
3   27   03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pertanian  Luas lahan sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani (ha)	1	1	1	5.081	1	5.264	1	5.900	1	6.000	1	6.025	1	28.270	
3   27   04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	5	5	825	4	855	3	958	2	968	1	978	1	4.584	
3   27   05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanaman Pangan</li><li>• Hortikultura</li><li>• Perkebunan</li></ul>			350		363		406		410		415		1.944		
3   27   07	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase penyuluhan pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik  Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas kelompok madya	75	75	75	3.426	80	3.550	80	3.978	90	4.000	90	4.062	90	19.016	
3   27   08	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian	2	2	3	100	4	100	6	100	7	100	10	100	10	500	



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
3	30	03	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>																
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	17,64	21,56	25,48	265	29,4	275	33,32	308	37,28	310	41,16	314	41,16	1.472	Dinas Dagperin Kop & UKM
3	30	04	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentiing	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7	7	7	95	7	98	7	110	7	111	7	113	7	527	
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku	32,02	18,51	37,02	170	55,54	176	66,64	197	74,05	199	81,45	202	81,45	944	
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	25	30	40	50	45	52	60	58	75	58	85	59	85	277	
28,5	35,7	42,8	57	71,4	78,6	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7		
3	31		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>																
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	15	27	37	345	51	357	64	401	82	404	100	409	100	1.916	Dinas DagperinKop & UKM
75	80	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	7,11	10,5	14,5	60	19	62	23	70	27	70	32	71	32	333	
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah IKM yg masuk SIINas	1	15	20	45	30	180	40	180	50	190	60	220	60	848	
3	32		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>																
3	32	02	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase dokumen perencanaan kawasan permukiman transmigrasi yang disusun	0	0	20	150	30	250	40	255	40	270	45	350	45	1.275	Dinas Nakertrans
0	20	20	250	30	270	35	350	40	450	45	500	45	500	45	500	45	1.820		
3	32	04	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun															



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
3	32	05	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	72,48	72,48	73,00	509	75,00	527	80,00	591	85,00	600	90,00	604	90,00	2.831	Dinas Nakertrans		
<b>4</b>																					
<b>4 01</b>																					
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	n.a	3000-3200	3200-3400	3.150	3400-3500	3.263	3500-3700	3.658	3700-3800	3.700	3800-4000	3.735	3800-4000	17.506	Setdakab		
				Persentase Perda ditetapkan	85	100	100		100		100		100		100		100				
				Persentase peningkatan fasilitasi lambaga keagamaan dan kemasyarakatan	10	13	15	18	20		23		25		25						
4	01	03		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	n.a	n.a	10	700	50	725	80	813	100	825	100	830	100	3.893			
				Rasio Elektrifikasi	61,22	65,00	68,00		72,00		75,00		78,00		80,00		80,00				
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio layanan 4G LTE	48,00	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00				
4	01	04		Indeks kelembagaan	n.a	0	60-63	16.963	63-65	17.573	64-66	19.696	66-69	19.850	70-73	20.114	70-73	94.196			
				Nilai komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	9,75	10-11	12-13		13-14		13-14		14-15		14-15						
				Persentase UKPP yang telah menerapkan SPP	0	43,57	54,85		66,14		77,43		88,71		100		100				
4	02		<b>Sekretariat DPRD</b>																		
4	02	03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat Dewan	90	95	100	16.962	100	17.573	100	19.696	100	20.000	100	20.114	100	94.345			
				Persentase ranperda yang difasilitasi menjadi perda	100	100	100		100		100		100		100		100				
				Persentase penjaringan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		100				
<b>5</b>																					
<b>5 01</b>																					
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja terhadap evaluasi AKIP	20,21	21-22	21-22	1.834	23-25	1.900	26-28	2.129	29-30	2.150	30	2.175	30	10.188	Bapppeda		
				Persentase capain IKU	86,21	90,00	95,00		100		100		100		100		100				
				Persentase capain IKD	76,27	80,00	85,00		90,00		100		100		100		100				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
5   01   03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan	80	85	90	2.817	100	2.918	100	3.271	100	3.300	100	3.339	100	15.645	Bapppeda
<b>5   02  </b>	<b>Unsur Keuangan</b>																
5   02   02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%)	85	90	100	153.480	100	159.005	100	178.213	100	180.276	100	181.990	100	852.964	BKAD
		Penetapan APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BKAD	
		Persentase penyaluran belanja daerah	90,11	95,00	97,00		100		100		100		100		100	100	
		Persentase penyampaian laporan tepat waktu	100	100	100		100		100		100		100		100	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100	100	100		100		100		100		100		100	100	
5   02   03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	90	95	100	925	100	958	100	1.074	100	1.080	100	1.097	100	5.134	
5   02   04	Program Pengelolaan Pendaftaran Daerah	Rasio PAD Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	9,94 107,71	10,00 110	12,00 110	924	14,00 110	958	16,00 115	1.074	18,00 115	1.085	20,00 120	1.096	20,00 120	5.137	
<b>5   03  </b>	<b>Unsur Kepegawaian</b>																
5   03   02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan NSPK	50	50	55	1.630	60	1.689	65	1.893	75	1.910	75	1.933	75	9.055	BKPSDM
<b>5   04  </b>	<b>Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>																
5   04   02	Program Pengembangan SDM	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pendidikan menengah /dasar Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan Rasio jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi	87,02 4,71 4,71	87,02 4,71 4,71	87,5 15 15	2.230 20 20	88 25 25	2.310 27 27	88,5 25 25	2.589 27 27	89 29 29	2.600 29 29	89,5 29 29	2.644 29 29	89,5 29 29	12.373	BKPSDM



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
5	04	02	Program Pengembangan SDM	Percentase ASN yang memiliki kinerja baik	87	87	88	2.230	89	2.310	90	2.589	91	2.600	92	2.644	92	12.373	BKPSDM		
5	05		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Percentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	50	75	85	1.050	95	1.088	100	1.219	100	1.151	100	1.245	100	5.753	Bapppeda		
6			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
6	01		<b>Inspektorat Daerah</b>																		
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP Percentase Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP Jumlah temuan BPK	3 60	3 70	3 75	776	3+ 80	804	4 85	901	4+ 90	915	5 95	920	5 95	4.316	Inspektorat		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP Percentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen risiko Percentase Perangkat Daerah bernilai SAKIP sempurna Nilai MCP Pencegahan Korupsi Percentase UKPP yang berzona integritas	3 0 0 n.a 0	3 0 10 80 0	4 50 50 85 25	452	4+ 75	468	5 85	524	5 95	530	5 100	535	5 100	2.509			
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
7	01		<b>Kecamatan</b>																		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	72,45	75,00	82,00	163	82,00	169	85,00	189	85,00	190	88,00	193	88,00	904	8 Kecamatan		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Percentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	10	15	5	292	5	302	5	339	5	340	5	346	35	1.619			



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
7   01   04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	0	0	88	0	100	0	120	0	150	20	180	0	658	8 Kecamatan	
7   01   05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penurunan potensi konflik	2	0	0	552	0	572	0	641	0	650	20	680	0	3.115		
7   01   06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar Persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	85	90	95	626	100	649	100	727	100	735	100	742	100	3.430		
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
8   01	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																	
8   01   02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	20	20	20	282	20	292	20	328	20	330	20	335	100	1.567	Kantor Kesbangpol	
8   01   03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	50	60	70	30	80	31	90	35	100	35	100	36	100	167		
8   01   04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75	80	20	339	20	351	20	393	20	400	20	401	100	1.884		
8   01   05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya Persentase penurunan penyalahgunaan narkotika	5	3	0	50	0	100	0	150	0	200	0	250	0	950		
8   01   06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	5	3	0	570	0	590	0	662	0	670	0	676	100	3.168		



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Base- line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Tar- get	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	
x   xx   01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	481.164	100	498.485	100	558.703	100	563.551	100	570.546	100	2.672.449	Seluruh Perangkat Daerah
		<b>Total Belanja Daerah</b>				854.774		885.543		922.476		937.138		1.013.494		4.613.425	

\*Tahun 2021 bersifat prognosis



# BAB



**SAKIP**  
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

8

# **BAB VIII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kondisi tersebut, dapat dilihat dari capaian kinerja tujuan pembangunan diakhir periode RPJMD. Penetapan target indikator tujuan RPJMD Kabupaten Sijunjung berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir, dapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Sat	Baseline (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD* (2021)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)	Sumber data
1	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	47,97	50-55	70-75	Menpan-RB
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,10	2,58	5,26	BPS
3	Angka Kemiskinan	%	6,78	6,69	5,50	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia	poin	67,74	68,44	73,64	BPS
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	n.a	35,00	60,00	Kemendikbud/BPS
6	Indeks Infrastruktur	nilai	59,38	62,54	91,00	Bapppeda
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	69,06	70,40	73,05	Dinas Perkim dan LH

\*) Prognosa

Ke-7 indikator tujuan pembangunan tersebut, merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan yang akan dicapai diakhir periode RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Masing-masing ke-7 indikator tujuan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indikator Reformasi Birokrasi adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Persepsi Anti Korupsi, dan survei kepuasan masyarakat.

Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional serta kualitas layanan publik yang inovatif dan berintegritas. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai terkait dengan reformasi birokrasi, dapat dilihat dari pencapaian kinerja delapan area perubahan reformasi birokrasi seperti gambar berikut ini:



Gambar 8.1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas, dan implementasinya. Penilaian indeks reformasi birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%. Berdasarkan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut, sehingga diharapkan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2026 bernilai antara 70-75 atau dikategori sangat baik (BB)

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sijunjung ditargetkan sekitar 2,5-3% per tahun selama kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Target ini diproyeksikan berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan 2020. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun tersebut, cenderung melambat secara rata-rata sekitar 2,5%, sehingga diasumsikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang sebesar 5,26%.

Uraian tentang pertumbuhan ekonomi ini akan terkait dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan *output* riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya; a) tanah dan kekayaan alam, b) mutu tenaga kerja dan penduduk, c) barang modal dan tingkat teknologi, dan d) sistem sosial dan sikap masyarakat.

## **3. Angka Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sebesar 16.280 jiwa atau 6,78% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan tersebut, mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi pertanian dengan nilai harga jual yang memadai terhadap pengeluaran. Sehingga pengeluaran masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi masyarakat mayoritas petani tidak terpangaruuh dengan adanya suasana pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini.

Walaupun struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung tidak terpangaruuh terhadap krisis struktur ekonomi yang terjadi pada tahun 2020. Namun disisi lain, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Oleh sebab itu, proyeksi angka kemiskinan lima tahun mendatang menggunakan asumsi moderat, sehingga rata-rata penurunan cukup kecil angkanya

## **4. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung ditargetkan meningkat menurut hasil proyeksi berdasarkan pencapaian IPM tahun-tahun sebelumnya.



Peningkatan target IPM ini selaras dengan meningkatnya komponen-komponen pendukung IPM. Komponen IPM yang relatif paling reaktif mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pergerakan komponen lain, seperti; harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan umur harapan hidup yang relatif lebih lambat kenaikannya.

Pengeluaran per kapita per tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional, bahkan internasional. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang diprioritaskan pada dimensi kesehatan, mengingat kondisi saat ini terjadinya pandemi covid-19. Selain itu, perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat serta terjaminnya kebutuhan pangan dan non pangan. Sehingga diharapkan pada tahun 2026, IPM Kabupaten Sijunjung berada pada posisi 10 besar tingkat provinsi atau minimal berada lima besar diantara 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

## **5. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga dijadikan alat ukur keberhasilan pembangunan kebudayaan nasional tahun 2020-2024.

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya; ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Kabupaten/Kota tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka target yang akan dicapai diakhir periode RPJMD menggunakan pendekatan moderat. Artinya, disesuaikan dengan kondisi dari tujuh dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2020.

## **6. Indeks Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mengusung prinsip *pro-poor*, *pro growth* dan *pro-job*. Namun, kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur akan menimbulkan beragam masalah, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya dimensi



penghitungan ketersediaan dan keterjangkauan layanan infrastuktur dan prasarana dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks infrastruktur merupakan gambaran kondisi ketersediaan dan keterjangkauan layanan infrastuktur dan prasarana dasar bersifat kuantitatif, sebagai salah satu indikator aspek daya saing. Variabel-variabel dari penghitungan indeks infrastruktur terdiri dari; 1) indeks infrastruktur jalan, 2) rasio elektrifikasi, 3) rasio layanan broadband 4G LTE, 4) cakupan layanan irigasi, 5) cakupan layanan air bersih, dan 6) cakupan sanitasi yang layak. Sedangkan metode penghitungan indeks infrastruktur dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

$$I\text{I}_{\text{Infra}} = \{(Ij \times y) + (Re \times y) + (RInt \times y) + (CI \times y) + (CA \times y) + (CS \times y)\}$$

I <sub>Infra</sub>	: Indeks Infrastruktur
I <sub>j</sub>	: Indeks Infrastruktur Jalan
R <sub>e</sub>	: Rasio Elektrifikasi
R <sub>Int</sub>	: Rasio Layanan Broadband 4G LTE
C <sub>I</sub>	: Cakupan Layanan Irigasi
C <sub>A</sub>	: Cakupan Layanan Air Minum
C <sub>S</sub>	: Cakupan Sanitasi yang Layak
y	: Bobot

**Gambar 8.2 Metode Penghitungan Indeks Infrastruktur**

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, indeks infrastruktur Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2020 tercapai senilai 59,38. Capaian tersebut, menunjukkan kinerja infrastruktur belum sesuai yang diharapkan, sehingga berimplikasi terhadap aspek daya saing daerah. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan menjadi prioritas utama bagi Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, sehingga ditargetkan indeks infrastruktur pada kondisi akhir RPJMD senilai 91,00. Penetapan target tersebut, dirumuskan berdasarkan asumsi yang optimis dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan sumber daya daerah.

## **7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Pembangunan suatu wilayah seringkali memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Upaya kita adalah bagaimana pembangunan wilayah tersebut mampu menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan diperlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu ukuran adalah penciptaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sehingga paling tidak kita mampu mendapatkan isyarat dini tentang kualitas lingkungan akibat pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kondisi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sijunjung tahun 2020 masih berada dikategori cukup, hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh kualitas air yang berada kategori buruk. Oleh sebab itu, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung tahun 2026 sedikit lebih baik yang diproyeksikan dengan skor 73,05. Proyeksi IKLH tersebut, disamping merujuk kepada Surat Edaran



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Sementara itu, untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan akhir pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 melalui strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dari tahun ke tahun (*long term outcome*), hal dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

### **8.1. Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Oleh sebab itu, IKU merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi SAKIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penentuan target IKU pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016-2020, SPM dan TPB serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penetapan IKU disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan ketersediaan data capaian IKU setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Base-line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi</b>										
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	62,11	65-69	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	84-87
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	2	2+	3	3+	4	4	4
4	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	53,76	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00
5	Indeks Pelayanan Publik	Skor	n.a	2,51-3,00	3,01-3,50	3,51-4,00	4,01-4,50	4,51-5,00	4,51-5,00	4,51-5,00
6	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.274	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
<b>Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata</b>										
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	28,00	28,50	30,00	30,50	31,50	32,50	32,50	32,50
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,81	0,83	0,88	0,95	1,10	1,15	1,15	1,15
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,80	12,10	12,50	12,80	13,10	13,50	13,50	13,50



No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Base-line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
4	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	3,00	3,20	4,50	5,00	5,20	5,40	5,40	5,40
6	Pertumbuhan realisasi investasi	%	11,40	12,00	13,00	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00
7	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	38,81	40,23	42,03	44,92	47,47	50,46	54,00	54,00
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30	5,08	5,00	4,86	4,74	4,58	4,00	4,00
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7024	0,7024	0,7273	0,7500	0,7900	0,8000	0,8300	0,8500
10	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	16,28	16,18	16,00	15,80	15,50	15,30	15,00	15,00

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)**

1	Harapan lama sekolah	Thn.	12,37	12,82	12,99	13,17	13,35	13,53	14,50	14,50
2	Rata-rata lama sekolah	Thn.	8,11	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	9,00	9,00
3	Usia Harapan Hidup	Thn.	66,21	66,37	66,53	66,69	66,86	67,57	68,00	68,00
4	Prevalensi balita stunting	%	23,40	20,00	17,00	15,00	14,00	10,00	7,00	7,00
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,03	93,10	93,20	93,50	94,00	94,50	95,30	95,30
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,93	59,97	60,00	61,00	63,00	64,00	65,00	65,00
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	n.a	8,00	9,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00
8	Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan	%	9,31	13,80	18,00	22,60	27,85	36,20	42,40	42,40
9	Tingkat penurunan sengketa adat	%	21	18	16	13	10	7	5	5

**Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan**

1	Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	55,74	59,55	64,75	72,38	85,00	89,00	91,00	91,00
2	Cakupan layanan irigasi	%	41,87	45,00	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00
3	Cakupan layanan air bersih	%	69,11	72,00	75,00	90,00	100	100	100	100
4	Cakupan sanitasi yang layak	%	72,11	75,00	80,00	90,00	100	100	100	100
5	Indeks Kualitas Air	Skor	50,00	52,60	52,70	52,80	52,90	53,20	53,80	53,80
6	Indeks Kualitas Udara	Skor	89,05	89,35	89,45	89,55	89,65	90,00	90,20	90,20
7	Indeks Tutupan lahan	Skor	64,46	65,90	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	71,00
8	Indeks risiko bencana	Skor	107,2	106,0	102,0	100,0	98,0	95,0	92,0	92,0

## 8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, diantaranya; a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan c) target kinerja penyelengaraan urusan pemeritahan atau Indikator Kinerja Kunci. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam



melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan menurut urusan pemerintahan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD setiap tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021-2026**

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir					
					2022	2023	2024	2025	2026						
<b>A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>															
<b>1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>															
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,10	2,58	2,92	4,21	4,65	4,96	5,26	5,26					
1.2	PDRB per-kapita (ADHK)	Rp Juta	27,74	28,38	28,79	29,57	30,48	31,45	32,50	32,50					
1.3	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	38,81	40,23	42,03	44,92	47,47	50,46	54,00	54,00					
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30	5,08	5,00	4,86	4,74	4,58	4,00	4,00					
1.5	Angka kemiskinan	%	6,78	6,69	6,56	6,43	6,30	6,00	5,50	5,50					
1.6	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	16,28	16,18	16,00	15,80	15,50	15,30	15,00	15,00					
1.7	Gini Ratio	nilai	0,286	0,270	0,260	0,250	0,240	0,230	0,210	0,210					
<b>2. Fokus Kesejahteraan Sosial</b>															
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,74	68,44	68,79	69,39	70,30	71,58	73,64	73,64					
2.1.1	Usia Harapan Hidup	Thn.	66,21	66,37	66,53	66,69	66,86	67,57	68,00	68,00					
2.1.2	Harapan lama sekolah	Thn.	12,37	12,82	12,99	13,17	13,45	13,83	14,50	14,50					
2.1.3	Rata-rata lama sekolah	Thn.	8,11	8,15	8,19	8,23	8,62	8,91	9,00	9,00					
2.1.4	Pengeluaran ril per-kapita	Rp Ribu	10.361	10.488	10.538	10.723	10.949	11.190	12.500	12.500					
2.2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,03	93,10	93,20	93,50	94,00	94,50	95,30	95,30					
2.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	n.a	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00					
<b>B. Aspek Pelayanan Umum</b>															
<b>1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>															
<b>1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>															
1.1.1	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	%	59,01	59,02	61,22	64,90	68,57	73,47	79,59	79,59					
1.1.2	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar	%	99,87	100	100	100	100	100	100	100					
1.1.3	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama	%	84,66	85,76	87,00	89,00	92,00	95,00	98,00	98,00					
1.1.4	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan	%	30	30	35	40	45	50	55	55					
1.1.5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a	42,5	55,0	65,0	75,0	82,5	82,5	82,5					
1.1.6	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a	42,5	55,0	65,0	75,0	82,5	82,5	82,5					



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.7	APS SD/MI/Paket A	%	99,99	100	100	100	100	100	100	100
1.1.8	APS SMP/MTs/ Paket B	%	89,98	90,00	95,00	100	100	100	100	100
1.1.9	APK PAUD	%	48,19	48,20	50,00	53,00	56,00	60,00	65,00	65,00
1.1.10	APK SD/MI/Paket A	%	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81
1.1.11	APK SMP/MTs/ Paket B	%	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83
1.1.12	Persentase sekolah yang memiliki nilai Assesment minimal Baik	%	0	20	25	30	35	40	50	50
1.2	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>									
1.2.1	Prevalensi balita stunting	%	23,40	20,00	17,00	15,00	14,00	10,00	7,00	7,00
1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	170	150	135	100	75	75	50	50
1.2.3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	%	15,3	15,0	13,0	10,0	7,0	5,0	3,0	3,0
1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	7,8	6,1	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	1,0
1.2.5	Prevelansi balita gizi buruk	%	15,5	13,2	11,0	9,0	8,0	5,0	3,0	3,0
1.2.6	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.7	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.8	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.9	Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	80	90	100	100	100	100	100	100
1.2.10	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.11	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2.15	Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	%	85	100	100	100	100	100	100	100
1.2.16	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular	%	9	8	7	6	5	4	3	3
1.2.17	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	%	55	57	60	65	70	75	80	80
1.2.18	Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	%	0,08	0,10	0,12	0,14	0,14	0,17	0,17	0,17
1.2.19	Status Akreditasi RSUD	status	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
1.3	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	66,54	75,00	68,21	69,89	71,57	73,25	74,93	74,93
1.3.2	Rasio layanan irigasi	%	41,87	45,00	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00
1.3.3	Cakupan layanan air minum	%	69,11	72,00	75,00	90,00	100	100	100	100



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.4	Cakupan sanitasi yang layak	%	72,11	75,00	80,00	90,00	100	100	100	100
1.3.5	Rasio kepatuhan IMB	%	9,10	15	25	35	45	55	65	65
1.3.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	14,05	16,55	19,05	21,55	24,05	26,55	29,05	29,05
1.3.7	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	66,51	68,5	70	71	72	73	74	74
1.4	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
1.4.1	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	%	77,03	78,00	82,00	85,00	90,00	95,00	100	100
1.4.2	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	%	0	50	65	75	85	95	100	100
1.4.3	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	0	10	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	88,97
1.4.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	85,33	90,00	95,00	100	100	100	100	100
1.5	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
1.5.1	Indeks risiko bencana	Skor	107,2	106,0	102,0	100,0	98,0	95,0	92,0	92,0
1.5.2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.3	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	org	30.500	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	100.000
1.5.5	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	org	30.500	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	100.000
1.5.6	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	org	30.550	25.000	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	org	25	30	0	0	0	0	0	0
1.5.8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.9	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanggangan kebakaran	Menit	15	15	15	15	13	12	12	12
1.6	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1.6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	55,21	58,85	62,00	67,00	72,00	77,00	85,00	85,00
1.6.2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	9,23	12,21	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
1.6.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kondisi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir				
					2022	2023	2024	2025	2026					
<b>2.</b>	<b>Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>													
<b>2.1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>													
2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	%	0	0	0	40	50	55	60	60				
2.1.2	Persentase tenaga kerja besertifikat kompetensi	%	23,43	23,43	24,00	25,00	30,00	34,00	35,00	35,00				
2.1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	0,40	0,42	0,47	0,52	0,58	0,67	0,78	0,78				
2.1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
2.1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		27,40	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00				
<b>2.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>													
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,93	59,97	60,00	61,00	63,00	64,00	65,00	65,00				
2.2.1	Persentase ARG terhadap APBD	%	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,005	0,005				
2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	%	0,3	0,3	0,2	0,2	0,15	0,12	0,10	0,10				
2.2.4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
2.2.5	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	n.a	Pratama	Pratama	Nidya	Nidya	Madya	Utama	Utama				
<b>2.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>													
2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,85	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	100				
2.3.2	Skor pola pangan harapan	Skor	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50	84,50				
2.3.3	Persentase ketersediaan pangan	%	15	10	10	20	20	20	20	90				
<b>2.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>													
2.4.1	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	%	65	65	70	75	75	80	80	80				
2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	50	60	100	100	100	100	100	100				
2.4.3	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
<b>2.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>													
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	69,06	70,40	70,79	71,18	71,87	72,01	73,04	73,04				
2.5.2	Indeks Kualitas Air	Skor	50,00	52,60	52,70	52,80	52,90	53,20	53,80	53,80				
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	Skor	89,05	89,35	89,45	89,55	89,65	90,00	90,20	90,20				
2.5.4	Indeks Tutupan lahan	Skor	64,46	65,90	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	71,00				
2.5.5	Persentase penanganan sampah	%	15,65	17,00	20,00	23,00	30,00	40,00	50,00	50,00				
2.5.6	Persentase pengurangan sampah	%	30,22	32,50	35,00	38,00	40,00	45,00	50,00	50,00				
<b>2.6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>													
2.6.1	Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	%	92,93	94,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2.6.2	Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	%	30	35	40	45	50	55	60	60				
2.6.3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	9	9	15	20	25	30	30	35				



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.7	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
2.7.1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7024	0,7273	0,7500	0,7900	0,8000	0,8300	0,8500	0,8500
2.7.2	Tingkat penurunan sengketa adat	%	21	18	16	13	10	7	5	5
2.7.2	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri	1,25	2	2	2	2	2	2	2	2
2.8	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
2.8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	n.a	55,73	55,75	55,80	55,85	55,9	60	60
2.8.2	Total Fertility Rate	nilai	2,95	2,22	2,22	2,22	2,22	2,15	2,15	2,15
2.8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	72,46	73,85	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	80,8
2.8.4	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	12,00	11,76	11,52	11,52	11,28	11	10,08	10,08
2.9	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>									
2.9.1	Persentase penurunan angka kecelakaan	%	6	5	4	3	2	1	0	0
2.10	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									
2.10.1	Maturitas SPBE	Skor	2,84	2,90	3,2	3,5	3,8	4,00	4,50	4,50
2.10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50	50	60	70	80	90	100	100
2.10.3	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	94	94	97	100	100	100	100	100
2.10.4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	40	45	50	55	60	65	70	70
2.11	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
2.11.1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	42,11	48,68	55,26	61,48	68,42	75	81,57	81,57
2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha	%	32,01	0,1	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	33,61
2.11.3	Persentase koperasi sehat	%	15	18	22	28	33	38	40	40
2.11.4	Persentase peningkatan omzet UMKM	%	4,1	4,3	4,5	5	5,5	6	6,5	6,5
2.12	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>									
2.12.1	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	11,40	12,00	13,00	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00
2.13	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>									
2.13.1	Indeks Pembangunan Pernuda	Nilai	n.a	45,00	45,30	46,00	47,00	47,50	48,50	48,50
2.13.2	Penumbuhan milenial <i>entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i>	org	5.602	4.562	699	836	836	1.077	1.118	9.236
2.13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	5	10	15	20	25	30	35	35
2.13.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11,75	13,75	15,75	17,75	20	30	40	40



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.13.5	Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan provinsi	Me-dali	33	33	45	45	50	50	50	50
<b>2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>										
2.14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	26	41	56	70	85	95	100	100
2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	26	41	56	70	85	95	100	100
<b>2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>										
2.15.1	Persentase layanan publik yang telah menerapkan sistem persandian	%	23	23	38	45	50	55	75	75
2.15.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	23	23	38	45	50	55	75	75
<b>2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>										
2.16.1	Persentase seni budaya yang dimanfaatkan	%	12,21	18,00	22,90	27,80	32,70	42,50	49,00	49,00
2.16.2	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	%	6,40	9,60	13,10	17,40	23,00	29,90	35,80	35,80
2.16.3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	99,71	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>										
2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	n.a	8,00	9,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00
2.17.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,05	60,05	62,3	64,2	65,05	66,2	67,3	67,3
<b>2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>										
2.18.1	Indeks Kepatuhan Arsip Daerah	%	n.a	20	30	40	50	60	70	70
2.18.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	n.a	50	60	70	80	90	100	100
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>									
3.1	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									
3.1.1	Nilai Tukar Petani Perikanan	Nilai	94,52	95,00	97,00	100	105	110	115	115
3.1.2	Jumlah produksi perikanan	Ton/thn	250	250	278	306	334	362	390	1.670
3.2	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>									
3.2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,79	0,81	0,83	0,88	0,95	1,10	1,15	1,15
3.2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,5	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	2,75
3.2.3	Tingkat hunian akomodasi	%	5	5	8	10	13	15	18	18
3.2.4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan non-santara yang datang	%	7,57	10,00	13,00	15,00	20,00	22,00	25,00	25,00
3.3	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>									
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,71	28,00	28,50	30,00	30,50	31,50	32,50	32,50
3.3.2	Tingkat produktivitas padi	Ton/ha	4,57	4,57	4,64	4,71	4,78	4,85	4,92	4,92



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/Indikator Kinerja	Sat.	Base-line (2020)	Kon-disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
3.3.3	Jumlah produksi pertanian : • Jagung • Manggis • Karet • Telur ayam ras	Ton	5.646	5.646	5.674	5.731	5.788	5.846	5.905	5.905
		Ton	4.092	4.092	4.112	4.133	4.153	4.174	4.195	4.195
		Ton	64.255	64.255	65.219	66.197	67.150	68.198	69.221	69.221
		Ton	1.496	1.496	1.388	1.402	1.416	1.430	1.444	1.444
3.3.4	Jumlah populasi ternak unggulan : • Sapi • Kerbau	ekor	16.327	16.490	16.655	16.882	16.990	17.160	17.160	17.160
		ekor	11.913	12.032	12.152	12.271	12.397	12.521	12.521	12.521
3.3.5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	5	5	4	3	2	1	1
3.3.6	Persentase peningkatan pendapatan petani	%	4	5	5	5	5	5	5	5
3.4	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>									
3.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,71	11,80	12,10	12,50	12,80	13,10	13,50	13,50
3.4.2	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	%	25	35	35	40	50	60	70	70
3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	32,02	18,51	37,02	55,54	66,64	74,05	81,45	81,45
3.5	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>									
3.5.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	2,60	3,00	3,20	4,50	5,00	5,20	5,40	5,40
3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RPIK	%	75	80	90	95	100	100	100	100
3.5.3	Persentase IKM yang memiliki izin	%	7,11	10,5	14,5	19	23	27	32	32
3.5.4	Persentase kenaikan omset IKM	%	-5,3	-0,71	1,5	1,75	2,00	2,25	2,5	2,5
3.6	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>									
3.6.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitialisasi	%	0	0	0	0	25	30	30	35
4	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>									
4.7.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	47,97	50-55	56-60	61-63	64-66	67-69	70-75	70-75
4.7.2	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	62,11	65-69	70-75	75-80	81-85	85-88	85-88	85-88
4.7.3	Nilai LPPD	Nilai	n.a	3000-3200	3200-3400	3400-3500	3500-3700	3700-3800	3800-4000	3800-4000
4.7.4	Indeks Pelayanan Publik	Skor	n.a	2,51-3,00	3,01-3,50	3,51-4,00	4,01-4,50	4,51-5,00	4,51-5,00	4,51-5,00
4.7.5	Persentase pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	%	80	85	100	100	100	100	100	100
4.7.6	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.7.7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25	25	30	33	38	40	45	45



**Pemerintah Kabupaten Sijunjung**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Sat.	Base- line (2020)	Kon- disi Awal (2021)	Tahun dan Target Capaian					Kondisi Akhir					
					2022	2023	2024	2025	2026						
<b>5</b>															
<b>5.1</b>															
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	77,95	84,82	85,81	89,03	90,21	91,10	91,36	91,36					
5.1.2	Nilai komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP	Nilai	20,21	21-22	21-22	23-25	26-28	29-30	30	30					
<b>5.2</b>															
5.2.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
5.2.2	Rasio PAD	%	9,94	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00					
5.2.3	Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	%	107,71	110	110	110	115	115	120	120					
5.2.4	Rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya	%	9,88	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00					
5.2.5	Cakupan layanan publik terhadap informasi keuangan daerah	%	50	60	80	100	100	100	100	100					
<b>5.3</b>															
5.3.1	Indeks merit sistem	Nilai	0	0,40	0,41-0,50	0,51-0,61	0,62-0,71	0,72-0,80	0,81-1	0,81-1					
5.3.2	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/dasar	%	87,02	87,02	87,5	88	88,5	89	89,5	89,5					
5.3.3	Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan	%	4,71	4,71	15	20	25	27	29	29					
<b>5.4</b>															
5.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53,76	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00					
5.4.2	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi	%	4,71	4,71	15	20	25	27	29	29					
<b>5.5</b>															
5.5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.274	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000					
<b>6</b>															
6.1	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	2	2+	3	3+	4	4	4					
6.2	Maturitas SPIP	Level	3	3	4	4+	5	5	5	5					
6.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3+	4	4+	5	5					
<b>C.</b>															
<b>Aspek Daya Saing</b>															
<b>1.</b>															
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>															
1.1	Nilai Tukar Petani	Nilai	100,58	100,90	102,00	105,00	110,00	113,00	115,00	115,00					
<b>2.</b>															
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>															
2.1	Indeks Infrastruktur	nilai	59,38	62,54	66,99	75,54	85,00	88,30	91,00	91,00					
2.2	Indeks infrastruktur jalan	nilai	55,74	59,55	64,75	72,38	85,00	89,00	91,00	91,00					
2.3	Rasio Elektrifikasi	%	61,22	65,00	68,00	72,00	75,00	78,00	80,00	80,00					
2.4	Rasio layanan broadband 4G LTE	%	48,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00					
<b>3.</b>															
<b>Fokus Iklim Investasi</b>															
3.1	Angka Kriminalitas	%	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01					
<b>4.</b>															
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>															
4.1	Rasio Ketergantungan	%	57,14	56,00	55,00	53,00	52,00	50,00	48,00	48,00					

Keterangan : Tahun 2021 prognosis



# BAB



9

# BAB IX

# PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu dan program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam lima tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta unsur pendukung urusan pemerintahan serta unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Rencana Strategis adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Rencana Strategis yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Sijunjung yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Sumber pendanaan pelaksanaan program pembangunan RPJMD ini, antara lain; 1) APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung, 2) APBD Provinsi Sumatera Barat, 3) APBN (Tugas Pembantuan), 4) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB), 5) *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan 6) swadaya masyarakat



serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 jika terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Rencana Strategis baru.
6. Pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, jika terjadi perubahan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031, maka program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan perubahan RTRW Kabupaten Sijunjung.
7. Untuk menjamin efektivitas dan konsistensinya pelaksanaan program RPJMD melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah, apabila hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya indikasi capaian indikator sasaran tidak terpenuhi pada akhir RPJMD dan terjadi perubahan yang mendasar seperti; terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



MISWITA.MR.

Lampiran 1

PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL

KAB SIJUNJUNG : RPJMD TAHUN 2021-2026

No	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
		TARGET NASIONAL DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD KABUPATEN/KOTA								
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	5	5,5	5,8	6	6,1	-1,6	3,44	3,4	4,57	4,6	4,7	4,84	-1,1	2,58	2,92	4,21	4,55	4,66	4,79	-1,10	2,58	2,92	4,21	4,65	4,96	5,26
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	8,0-8,5			6,0-7,0	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55	6,56	6,4	6,28	6,16	6,03	5,9	5,77	7,08	6,93	6,81	6,69	6,56	6,43	6,3	6,78	6,69	6,56	6,43	6,30	5,50	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,0	4,8-5,0			3,4-4,3	5,5	5,3	5,2	4,7	4,4	6,88	6,7	6,6	6,45	6,31	5,94	4,38	5,3	5,08	5	4,86	4,74	4,58	4,4	5,30	5,08	5,00	4,86	4,74	4,58	4,00
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26			75,54						72,38	72,56	72,74	73,23	73,6	74,16	74,6	67,74	68,12	68,51	69,02	69,54	70,08	70,51	67,74	68,44	68,79	69,39	70,30	71,58	73,64
5	Rasio Gini	0,375-0,380	0,375-0,379			0,360-0,370						0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284	0,289	0,288	0,287	0,284	0,279	0,274	0,268	0,286	0,270	0,260	0,250	0,240	0,230	0,210
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)																															

## Lampiran 2

## PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

KAB SIJUNJUNG : RPJMD TAHUN 2021-2026

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan															Bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan,Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perindustrian								
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		291,79	292,98	294,15	295,31		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82,5	83	84	84,5		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)		2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		291,79	292,98	294,15	295,31		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82,5	83	84	84,5		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)		57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		291,79	292,98	294,15	295,31		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82,5	83	84	84,5		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishment/POU)		6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		291,79	292,98	294,15	295,31		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50	
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291,79	292,98	294,15	295,31		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50	
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	14	13	12	11	10	10	10	
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83,5	84	84,5		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85	85	85	85	85	85	85	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil				6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)				15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)				39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)				45	50	55	60		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	75	75	75	80	80	90	90	
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)				20	20	20	20	20	100	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas kelompok madya	0	0	1	2	3	4	5
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	280	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (%)				41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		80	82	84	86	90	92	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak	0	5	5	5	5	5	5
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
	Penguan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rata-rata omset Koperasi aktif (Rp Juta)	147,37	153,26	158,7	166,89	174,9	183,8	192,7
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	4,1	4,3	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Persentase koperasi ber-kualitas	42,11	48,68	55,26	61,48	68,42	75,00	81,57
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	1,6	2,1	3,2	4,3	5,4	6,5	8,7

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85	85	85	85	85	85	85
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	25	25	25	30	35	40	45
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah teknologi pascapanen yang diterapkan pada komoditi pertanian	2	2	3	4	4	5	5
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)			20	20	20	20	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana per-tanian	1	1	1	1	1	1	1
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0,63	0,6	0,57	0,54		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
		Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)			0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	12	12	15	18	21	24	27
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)			256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)			15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12,0	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)			39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	238	238	263	288	313	338	363
		Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25											
								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)			72	74	76	78		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	7,11	10,5	14,5	19	23	27	32	
								PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41.373	43.263	45.363	47.673		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah IKM yg masuk SIInas	1	15	20	30	40	50	60	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10	13	15	20	22	25
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	85,19	86,04	100	150
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 -1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250									
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	0	1	1	2	3	4	5
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)		4	4	4	5	5	23	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN dan PMA	187	187	190	193	196	199	202
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp triliun)		4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	Program Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN (Rp triliun)	9,02	10,10	11,42	13,13	15,75	19,69	24,62
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)		0	2	1	1	1	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Realisasi investasi PMA (US\$ Rbu)	193,56	193,56	197,43	201,38	207,42	217,8	233,04
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,43	23,43	24,0	25,00	30,00	34,0	35,0
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)		31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	27,4	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,43	23,43	24,0	25,00	30,00	34,0	35,0

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi	15	27	37	51	64	82	100	
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi	15	27	37	51	64	82	100	
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10	13	15	20	22	25	
								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	85,19	86,04	100	150	
								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnu (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	85,19	86,04	100	150	
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250										
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	0	1	1	2	3	4	5	
	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)			1.420,99	1.449,41	1.478,40	1.507,97											
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)			5,5	5,8	6,2	6,5		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana & prasarana perdagangan yang representatif	17,64	21,56	25,48	29,40	33,32	37,28	41,16	
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Percentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			6	6	6	6		Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Percentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7	7	7	7	7	7	7	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10	13	15	20	22	25
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	85,19	86,04	100	150
	Penguanan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																			
		Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	7,57	10	13	15	20	22	25
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	82,68	83,50	84,34	85,19	86,04	100	150
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																	Bidang Pertanian, Bidang PURR, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ketentraman, Keteributan Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Sosial dan Usir Litbang								
	Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah		0		0				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	25	25	25	30	35	40	45
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan ket tersediaan prasarana per-tanian	1	1	1	1	1	1	1
	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang		0		0				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73,92	75	77	79	81	82	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	66,54	68,21	69,89	71,57	73,25	74,93	76,61
	Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah		0		0				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanaan pembangunan	65	65	70	75	80	85	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	50	75	85	95	100	100	100
	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD (%)	70,56	71,50	73,00	75,00	78,00	82,00	85,00
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama (%)	84,66	85,76	87,00	89,00	92,00	95,00	98,00
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK bersertifikat Profesi	36,67	36,67	40	45	50	55	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasi untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum (%)	69,11	72,00	75,00	90,00	100	100	100	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak (%)	72,11	75	80	90	100	100	100	
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	0	50	65	75	85	95	100	
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)		77	79	81	83	85	87	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase menurunnya gangguan ketenteraman ketertiban umum	2	2	1	1	1	1	0	
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		75	77	79	81	83	85	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Ben-cana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	35	45	55	65	75	85	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,23	12,21	15	20	25	30	35
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	52,73	54	58	63	66	70	75

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)			100	100	100	100	100	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	Bidang Dukcapil, Bidang Dalduk & KB, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Pangan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Kominfo, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Pendidikan, Bidang PPr dan PA, Bidang Kepemudaan, Bidang Pertanahanan, Unsur Pendukung dan Unsur Perencanaan								
	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			0		0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26,66	40	50	60	70	80	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	30	35	40	45	50	55	60
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97,16	97,75	98	98,25	98,5	99	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	92,93	94	95	96	98	100	100
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91,47	94	95	96	97	98	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak	93,48	95,65	98	100	100	100	100
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	93,48	95,65	98	100	100	100	100
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan buku nikah/akta perkawinan pa-da semua pasangan yang perkawinan yang dilaporkan	10	15	25	30	35	40	50

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya yang dilaporkan	0	0	5	10	15	20	25	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)		3	6	9	12	15	18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	9	9	15	20	25	30	35	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)		80	80	85	90	90	90	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,95	2,22	2,22	2,22	2,22	2,15	2,15	
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	72,46	73,85	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	28,09	30,9	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	
	Penguanan pelaksanaan perlindungan sosial		Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	5	10	25	30	40	50	55
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	5	10	25	30	40	50	55
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguanan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)			25	25	25	25	25	25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	75	80	85	90	100	100	100
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGI sesuai standar		85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			0	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar		75	83	88	95	98	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang negara usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar		85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar		75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C		75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting		35,34	40	45	50	65	75	90
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)		12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan-anak usia pendidikan dasar sesuai standar		80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Keselamatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencar yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGI sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90	
									Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kon-trasepsi modern	72,46	73,85	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,03	12,00	11,76	11,52	11,28	11,00	10,08
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,31	20,31	20,5	20,75	21	21,75	22
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar		85	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil		90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar		75	83	88	95	98	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C		75,38	78	81	85	90	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting		35,34	40	45	50	65	75	90	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/kota (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga		76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif		76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM		44,58	48,0	53,0	58,0	63,0	68,0	73,0
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum (%)		69,11	72	75	90	100	100	100	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak (%)		72,11	75	80	90	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,33	90	95	100	100	100	100	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,23	12,21	15	20	25	30	35
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,23	12,21	15	20	25	30	35
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	52,73	54	58	63	66	70	75
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15	10	10	20	20	20	20
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80	80,5	81,5	82,5	82,5	84,5	84,5
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pemanganan daerah rentan rawan pangan (%)			22	24	27	28			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	15	10	10	20	20	20	20
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	80	80,5	81,5	82,5	82,5	84,5	84,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga ke-masyarakat nagari yang aktif	15	20	25	30	40	50	60	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu badut yang mendapatkan KIE Stunting	28,09	30,9	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	30	30	50	60	70	90	100	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12	12	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn)	12	12	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	25	25	25	30	35	40	45	
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0,63	0,6	0,57	0,54			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)			100	100	100	100		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangan	80	85	90	100	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGI sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Sedianan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGI sesuai standar		85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil		90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar		75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C		75,38	78	81	85	90	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencak yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
		Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sebat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kese-hatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercakupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0	0	0	0	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk meningkatkan PHBS di Kab/kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga	76,57	80,23	83	88	93	98	100	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Percentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83	88	93	98	100	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM	44,58	48	53	58	63	68	73	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)				73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan-an anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustkesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM	44,58	48	53	58	63	68	73
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase pustekmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM	44,58	48	53	58	63	68	73
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100	
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100	
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama (%)	84,66	85,76	87	89	92	95	98
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan me-nengah pertama (%)	84,66	85,76	87	89	92	95	98
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama (%)	84,66	85,76	87	89	92	95	98
		Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama (%)	84,66	85,76	87	89	92	95	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase peningkatan kepemilikan ijazah pendidikan kesetaraan	30	30	35	40	45	50	55
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57	Program Pengembangan Kuriku-lum	Persentase dokumen kuri-kulum muatan lokal yang ditetapkan	0	0	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK bersertifikat Profesi	36,67	36,67	40	45	50	55	60
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan/ lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikeluarkan izin operasional	0	0	20	10	10	15	20
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori kabupaten layak anak	n.a	pratama	pratama	nindya	nindya	madya	utama	
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83,5	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori kabupaten layak anak	n.a	pratama	pratama	nindya	nindya	madya	utama	
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83,5	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116	91,2779	91,27896	91,3347	91,3863	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,2448	73,5005	73,74052	73,9659	74,1775	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap APBD	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		84	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	0,3	0,3	0,2	0,2	0,15	0,12	0,1	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)		14	15	16	17	18	20	Program Pengembangan Kapa-sitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11,75	13,75	15,75	17,75	20	30	40	
	Pengertesan kemiskinan		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,23	12,21	15	20	25	30	35
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	5	10	25	30	40	50	55

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087		0		5,6E+07	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang dilaksanakan	50	55	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	Program penetapan tanah ulayat	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuannya	0	65	70	75	80	85	90
	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing		Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar (%)	99,87	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama (%)	84,66	85,76	87	89	92	95	98
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,43	23,43	24	25	30	34	35
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,43	23,43	24	25	30	34	35

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																	Unsur Pemerintahan Umum, Unsur Pendukung Pemerintah, Budang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, dan Unsur Litbang								
	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0		0					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)	2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok ma-syarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan keba-ngsaan	20	20	20	40	60	80	100
	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0		0					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)		8	8	8	8		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dikelola	82,58	82,58	85,58	88,58	91,59	94,59	97,59	
	Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia								PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)		21	23	23	23		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga seni budaya yang dikembangkan	4	4	6	8	10	12	12	
	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama		0					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)		11	16	21	26		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	343	344	345	346	
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya penuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan fasilitasi lambaga keaga-maan dan kemasyarakatan	10	13	15	18	20	23	25	
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya	5	3	0	0	0	0	0	
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Tervujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter								PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Percentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)		1,41	1,52	1,62	1,72		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pen-duduk	1:16	1:16	1:14	1:13	1:12	1:12	1:12	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar															Bidang Perumahan Rakyat dan Perumahan, Bidang Pertanahan, Bidang PU/PUPR, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Perhubungan dan Bidang Kominfo									
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan lauas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	0	50	65	75	85	95	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	0	50	65	75	85	95	100
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAyat	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	Program penetapan tanah ulayat	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	100	100	100	100	100	100	100
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4																		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak (%)	72,11	75	80	90	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,33	90	95	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83	88	93	98	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM	44,58	48	53	58	63	68	73
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan; 3,70% pengurangan	73,70% penanganan; 5,51% pengurangan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	77,64% penanganan; 14,57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yang Ditingkatkan Prasrama, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,33	90	95	100	100	100	100	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air	91,8% (JP: 23,6%, BJP: 25,4%)	93,8% (JP: 25,4%, BJP: 27,1%)	95,9% (JP: 28,9%, BJP: 30,4%)	97,9% (JP: 30,4%, BJP: 32,0%)	100% (JP: 30,4%, BJP: 32,0%)	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akkreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan-anak usia pendidikan dasar sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-tukan skriming kesehatan sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skriming kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGI sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	90	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	75	83	88	95	98	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketercakupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	75,38	78	81	85	90	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	35,34	40	45	50	65	75	90
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	76,57	80,23	83	88	93	98	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masya-rakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM	44,58	48	53	58	63	68	73
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85,33	90	95	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum (%)	69,11	72	75	90	100	100	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	0	50	65	75	85	95	100
			Volume tumpungan air per kapita (m3/kapita)	52,5019	55,1815	57,06	58,105	58,4986	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tumpungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi	41,87	45,0	50,0	55,0	65,0	75,0	85,0
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57	59	61	63	65	66	66
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tumpungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi	41,87	45	50	55	65	75	85
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57	59	61	63	65	66	66
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,2	115943	116142,7	116343	116343	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tumpungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57	59	61	63	65	66	66
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57	59	61	63	65	66	66
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terduga dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani (ha)	5,400	5,400	6,000	6,600	7,200	7,800	8,400
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Ben-cana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	35	45	55	65	75	85

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Percentase volume tumpungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum (%)	69,11	72	75	90	100	100	100
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Percentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Percentase ruas jalan mantap yang terpenuhi prasarana jalan sesuai standar	16,44	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Percentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Percentase penurunan pelanggaran lalu lintas	10	9	8	7	5	4	3
	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)				0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Percentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95									
	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)				0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Percentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Percentase peningkatan angkutan orang dan barang laik jalan	75	80	85	90	100	100	100
	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Elektrifikasi (%)	61,22	65,0	68,0	72,0	75,0	78,0	80,0
		Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Elektrifikasi (%)	61,22	65	68	72	75	78	80
	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE ( Skala 1-5) (indeks)		3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	94	94	97	100	100	100	100
		Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100											Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio layanan broadband 4G LTE (%)	48	50	55	60	65	70	75

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim															Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang PUPR									
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara	89,05	89,35	89,45	89,55	89,65	90,00	90,20	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	50,00	52,60	52,70	52,80	52,90	53,20	53,80	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Tutupan lahan	64,46	65,90	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Kabupaten/Kota)	19	19	19	19	19	19	Program Pengelolaan Keane-karagaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaraga-man Hayati	60	65	70	80	90	100	100	
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Percentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Ben-cana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	35	45	55	65	75	85	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	25	25	25	30	35	40	45	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	0	0	0	0	0	0	0			
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah teknologi pasca panen yang diterapkan pada komoditi pertanian	2	2	3	4	4	5	5
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasara-na Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan ket-tersediaan prasarana per-tanian	1	1	1	1	1	1	1	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJM N TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)			3	1,08	1,28	1,44	1,65	5,48	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan ke-jadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		5	5	5	4	3	2	1
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0,63	0,6	0,57	0,54		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebut usaha pertanian (%)				5	7	8	10		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian		2	2	3	4	6	7	10
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)		8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)			2	2	3	3	3	3										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak (%)		72,11	75	80	90	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)			1	2	10	15	25	36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		0,79	3,0	10,0	15,0	25,0	35,0	40,0
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)				60	65	70	75		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah		15,65	17,0	20,0	23,0	30,0	40,0	50,0
																		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah		30,22	32,5	35,0	38,0	40,0	45,0	50,0	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)		2	2,3	2,5	2,6	2,9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)			60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara		89,05	89,35	89,45	89,55	89,65	90	90,2
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)			20	20	40	60	80	100	Program Penyelegaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan angkutan orang dan barang laik jalan		75	80	85	90	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)			1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas		10	9	8	7	5	4	3
7	Memperkuat Stabilitas Polihukumkan dan Transformasi Pelayanan Publik																		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Litbang' dan Unsur Pemerintahan Umum									
	Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)		3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	50	60	70	80	90	100	100		
	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85																					
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100	Program Administrasi Umum	Indeks kelembagaan	n.a	0	60-63	63-65	64-66	66-69	70-73			
								PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah bernilai SAKIP sempurna	0	10	50	75	85	90	100			
								PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)		5	7	9	11	13	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	50	75	85	95	100	100	100			
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen risiko	0	0	50	75	85	95	100			

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2																			
		Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya		5	3	0	0	0	0	0
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONSEP SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial		5	3	0	0	0	0	0
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya		5	3	0	0	0	0	0
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONSEP SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial		5	3	0	0	0	0	0
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya		5	3	0	0	0	0	0
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONSEP SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial		5	3	0	0	0	0	0